Katalog: 4104001

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2021

https://www.bps.go

BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK

PENDUDUK LANJUT USIA

2021

BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021

ISSN : 2086-1036
Katalog : 4104001
No. Publikasi : 04200.2125

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xxvi + 288 halaman

Naskah:
Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Penyunting:
Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Desain Kover:
Fungsi Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Dicetak dan Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:
https://www.freepik.com

https://www.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021

Pengarah:

Dr. Ateng Hartono SE, M.Si.

Penanggung Jawab Umum:

Ahmad Avenzora, SE, MSE.

Penanggung Jawab Teknis:

Wachyu Winarsih, M.Si.

Editor:

Andhie Surya Mustari, SST, M.Si.
Dr. Budi Santoso, SST, M.Si.
Ika Maylasari, SST, M.Si.
Raden Sinang, SST, M.Si.

Penulis Naskah:

Andry Poltak Lasriado Girsang, SST, M.Ec.Dev.
Karuniawati Dewi Ramadani, S.Si., MEKK.
Sigit Wahyu Nugroho, S.AP.
Nindya Putri Sulistyowati, SST.
Rhiska Putrianti, S.Tr.Stat..
Hendrik Wilson, SST, S.Si., ME.

Pengolah Data:

Rhiska Putrianti, S.Tr.Stat.

Desain/Layout:

Andry Poltak Lasriado Girsang, SST, M.Ec.Dev.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

Kata Pengantar

Seiring semakin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan, terkendalinya tingkat kelahiran, meningkatnya angka harapan hidup, serta menurunnya tingkat kematian, maka jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) terus mengalami peningkatan. Fenomena penuaan penduduk (*ageing population*) ini bisa dimanfaatkan sebagai bonus demografi kedua bagi dunia, dengan syarat tersedianya lansia yang sejahtera dan produktif dalam jumlah yang cukup. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan program kebijakan di bidang kesejahteraan lanjut usia yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang memadai.

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021 hadir untuk memberikan gambaran kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial ekonomi, dan perlindungan sosial bagi lansia. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk (SP) dan proyeksi penduduk, serta hasil pengumpulan data administratif dari Kementerian/Lembaga terkait.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan lanjut usia. Kami ucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi menyumbangkan pikiran dan tenaganya sehingga publikasi ini dapat diselesaikan.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Margo Yuwono

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

Ringkasan Eksekutif

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan penduduk lanjut usia (lansia) sebagai mereka yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Seiring semakin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan, terkendalinya tingkat kelahiran, meningkatnya angka harapan hidup, serta menurunnya tingkat kematian, maka jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan. Secara global, terdapat 727 juta orang yang berusia 65 tahun atau lebih pada tahun 2020 (UN, 2020). Jumlah tersebut diproyeksikan akan berlipat ganda menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050. Selama lima puluh tahun terakhir, persentase penduduk lanjut usia di Indonesia meningkat dari 4,5 persen pada tahun 1971 menjadi sekitar 10,7 persen pada tahun 2020. Angka tersebut diproyeksi akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 19,9 persen pada tahun 2045.

Fenomena penuaan penduduk (*ageing population*) ini bisa dimanfaatkan sebagai bonus demografi kedua bagi dunia. Ketika suatu negara mengalami peningkatan populasi lansia yang masih produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian, maka negara tersebut tengah mengalami bonus demografi kedua (Heryanah, 2015). Akan tetapi, kondisi ini membutuhkan prasyarat tersedianya lansia yang sejahtera dan produktif dalam jumlah yang cukup. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan program kebijakan di bidang kesejahteraan lanjut usia yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang memadai. Oleh karena itu, publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia tahun 2021 ini hadir.

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk (SP) dan proyeksi penduduk, serta hasil pengumpulan data administratif. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk gambar dan tabel-tabel diulas menggunakan analisis deskriptif, untuk memberikan pemahaman akan makna dan interpretasi indikator statistik yang disajikan. Sebagai pelengkap, ditampilkan pula nilai *Sampling Error* dari indikator, sehingga pembaca dapat memahami tingkat akurasi dari estimasi statistik yang ditampilkan.

https://www.bps.go.id

Pada tahun 2021, terdapat delapan provinsi yang telah memasuki struktur penduduk tua, yaitu persentase penduduk lanjut usia yang lebih besar dari sepuluh persen. Kedelapan provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (15,52 persen), Jawa Timur (14,53 persen), Jawa Tengah (14,17 persen), Sulawesi Utara (12,74 persen), Bali (12,71 persen), Sulawesi Selatan (11,24 persen), Lampung (10,22 persen), dan Jawa Barat (10,18 persen). Menurut jenis kelamin, lansia perempuan lebih banyak daripada lansia laki-laki, yaitu 52,32 persen berbanding 47,68 persen. Menurut tempat tinggalnya, lansia di perkotaan lebih banyak daripada di perdesaan, yaitu 53,75 persen berbanding 46,25 persen.

Hampir tiga dari sepuluh (29,52 persen) rumah tangga di Indonesia dihuni oleh lansia. Informasi ini sangat penting, mengingat banyak program kesejahteraan lanjut usia yang menggunakan pendekatan rumah tangga, serta lansia yang sangat membutuhkan dukungan orang yang tinggal bersamanya. Hampir tiga dari lima (59,21 persen) lansia bertindak sebagai kepala rumah tangga, yaitu orang yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Menurut status tinggal bersama, sekitar satu dari sepuluh (9,99 persen) lansia tinggal sendiri. WHO (1977) menyebutkan bahwa lansia yang hidup sendiri sebagai kelompok berisiko yang membutuhkan perhatian khusus (Iliffe dkk, 1992).

Tingkat pendidikan lansia dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemampuannya untuk mengakses informasi dan hidup secara mandiri (the Prakarsa, 2020). Pada tahun 2021, sebanyak 32,33 persen lansia yang tamat SD/sederajat dan 30,94 persen yang tamat SMP/sederajat, serta 81,72 persen lansia yang dapat membaca dan menulis. Angka rata-rata lama sekolah lansia adalah 5,14 tahun, atau sertara dengan pernah duduk di kelas 5 SD/sederajat. Menurut akses ke fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sebanyak 46,79 persen lansia pernah menggunakan telepon seluler dan 14,10 persen pernah mengakses internet. Fasilitas TIK tersebut dapat memudahkan lansia untuk berhubungan dengan keluarganya dan mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi atau kesehatan.

Kesejahteraan lansia dapat dicerminkan melalui kondisi kesehatannya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Pada tahun 2021, sebanyak 42,22 persen lansia pernah mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, separuh di antaranya (22,48 persen) terganggu aktivitasnya sehari-hari atau sakit. Sekitar 81,08 persen lansia mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dialaminya dan 45,42 persen yang berobat jalan. Hanya 5,26

https://www.bps.go.id

persen lansia yang pernah dirawat inap dalam setahun terakhir. Mengingat kondisi kesehatan yang rentan terserang penyakit, lansia perlu berperilaku sehat seperti rajin berolahraga dan menghindari rokok. Akan tetapi, hampir satu dari empat (24,19 persen) lansia masih merokok dalam sebulan terakhir, di mana 22,10 persen di antaranya merokok setiap hari.

Lansia potensial adalah penduduk lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa (UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Pada tahun 2021, sekitar satu dari dua (49,46 persen) lansia masih aktif bekerja. Lapangan usaha pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, yaitu sebesar 53,10 persen. Sekitar enam dari sepuluh lansia bekerja sebagai pemilik usaha, baik yang berusaha sendiri (31,34 persen), berusaha dibantu buruh tidak dibayar (30,76 persen), maupun dibantu buruh dibayar (4,23 persen). Sebanyak 86,02 persen lansia bekerja di sektor informal, yang menjadikannya rentan karena tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan, kontrak pekerjaan, maupun imbalan yang layak. Menurut jam kerja, sekitar satu dari lima (19,54 persen) lansia bekerja secara berlebihan, yaitu jumlah jam kerja yang lebih dari 48 jam dalam seminggu. Adapun dari sisi pendapatan, rata-rata penghasilan dari lansia bekerja sebesar 1,34 juta rupiah per bulan, di mana 32,79 persen lansia bekerja yang mendapatkan upah rendah. Lansia potensial yang produktif dapat meningkatkan kesejahteraannya dan memberikan sumbangan bagi perekonomian negara.

https://www.bps.go.id

Memasuki usia senja, lansia memerlukan dukungan sosial dan ekonomi untuk menjalani hidup yang produktif dan berkualitas. Kehidupan sosial lansia dapat dicerminkan dari kebiasaannya dalam bepergian. Sekitar satu dari dua belas (8,00 persen) lansia pernah bepergian selama periode Januari hingga Desember 2020. Jumlah tersebut turun dari data tahun sebelumnya, di mana sekitar satu dari lima (19,72 persen) lansia yang pernah bepergian. Menurut kondisi ekonominya, lansia lebih terdistribusi pada status ekonomi rendah. Pada tahun 2021, sebanyak 43,29 persen lansia berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan 19,31 persen pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Sekitar sembilan dari sepuluh (92,77 persen) lansia telah tinggal di rumah milik sendiri atau milik anggota rumah tangga yang tinggal bersamanya. Akan tetapi, masih ada sebanyak 36,56 persen lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni. Idealnya, lansia sudah memiliki kemapanan ekonomi ketika memasuki masa tua, sehingga kualitas hidup mereka tetap terjaga walaupun produktivitas menurun (Styawan, 2021).

Sebagai kelompok penduduk yang memiliki kerentanan sosial ekonomi yang tinggi, lansia membutuhkan perlindungan sosial yang memadai, baik berupa bantuan sosial maupun jaminan sosial. Pada tahun 2021, sekitar satu dari empat (24,20 persen) rumah tangga lansia pernah menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebanyak 11,86 persen rumah tangga lansia tercatat sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) dan 15,01 persen yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Kesejahteraan Sosial (KPS/KKS). Sekitar tujuh dari sepuluh (70,96 persen) lansia memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) dan sekitar satu dari sepuluh (11,62 persen) lansia yang memiliki jaminan sosial. Cakupan perlindungan sosial bagi lansia masih jauh dari harapan, terutama untuk lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Pelayanan Kesejahteraan Lansia telah ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Lansia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia menyebutkan bahwa pelayanan sosial lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Secara garis besar, program pelayanan dan pemberdayaan lanjut usia meliputi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Sentral Layanan Sosial (SERASI), program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), program pendampingan sosial lansia melalui perawatan di rumah (*home care*), program *family support* lansia, program rehabilitasi sosial lanjut usia (Progress LU), pendamping sosial profesional lanjut usia, dukungan teknis lanjut usia, dan bantuan sosial lanjut usia. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menjalankan berbagai program yang ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia di fasilitas kesehatan primer dan rujukan serta pemberdayaan potensi lansia di masyarakat. Terdapat juga program pelayanan kesehatan khusus lanjut usia akibat pandemi COVID-19, karena lansia merupakan kelompok rentan yang paling berisiko.

https://www.bps.go.id

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar v
Ringkasan Eksekutif vii
Daftar Isi xi
Daftar Gambar xiii
Daftar Tabel xvii
Daftar Singkatan xxv
Bab 1 Pendahuluan 3
1.1. Penuaan Penduduk 3
1.2. Tantangan Penduduk Lanjut Usia 5
1.3. Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia 7
1.4. Ketersediaan Data 9
Bab 2 Metodologi 13
2.1. Sumber Data 13
2.2. Ruang Lingkup 14
2.3. Kualitas Data 15
2.4. Metode Analisis 17
2.5. Konsep Definisi 18
Bab 3 Demografi 27
3.1. Komposisi Penduduk Lanjut Usia 27
3.2. Lansia di Rumah Tangga 32
3.3. Status Tinggal Bersama 35
Bab 4 Pendidikan 79
4.1. Kemampuan Membaca dan Menulis 79
4.2. Tingkat Pendidikan 82
4.3. Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi 87
Bab 5 Kesehatan 113
5.1. Kondisi Kesehatan Lansia 114
5.2. Tindakan Pengobatan 117

https://www.bps.go.id

5.3. Pemanfaatan Jaminan Kesehatan 125
5.4. Kebiasaan Merokok 128
Bab 6 Ketenagakerjaan 159
6.1. Lansia Bekerja 159
6.2. Karakteristik Pekerja Lansia 163
6.3. Jam Kerja Lansia 168
6.4. Penghasilan Lansia 170
6.5. Dampak Pandemi COVID-19 172
Bab 7 Sosial Ekonomi 205
7.1. Kondisi Ekonomi 205
7.2. Rumah Layak bagi Lansia 209
7.3. Kehidupan Sosial 211
Bab 8 Perlindungan Sosial 243
8.1. Bantuan Sosial 243
8.2. Jaminan Sosial 247
Bab 9 Program Kesejahteraan Lanjut Usia 271
9.1. Kebijakan Umum Kesejahteraan Lanjut Usia 271
9.2. Program Kesejahteraan Lanjut Usia 273
Daftar Pustaka 283

https://www.bps.go.id

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia), 1971-2045 4

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2020, dan 2045 28

Gambar 3.2 Persentase Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, Kelompok Pengeluaran, dan Status Disabilitas, 2021 29

Gambar 3.3 Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur (persen), 2021 30

Gambar 3.4 Provinsi dengan Struktur Penduduk Tua di Indonesia, 2021 31

Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Lanjut Usia, 2017-2021 32

Gambar 3.6 Perkembangan Persentase Rumah Tangga Lansia, 2017-2021 33

Gambar 3.7 Persentase Lansia yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Pengeluaran, dan Status Disabilitas, 2021 34

Gambar 3.8 Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan, 2021 36

Gambar 3.9 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Bersama, 2021 37

Gambar 4.1 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Jenis Kelamin (persen), 2017-2021 80

Gambar 4.2 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Status Disabilitas, dan Kelompok Pengeluaran (persen), 2021 81

https://www.bps.go.id

Gambar 4.3 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi (persen),2021 82
Gambar 4.4 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Tingkat Pendidikan, 2021 83
Gambar 4.5 Tingkat Pendidikan Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Pengeluaran (persen), 2021 84
Gambar 4.6 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Lansia (tahun), 20172021 85
Gambar 4.7 Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Kelompok Pengeluaran (tahun), 2021 86
Gambar 4.8 Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi (tahun), 2021 87
Gambar 4.9 Perkembangan Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Fasilitas, 2017-2021 88
Gambar 4.10 Persentase Lansia yang Memiliki/Menguasai dan Menggunakan Telepon Seluler, 2021 89
Gambar 4.11 Persentase Lansia yang Memiliki Akses Komputer dan Internet Menurut Tipe Derah, Jenis Kelamin, Status Disabilitas, dan Kelompok Pengeluaran, 2021 90
Gambar 5.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Lansia, 2021 115
Gambar 5.2 Perkembangan Angka Kesakitan Lansia (persen), 2015-2021 116
Gambar 5.3 Tindakan Pengobatan Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir (persen), 2021 117
Gambar 5.4 Alasan Utama Lansia Tidak Berobat Jalan (persen), 2021 119
Gambar 5.5 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan, 2021 120
Gambar 5.6 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan, Tipe Daerah, dan Kelompok Pengeluaran, 2021 121

https://www.bps.go.id

Gambar 5.7 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2021 122
Gambar 5.8 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan, 2021 123
Gambar 5.9 Rata-Rata Lama Rawat Inap Lansia (hari), 2021 124
Gambar 5.10 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kelompok Umur dan Lamanya Rawat Inap, 2021 124
Gambar 5.11 Persentase Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap, 2021 126
Gambar 5.12 Persentase Lansia yang Berobat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2021 127
Gambar 5.13 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021 129
Gambar 5.14 Persentase Lansia Menurut Kebiasaan Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021 130
Gambar 6.1 Perkembangan Persentase Lansia Bekerja, 2012-2021 160
Gambar 6.2 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2021 160
Gambar 6.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2021 162
Gambar 6.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2021 162
Gambar 6.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tipe Daerah, dan Tingkat Pendidikan, 2021 163
Gambar 6.6 Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan, 2021 164
Gambar 6.7 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Informal Menurut Tipe Daerah dan Tingkat Pendidikan, 2021 165
Gambar 6.8 Persentase Lansia Bekerja Sebagai Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2021 167
Gambar 6.9 Persentase Lansia Bekerja yang Termasuk *Precarious Employment* Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 2021 167

https://www.bps.go.id

Gambar 6.10 Persentase Lansia Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2021 168
Gambar 6.11 Persentase Pekerja Lansia yang Bekerja dengan Jam Kerja Berlebih Menurut Konsep Undang-Undang dan ILO, 2021 170
Gambar 6.12 Rata-rata Penghasilan Lansia Bekerja dalam Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Tingkat Pendidikan (000 rupiah), 2021 171
Gambar 6.13 Perkembangan Rata-rata Penghasilan Lansia Bekerja (000 rupiah), 2018-2021 171
Gambar 6.14 Persentase Lansia Bekerja dengan Upah Rendah, 2021 171
Gambar 6.15 Persentase Lansia Bekerja menurut Status Perubahan Jam Kerja dan Kelompok Umur, 2021 173
Gambar 6.16 Persentase Lansia Bekerja menurut Status Perubahan Penghasilan dan Tingkat Pendidikan, 2021 174
Gambar 7.1 Persentase Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran, 2021 205
Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Pembiayaan Terbesar, 2021 208
Gambar 7.3 Persentase Lansia menurut Status Kepemilikan Rumah, 2021 209
Gambar 7.4 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni, 2021 210
Gambar 7.5 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bepergian, 2021 213
Gambar 7.6 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan,2021 214
Gambar 8.1 Perkembangan Rumah Tangga Lansia yang Tercatat Sebagai Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 2017-2021 245
Gambar 8.2 Perkembangan Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Kesejahteraan Sosial (KPS/KKS), 2015-2021 246
Gambar 8.3 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 2021 247
Gambar 8.4 Perkembangan Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial, 2013-2021 248

https://www.bps.go.id

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia menurut Kelompok Umur, 2021 38

Tabel 3.2 Rasio Ketergantungan Lansia menurut Tipe Derah, 2021 39

Tabel 3.3 Persentase Lansia menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2021 40

Tabel 3.4 Persentase Lansia menurut Status Perkawinan, 2021 41

Tabel 3.5 Persentase Lansia menurut Status Tinggal Bersama, 2021 42

Tabel 3.6 Persentase Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 43

Tabel 3.7 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021 44

Tabel 3.8 Rasio Ketergantungan Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 49

Tabel 3.9 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2021 50

Tabel 3.10 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2021 51

Tabel 3.11 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2021 56

Tabel 3.12 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2021 61

Tabel 3.13 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, 2021 66

Tabel 3.14 Nilai *Sampling Error* Rasio Ketergantungan Lansia Menurut Provinsi, 2021 71

https://www.bps.go.id

Tabel 3.15 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi, 2021 72

Tabel 3.16 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal Sendiri Menurut Provinsi, 2021 75

Tabel 4.1 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Lanjut Usia Menurut Tipe Daerah (persen), 2021 91

Tabel 4.2 Persentase Lansia menurut Tingkat Pendidikan, 2021 92

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lanjut Usia Menurut Tipe Daerah (tahun), 2021 93

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Fasilitas, 2021 94

Tabel 4.5 Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2021 95

Tabel 4.6 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2021 98

Tabel 4.7 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin (tahun), 2021 103

Tabel 4.8 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2021 104

Tabel 4.9 Nilai *Sampling Error* Angka Melek Huruf Lansia Menurut Provinsi, 2021 105

Tabel 4.10 Nilai *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi, 2021 106

Tabel 4.11 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Memiliki Telepon Seluler Menurut Provinsi, 2021 107

Tabel 4.12 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Provinsi, 2021 108

Tabel 4.13 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Memiliki Komputer/Laptop Menurut Provinsi, 2021 109

Tabel 4.14 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi, 2021 110

https://www.bps.go.id

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, 2021 131

Tabel 5.2 Angka Kesakitan Penduduk Lanjut Usia Menurut Tipe Daerah (persen), 2021 132

Tabel 5.3 Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021 133

Tabel 5.4 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021 134

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2021 135

Tabel 5.6 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Kebiasaan Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021 136

Tabel 5.7 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 137

Tabel 5.8 Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin (persen), 2021 138

Tabel 5.9 Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 139

Tabel 5.10 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 140

Tabel 5.11 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Fasilitas Kesehatan, 2021 141

Tabel 5.12 Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2021 142

Tabel 5.13 Persentase Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2021 143

https://www.bps.go.id

Tabel 5.14 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 144
Tabel 5.15 Rata-rata Lama Rawat Inap Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin (hari), 2021 145
Tabel 5.16 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Lama Rawat Inap, 2021 146
Tabel 5.17 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2021 147
Tabel 5.18 Persentase Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Rawat Inap Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2021 148
Tabel 5.19 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021 149
Tabel 5.20 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021 150
Tabel 5.21 Nilai *Sampling Error* Angka Kesakitan Lansia, 2021 151
Tabel 5.22 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021 152
Tabel 5.23 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021 153
Tabel 5.24 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2021 154
Tabel 5.25 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Masih Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021 155
Tabel 6.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2021 176
Tabel 6.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2021 177
Tabel 6.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2021 178
Tabel 6.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2021 179

https://www.bps.go.id

Tabel 6.5 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal dan Informal, 2021 180
Tabel 6.6 Persentase Lansia Bekerja Sebagai Pekerja Rentan dan Tidak Rentan, 2021 181
Tabel 6.7 Persentase Lansia Bekerja Sebagai Pekerja Tetap dan Tidak Tetap (*Precarious Employment*), 2021 182
Tabel 6.8 Rata-rata Jumlah Jam Kerja dan Persentase Lansia Bekerja Menurut Jam Kerja dalam Seminggu, 2021 183
Tabel 6.9 Rata-rata Penghasilan dan Persentase Lansia Bekerja Menurut Jumlah Penghasilan dalam Sebulan, 2021 184
Tabel 6.10 Persentase Lansia Bekerja dengan Penghasilan Rendah, 2021 185
Tabel 6.11 Persentase Lansia Bekerja Menurut Perubahan Jam Kerja Dibandingkan Sebelum Pandemi COVID-19, 2021 186
Tabel 6.12 Persentase Lansia Bekerja yang Mengalami Perubahan Jam Kerja Karena Terkait COVID-19, 2021 187
Tabel 6.13 Persentase Lansia Bekerja Menurut Perubahan Penghasilan Dibandingkan Sebelum Pandemi COVID-19, 2021 188
Tabel 6.14 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2021 189
Tabel 6.15 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2021 194
Tabel 6.16 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2021 195
Tabel 6.17 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2021 196
Tabel 6.18 Persentase Lansia Bekerja pada Kategori *Precarious Employment* Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 197
Tabel 6.19 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Informal Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 198
Tabel 6.20 Rata-rata Jumlah Jam Kerja dan Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2021 199

https://www.bps.go.id

Tabel 6.21 Rata-rata Penghasilan dan Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Penghasilan dalam Sebulan, 2021 200

Tabel 6.22 Persentase Lansia Bekerja yang Memperoleh Upah Rendah Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 201

Tabel 6.23 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2021 202

Tabel 7.1 Persentase Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga, 2021 216

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Pembiayaan Terbesar, 2021 217

Tabel 7.3 Persentase Lansia Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2021 218

Tabel 7.4 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Tipe Daerah, 2021 219

Tabel 7.5 Persentase Lansia yang Bepergian Menurut Tipe Daerah, 202.... 220

Tabel 7.6 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah, 2021 221

Tabel 7.7 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga, 2021 222

Tabel 7.8 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2021 227

Tabel 7.9 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 232

Tabel 7.10 Persentase Lansia yang Bepergian menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 233

Tabel 7.11 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 234

Tabel 7.12 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terbawah, 2021 235

Tabel 7.13 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Kelompok Pengeluaran 40 Persen Menengah, 2021 236

https://www.bps.go.id

Tabel 7.14 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Kelompok Pengeluaran 20 Persen Teratas, 2021 237

Tabel 7.15 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni, 2021 238

Tabel 7.16 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Bepergian, 2021 239

Tabel 7.17 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir, 2021.....240

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima BPNT, Tercatat Sebagai Penerima PKH, dan Memiliki KPS/KKS, 2021 250

Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Menurut Jenis Kredit dan Tipe Daerah, 2021 251

Tabel 8.3 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2021 252

Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial, 2021 253

Tabel 8.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima BPNT Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2021 254

Tabel 8.6 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi dan Tipe daerah, 2021 255

Tabel 8.7 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan KPS/KKS, 2021 256

Tabel 8.8 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 259

Tabel 8.9 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2021 260

Tabel 8.10 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2021.....261

Tabel 8.11 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2021 262

https://www.bps.go.id

Tabel 8.12 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima BPNT Menurut Provinsi, 2021 263

Tabel 8.13 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi, 2021 264

Tabel 8.14 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki KPS/KKS Menurut Provinsi, 2021 265

Tabel 8.15 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2021 266

Tabel 8.16 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi, 2021 267

https://www.bps.go.id

Daftar Singkatan

Adminduk: Data Administrasi Kependudukan
AHH: Angka Harapan Hidup
AMH: Angka Melek Huruf
ART: Anggota Rumah Tangga
Balita: bawah lima tahun, yaitu penduduk berumur 0-59 bulan
Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BLSM: Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
BPJS: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT: Bantuan Pangan Non Tunai
BPR: Bank Perkreditan Rakyat
BPS: Badan Pusat Statistik
BS: Blok Sensus
BSM: Bantuan Siswa Miskin
BUMDES: Badan Usaha Milik Desa
COVID-19: *coronavirus disease* 2019
Ditjen Dukcapil: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
Jamkesda: Jaminan Kesehatan Daerah
JKN: Jaminan Kesehatan Nasional
Kemendagri: Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes: Kementerian Kesehatan
Kemenko PMK: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemensos: Kementerian Sosial
KK: Kartu Keluarga
KKS: Kartu Keluarga Sejahtera
KLUI: Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia
KPS: Kartu Perlindungan Sosial
KRT: Kepala Rumah Tangga
KTP: Kartu Tanda Penduduk

https://www.bps.go.id

KUBE: Kelompok Usaha Bersama

KUR: Kredit Usaha Rakyat

Lansia: penduduk lanjut usia, yaitu penduduk berumur 60 tahun ke atas

LIPI: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LKS: Lembaga Kesejahteraan Sosial

PBI: Penerima Bantuan Iuran

PKH: Program Keluarga Harapan

PMKS: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PP: Peraturan Pemerintah

PPS: *Probability Proportional to Size*

RLS: Rata-rata Lama Sekolah

RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RSE: *Relative Standard Error*

Sakernas: Survei Angkatan Kerja Nasional

SD: Sekolah Dasar

SDGs: *Sustainable Development Goals*

SE: *Standard Error*

SMA: Sekolah Menengah Atas

SMP: Sekolah Menengah Pertama

SP: Sensus Penduduk

SUPAS: Survei Penduduk Antar Sensus

Susenas: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Susenas Modul Hansos: Susenas Modul Ketahanan Sosial

Susenas Modul Kesrum: Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan

Susenas MSBP: Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan

TPB: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

UN: *United Nations*

UNFPA: *United Nations Fund for Population Activities*

UU: Undang-Undang

WHO: *World Health Organization*

WNA: Warga Negara Asing

WNI: Warga Negara Indonesia

https://www.bps.go.id

BAB 1. PENDAHULUAN

Diproyeksikan pada tahun 2045, **Penduduk Lanjut Usia** di Indonesia akan mencapai hampir **satu perlima** dari total penduduk

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2015 - 2045

https://www.bps.go.id

Penduduk Lanjut Usia adalah mereka yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

UU Nomor 13 Tahun 1998

https://www.bps.go.id

Bab 1 Pendahuluan

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan penduduk lanjut usia (lansia) sebagai mereka yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Seiring meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk, akan berpengaruh pada peningkatan umur harapan hidup di Indonesia (Kemenkes, 2013). Hal ini mengakibatkan penduduk lanjut usia semakin meningkat, baik jumlah maupun proporsinya. Fenomena demografi ini dapat membawa dampak positif, namun dapat juga menjadi penghambat dalam pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat sehingga dapat menciptakan lansia yang sejahtera. Untuk itu, diperlukan data terkait kelanjutusiaan sebagai bahan pemetaan dan strategi kebijakan. Pada akhirnya nanti lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut.

Penduduk lanjut usia **(lansia)** adalah mereka yang telah **berusia 60 tahun ke atas**

(UU No. 13 Tahun 1998)

---

https://www.bps.go.id

1.1. Penuaan Penduduk

Penuaan Penduduk (*ageing population*) sudah menjadi fenomena global. Hampir setiap negara di dunia mengalami penambahan penduduk lanjut usia yang sangat drastis baik jumlah maupun proporsinya dalam populasi. Secara global, ada 727 juta orang yang berusia 65 tahun atau lebih pada tahun 2020 (UN, 2020). Jumlah tersebut diproyeksikan akan berlipat

---

Diprediksi pada tahun 2050, **satu** dari **enam** orang di dunia adalah penduduk usia 65 tahun atau lebih

---

ganda menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050. Selain itu, pada tahun 2050 diprediksi akan terdapat 33 negara yang jumlah lansianya mencapai lebih dari 10 juta orang, dimana 22 negara diantaranya merupakan negara-negara berkembang (UNFPA, 2012). Secara global, proporsi penduduk berusia 65 tahun atau lebih meningkat dari 6 persen tahun 1990 menjadi 9,3 persen pada tahun 2020. Proporsi tersebut diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 16 persen pada tahun 2050. Artinya, satu dari enam orang di dunia akan berusia 65 tahun atau lebih.

Fenomena ini bisa menjadi bonus demografi kedua bagi dunia. Bonus demografi kedua dideskripsikan sebagai keadaan suatu negara atau wilayah ketika proporsi dari penduduk yang berusia tua semakin banyak, tetapi mereka yang dikategorikan penduduk usia lanjut ini masih produktif dan masih memberikan sumbangan bagi perekonomian negara (Heryanah, 2015). Melonjaknya penduduk usia lanjut ini merupakan keniscayaan ketika jumlah mereka yang berusia produktif saat ini berlimpah, tetapi beberapa tahun yang akan datang mereka akan memasuki usia lanjut atau pensiun.

https://www.bps.go.id

Gambar 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia), 1971-2045

Sumber: BPS, SP 1971, 1980, 1990, 2000, 2010
BPS, SUPAS 1985, 1995, 2005, 2015
BPS, Proyeksi Penduduk 2015-2045

Fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia. Sebagai dampak dari pembangunan nasional, telah terjadi peningkatan kualitas hidup yang mengakibatkan asupan nutrisi, kondisi sanitasi, kondisi ekonomi juga semakin baik. Fasilitas kesehatan yang semakin memadai dan terjangkau. Hal-hal tersebut telah menurunkan tingkat kematian serta menyebabkan semakin panjangnya hidup manusia. Konsekuensi dari semakin membaiknya angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah akan semakin banyaknya jumlah penduduk lanjut usia (Gambar 1.1). Di sisi lain, program Keluarga Berencana dinilai mampu menekan angka kelahiran. Diproyeksikan pada tahun 2045, persentase anak usia 0-4 tahun akan sebesar 6,9 persen, mengalami penurunan hampir tiga kali lipat dari tahun 1971 (16,1 persen).

Struktur penduduk Indonesia berada pada *ageing population*, yang ditandai dengan persentase penduduk lanjut usia tahun 2020 yang mencapai lebih dari 10 persen (Gambar 1.1). Bahkan dari hasil proyeksi penduduk tersebut, pada tahun 2045, lansia Indonesia diperkirakan akan mencapai hampir seperlima dari seluruh penduduk Indonesia. Pertumbuhan lansia yang pesat merupakan efek dari terjadinya transisi demografi. Dimana saat ini, Indonesia sudah berada pada tahapan angka kematian dan angka kelahiran yang rendah (Bappenas, 2019). Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yang termasuk kategori usia 60 tahun ke atas diperkirakan sebanyak 28 juta jiwa atau sebesar 10,7 persen dari total penduduk (BPS, 2018).

https://www.bps.go.id

1.2. Tantangan Penduduk Lanjut Usia

Dalam struktur kependudukan, lansia merupakan kelompok usia "beban", yang berarti memiliki ketergantungan terhadap kelompok usia produktif. Jumlahnya yang semakin banyak, secara tidak langsung, memiliki dampak sosial dan ekonomi baik bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial. Lansia juga merupakan kelompok penduduk yang rentan. Bloom, et al (dalam TNP2K, 2020) menyebutkan ada tiga faktor utama yang

---

Lansia merupakan **penduduk** paling **rentan** karena ketidakstabilan **finansial**, **kesehatan** dan butuh pendampingan (***caregiver***)

---

menjadikan lansia rentan, yaitu tidak lagi produktif secara ekonomi, masalah kesehatan, dan membutuhkan pendamping sebagai pengasuh (*caregiver*).

Selain itu, di balik keberhasilan peningkatan umur harapan hidup terselip tantangan yang harus diwaspadai, yaitu ke depannya Indonesia akan menghadapi beban tiga (*triple burden*) yaitu di samping meningkatkan angka kelahiran dan beban penyakit (menular dan tidak menular), juga akan terjadi peningkatan angka beban ketergantungan penduduk kelompok usia produktif terhadap kelompok usia tidak produktif (Infodatin Kemenkes, 2014). Hal ini dimungkinkan karena lansia dihadapkan dengan masalah kestabilan dan kemandirian finansial. Lansia umumnya sudah tidak produktif dan tidak memiliki kemandirian secara ekonomi. Tidak semua lansia memiliki jaminan sosial, dana pensiun, atau bahkan sumber pendanaan lainnya yang mampu membiayai kebutuhan mereka. Tidak banyak lansia yang mempersiapkan finansialnya secara matang untuk kehidupan di hari tua. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam satu struktur keluarga, orang tua (lansia) secara ekonomi harus bergantung pada anaknya atau yang lebih muda. Hal ini menjadikan penduduk usia produktif memiliki beban tanggungan yang banyak yaitu diri sendiri, keluarga inti, dan orang tua sehingga penduduk mereka menjadi bagian dari *sandwich generation*.

Selain itu, seiring bertambahnya usia, secara alamiah lansia mengalami penurunan fungsi fisiologis dan kognitif sehingga rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Menurut WHO (2012), beban kesehatan lansia di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berasal dari penyakit-penyakit seperti jantung, stroke, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Kesehatan yang buruk pada lansia tidak hanya berdampak bagi individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan jaminan serta fasilitas kesehatan yang memadai untuk lansia. Lingkungan yang mendukung seperti transportasi ramah lansia juga penting diciptakan agar penduduk lanjut usia dapat beraktivitas dengan baik.

Pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh lansia. WHO menyatakan bahwa lansia merupakan kelompok yang paling rentan terpapar bahkan meninggal karena COVID-19. Kerentanan pada lansia

https://www.bps.go.id

terjadi karena melemahnya fungsi imun serta adanya penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, dan diabetes (LIPI, 2020). Dari data WHO, lebih dari 95 persen kematian akibat COVID-19 di Eropa terjadi pada usia 60 tahun ke atas, dan lebih dari 50 persen terjadi pada penduduk berusia 80 tahun atau lebih. Di Indonesia, berdasarkan data bulan Oktober 2021, persentase kematian akibat COVID-19 pada kelompok lansia sebesar 46,8 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada kondisi ini, lansia memerlukan perlindungan dan akses terhadap makanan bergizi, ketersediaan kebutuhan dasar, obat- obatan, serta perawatan sosial. Keluarga juga memiliki peran penting untuk melindungi serta menjaga lansia selama pandemi, misalnya dengan memperhatikan protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan kesehatan sehari-hari lansia.

Sekitar **sembilan dari dua puluh** orang yang meningggal karena COVID-19 adalah lansia (kondisi Oktober 2021)

---

https://www.bps.go.id

Terjadinya peningkatan jumlah lansia, selain menjadi tantangan, juga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi negara. Agar lansia dapat berkontribusi, maka harus diberdayakan. Selain dapat memberikan manfaat secara ekonomi, pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU Nomor 13 Tahun 1998).

1.3. Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia

Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan penduduk lanjut usia, baik melalui peraturan tertulis, kebijakan, maupun program pembangunan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat lansia agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Nomor 13 Tahun 1998) dan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Permensos Nomor 5 Tahun 2018) juga telah disahkan guna memastikan lansia sejahtera dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi berbagai upaya:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Pelayanan kesempatan kerja;
4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; serta
7. Bantuan sosial.

https://www.bps.go.id

Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah juga telah menyusun strategi guna mengantisipasi kondisi Indonesia yang telah memasuki *ageing population*. Wujud antisipasinya antara lain dengan penyiapan terkait kelanjutusiaan pada berbagai aspek untuk menciptakan penduduk lansia yang sehat dan produktif. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan kawasan yang ramah lansia.

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi lansia. Salah satunya melalui Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berperspektif Gender yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya perlindungan terhadap lansia secara umum, khususnya perempuan, yaitu dengan meningkatkan sosialisasi Gerakan Sayang Lansia yang tujuannya untuk mendorong lansia sehat, aman, dan terlindungi.

Selain itu, untuk memastikan hak-hak lansia terpenuhi, Kementerian Sosial juga menghadirkan Program Atensi (Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia). Di antara layanan Atensi adalah dukungan pemenuhan hidup layak; Dukungan keluarga; Terapi (fisik, psikososial, dan terapi mental spiritual); Pelatihan

vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bantuan sosial dan asistensi sosial; dan dukungan aksesibilitas (Kementerian Sosial, 2021).

Semakin banyaknya perhatian yang tercurah terkait kelanjutusiaan, diharapkan menghasilkan regulasi yang terarah, terstruktur dan komprehensif serta mampu memayungi para lansia agar mampu menjadi lansia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat. Dengan demikian, kehadiran lansia tidak lagi menjadi penghambat, namun tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia (UUD No. 13 Tahun 1998).

1.4. Ketersediaan Data

https://www.bps.go.id

Untuk memetakan situasi dan kondisi terkini dari lansia di Indonesia, serta untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan dan program kesejahteraan lanjut usia, diperlukan data dan informasi terkait kelanjutusiaan, baik pada tingkat nasional maupun regional. Untuk menyikapi kondisi ini, BPS menyusun data dan informasi terkait penduduk lanjut usia dan mengemasnya menjadi suatu bentuk buku publikasi "Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021". Publikasi ini memuat informasi lansia yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial ekonomi, dan perlindungan sosial serta program-program untuk lansia yang sudah dijalankan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi tentang lansia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang kelanjutusiaan. Data yang disajikan pada publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk (SP), serta data sekunder dari Kementerian/Lembaga terkait. Publikasi ini disusun secara sistematis menjadi sembilan bagian dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang mampu menggambarkan kehidupan lansia Indonesia serta berbagai fenomena yang menyertainya. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dari keseluruhan isi publikasi. Uraian yang rinci disajikan dalam bab-bab sesuai tema bahasan dari publikasi.

Bagian pertama (Bab 1) menyajikan bagaimana perjalanan penuaan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu beserta tantangan yang akan dihadapinya. Pada bab 2 akan dibahas metodologi penyusunan publikasi yang memuat terkait sumber data hingga konsep definisi yang digunakan pada publikasi ini. Selanjutnya, bagaimana potret lansia Indonesia dari sudut pandang demografi dijabarkan secara komprehensif pada Bab 3. Lansia juga memiliki potensi yang dapat diberdayakan guna menunjang pembangunan nasional, hal ini dikupas tuntas pada Bab 4 dan Bab 5, masing-masing untuk melihat sejauh mana tingkat pendidikan dan kesehatan lansia. Sementara itu, untuk mengukur keterlibatan lansia secara nyata dalam menggerakkan perekonomian negeri ini dapat dilihat pada Bab 6 (ketenagakerjaan). Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lansia juga tidak luput dari perhatian penulisan publikasi ini, di mana fakta-fakta yang ada dijabarkan pada Bab 7. Selanjutnya, program-program yang sudah diterima oleh rumah tangga lansia digambarkan pada Bab 8. Terakhir, Bab 9 menjelaskan sudah sejauh mana Kementerian dan Lembaga sudah menjalankan program kesejahteraan lanjut usia.

https://www.bps.go.id

BAB 2. METODOLOGI

"NILAI RSE KURANG DARI 25% UNTUK ESTIMASI STATISTIK BERKUALITAS"

https://www.bpps.go.id

Sumber data yang digunakan adalah Susenas, Sakernas, Sensus Penduduk, dan data administratif lainnya

https://www.bps.go.id

Bab 2 Metodologi

2.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2021 ini adalah hasil kegiatan pengumpulan data sebagai berikut:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021;
- Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021;
- Sensus Penduduk (SP) 2020; dan
- Pengumpulan data administratif.

Susenas merupakan kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi penduduk yang dilakukan melalui wawancara kepada rumah tangga sampel. Susenas dilakukan dua kali setiap tahun, yaitu di bulan Maret untuk mengumpulkan variabel inti (KOR) dan di bulan September untuk mengumpulkan variabel khusus (MODUL).

Susenas KOR mengumpulkan informasi yang sama setiap tahun, yaitu mencakup keterangan umum anggota rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran. Susenas modul mengumpulkan informasi yang berbeda setiap tahun dan mengalami rotasi setiap tiga tahun, yaitu Modul Ketahanan Sosial (Hansos), Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP), serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP). Sumber data pada publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2021 ini diambil dari hasil Susenas Maret tahun 2021.

Sakernas merupakan kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan penduduk yang dilakukan melalui wawancara kepada rumah tangga sampel. Pengumpulan data Sakernas juga dilakukan dua kali setiap tahun, yaitu pada bulan Februari untuk estimasi tingkat provinsi dan pada bulan Agustus untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Sumber data publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2021 diambil dari hasil Sakernas Agustus 2021.

https://www.bps.go.id

Sensus Penduduk merupakan kegiatan penghitungan jumlah penduduk dan karakteristiknya yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Pada SP 2020, sensus penduduk dilakukan menggunakan metode kombinasi, yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), sebagai data dasar untuk kegiatan pencatatan seluruh penduduk secara *door to door*.

Sumber data lainnya yang digunakan pada publikasi ini adalah data registrasi dan data administrasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga, yang mencakup kumpulan regulasi terkait kesejahteraan lanjut usia, penjelasan program dan kebijakan terkait pemberdayaan dan perlindungan sosial lanjut usia, serta catatan pendukung lainnya.

https://www.bps.go.id

2.2. Ruang Lingkup

Pengumpulan data pada Susenas Maret 2021 mencakup 345 ribu rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh Indonesia untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Tahapan pemilihan sampel pada Susenas tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kerangka sampel Blok Sensus (BS) Biasa yang telah diberikan bobot jumlah keluarga hasil pemetaan SP 2020;
2. Memilih 40 persen BS Biasa secara *probability proportional to size* (PPS), kemudian menetapkannya sebagai kerangka sampel utama (*master sampling frame*);
3. Pemilihan sampel untuk Susenas Maret 2021:
   a. Memilih 34.500 BS Biasa dari kerangka sampel utama secara *systematic sampling* pada strata perkotaan dan perdesaan;
   b. Melakukan pemutakhiran daftar rumah tangga pada BS terpilih;
   c. Memilih 10 rumah tangga sampel secara *systematic sampling* untuk diwawancara pada setiap BS terpilih, dengan strata tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Pengumpulan data pada Sakernas Agustus mencakup 300 ribu rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh Indonesia untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Pemilihan sampel Blok Sensus untuk Sakernas menggunakan

kerangka sampel utama yang sama dengan Susenas, yaitu 40 persen BS Biasa hasil pemetaan SP 2020. Tahapan pemilihan sampel untuk Sakernas Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memilih 30.000 BS Biasa dari kerangka sampel utama secara *systematic sampling* pada strata kelompok lapangan usaha;
2. Melakukan pemutakhiran daftar rumah tangga pada BS terpilih;
3. Memilih 10 rumah tangga sampel secara *systematic sampling* untuk diwawancara pada setiap BS terpilih.

Cakupan pengumpulan data Sensus Penduduk adalah seluruh penduduk warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, termasuk anggota korps diplomatik dan tentara nasional yang sedang bertugas di luar negeri. SP 2020 dilakukan dengan cara memverifikasi keberadaan daftar keluarga dan penduduk, kemudian menggunakan variabel data Adminduk sebagai karakteristik penduduk. Sedangkan sensus penduduk sebelumnya dilakukan dengan cara wawancara rumah tangga dari pintu ke pintu (*door to door*).

https://www.bps.go.id

2.3. Kualitas Data

Data statistik hasil survei, seperti Susenas dan Sakernas, merupakan angka estimasi yang dihitung berdasarkan teknik sampling tertentu. Kualitas estimasi data statistik hasil survei selalu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1. Jumlah sampel (n).
   Semakin besar jumlah sampel dalam suatu survei, maka nilai estimasi yang dihasilkan semakin mendekati karakteristik populasinya.

2. Teknik pemilihan sampel (*sampling error*).
   Sampling Error merupakan kesalahan estimasi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan teknik pemilihan sampel tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya tingkat *Sampling Error* dapat ditunjukkan oleh besarnya angka *Standard Error* (SE). Untuk mengukur sejauh mana teknik pemilihan sampel yang digunakan sudah cukup menggambarkan keadaan populasi, digunakan nilai *Relative Standard Error* (RSE), yaitu hasil pembagian nilai SE dengan nilai estimasi suatu indikator, yang dinyatakan dalam persentase (%).

3. Faktor non teknis lainnya (*non sampling error*).

   Non Sampling Error merupakan kesalahan yang muncul pada saat pengumpulan atau pengolahan data, sebagai akibat dari kesalahan petugas (*human error*). Termasuk *non Sampling Error* antara lain kesalahan penyampaian materi dari instruktur kepada petugas lapangan, kesalahan penggunaan konsep definisi oleh petugas, kesalahan pemahaman antara petugas dengan responden, kesalahan mewawancara responden *eligible*, kesalahan pengisian kuesioner, atau kesalahan saat input data ke komputer. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk memperkecil *non sampling error*, seperti pengawasan yang ketat atau manajemen lapangan yang baik. Akan tetapi, *non Sampling Error* tidak dapat dihilangkan sama sekali dan sulit untuk dievaluasi secara statistik.

Secara umum, semakin besar jumlah sampel pada suatu survei akan memperkecil *Sampling Error* dan memperbesar *non sampling error*. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel akan memperbesar *Sampling Error* dan memperkecil *non sampling error*. Setiap desain survei harus mempertimbangkan ketiga faktor tersebut untuk mendapatkan data yang lebih berkualitas.

Kualitas data estimasi hasil survei dapat diamati dari nilai RSE, sehingga dapat diambil keputusan untuk mendiseminasikan dan memanfaatkan statistik yang dihasilkan. Nilai *Sampling Error* dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Secara umum, estimasi statistik yang dihitung dari jumlah kasus yang kecil akan menghasilkan nilai RSE yang besar. Angka estimasi yang sangat kecil juga akan menghasilkan nilai RSE yang tinggi, sehingga nilai estimasinya menjadi tidak akurat. Prosedur pengambilan keputusan berdasarkan nilai RSE adalah sebagai berikut:

- Estimasi statistik dengan nilai RSE kurang dari 25 persen dianggap akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan;
- Estimasi statistik dengan nilai RSE 25 hingga 50 persen dianggap kurang akurat dan perlu kehati-hatian untuk digunakan;
- Estimasi statistik dengan nilai RSE di atas 50 persen dianggap sangat tidak akurat dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan.

Dalam publikasi ini, penghitungan nilai RSE menggunakan metode *Taylor Linearization* untuk mengestimasi nilai total maupun rata-ratanya. Namun tidak semua variabel hasil pendataan dihitung nilai SE dan RSE, hanya beberapa

https://www.bps.go.id

indikator penting saja yang dihitung. Nilai *Sampling Error* yang disajikan pada publikasi ini di antaranya:

a. *Standard Error* (SE), standar deviasi, atau akar kuadrat varians dari suatu distribusi statistik, merupakan ukuran yang menyatakan keragaman antar estimasi indikator atau parameter populasi yang diturunkan dari seluruh kemungkinan sampel yang berbeda jika disurvei dengan kondisi yang sama. Nilai *Standard Error* menyatakan ukuran presisi sejauh mana nilai estimasi yang dihasilkan akan mendekati rata-rata estimasi dari seluruh kemungkinan sampel.
b. *Relative Standard Error* (RSE), merupakan perbandingan nilai *Standard Error* terhadap nilai estimasi indikatornya, yang berguna untuk membandingkan tingkat presisi estimasi atau tingkat akurasi indikator antar karakteristik karena sifatnya yang lebih stabil.
c. Selang kepercayaan (*confidence interval*, CI), merupakan perkiraan rentang nilai batas atas dan batas bawah yang mencakup nilai parameter populasi sebenarnya yang dihitung dari seluruh kemungkinan sampel pada tingkat kepercayaan tertentu (biasanya 95 persen). Semakin sempit selang kepercayaan menunjukkan tingkat akurasi estimasi yang semakin baik.
d. Efek rancangan sampel (*design effect*), merupakan efek dari rancangan *sampling* yang digunakan terhadap nilai varians-nya, jika dibandingkan dengan varians suatu sampel acak sederhana (*simple random sampling*, SRS). Nilai *design effect* mencerminkan tingkat kompleksitas rancangan *sampling* yang digunakan relatif terhadap teknik *sampling* yang paling sederhana.
e. Jumlah unit observasi (*n*), merupakan jumlah sampel yang terlibat dalam penghitungan estimasi indikator.

2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam publikasi ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel, visualisasi berupa gambar atau grafik, serta ulasan sederhana. Analisis yang disajikan menjelaskan perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan, karakteristik sosial ekonomi, serta antar wilayah provinsi. Selain itu, disertakan pula analisis tren yang menjelaskan gambaran perkembangan penduduk lanjut usia antar periode waktu.

https://www.bps.go.id

Pada bagian akhir setiap bab dilengkapi dengan tabel-tabel yang menyajikan data pada level provinsi dan nilai *Sampling Error* untuk menjelaskan kualitas data yang disajikan.

2.5. Konsep Definisi

Istilah dan ukuran yang digunakan pada publikasi ini mengandung arti dan konsep sebagai berikut:

Penduduk lanjut usia atau **lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas, terdiri atas lansia muda (umur 60-69 tahun), lansia madya (umur 70-79 tahun), dan lansia tua (umur 80 tahun ke atas).

Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh penduduk sejak lahir, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Rasio ketergantungan lansia adalah perbandingan antara penduduk usia produktif (umur 15-59 tahun) dibandingkan dengan penduduk lanjut usia (umur 60 tahun ke atas), yang mencerminkan besaran beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lanjut usia.

Tipe daerah menggambarkan kelompok desa/kelurahan tertentu yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan, berdasarkan indikator komposit yang dibangun dari tiga variabel; kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum.

Jenis kelamin dicatat berdasarkan informasi pada dokumen kependudukan resmi yang dimiliki (KTP/KK), atau berdasarkan pengakuan penduduk.

Status perkawinan adalah status perkawinan seorang penduduk berdasarkan catatan resmi yang sah secara hukum, termasuk sah secara adat, agama, atau pengakuan masyarakat sekitar. Status perwakinan terdiri atas belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.

Status disabilitas adalah status gangguan fungsional yang dialami oleh seorang penduduk, terdiri atas sebagai penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Termasuk Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau

https://www.bps.go.id

sensorik dalam jangka waktu lama, serta mengalami hambatan dan kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu bangunan tempat tinggal dengan pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu.

Kepala rumah tangga adalah adalah salah seorang anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Rumah tangga lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.

Status tinggal bersama lansia adalah status anggota rumah tangga yang tinggal bersama lansia dalam suatu rumah tangga lansia, yang terdiri atas lansia tinggal sendiri, bersama pasangan (suami atau isteri), bersama keluarga (suami/isteri dan anak), tiga generasi (bersama anak dan cucu), dan lainnya.

Kelompok pengeluaran rumah tangga lansia merupakan pengelompokkan rumah tangga lansia berdasarkan besaran nilai konsumsi dan pengeluaran rumah tangga per bulan, yang terdiri atas kelompok 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Angka melek huruf lansia adalah kemampuan seseorang penduduk lanjut usia untuk bisa membaca dan menulis kata-kata atau kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Tingkat pendidikan lansia adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk lanjut usia, terdiri atas tidak pernah sekolah, tidak tamat SD/sederajat, tamat SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan tamat perguruan tinggi (termasuk diploma, sarjana, dan/atau pasca sarjana).

Rata-rata lama sekolah lansia adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk lanjut usia untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.

Akses lansia terhadap teknologi informasi adalah persentase penduduk lanjut usia yang pernah memiliki akses dan menggunakan fasilitas teknologi informasi dalam tiga bulan terakhir, termasuk menggunakan fasilitas telepon seluler, komputer, atau jaringan internet.

https://www.bps.go.id

Keluhan kesehatan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikis dalam sebulan terakhir, baik karena penyakit yang biasa dialami seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut atau kronis (meskipun tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya.

Angka kesakitan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan terganggu aktivitas sehari-harinya akibat dari keluhan kesehatan tersebut.

Tindakan pengobatan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan melakukan tindakan pengobatan, termasuk mengobati sendiri, berobat jalan kepada tenaga kesehatan, atau rawat inap di fasilitas kesehatan.

Fasilitas kesehatan merupakan tempat penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berinteraksi dengan tenaga kesehatan dan menerima pelayanan kesehatan berupa berobat jalan atau rawat inap. Fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, praktik dokter, klinik, puskesmas, pengobatan tradisional, dan fasilitas lainnya.

Jaminan kesehatan adalah fasilitas perlindungan untuk pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi penerima manfaat jika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Termasuk jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS PBI, BPJS non PBI, Jamkesda, asuransi swasta, maupun fasilitas dari tempatnya bekerja.

Kebiasaan merokok lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang pernah atau masih merokok dalam sebulan terakhir, termasuk yang merokok setiap hari, tidak setiap hari, atau pernah merokok lebih dari sebulan terakhir.

Lansia bekerja adalah penduduk lanjut usia yang bekerja atau sementara tidak bekerja dalam seminggu terakhir.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama

https://www.bps.go.id

satu jam dalam seminggu terakhir, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan ekonomi.

Lansia pengangguran adalah penduduk lanjut usia yang dalam seminggu terakhir tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Lansia mengurus rumah tangga adalah penduduk lanjut usia yang dalam seminggu terakhir melakukan kegiatan lokal mengurus rumah tangga.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau tempat seseorang bekerja, mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dan dapat dikelompokkan menjadi sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh dibayar, sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Precarious Employment adalah penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas, buruh dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu, dan buruh dengan kontrak kerja lisan.

Jam kerja lansia adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan penduduk lanjut usia untuk bekerja, sebagai ukuran tingkat kelayakan waktu kerja. Klasifikasi jam kerja termasuk bekerja secara berlebihan (lebih dari 48 jam seminggu), bekerja secara penuh (35-48 jam seminggu), setengah pengangguran (kurang dari 35 jam seminggu), atau setengah pengangguran kritis (kurang dari 15 jam seminggu).

Penghasilan lansia bekerja adalah rata-rata penghasilan dari penduduk lanjut usia yang bekerja, mencakup upah, gaji, dan pendapatan lainnya dalam sebulan. Upah Rendah adalah penghasilan yang kurang dari dua per tiga (2/3) nilai median penghasilan lansia bekerja.

Status kepemilikan tempat tinggal adalah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, dan status kepemilikan lainnya.

https://www.bps.go.id

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi setidaknya lima dari tujuh kualitas fisik dan fasilitas bangunan rumah, yaitu; (1) luas lantai per kapita, (2) jenis atap terluas, (3) jenis dinding terluas, (4) jenis lantai terluas, (5) fasilitas sanitasi, (6) sumber air minum layak, dan (7) sumber penerangan utama.

Status ekonomi lansia merupakan pengelompokkan penduduk lanjut usia berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangganya, yang terbagi atas 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Sumber penghasilan lansia diperkirakan melalui sumber pembiayaan rumah tangga lansia, yaitu sumber utama atau sumber penghasilan terbesar yang digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga lansia, yang terdiri atas anggota rumah tangga yang bekerja, kiriman uang atau barang, pensiunan, dan investasi.

Lansia bepergian adalah penduduk lanjut usia yang pernah melakukan perjalanan, bepergian, atau keluar dari tempat tinggalnya dalam wilayah geografis Indonesia selama kurang dari 6 bulan, baik dilakukan secara sendiri maupun berkelompok, serta bukan bertujuan untuk sekolah atau bekerja secara rutin.

Lansia korban kejahatan adalah seseorang lansia atau harta bendanya yang dalam setahun terakhir pernah mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha percobaan tindak kejahatan, terdiri atas korban pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, yang mencakup bantuan sosial untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia yang berasal dari keluarga miskin.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu penanda bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang mampu, di antaranya penyadang disabilitas, lanjut usia yang belum memperoleh layanan/ bantuan sosial dan berada di dalam panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), gelandangan dan pengemis yang tinggal dikolong jembatan serta tidak memiliki tempat

https://www.bps.go.id

tinggal tetap atau tidak layak huni, korban penyalahgunaan napza dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu penanda bagi rumah tangga miskin, yang berguna untuk mendapatkan manfaat dari program subsidi beras, program Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Kredit usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha, yang berasal dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit dari perbankan umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, perorangan dengan bunga, pegadaian, perusahaan leasing, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), badan usaha milik desa (BUMDES), atau sumber kredit usaha lainnya.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, yang terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan bisa berasal dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI), non PBI, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), asuransi swasta, dan jaminan kesehatan dari perusahaan tempatnya bekerja.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 3. DEMOGRAFI

"TERDAPAT 10,82% PENDUDUK LANSIA DI INDONESIA"

Rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk usia produktif meningkat menjadi 16,76

https://www.bps.go.id

Bab 3 Demografi

Transisi demografi yang terjadi di Indonesia ditandai dengan penurunan tingkat fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Hal ini menyebabkan bergesernya struktur umur penduduk dan mengubah wajah penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muda semakin menurun, proporsi penduduk usia kerja meningkat pesat, dan proporsi penduduk lanjut usia bergerak naik secara perlahan. Indonesia tidak hanya bersiap menyongsong bonus demografi tetapi juga memasuki fase penduduk yang menua. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana komposisi penduduk lanjut usia di Indonesia melalui sudut pandang demografi, supaya dapat mengambil langkah lebih lanjut terkait penuaan penduduk di Indonesia. Pemetaan kondisi lansia Indonesia berguna sebagai bahan acuan dalam menentukan kebijakan yang tepat dan komprehensif.

Sekitar **satu** dari **sepuluh** penduduk di Indonesia merupakan penduduk lanjut usia (lansia)

https://www.bps.go.id

3.1. Komposisi Penduduk Lanjut Usia

Penuaan penduduk adalah fenomena yang terjadi ketika umur median penduduk di suatu wilayah mengalami peningkatan akibat bertambahnya tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat fertilitas (Heryanah, 2015). Dilihat dari sisi demografis, penuaan penduduk merupakan kecenderungan yang terjadi sebagai dampak dari perubahan struktur umur penduduk di suatu wilayah dalam beberapa waktu ke belakang. Perubahan struktur umur tersebut terjadi sebagai hasil dari perubahan aspek kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Transisi demografi di Indonesia telah terjadi sejak awal tahun 1980 yang ditandai dengan adanya penurunan kematian dan kelahiran sebagai dampak dari kemajuan proses pembangunan. Proses pembangunan tersebut cenderung memiliki dampak positif dimana dapat terlihat dari meningkatnya kualitas kesehatan dan kondisi sosial penduduk Indonesia. Fenomena peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat digambarkan dengan menurunnya angka kematian ibu, bayi, dan anak. Peningkatan kondisi sosial tercermin dari adanya kemajuan pendidikan penduduk Indonesia yang berakibat semakin sadarnya penduduk untuk menekan angka kelahiran. Dengan adanya fenomena penurunan kematian dan kelahiran ini, struktur umur penduduk di Indonesia mulai bergeser dari yang awalnya didominasi oleh penduduk umur muda, menjadi penduduk lanjut usia (Bappenas, 2019).

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2020, dan 2045

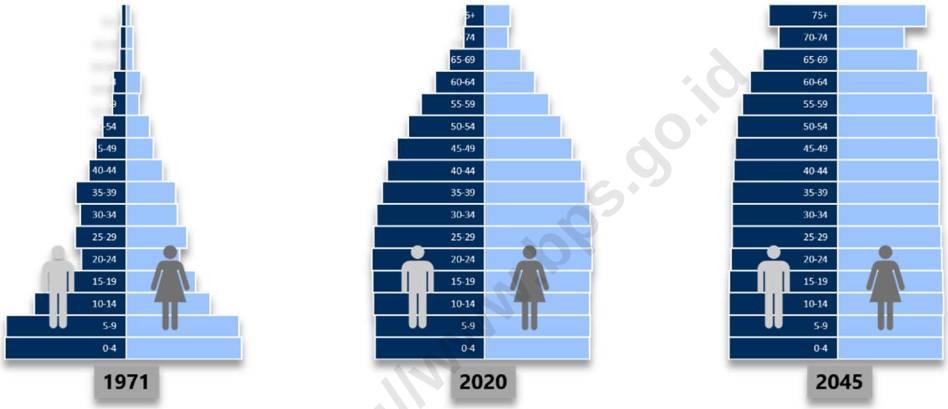

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 1971, Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi Penduduk 2045

https://www.bps.go.id

Gambar 3.1 di atas memperlihatkan piramida penduduk yang menunjukkan perubahan struktur umur penduduk Indonesia selama periode tahun 1971 s.d. 2045. Pada tahun 1971, piramida penduduk tampak luas bagi penduduk yang lebih muda. Sedangkan pada piramida penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020, terjadi peningkatan pada bagian tengah dan puncak piramida, sedangkan bagian dasar piramida mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk dewasa dan penduduk lanjut usia, sedangkan penduduk usia muda mengalami penurunan. Piramida penduduk hasil proyeksi tahun 2045 juga menunjukkan struktur umur penduduk yang hampir sama seperti pada tahun 2020. Bahkan, pada bagian puncak piramida terlihat semakin meluas, yang berarti Indonesia berada dalam fase menua.

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terjadi dalam waktu 50 tahun terakhir. Selama periode tersebut, proporsi penduduk lanjut usia di

Indonesia meningkat dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya (Gambar 1.1). Pada tahun 2021, proporsi lansia mencapai 10,82 persen atau sekitar 29,3 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase struktur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Indonesia yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk (Kemenkes, 2017).

Gambar 3.2 Persentase Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, Kelompok Pengeluaran, dan Status Disabilitas, 2021

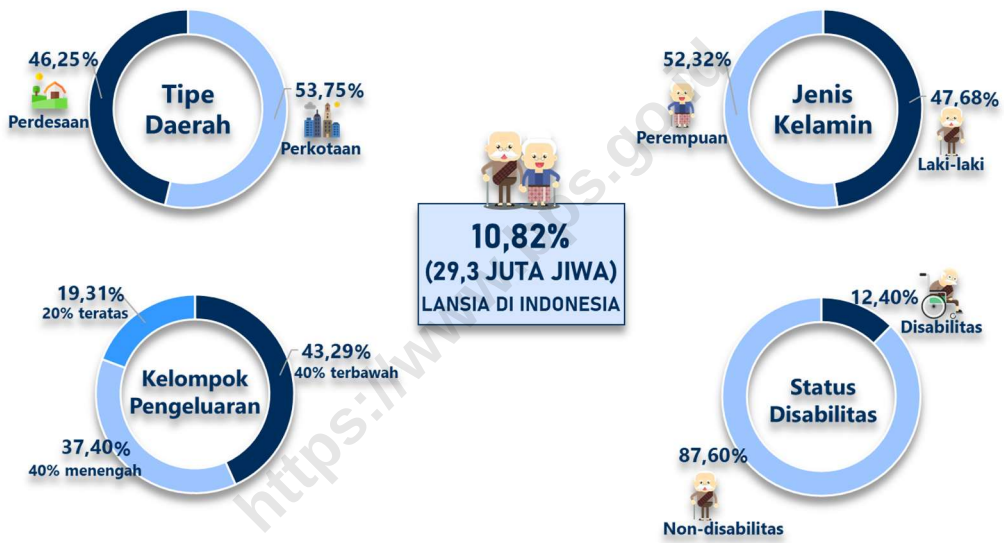

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pada Gambar 3.2 di atas, dapat dilihat persebaran penduduk lanjut usia di Indonesia menurut tipe daerah, jenis kelamin, kelompok pengeluaran, dan status disabilitas. Penduduk lanjut usia yang tinggal di perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan (53,75 persen berbanding 46,25 persen). Menurut jenis kelamin, lansia perempuan lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (52,32 persen berbanding 47,68 persen). Jika dilihat berdasarkan status disabilitas, terdapat 12,40 persen penduduk lanjut usia yang menyandang disabilitas, sedangkan 87,60 persen lainnya tidak mengalami disabilitas. Menurut kelompok pengeluaran, lebih banyak lansia yang berada pada kondisi ekonomi rendah, yaitu sebanyak 43,29 persen lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Hanya 19,31 persen penduduk lanjut

usia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas.

Jumlah lansia akan terus meningkat dan tidak dapat dihindari, karena banyak dari mereka yang saat ini masih dalam usia produktif dan akan memasuki usia lanjut atau usia pensiun di tahun-tahun mendatang. Ketika seseorang menjadi lansia, artinya dia berada pada masa akhir dari sebuah rentangan kehidupan manusia yang di dalamnya bagaikan rantai kehidupan yang saling berkaitan. Kondisi lansia di masa mendatang ditentukan oleh bagaimana keputusan yang telah diambil di masa lalu (Karni, 2018).

Jika dilihat dari kelompok umur, sebagian besar lansia di Indonesia merupakan lansia muda yaitu pada kelompok umur 60-69 tahun dengan persentase sebesar 63,65 persen, diikuti oleh lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun) sebesar 27,66 persen, dan lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas) sebesar 8,68 persen. Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah penduduk yang berada di kelompok pra lansia (45-59 tahun). Pada tahun 2021 terdapat 17,82 persen penduduk yang berada pada kelompok pra-lansia. Penduduk yang saat ini berada pada kelompok ini beberapa tahun ke depan akan masuk ke dalam kelompok penduduk lanjut usia.

https://www.bps.go.id

Gambar 3.3 Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur (persen), 2021

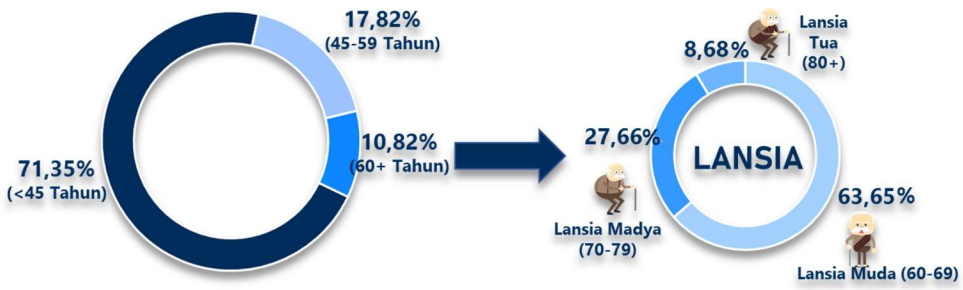

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Dalam rangka penuaan penduduk, pemerintah telah mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lansia, antara lain dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan di

fasilitas kesehatan primer maupun rujukan, yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia. Selain itu, sebagai respon terhadap pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi lansia, salah satunya melalui Panduan Perlindungan Lanjut Usia yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya perlindungan terhadap lansia, khususnya perempuan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi Gerakan Sayang Lansia yang tujuannya untuk mendorong lansia sehat, aman, dan terlindungi. Berbagai program perlindungan lansia dan upaya peningkatan kesejahteraan lansia secara lengkap akan diulas pada Bab 9 publikasi ini.

Gambar 3.4 Provinsi dengan Struktur Penduduk Tua di Indonesia, 2021

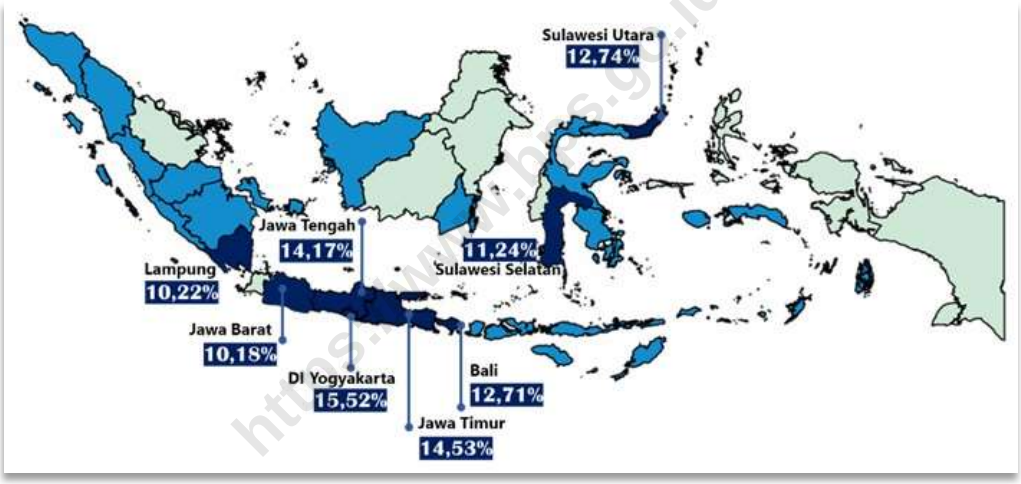

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, terdapat delapan provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua karena persentase penduduk lansia yang sudah diatas 10 persen. Delapan provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (15,52 persen), Jawa Timur (14,53 persen), Jawa Tengah (14,17 persen), Sulawesi Utara (12,74 persen), Bali (12,71 persen), Sulawesi Selatan (11,24 persen), Lampung (10,22 persen), dan Jawa Barat (10,18 persen).

Penambahan penduduk lanjut usia juga berpengaruh pada angka rasio ketergantungan, yang merupakan perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif. Untuk melihat tingkat kemandirian penduduk lanjut usia dan beban ekonomi penduduk usia produktif terhadap lansia, digunakan indikator rasio ketergantungan lansia. Dengan bertambahnya

usia lanjut sebagai kelompok yang kurang produktif, maka beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai kehidupan penduduk yang tidak produktif secara otomatis akan meningkat.

Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Lanjut Usia, 2017-2021

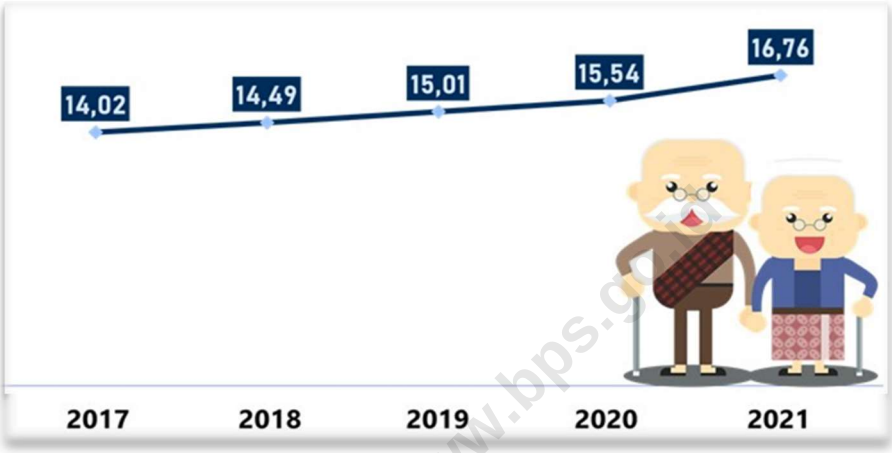

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Selama lima tahun terakhir, rasio ketergantungan lansia terus meningkat dari 14,02 pada tahun 2017 menjadi 16,76 di tahun 2021. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung setidaknya 17 orang penduduk lanjut usia. Peningkatan penduduk lanjut usia berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan, termasuk perawatan, yang pada akhirnya menjadi beban ekonomi penduduk usia produktif dalam rangka pembiayaan penduduk lanjut usia. Untuk itu perlu adanya peningkatan sinergi dalam pelaksanaan program bagi lansia yang dapat mengurangi beban ketergantungan pada lansia pada kelompok usia produktif. Hal ini bertujuan agar lansia tetap sehat, mandiri dan aktif selama mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama lansia bekerja.

3.2. Lansia di Rumah Tangga

Meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun juga terlihat dari peningkatan jumlah rumah tangga yang menjadi tempat tinggal lansia. Dalam lima tahun terakhir, jumlah rumah tangga lansia terus mengalami peningkatan. Pada

https://www.bps.go.id

tahun 2017 terdapat 26,35 persen rumah tangga lansia dan meningkat menjadi 29,52 persen di tahun 2021 (Gambar 3.6). Artinya, satu dari empat rumah tangga di Indonesia terdapat lansia yang tinggal di dalamnya. Kondisi ini menjadi penting bagi semua orang yang terlibat, termasuk keluarga, masyarakat lokal dan pemerintah, untuk memberikan dukungan sosial dan ekonomi. Apalagi, berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2045, penduduk lanjut usia diproyeksikan akan semakin meningkat setiap tahunnya.

Gambar 3.6 Perkembangan Persentase Rumah Tangga Lansia, 2017-2021

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Pada Gambar 3.7 di bawah, dapat dilihat bahwa persentase lansia yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) sebanyak 59,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari dua lansia di Indonesia masih harus dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota rumah tangganya dengan perannya sebagai KRT. Tingginya persentase lansia yang menjadi KRT tersebut bisa disebabkan karena perspektif sosial masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman bahwa pengambilan keputusan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangga menjadi tanggung jawab dari anggota rumah tangga yang paling senior.

Menurut jenis kelamin, terlihat jelas bahwa lansia laki-laki jauh lebih banyak yang menjadi KRT dibandingkan lansia perempuan (89,20 persen berbanding 31,88 persen). Hal ini menjadi bukti dari aspek budaya patrilineal yang tumbuh di Indonesia yang mengutamakan peranan laki-laki untuk menjalankan peran sebagai KRT. Sementara itu, persentase lansia yang menjadi KRT baik di perkotaan maupun perdesaan tidak berbeda jauh (59,96 persen berbanding 58,35 persen).

Gambar 3.7 Persentase Lansia yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Pengeluaran, dan Status Disabilitas, 2021

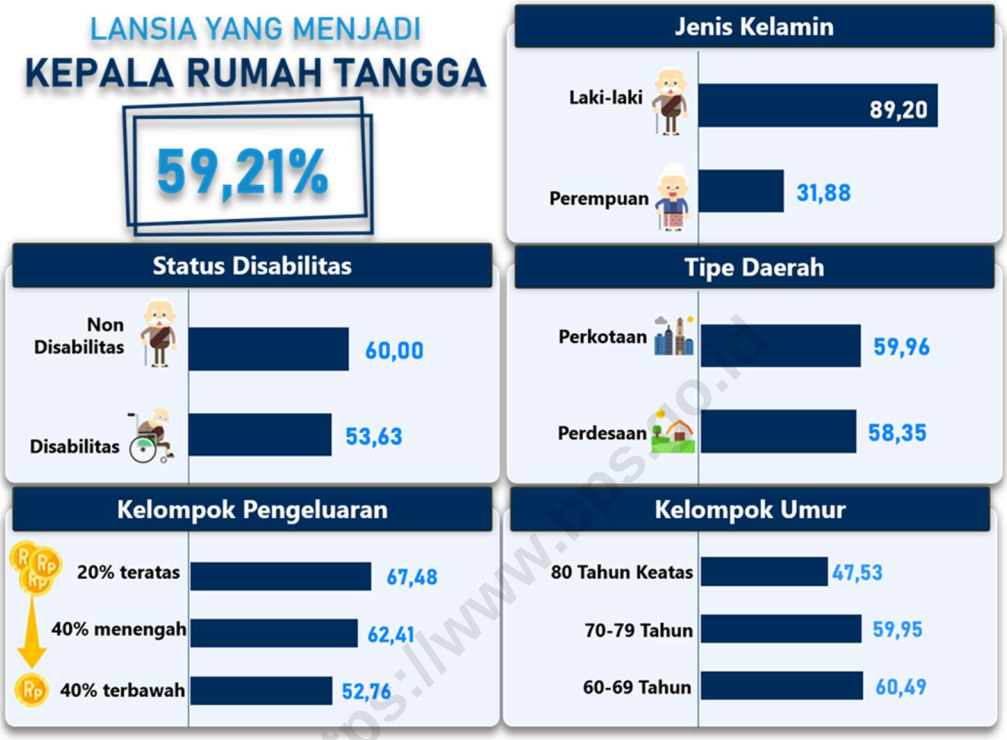

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Jika dilihat berdasarkan status disabilitas, lansia yang tidak mengalami disabilitas lebih banyak yang menjadi KRT dibandingkan lansia yang mengalami disabilitas (60,00 persen berbanding 53,63 persen). Meskipun persentasenya lebih kecil tetapi angka ini juga cukup banyak karena artinya 1 dari 2 lansia yang mengalami disabilitas masih harus menanggung tanggung jawab sebagai KRT.

Berdasarkan kelompok umur lansia dapat dilihat bahwa persentase lansia yang menjadi KRT paling banyak adalah pada kelompok umur 60-69 tahun (60,49 persen) dan persentasenya akan semakin kecil seiring dengan semakin tinggi kelompok umur. Sementara itu, pada kelompok pengeluaran rumah tangga, semakin tinggi kelompok pengeluaran semakin banyak lansia yang menjadi KRT. Pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas terdapat 67,48 persen lansia yang menjadi KRT.

3.3. Status Tinggal Bersama

Ketika seseorang memasuki masa tua, mereka akan mengalami perubahan fisik, mental sosial dan kesehatan sehingga tidak sedikit lansia yang merasa sendirian, kesepian dan kehilangan percaya diri (Osman dkk, 2012). Pada kondisi seperti ini terlihat bahwa lansia bergantung pada penduduk lain untuk mendapatkan dukungan/bantuan baik secara ekonomi maupun sosial. Dukungan sosial dapat berupa kesempatan para lansia merasa terhubung secara sosial, memiliki sumber daya sosial yang memadai, kedekatan dengan orang lain, atau juga suatu rasa kebersamaan dalam kelompok. Dukungan sosial yang terpenting adalah dukungan yang berasal dari keluarga (Kaplan, 2010). Dukungan dari pasangan atau keluarga utama akan sangat berarti dibandingkan dengan dukungan dari orang lain yang tidak menjalin hubungan apapun. Secara psikologis, adanya dukungan dan bantuan dapat menurunkan risiko sakit dan kematian pada lansia.

Keluarga dapat memberikan perawatan kesehatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup lansia sehingga dapat optimal dalam memenuhi aktifitas sehari-hari lansia termasuk status kesehatannya (Kemenkes, 2016). Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting untuk melindungi serta menjaga lansia di situasi pandemi ini. Bagi keluarga yang memiliki lansia atau hidup bersama lansia, harus memperhatikan protokol kesehatan agar mencegah lansia terpapar COVID-19. Penting juga bagi keluarga yang tidak bertempat tinggal bersama lansia untuk tetap berusaha memantau dan memperhatikan kesehatan lansia, serta memastikan kebutuhan sehari-hari lansia terpenuhi.

Terdapat 62,91 persen lansia yang masih memiliki pasangan atau berstatus kawin pada tahun 2021, sedangkan sisanya tidak memiliki pasangan, baik karena cerai mati, cerai hidup, maupun belum kawin. Berdasarkan Gambar 3.8 di bawah, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara persentase lansia yang berstatus kawin di perkotaan dan di perdesaan (62,53 persen dibanding 63,35 persen). Berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang kawin (82,95 persen) hampir dua kali lipat lansia perempuan yang kawin (44,64 persen). Hal tersebut menunjukkan kecenderungan lansia laki-laki untuk menikah kembali setelah pasangannya meninggal, karena hanya ada sedikit laki-

https://www.bps.go.id

laki yang siap untuk hidup menyendiri dan mengatur hidupnya sendiri (Rianti, 2011).

Gambar 3.8 Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan, 2021

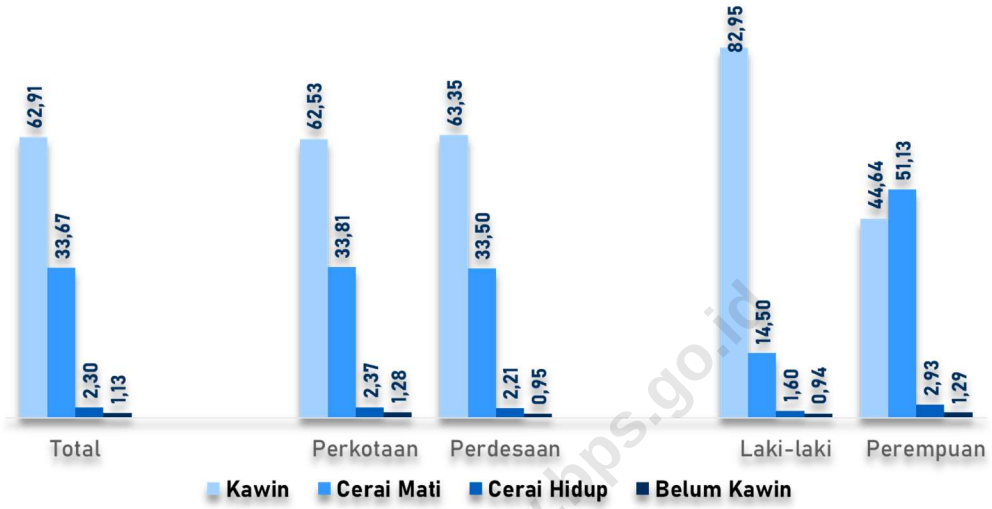

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Berdasarkan Gambar 3.9 di bawah memperlihatkan variasi persentase penduduk lanjut usia berdasarkan status tinggal bersama dalam rumah tangga. Lansia lebih banyak yang tinggal bersama tiga generasi dalam rumah tangga, yaitu sebesar 34,71 persen. Tinggal bersama tiga generasi, artinya seorang lansia tinggal bersama anak dan cucunya dalam satu rumah, atau tinggal bersama anak dan orangtuanya. Selanjutnya, terdapat 29,66 persen yang tinggal bersama keluarga inti dan 22,78 persen lansia tinggal bersama pasangannya.

Umumnya, kebutuhan hidup sehari-hari lansia akan lebih diperhatikan oleh pasangannya, anak, menantu, atau anggota keluarga lainnya. Di Indonesia, faktor budaya dan agama menuntut anak untuk mengabdi kepada orang tuanya, termasuk pengasuhan dan dukungan orang tua (lansia). Anak masih dipandang sebagai tempat ketergantungan, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, mengingat anak merupakan satu-satunya orang terdekat yang dapat memberikan bantuan pada orang tuanya (Fathanah, 2020). Dengan dukungan keluarga, orang tua akan merasa bahwa seseorang masih memperhatikan, membuat mereka merasa bahagia, dan meningkatkan kesehatan mental mereka.

Gambar 3.9 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Bersama, 2021

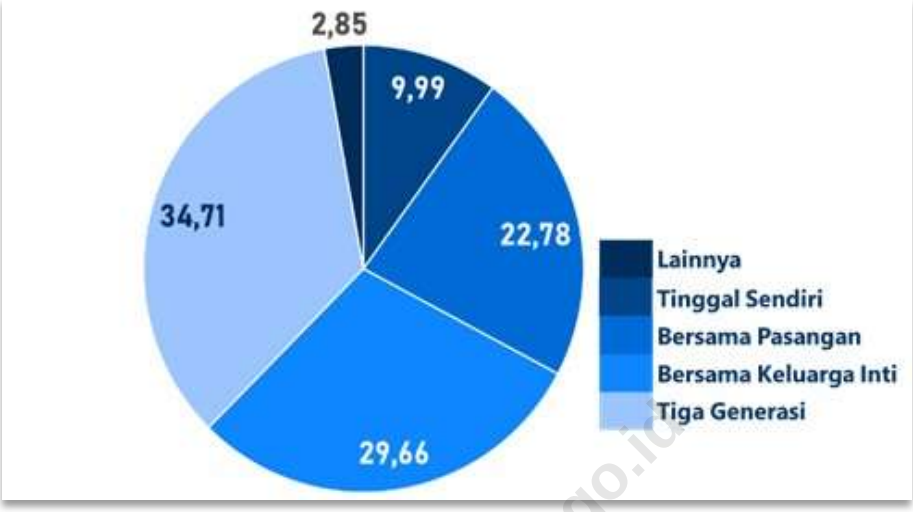

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

WHO (1977) menyebutkan bahwa lansia yang hidup sendiri sebagai kelompok berisiko yang membutuhkan perhatian khusus (Iliffe dkk, 1992). Hasil Susenas Maret 2021 memperlihatkan sekitar satu dari sepuluh lansia yang tinggal sendiri. Masalah lansia yang hidup sendiri membuka kemungkinan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab fenomena tersebut dan menjawab pertanyaan apakah hidup sendiri merupakan bagian dari pilihan hidup lansia karena tidak memiliki anak atau pasangan, tanpa keluarga, diabaikan atau dikucilkan dari kehidupan keluarga besar.

https://www.bps.go.id

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia menurut Kelompok Umur, 2021

Karakteristik	Kelompok Umur				
	Pra Lansia (45-59 Tahun)	Lansia (60 Tahun ke atas)			Jumlah Lansia (3)+(4)+(5)
		Lansia Muda (60-69 tahun)	Lansia Madya (70-79 tahun)	Lansia Tua (80 tahun ke atas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	17,77	6,59	2,81	0,83	10,24
Perdesaan	17,89	7,28	3,23	1,08	11,60
Jenis Kelamin					
Laki-laki	17,78	6,79	2,75	0,74	10,28
Perempuan	17,87	6,99	3,24	1,14	11,37
Kelompok Pengeluaran					
20 Persen Teratas	21,18	7,26	2,58	0,64	10,48
40 Persen Menengah	18,45	6,62	2,68	0,77	10,07
40 Persen Terbawah	15,51	6,96	3,62	1,33	11,91
Status Disabilitas					
Penyandang Disabilitas	18,51	22,00	22,01	14,72	58,73
Non Disabilitas	17,81	6,54	2,55	0,62	9,70
Indonesia	**17,82**	**6,89**	**2,99**	**0,94**	**10,82**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.2 Rasio Ketergantungan Lansia menurut Tipe Derah, 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	14,81	17,38	15,88
Perempuan	16,35	19,40	17,65
Kelompok Pengeluaran			
20 Persen Teratas	14,42	15,46	14,65
40 Persen Menengah	14,17	16,82	15,32
40 Persen Terbawah	18,54	20,57	19,61
Indonesia	**15,56**	**18,40**	**16,76**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.3 Persentase Lansia menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2021

Karakteristik	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	59,96	21,35	16,36	2,33	100,00
Perdesaan	58,35	21,13	18,02	2,50	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	89,20	0,42	8,90	1,48	100,00
Perempuan	31,88	40,24	24,62	3,27	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69 Tahun)	60,49	26,85	10,81	1,85	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	59,95	13,43	23,87	2,75	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	47,53	5,11	41,92	5,44	100,00
Kelompok Pengeluaran					
20 Persen Teratas	67,48	20,17	10,67	1,68	100,00
40 Persen Menengah	62,41	20,69	14,93	1,97	100,00
40 Persen Terbawah	52,76	22,21	21,90	3,13	100,00
Status Disabilitas					
Penyandang Disabilitas	53,63	14,14	27,76	4,47	100,00
Non Disabilitas	60,00	22,26	15,62	2,12	100,00
Indonesia	**59,21**	**21,25**	**17,12**	**2,41**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.4 Persentase Lansia menurut Status Perkawinan, 2021

Karakteristik	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	1,28	62,53	2,37	33,81	100,00
Perdesaan	0,95	63,35	2,21	33,50	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	0,94	82,95	1,60	14,50	100,00
Perempuan	1,29	44,64	2,93	51,13	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69 Tahun)	1,24	71,79	2,49	24,48	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	0,98	52,17	1,94	44,91	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	0,77	32,01	2,03	65,19	100,00
Kelompok Pengeluaran					
20 Persen Teratas	1,43	60,21	2,76	35,61	100,00
40 Persen Menengah	1,00	62,82	2,32	33,87	100,00
40 Persen Terbawah	1,08	64,54	2,01	32,37	100,00
Status Disabilitas					
Penyandang Disabilitas	2,05	47,27	2,53	48,15	100,00
Non Disabilitas	1,00	65,12	2,26	31,62	100,00
Indonesia	**1,13**	**62,91**	**2,30**	**33,67**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.5 Persentase Lansia menurut Status Tinggal Bersama, 2021

Karakteristik	Status Tinggal Bersama					Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	9,30	21,29	32,54	33,94	2,91	100,00
Perdesaan	10,79	24,52	26,30	35,61	2,78	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	4,74	28,08	35,05	30,46	1,68	100,00
Perempuan	14,78	17,96	24,74	38,59	3,92	100,00
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60-69 Tahun)	7,70	23,75	34,26	32,04	2,24	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	13,70	23,05	21,90	38,11	3,24	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	14,94	14,85	20,60	43,46	6,14	100,00
Kelompok Pengeluaran						
20 Persen Teratas	5,69	21,02	25,27	44,49	3,53	100,00
40 Persen Menengah	11,41	23,53	31,99	30,85	2,22	100,00
40 Persen Terbawah	16,88	25,31	34,97	20,29	2,55	100,00
Status Disabilitas						
Penyandang Disabilitas	13,30	21,26	24,88	35,43	5,12	100,00
Non Disabilitas	9,52	23,00	30,33	34,61	2,53	100,00
Indonesia	**9,99**	**22,78**	**29,66**	**34,71**	**2,85**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.6 Persentase Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	7,41	8,45	7,59	8,61	8,10
12 Sumatera Utara	8,87	9,30	8,34	9,78	9,06
13 Sumatera Barat	9,37	10,33	9,17	10,54	9,86
14 Riau	6,24	6,67	6,53	6,47	6,50
15 Jambi	9,38	9,67	9,47	9,68	9,57
16 Sumatera Selatan	8,61	9,27	8,64	9,41	9,02
17 Bengkulu	8,35	10,25	9,59	9,66	9,62
18 Lampung	9,33	10,64	10,20	10,24	10,22
19 Kep. Bangka Belitung	9,57	8,49	9,12	9,08	9,10
21 Kepulauan Riau	5,14	10,44	5,60	5,47	5,53
31 DKI Jakarta	9,23	-	8,90	9,56	9,23
32 Jawa Barat	9,44	12,82	9,77	10,60	10,18
33 Jawa Tengah	13,51	14,89	13,34	15,00	14,17
34 DI Yogyakarta	13,77	20,52	14,27	16,74	15,52
35 Jawa Timur	13,57	15,68	13,63	15,40	14,53
36 Banten	7,74	10,24	8,32	8,59	8,45
51 Bali	11,64	15,26	11,95	13,47	12,71
52 Nusa Tenggara Barat	9,34	9,52	8,67	10,16	9,43
53 Nusa Tenggara Timur	8,27	9,72	8,81	9,89	9,36
61 Kalimantan Barat	9,07	8,61	8,59	8,98	8,78
62 Kalimantan Tengah	7,42	7,86	7,96	7,37	7,68
63 Kalimantan Selatan	9,38	10,20	9,30	10,32	9,81
64 Kalimantan Timur	8,11	8,67	8,45	8,11	8,29
65 Kalimantan Utara	7,48	8,90	8,34	7,66	8,02
71 Sulawesi Utara	12,00	13,62	12,06	13,46	12,74
72 Sulawesi Tengah	8,34	9,24	8,74	9,18	8,96
73 Sulawesi Selatan	10,02	12,24	10,25	12,19	11,24
74 Sulawesi Tenggara	7,12	8,58	7,69	8,43	8,06
75 Gorontalo	9,77	9,22	8,78	10,14	9,46
76 Sulawesi Barat	8,45	7,81	7,34	8,55	7,94
81 Maluku	8,00	8,97	8,23	8,87	8,55
82 Maluku Utara	7,37	7,95	7,62	7,95	7,78
91 Papua Barat	5,88	5,80	5,98	5,68	5,83
94 Papua	7,95	4,38	5,79	4,98	5,41
Indonesia	**10,24**	**11,60**	**10,28**	**11,37**	**10,82**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.7.1 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Perkotaan

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	Lansia Muda (60-69 tahun)	Lansia Madya (70-79 tahun)	Lansia Tua (80 tahun ke atas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	66,12	26,74	7,14	100,00
12 Sumatera Utara	68,05	25,06	6,89	100,00
13 Sumatera Barat	62,73	27,36	9,92	100,00
14 Riau	71,90	21,73	6,37	100,00
15 Jambi	70,90	23,02	6,08	100,00
16 Sumatera Selatan	65,56	26,92	7,51	100,00
17 Bengkulu	67,56	24,89	7,55	100,00
18 Lampung	67,03	25,35	7,62	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	67,43	26,01	6,57	100,00
21 Kepulauan Riau	69,67	21,97	8,36	100,00
31 DKI Jakarta	68,20	26,55	5,25	100,00
32 Jawa Barat	64,88	27,07	8,05	100,00
33 Jawa Tengah	60,44	29,82	9,74	100,00
34 DI Yogyakarta	57,21	29,70	13,09	100,00
35 Jawa Timur	62,02	28,98	9,00	100,00
36 Banten	69,57	25,76	4,67	100,00
51 Bali	62,12	27,40	10,48	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	64,57	28,28	7,16	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	65,24	28,60	6,15	100,00
61 Kalimantan Barat	64,86	29,41	5,73	100,00
62 Kalimantan Tengah	70,73	23,44	5,83	100,00
63 Kalimantan Selatan	69,46	24,85	5,69	100,00
64 Kalimantan Timur	71,58	21,49	6,93	100,00
65 Kalimantan Utara	77,34	18,15	4,52	100,00
71 Sulawesi Utara	64,87	26,91	8,22	100,00
72 Sulawesi Tengah	67,89	26,28	5,84	100,00
73 Sulawesi Selatan	62,95	28,17	8,88	100,00
74 Sulawesi Tenggara	66,75	25,01	8,24	100,00
75 Gorontalo	66,85	28,46	4,69	100,00
76 Sulawesi Barat	65,01	28,32	6,67	100,00
81 Maluku	64,99	27,30	7,71	100,00
82 Maluku Utara	68,69	23,51	7,80	100,00
91 Papua Barat	70,70	25,82	3,48	100,00
94 Papua	72,16	23,20	4,63	100,00
Indonesia	**64,39**	**27,49**	**8,12**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.7.2 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Perdesaan

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	Lansia Muda (60-69 tahun)	Lansia Madya (70-79 tahun)	Lansia Tua (80 tahun ke atas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	63,82	27,13	9,04	100,00
12 Sumatera Utara	65,83	26,47	7,70	100,00
13 Sumatera Barat	61,44	29,49	9,07	100,00
14 Riau	72,49	21,29	6,22	100,00
15 Jambi	67,85	24,08	8,07	100,00
16 Sumatera Selatan	64,59	25,74	9,67	100,00
17 Bengkulu	65,97	26,06	7,97	100,00
18 Lampung	63,70	27,25	9,06	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	66,38	25,89	7,72	100,00
21 Kepulauan Riau	68,77	23,97	7,26	100,00
31 DKI Jakarta	-	-	-	-
32 Jawa Barat	62,38	28,48	9,14	100,00
33 Jawa Tengah	59,44	29,98	10,58	100,00
34 DI Yogyakarta	56,25	30,16	13,59	100,00
35 Jawa Timur	60,66	29,13	10,22	100,00
36 Banten	67,55	25,12	7,33	100,00
51 Bali	59,48	29,15	11,37	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	63,67	28,17	8,17	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	61,95	28,63	9,42	100,00
61 Kalimantan Barat	68,06	24,92	7,02	100,00
62 Kalimantan Tengah	70,35	23,37	6,29	100,00
63 Kalimantan Selatan	67,98	25,88	6,13	100,00
64 Kalimantan Timur	71,58	21,92	6,50	100,00
65 Kalimantan Utara	70,56	22,62	6,83	100,00
71 Sulawesi Utara	64,07	26,51	9,42	100,00
72 Sulawesi Tengah	64,38	27,77	7,85	100,00
73 Sulawesi Selatan	61,10	28,16	10,74	100,00
74 Sulawesi Tenggara	63,63	27,36	9,01	100,00
75 Gorontalo	67,90	25,96	6,14	100,00
76 Sulawesi Barat	64,30	27,80	7,90	100,00
81 Maluku	64,43	27,43	8,14	100,00
82 Maluku Utara	66,66	25,46	7,89	100,00
91 Papua Barat	70,46	22,64	6,90	100,00
94 Papua	81,32	15,31	3,37	100,00
Indonesia	**62,79**	**27,87**	**9,34**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.7.3 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Laki-laki

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	Lansia Muda (60-69 tahun)	Lansia Madya (70-79 tahun)	Lansia Tua (80 tahun ke atas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	67,35	25,15	7,50	100,00
12 Sumatera Utara	69,05	24,74	6,21	100,00
13 Sumatera Barat	64,33	27,40	8,27	100,00
14 Riau	75,03	20,22	4,74	100,00
15 Jambi	69,48	23,52	6,99	100,00
16 Sumatera Selatan	67,41	25,41	7,18	100,00
17 Bengkulu	68,27	24,78	6,95	100,00
18 Lampung	65,79	27,01	7,20	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	69,44	24,68	5,89	100,00
21 Kepulauan Riau	72,12	19,43	8,45	100,00
31 DKI Jakarta	70,05	25,73	4,22	100,00
32 Jawa Barat	66,35	26,30	7,35	100,00
33 Jawa Tengah	62,29	29,18	8,52	100,00
34 DI Yogyakarta	59,01	30,86	10,13	100,00
35 Jawa Timur	64,32	28,25	7,43	100,00
36 Banten	70,96	24,77	4,27	100,00
51 Bali	63,20	27,63	9,17	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	65,85	27,69	6,45	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	64,25	28,16	7,59	100,00
61 Kalimantan Barat	68,00	26,26	5,74	100,00
62 Kalimantan Tengah	73,15	21,60	5,25	100,00
63 Kalimantan Selatan	71,93	24,24	3,83	100,00
64 Kalimantan Timur	72,70	21,18	6,12	100,00
65 Kalimantan Utara	72,56	21,74	5,70	100,00
71 Sulawesi Utara	67,09	26,14	6,77	100,00
72 Sulawesi Tengah	67,75	25,32	6,93	100,00
73 Sulawesi Selatan	64,55	27,22	8,23	100,00
74 Sulawesi Tenggara	67,60	24,77	7,63	100,00
75 Gorontalo	70,73	24,80	4,46	100,00
76 Sulawesi Barat	65,66	28,71	5,63	100,00
81 Maluku	65,88	27,85	6,28	100,00
82 Maluku Utara	68,29	24,35	7,36	100,00
91 Papua Barat	70,48	23,48	6,04	100,00
94 Papua	77,07	18,40	4,53	100,00
Indonesia	**66,03**	**26,80**	**7,18**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.7.4 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Perempuan

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	Lansia Muda (60-69 tahun)	Lansia Madya (70-79 tahun)	Lansia Tua (80 tahun ke atas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	62,05	28,65	9,30	100,00
12 Sumatera Utara	65,31	26,53	8,16	100,00
13 Sumatera Barat	60,07	29,44	10,49	100,00
14 Riau	69,35	22,77	7,88	100,00
15 Jambi	68,18	23,96	7,87	100,00
16 Sumatera Selatan	62,62	26,86	10,52	100,00
17 Bengkulu	64,52	26,71	8,77	100,00
18 Lampung	63,50	26,36	10,14	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	64,42	27,33	8,26	100,00
21 Kepulauan Riau	66,87	25,17	7,95	100,00
31 DKI Jakarta	66,50	27,30	6,20	100,00
32 Jawa Barat	62,14	28,56	9,30	100,00
33 Jawa Tengah	57,87	30,52	11,61	100,00
34 DI Yogyakarta	55,09	29,02	15,89	100,00
35 Jawa Timur	58,79	29,74	11,47	100,00
36 Banten	66,78	26,32	6,90	100,00
51 Bali	59,37	28,38	12,25	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	62,67	28,65	8,67	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	61,29	29,03	9,68	100,00
61 Kalimantan Barat	65,74	26,93	7,33	100,00
62 Kalimantan Tengah	67,43	25,48	7,09	100,00
63 Kalimantan Selatan	65,67	26,47	7,86	100,00
64 Kalimantan Timur	70,33	22,14	7,53	100,00
65 Kalimantan Utara	76,76	17,99	5,25	100,00
71 Sulawesi Utara	62,03	27,25	10,71	100,00
72 Sulawesi Tengah	63,09	29,32	7,60	100,00
73 Sulawesi Selatan	59,67	28,92	11,41	100,00
74 Sulawesi Tenggara	61,89	28,30	9,81	100,00
75 Gorontalo	64,55	29,08	6,37	100,00
76 Sulawesi Barat	63,40	27,22	9,38	100,00
81 Maluku	63,50	26,93	9,57	100,00
82 Maluku Utara	66,13	25,50	8,37	100,00
91 Papua Barat	70,66	24,63	4,70	100,00
94 Papua	77,94	18,97	3,10	100,00
Indonesia	**61,49**	**28,45**	**10,06**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.7.5 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2021

Total

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	Lansia Muda (60-69 tahun)	Lansia Madya (70-79 tahun)	Lansia Tua (80 tahun ke atas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	64,52	27,01	8,46	100,00
12 Sumatera Utara	67,03	25,70	7,26	100,00
13 Sumatera Barat	62,04	28,49	9,47	100,00
14 Riau	72,26	21,46	6,28	100,00
15 Jambi	68,83	23,74	7,43	100,00
16 Sumatera Selatan	64,94	26,16	8,90	100,00
17 Bengkulu	66,43	25,72	7,85	100,00
18 Lampung	64,67	26,69	8,64	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	67,00	25,96	7,04	100,00
21 Kepulauan Riau	69,54	22,25	8,21	100,00
31 DKI Jakarta	68,20	26,55	5,25	100,00
32 Jawa Barat	64,19	27,46	8,35	100,00
33 Jawa Tengah	59,93	29,90	10,17	100,00
34 DI Yogyakarta	56,88	29,86	13,26	100,00
35 Jawa Timur	61,35	29,05	9,59	100,00
36 Banten	68,87	25,54	5,59	100,00
51 Bali	61,18	28,02	10,80	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	64,11	28,22	7,67	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	62,67	28,62	8,70	100,00
61 Kalimantan Barat	66,86	26,60	6,54	100,00
62 Kalimantan Tengah	70,50	23,40	6,10	100,00
63 Kalimantan Selatan	68,67	25,41	5,93	100,00
64 Kalimantan Timur	71,58	21,63	6,79	100,00
65 Kalimantan Utara	74,46	20,04	5,50	100,00
71 Sulawesi Utara	64,47	26,72	8,81	100,00
72 Sulawesi Tengah	65,39	27,34	7,27	100,00
73 Sulawesi Selatan	61,84	28,16	9,99	100,00
74 Sulawesi Tenggara	64,62	26,61	8,77	100,00
75 Gorontalo	67,43	27,09	5,49	100,00
76 Sulawesi Barat	64,45	27,91	7,63	100,00
81 Maluku	64,66	27,38	7,97	100,00
82 Maluku Utara	67,21	24,93	7,86	100,00
91 Papua Barat	70,56	24,02	5,42	100,00
94 Papua	77,45	18,65	3,91	100,00
Indonesia	**63,65**	**27,66**	**8,68**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.8 Rasio Ketergantungan Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	11,45	13,46	11,95	13,60	12,77
12 Sumatera Utara	13,73	15,35	13,28	15,57	14,43
13 Sumatera Barat	14,66	16,95	14,66	16,93	15,80
14 Riau	9,58	10,45	10,16	10,02	10,09
15 Jambi	14,17	14,92	14,50	14,84	14,67
16 Sumatera Selatan	13,20	14,63	13,42	14,77	14,09
17 Bengkulu	12,52	15,93	14,70	14,85	14,77
18 Lampung	14,17	16,72	15,81	15,97	15,89
19 Kep. Bangka Belitung	14,50	12,96	13,77	13,90	13,83
21 Kepulauan Riau	7,67	16,58	8,44	8,15	8,30
31 DKI Jakarta	13,52	-	13,06	13,98	13,52
32 Jawa Barat	14,33	20,38	14,95	16,28	15,61
33 Jawa Tengah	21,01	23,75	20,92	23,70	22,31
34 DI Yogyakarta	20,81	34,50	21,94	26,22	24,08
35 Jawa Timur	20,72	24,62	20,98	23,91	22,46
36 Banten	11,46	16,39	12,56	13,03	12,79
51 Bali	17,53	24,26	18,11	20,80	19,43
52 Nusa Tenggara Barat	14,57	15,23	13,72	16,04	14,90
53 Nusa Tenggara Timur	12,83	16,21	14,47	16,16	15,33
61 Kalimantan Barat	13,78	13,34	13,18	13,83	13,50
62 Kalimantan Tengah	10,90	11,85	11,85	11,02	11,45
63 Kalimantan Selatan	14,49	16,10	14,46	16,20	15,32
64 Kalimantan Timur	12,02	13,25	12,57	12,21	12,40
65 Kalimantan Utara	11,42	14,09	12,85	11,94	12,42
71 Sulawesi Utara	18,29	21,64	18,54	21,13	19,79
72 Sulawesi Tengah	12,60	14,49	13,50	14,29	13,89
73 Sulawesi Selatan	15,20	19,47	15,96	18,97	17,50
74 Sulawesi Tenggara	11,09	13,97	12,36	13,46	12,91
75 Gorontalo	14,74	14,04	13,21	15,51	14,35
76 Sulawesi Barat	13,31	12,28	11,49	13,51	12,49
81 Maluku	12,10	14,95	13,12	14,15	13,63
82 Maluku Utara	10,94	12,67	11,87	12,43	12,15
91 Papua Barat	8,88	9,13	9,21	8,82	9,02
94 Papua	11,88	6,54	8,67	7,42	8,07
Indonesia	**15,56**	**18,40**	**15,88**	**17,65**	**16,76**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.9 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
11 Aceh	23,09	26,38	25,29
12 Sumatera Utara	26,15	27,47	26,75
13 Sumatera Barat	28,19	30,97	29,61
14 Riau	17,81	20,19	19,24
15 Jambi	26,50	26,69	26,63
16 Sumatera Selatan	25,81	25,60	25,68
17 Bengkulu	22,86	26,86	25,55
18 Lampung	26,96	28,46	28,00
19 Kep. Bangka Bellitung	25,16	22,68	24,08
21 Kepulauan Riau	14,14	28,66	15,23
31 DKI Jakarta	24,09	-	24,09
32 Jawa Barat	25,40	30,76	26,66
33 Jawa Tengah	36,14	38,72	37,40
34 DI Yogyakarta	32,19	51,46	36,83
35 Jawa Timur	35,94	40,07	37,83
36 Banten	21,88	29,45	24,01
51 Bali	29,26	40,54	32,51
52 Nusa Tenggara Barat	24,27	23,74	24,00
53 Nusa Tenggara Timur	25,10	31,10	29,54
61 Kalimantan Barat	28,05	25,16	26,18
62 Kalimantan Tengah	20,48	21,02	20,80
63 Kalimantan Selatan	26,27	27,57	26,95
64 Kalimantan Timur	22,86	24,53	23,39
65 Kalimantan Utara	22,26	26,17	23,75
71 Sulawesi Utara	31,93	36,12	33,87
72 Sulawesi Tengah	24,96	27,40	26,64
73 Sulawesi Selatan	30,13	35,61	33,20
74 Sulawesi Tenggara	22,56	26,82	25,29
75 Gorontalo	28,42	26,75	27,47
76 Sulawesi Barat	25,69	24,58	24,80
81 Maluku	24,65	29,83	27,41
82 Maluku Utara	22,75	25,31	24,53
91 Papua Barat	18,38	17,63	17,95
94 Papua	23,10	12,17	15,19
Indonesia	**28,00**	**31,53**	**29,52**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.10.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2021

Perkotaan

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	70,90	18,04	9,19	1,87	100,00
12 Sumatera Utara	61,97	22,22	14,01	1,79	100,00
13 Sumatera Barat	58,73	19,87	19,33	2,06	100,00
14 Riau	60,02	22,23	15,89	1,87	100,00
15 Jambi	59,53	23,31	15,84	1,31	100,00
16 Sumatera Selatan	57,02	21,27	19,84	1,88	100,00
17 Bengkulu	58,49	21,48	18,33	1,70	100,00
18 Lampung	59,01	22,53	16,76	1,70	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	63,67	23,50	10,37	2,45	100,00
21 Kepulauan Riau	59,25	21,09	17,06	2,60	100,00
31 DKI Jakarta	66,42	21,71	8,65	3,22	100,00
32 Jawa Barat	63,77	21,91	12,78	1,54	100,00
33 Jawa Tengah	57,94	22,23	17,62	2,20	100,00
34 DI Yogyakarta	57,19	23,56	16,66	2,59	100,00
35 Jawa Timur	57,34	19,86	20,22	2,58	100,00
36 Banten	63,55	23,02	12,88	0,54	100,00
51 Bali	36,12	18,23	39,75	5,90	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	61,46	21,08	15,86	1,59	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	58,24	19,47	17,74	4,55	100,00
61 Kalimantan Barat	59,69	18,65	19,20	2,46	100,00
62 Kalimantan Tengah	59,62	21,20	16,85	2,33	100,00
63 Kalimantan Selatan	62,99	18,15	15,61	3,25	100,00
64 Kalimantan Timur	58,75	21,94	16,31	3,00	100,00
65 Kalimantan Utara	61,44	19,52	18,13	0,91	100,00
71 Sulawesi Utara	51,51	22,37	21,59	4,53	100,00
72 Sulawesi Tengah	56,84	21,20	20,39	1,57	100,00
73 Sulawesi Selatan	58,43	19,53	15,88	6,16	100,00
74 Sulawesi Tenggara	62,84	21,45	13,31	2,41	100,00
75 Gorontalo	50,10	19,19	26,71	4,00	100,00
76 Sulawesi Barat	62,22	18,94	11,63	7,21	100,00
81 Maluku	55,00	20,80	19,49	4,71	100,00
82 Maluku Utara	58,92	18,41	18,89	3,79	100,00
91 Papua Barat	59,26	25,31	14,47	0,97	100,00
94 Papua	63,42	25,81	8,58	2,19	100,00
Indonesia	**59,96**	**21,35**	**16,36**	**2,33**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.10.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2021

Perdesaan

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	72,75	17,45	8,49	1,31	100,00
12 Sumatera Utara	63,79	21,63	13,62	0,97	100,00
13 Sumatera Barat	55,90	19,48	22,72	1,90	100,00
14 Riau	64,36	20,88	13,74	1,03	100,00
15 Jambi	62,24	22,27	13,74	1,74	100,00
16 Sumatera Selatan	56,89	22,14	19,22	1,76	100,00
17 Bengkulu	56,98	23,09	18,93	1,00	100,00
18 Lampung	59,94	22,80	16,38	0,87	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	61,24	23,74	13,08	1,94	100,00
21 Kepulauan Riau	63,78	21,93	12,36	1,93	100,00
31 DKI Jakarta	-	-	-	-	-
32 Jawa Barat	64,80	23,17	10,39	1,63	100,00
33 Jawa Tengah	54,95	21,59	21,34	2,12	100,00
34 DI Yogyakarta	49,05	22,88	25,13	2,94	100,00
35 Jawa Timur	54,99	19,41	21,94	3,66	100,00
36 Banten	65,58	22,79	10,69	0,94	100,00
51 Bali	40,33	20,28	33,51	5,88	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	61,29	21,98	14,62	2,10	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	55,30	20,58	19,46	4,66	100,00
61 Kalimantan Barat	56,28	21,27	20,38	2,08	100,00
62 Kalimantan Tengah	62,64	21,23	13,10	3,03	100,00
63 Kalimantan Selatan	64,97	18,89	13,79	2,35	100,00
64 Kalimantan Timur	62,71	21,31	13,80	2,19	100,00
65 Kalimantan Utara	61,76	23,35	12,55	2,34	100,00
71 Sulawesi Utara	55,54	24,18	17,64	2,64	100,00
72 Sulawesi Tengah	56,86	21,57	19,47	2,09	100,00
73 Sulawesi Selatan	57,99	19,01	17,59	5,41	100,00
74 Sulawesi Tenggara	60,83	18,88	17,97	2,32	100,00
75 Gorontalo	55,62	20,64	19,92	3,82	100,00
76 Sulawesi Barat	58,84	18,80	18,52	3,84	100,00
81 Maluku	54,60	24,99	16,06	4,35	100,00
82 Maluku Utara	58,52	22,31	17,14	2,03	100,00
91 Papua Barat	66,38	24,17	7,94	1,51	100,00
94 Papua	68,72	24,52	5,68	1,08	100,00
Indonesia	**58,35**	**21,13**	**18,02**	**2,50**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.10.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2021

Laki-laki

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	95,45	0,27	3,43	0,85	100,00
12 Sumatera Utara	92,08	0,15	6,59	1,19	100,00
13 Sumatera Barat	86,27	0,39	11,58	1,76	100,00
14 Riau	92,07	0,16	6,47	1,29	100,00
15 Jambi	92,70	0,00	6,53	0,77	100,00
16 Sumatera Selatan	88,66	0,18	9,95	1,22	100,00
17 Bengkulu	88,00	0,22	10,80	0,99	100,00
18 Lampung	91,33	0,34	7,66	0,67	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	91,02	0,00	7,00	1,98	100,00
21 Kepulauan Riau	90,02	0,17	7,82	1,98	100,00
31 DKI Jakarta	93,86	0,27	4,20	1,67	100,00
32 Jawa Barat	92,72	0,39	5,92	0,98	100,00
33 Jawa Tengah	87,66	0,62	10,51	1,20	100,00
34 DI Yogyakarta	86,69	0,28	10,90	2,13	100,00
35 Jawa Timur	86,93	0,58	10,83	1,66	100,00
36 Banten	95,14	0,26	4,32	0,28	100,00
51 Bali	66,45	1,08	28,13	4,34	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	90,09	0,38	8,52	1,00	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	86,16	0,07	10,95	2,82	100,00
61 Kalimantan Barat	87,83	0,42	9,89	1,86	100,00
62 Kalimantan Tengah	90,50	0,31	7,52	1,67	100,00
63 Kalimantan Selatan	91,34	0,44	6,02	2,20	100,00
64 Kalimantan Timur	88,05	0,03	9,66	2,27	100,00
65 Kalimantan Utara	88,14	0,43	10,26	1,16	100,00
71 Sulawesi Utara	83,50	0,62	12,13	3,75	100,00
72 Sulawesi Tengah	86,00	0,26	12,31	1,43	100,00
73 Sulawesi Selatan	87,95	0,20	8,80	3,05	100,00
74 Sulawesi Tenggara	91,71	0,00	7,40	0,89	100,00
75 Gorontalo	81,57	0,95	14,72	2,77	100,00
76 Sulawesi Barat	87,94	0,55	8,38	3,13	100,00
81 Maluku	86,47	0,08	9,54	3,90	100,00
82 Maluku Utara	88,23	0,30	9,81	1,66	100,00
91 Papua Barat	93,00	0,51	5,46	1,03	100,00
94 Papua	95,15	0,01	4,00	0,85	100,00
Indonesia	**89,20**	**0,42**	**8,90**	**1,48**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.10.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2021

Perempuan

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	51,80	32,85	13,32	2,03	100,00
12 Sumatera Utara	37,80	40,57	20,02	1,61	100,00
13 Sumatera Barat	32,20	36,27	29,37	2,17	100,00
14 Riau	31,82	43,71	23,06	1,41	100,00
15 Jambi	29,81	45,38	22,36	2,45	100,00
16 Sumatera Selatan	27,15	42,15	28,35	2,35	100,00
17 Bengkulu	25,60	45,93	27,04	1,42	100,00
18 Lampung	26,73	46,02	25,67	1,58	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	32,58	48,67	16,23	2,52	100,00
21 Kepulauan Riau	28,66	43,01	25,28	3,04	100,00
31 DKI Jakarta	41,12	41,48	12,75	4,65	100,00
32 Jawa Barat	36,84	43,03	18,01	2,12	100,00
33 Jawa Tengah	29,09	40,53	27,38	3,00	100,00
34 DI Yogyakarta	27,36	42,64	26,80	3,19	100,00
35 Jawa Timur	29,66	36,09	29,89	4,35	100,00
36 Banten	33,28	45,69	19,95	1,08	100,00
51 Bali	11,76	34,96	45,98	7,29	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	37,65	39,02	20,78	2,55	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	29,52	38,06	26,20	6,22	100,00
61 Kalimantan Barat	27,62	39,92	29,87	2,59	100,00
62 Kalimantan Tengah	27,73	45,46	22,80	4,01	100,00
63 Kalimantan Selatan	38,96	35,19	22,56	3,29	100,00
64 Kalimantan Timur	28,80	45,96	21,99	3,25	100,00
65 Kalimantan Utara	29,55	46,11	22,39	1,94	100,00
71 Sulawesi Utara	25,48	44,39	26,67	3,46	100,00
72 Sulawesi Tengah	28,33	42,22	27,01	2,45	100,00
73 Sulawesi Selatan	34,26	34,48	23,41	7,85	100,00
74 Sulawesi Tenggara	33,76	37,75	24,82	3,68	100,00
75 Gorontalo	28,41	36,52	30,18	4,89	100,00
76 Sulawesi Barat	34,93	34,71	24,54	5,82	100,00
81 Maluku	24,66	45,28	25,00	5,06	100,00
82 Maluku Utara	29,30	42,02	25,33	3,35	100,00
91 Papua Barat	29,44	52,20	16,81	1,56	100,00
94 Papua	29,50	57,39	10,65	2,46	100,00
Indonesia	**31,88**	**40,24**	**24,62**	**3,27**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.10.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2021

Total

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Jumlah
	Kepala Rumah Tangga	Isteri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	72,19	17,63	8,70	1,48	100,00
12 Sumatera Utara	62,80	21,95	13,83	1,41	100,00
13 Sumatera Barat	57,22	19,66	21,14	1,98	100,00
14 Riau	62,69	21,40	14,56	1,35	100,00
15 Jambi	61,37	22,61	14,42	1,61	100,00
16 Sumatera Selatan	56,93	21,83	19,44	1,80	100,00
17 Bengkulu	57,41	22,63	18,76	1,20	100,00
18 Lampung	59,67	22,73	16,49	1,11	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	62,68	23,60	11,48	2,24	100,00
21 Kepulauan Riau	59,89	21,21	16,40	2,50	100,00
31 DKI Jakarta	66,42	21,71	8,65	3,22	100,00
32 Jawa Barat	64,06	22,26	12,12	1,56	100,00
33 Jawa Tengah	56,43	21,91	19,51	2,16	100,00
34 DI Yogyakarta	54,41	23,33	19,55	2,71	100,00
35 Jawa Timur	56,19	19,64	21,06	3,11	100,00
36 Banten	64,25	22,94	12,12	0,68	100,00
51 Bali	37,61	18,95	37,55	5,90	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	61,38	21,54	15,23	1,85	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	55,95	20,34	19,08	4,64	100,00
61 Kalimantan Barat	57,55	20,29	19,94	2,22	100,00
62 Kalimantan Tengah	61,43	21,22	14,60	2,75	100,00
63 Kalimantan Selatan	64,05	18,54	14,64	2,77	100,00
64 Kalimantan Timur	60,05	21,73	15,48	2,73	100,00
65 Kalimantan Utara	61,58	21,14	15,76	1,52	100,00
71 Sulawesi Utara	53,49	23,26	19,65	3,60	100,00
72 Sulawesi Tengah	56,86	21,46	19,74	1,94	100,00
73 Sulawesi Selatan	58,17	19,22	16,90	5,71	100,00
74 Sulawesi Tenggara	61,47	19,70	16,49	2,35	100,00
75 Gorontalo	53,12	19,98	22,99	3,90	100,00
76 Sulawesi Barat	59,57	18,83	17,02	4,57	100,00
81 Maluku	54,77	23,26	17,47	4,50	100,00
82 Maluku Utara	58,63	21,25	17,61	2,51	100,00
91 Papua Barat	63,29	24,66	10,77	1,28	100,00
94 Papua	66,48	25,07	6,91	1,55	100,00
Indonesia	**59,21**	**21,25**	**17,12**	**2,41**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.11.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2021

Perkotaan

Provinsi	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	0,97	59,02	2,06	37,94	100,00
12 Sumatera Utara	1,31	61,40	1,79	35,49	100,00
13 Sumatera Barat	0,59	60,63	4,64	34,14	100,00
14 Riau	1,16	68,13	1,74	28,97	100,00
15 Jambi	0,89	66,52	3,01	29,58	100,00
16 Sumatera Selatan	1,94	62,02	1,10	34,94	100,00
17 Bengkulu	1,19	67,31	2,13	29,37	100,00
18 Lampung	0,95	65,81	2,93	30,30	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	1,57	64,65	2,75	31,03	100,00
21 Kepulauan Riau	2,76	64,83	3,96	28,46	100,00
31 DKI Jakarta	2,95	61,52	2,60	32,93	100,00
32 Jawa Barat	0,58	63,28	2,83	33,30	100,00
33 Jawa Tengah	0,85	62,78	1,88	34,49	100,00
34 DI Yogyakarta	1,71	64,38	2,00	31,92	100,00
35 Jawa Timur	0,88	59,86	2,07	37,19	100,00
36 Banten	0,45	68,07	1,92	29,55	100,00
51 Bali	4,02	67,63	1,53	26,82	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	1,42	61,93	5,50	31,15	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	4,05	60,86	2,02	33,06	100,00
61 Kalimantan Barat	2,64	59,32	2,27	35,77	100,00
62 Kalimantan Tengah	0,59	67,79	2,58	29,04	100,00
63 Kalimantan Selatan	2,07	59,05	3,20	35,68	100,00
64 Kalimantan Timur	1,33	69,18	2,77	26,71	100,00
65 Kalimantan Utara	0,67	65,91	3,85	29,58	100,00
71 Sulawesi Utara	3,19	60,51	2,48	33,81	100,00
72 Sulawesi Tengah	1,93	64,71	1,77	31,59	100,00
73 Sulawesi Selatan	4,38	56,95	2,40	36,26	100,00
74 Sulawesi Tenggara	0,50	63,01	1,90	34,58	100,00
75 Gorontalo	2,33	58,62	1,59	37,46	100,00
76 Sulawesi Barat	9,34	54,53	2,81	33,32	100,00
81 Maluku	2,99	59,78	1,00	36,22	100,00
82 Maluku Utara	2,42	52,31	2,65	42,63	100,00
91 Papua Barat	0,33	68,35	2,26	29,06	100,00
94 Papua	1,34	70,74	2,92	25,00	100,00
Indonesia	**1,28**	**62,53**	**2,37**	**33,81**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.11.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2021

Perdesaan

Provinsi	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	0,79	59,49	2,20	37,52	100,00
12 Sumatera Utara	0,68	58,04	2,03	39,25	100,00
13 Sumatera Barat	0,37	61,51	4,18	33,94	100,00
14 Riau	0,61	65,25	1,84	32,30	100,00
15 Jambi	0,65	67,66	1,54	30,15	100,00
16 Sumatera Selatan	1,03	65,98	1,91	31,08	100,00
17 Bengkulu	0,29	68,77	1,35	29,60	100,00
18 Lampung	0,32	69,34	1,58	28,77	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	1,55	64,61	2,69	31,15	100,00
21 Kepulauan Riau	0,79	62,89	2,65	33,67	100,00
31 DKI Jakarta	-	-	-	-	-
32 Jawa Barat	0,26	65,81	2,02	31,91	100,00
33 Jawa Tengah	0,59	64,68	1,97	32,76	100,00
34 DI Yogyakarta	1,58	65,01	2,55	30,86	100,00
35 Jawa Timur	0,68	61,30	2,17	35,85	100,00
36 Banten	0,16	66,48	1,53	31,83	100,00
51 Bali	2,81	64,80	1,48	30,91	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	1,02	60,81	2,93	35,24	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	3,24	61,14	1,70	33,92	100,00
61 Kalimantan Barat	1,09	63,60	1,37	33,95	100,00
62 Kalimantan Tengah	2,27	67,53	2,07	28,13	100,00
63 Kalimantan Selatan	0,94	60,08	4,64	34,35	100,00
64 Kalimantan Timur	0,57	64,43	2,88	32,11	100,00
65 Kalimantan Utara	3,18	68,71	3,43	24,68	100,00
71 Sulawesi Utara	1,99	62,92	2,03	33,06	100,00
72 Sulawesi Tengah	1,15	64,30	3,07	31,48	100,00
73 Sulawesi Selatan	3,79	55,79	3,68	36,74	100,00
74 Sulawesi Tenggara	1,06	60,14	2,63	36,17	100,00
75 Gorontalo	1,71	61,77	3,30	33,22	100,00
76 Sulawesi Barat	2,35	57,90	4,62	35,13	100,00
81 Maluku	2,49	65,53	2,15	29,83	100,00
82 Maluku Utara	0,80	67,90	2,79	28,51	100,00
91 Papua Barat	0,41	69,66	1,12	28,81	100,00
94 Papua	0,80	72,63	2,16	24,41	100,00
Indonesia	**0,95**	**63,35**	**2,21**	**33,50**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.11.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2021

Laki-laki

Provinsi	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	0,47	86,35	1,43	11,75	100,00
12 Sumatera Utara	1,00	79,49	1,48	18,04	100,00
13 Sumatera Barat	0,74	83,65	3,18	12,43	100,00
14 Riau	0,96	84,43	1,32	13,29	100,00
15 Jambi	0,64	86,37	1,31	11,68	100,00
16 Sumatera Selatan	1,06	84,30	0,85	13,79	100,00
17 Bengkulu	0,74	84,79	0,98	13,49	100,00
18 Lampung	0,66	86,07	1,81	11,46	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	2,03	78,04	2,75	17,18	100,00
21 Kepulauan Riau	2,25	81,58	4,04	12,12	100,00
31 DKI Jakarta	2,04	79,64	1,78	16,54	100,00
32 Jawa Barat	0,57	83,50	1,98	13,95	100,00
33 Jawa Tengah	0,59	84,35	1,14	13,92	100,00
34 DI Yogyakarta	1,43	83,57	1,05	13,95	100,00
35 Jawa Timur	0,79	82,54	1,40	15,27	100,00
36 Banten	0,52	87,40	0,88	11,21	100,00
51 Bali	2,42	82,82	0,99	13,78	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	0,76	84,15	2,20	12,90	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	2,12	80,10	1,48	16,30	100,00
61 Kalimantan Barat	2,00	79,97	1,32	16,71	100,00
62 Kalimantan Tengah	1,01	83,46	1,88	13,65	100,00
63 Kalimantan Selatan	0,92	83,41	3,08	12,59	100,00
64 Kalimantan Timur	1,56	82,21	1,80	14,43	100,00
65 Kalimantan Utara	2,11	79,16	4,53	14,20	100,00
71 Sulawesi Utara	3,46	74,01	2,33	20,21	100,00
72 Sulawesi Tengah	1,16	81,51	2,54	14,78	100,00
73 Sulawesi Selatan	1,69	78,57	2,15	17,60	100,00
74 Sulawesi Tenggara	0,46	83,11	1,85	14,58	100,00
75 Gorontalo	0,73	80,06	2,38	16,84	100,00
76 Sulawesi Barat	2,46	79,42	3,02	15,10	100,00
81 Maluku	2,65	76,57	1,66	19,12	100,00
82 Maluku Utara	0,89	80,79	1,13	17,20	100,00
91 Papua Barat	0,34	81,97	1,39	16,29	100,00
94 Papua	0,59	81,24	2,29	15,88	100,00
Indonesia	**0,94**	**82,95**	**1,60**	**14,50**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.11.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2021

Perempuan

Provinsi	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	1,18	35,67	2,80	60,35	100,00
12 Sumatera Utara	1,04	43,11	2,26	53,59	100,00
13 Sumatera Barat	0,24	41,68	5,44	52,64	100,00
14 Riau	0,68	47,36	2,31	49,65	100,00
15 Jambi	0,82	48,08	2,71	48,39	100,00
16 Sumatera Selatan	1,63	46,04	2,34	49,99	100,00
17 Bengkulu	0,36	51,25	2,18	46,21	100,00
18 Lampung	0,35	49,83	2,14	47,69	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	1,07	50,39	2,70	45,84	100,00
21 Kepulauan Riau	2,71	46,90	3,50	46,88	100,00
31 DKI Jakarta	3,80	44,82	3,35	48,03	100,00
32 Jawa Barat	0,42	45,44	3,20	50,94	100,00
33 Jawa Tengah	0,83	45,71	2,62	50,85	100,00
34 DI Yogyakarta	1,86	48,69	3,15	46,30	100,00
35 Jawa Timur	0,78	41,59	2,74	54,89	100,00
36 Banten	0,18	47,60	2,70	49,52	100,00
51 Bali	4,65	52,13	1,98	41,24	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	1,60	42,54	5,85	50,02	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	4,55	44,44	2,02	48,99	100,00
61 Kalimantan Barat	1,34	44,25	2,08	52,33	100,00
62 Kalimantan Tengah	2,28	49,28	2,72	45,71	100,00
63 Kalimantan Selatan	1,96	37,71	4,79	55,54	100,00
64 Kalimantan Timur	0,55	51,35	3,93	44,17	100,00
65 Kalimantan Utara	1,28	52,55	2,64	43,53	100,00
71 Sulawesi Utara	1,81	50,20	2,20	45,79	100,00
72 Sulawesi Tengah	1,58	47,68	2,85	47,89	100,00
73 Sulawesi Selatan	5,90	38,35	3,99	51,76	100,00
74 Sulawesi Tenggara	1,27	40,84	2,90	54,99	100,00
75 Gorontalo	3,08	43,22	2,66	51,04	100,00
76 Sulawesi Barat	5,09	37,84	5,27	51,80	100,00
81 Maluku	2,75	50,43	1,69	45,12	100,00
82 Maluku Utara	1,58	46,74	4,36	47,32	100,00
91 Papua Barat	0,41	54,42	1,86	43,31	100,00
94 Papua	1,59	59,70	2,74	35,97	100,00
Indonesia	**1,29**	**44,64**	**2,93**	**51,13**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.11.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2021

Total

Provinsi	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	0,85	59,34	2,16	37,65	100,00
12 Sumatera Utara	1,02	59,86	1,90	37,21	100,00
13 Sumatera Barat	0,47	61,10	4,39	34,03	100,00
14 Riau	0,82	66,35	1,80	31,02	100,00
15 Jambi	0,73	67,29	2,01	29,97	100,00
16 Sumatera Selatan	1,35	64,56	1,62	32,46	100,00
17 Bengkulu	0,55	68,35	1,57	29,53	100,00
18 Lampung	0,50	68,31	1,97	29,22	100,00
19 Kep. Bangka Bellitung	1,56	64,63	2,73	31,08	100,00
21 Kepulauan Riau	2,48	64,55	3,78	29,19	100,00
31 DKI Jakarta	2,95	61,52	2,60	32,93	100,00
32 Jawa Barat	0,49	63,98	2,61	32,92	100,00
33 Jawa Tengah	0,72	63,74	1,93	33,61	100,00
34 DI Yogyakarta	1,66	64,59	2,19	31,55	100,00
35 Jawa Timur	0,78	60,56	2,12	36,53	100,00
36 Banten	0,35	67,52	1,79	30,34	100,00
51 Bali	3,59	66,63	1,51	28,26	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	1,22	61,36	4,20	33,22	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	3,41	61,08	1,77	33,74	100,00
61 Kalimantan Barat	1,67	62,00	1,70	34,63	100,00
62 Kalimantan Tengah	1,60	67,63	2,27	28,49	100,00
63 Kalimantan Selatan	1,46	59,60	3,97	34,96	100,00
64 Kalimantan Timur	1,08	67,63	2,81	28,48	100,00
65 Kalimantan Utara	1,73	67,09	3,67	27,50	100,00
71 Sulawesi Utara	2,60	61,69	2,26	33,44	100,00
72 Sulawesi Tengah	1,37	64,42	2,70	31,51	100,00
73 Sulawesi Selatan	4,03	56,25	3,17	36,55	100,00
74 Sulawesi Tenggara	0,88	61,05	2,40	35,67	100,00
75 Gorontalo	1,99	60,35	2,53	35,14	100,00
76 Sulawesi Barat	3,87	57,17	4,23	34,74	100,00
81 Maluku	2,70	63,16	1,68	32,46	100,00
82 Maluku Utara	1,24	63,68	2,75	32,33	100,00
91 Papua Barat	0,37	69,10	1,61	28,92	100,00
94 Papua	1,03	71,83	2,48	24,66	100,00
Indonesia	**1,13**	**62,91**	**2,30**	**33,67**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.12.1 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2021

Perkotaan

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	9,34	13,55	47,10	27,61	2,40	100,00
12 Sumatera Utara	9,30	17,44	35,75	35,10	2,40	100,00
13 Sumatera Barat	8,96	16,71	33,99	37,98	2,36	100,00
14 Riau	5,36	21,31	38,68	32,72	1,93	100,00
15 Jambi	6,11	19,15	38,61	34,45	1,69	100,00
16 Sumatera Selatan	4,43	17,68	33,17	41,68	3,04	100,00
17 Bengkulu	7,82	17,87	36,22	36,24	1,85	100,00
18 Lampung	6,46	19,06	32,80	39,51	2,17	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	10,24	23,42	30,90	32,76	2,68	100,00
21 Kepulauan Riau	7,21	19,83	39,23	30,74	3,00	100,00
31 DKI Jakarta	8,90	18,20	42,81	24,70	5,39	100,00
32 Jawa Barat	11,56	24,85	34,70	26,97	1,91	100,00
33 Jawa Tengah	9,82	23,78	27,43	36,54	2,43	100,00
34 DI Yogyakarta	10,12	23,21	29,06	34,05	3,56	100,00
35 Jawa Timur	9,89	21,77	27,77	37,57	3,00	100,00
36 Banten	7,24	20,87	40,77	30,34	0,78	100,00
51 Bali	3,94	15,65	22,90	51,06	6,44	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	10,00	24,54	29,61	33,54	2,30	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	5,01	8,24	32,01	48,88	5,86	100,00
61 Kalimantan Barat	6,44	11,80	36,81	41,33	3,62	100,00
62 Kalimantan Tengah	7,43	22,33	34,10	33,69	2,45	100,00
63 Kalimantan Selatan	10,88	23,24	30,99	30,74	4,16	100,00
64 Kalimantan Timur	8,00	19,34	32,26	36,92	3,47	100,00
65 Kalimantan Utara	5,81	11,27	33,94	47,58	1,41	100,00
71 Sulawesi Utara	7,56	18,68	28,24	39,71	5,82	100,00
72 Sulawesi Tengah	4,16	18,45	30,63	44,65	2,11	100,00
73 Sulawesi Selatan	5,73	13,10	35,16	38,18	7,84	100,00
74 Sulawesi Tenggara	6,73	16,47	33,80	40,32	2,69	100,00
75 Gorontalo	4,85	15,96	30,06	44,73	4,40	100,00
76 Sulawesi Barat	8,03	14,70	31,72	36,61	8,94	100,00
81 Maluku	4,80	8,10	25,96	55,91	5,23	100,00
82 Maluku Utara	5,69	7,74	29,82	52,55	4,20	100,00
91 Papua Barat	4,93	11,78	35,88	46,42	0,99	100,00
94 Papua	6,17	19,21	41,27	30,39	2,97	100,00
Indonesia	**9,30**	**21,29**	**32,54**	**33,94**	**2,91**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.12.2 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2021

Perdesaan

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	14,32	17,55	41,43	25,67	1,03	100,00
12 Sumatera Utara	14,72	25,20	30,23	28,68	1,17	100,00
13 Sumatera Barat	10,49	19,79	29,45	38,29	1,99	100,00
14 Riau	8,61	24,63	35,27	30,15	1,35	100,00
15 Jambi	9,89	29,34	31,26	27,60	1,91	100,00
16 Sumatera Selatan	8,95	27,26	28,38	33,36	2,05	100,00
17 Bengkulu	9,23	32,19	27,03	30,59	0,96	100,00
18 Lampung	7,46	25,28	29,79	36,44	1,03	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	12,47	34,24	29,29	22,12	1,88	100,00
21 Kepulauan Riau	16,30	29,37	27,49	24,67	2,18	100,00
31 DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
32 Jawa Barat	16,15	36,49	23,97	21,73	1,66	100,00
33 Jawa Tengah	9,99	24,75	21,40	41,53	2,33	100,00
34 DI Yogyakarta	9,19	23,57	21,20	42,94	3,10	100,00
35 Jawa Timur	11,03	23,31	22,12	39,75	3,78	100,00
36 Banten	10,49	19,26	39,71	29,48	1,06	100,00
51 Bali	5,84	26,27	18,98	42,68	6,23	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	12,19	26,36	25,50	33,77	2,19	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	7,10	12,37	29,05	45,63	5,86	100,00
61 Kalimantan Barat	7,88	19,46	33,31	37,04	2,32	100,00
62 Kalimantan Tengah	11,37	27,72	32,26	24,82	3,83	100,00
63 Kalimantan Selatan	13,80	26,38	28,86	28,16	2,79	100,00
64 Kalimantan Timur	9,26	26,07	32,81	28,73	3,13	100,00
65 Kalimantan Utara	9,65	22,61	28,55	35,86	3,33	100,00
71 Sulawesi Utara	9,82	25,19	25,73	35,77	3,49	100,00
72 Sulawesi Tengah	8,39	21,11	27,90	39,79	2,81	100,00
73 Sulawesi Selatan	9,09	16,51	27,44	40,24	6,71	100,00
74 Sulawesi Tenggara	10,68	19,59	26,07	40,79	2,87	100,00
75 Gorontalo	8,83	23,31	23,67	39,68	4,50	100,00
76 Sulawesi Barat	7,98	17,08	34,81	35,58	4,55	100,00
81 Maluku	5,90	13,52	28,61	46,92	5,06	100,00
82 Maluku Utara	5,24	13,37	34,39	44,69	2,31	100,00
91 Papua Barat	8,35	22,50	37,32	29,84	2,00	100,00
94 Papua	10,93	24,42	46,66	16,79	1,20	100,00
Indonesia	**10,79**	**24,52**	**26,30**	**35,61**	**2,78**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.12.3 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2021

Laki-laki

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	3,68	21,56	51,37	22,78	0,61	100,00
12 Sumatera Utara	6,79	26,17	39,44	26,23	1,37	100,00
13 Sumatera Barat	4,52	23,01	37,87	32,77	1,82	100,00
14 Riau	4,71	27,36	42,40	24,20	1,34	100,00
15 Jambi	4,69	31,14	38,45	24,74	0,98	100,00
16 Sumatera Selatan	3,62	28,95	35,71	30,34	1,38	100,00
17 Bengkulu	4,66	32,33	32,99	29,22	0,80	100,00
18 Lampung	3,35	27,73	35,86	32,19	0,88	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	8,03	31,88	32,97	25,10	2,01	100,00
21 Kepulauan Riau	6,31	24,66	43,11	23,30	2,61	100,00
31 DKI Jakarta	5,40	21,65	50,42	19,54	3,00	100,00
32 Jawa Barat	5,39	33,64	38,49	21,29	1,18	100,00
33 Jawa Tengah	4,24	30,02	29,42	35,21	1,10	100,00
34 DI Yogyakarta	5,32	28,47	30,51	33,42	2,28	100,00
35 Jawa Timur	4,72	29,10	28,77	35,65	1,76	100,00
36 Banten	3,56	24,23	48,11	23,91	0,19	100,00
51 Bali	2,86	23,22	25,08	44,09	4,75	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	3,70	33,14	33,04	28,65	1,48	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	3,70	14,48	34,51	43,60	3,71	100,00
61 Kalimantan Barat	5,57	19,54	38,14	34,52	2,23	100,00
62 Kalimantan Tengah	5,92	29,10	38,83	24,24	1,90	100,00
63 Kalimantan Selatan	5,26	33,40	35,61	23,42	2,31	100,00
64 Kalimantan Timur	4,88	23,92	37,91	30,74	2,56	100,00
65 Kalimantan Utara	6,33	16,97	37,98	36,92	1,80	100,00
71 Sulawesi Utara	7,23	25,40	28,87	33,49	5,01	100,00
72 Sulawesi Tengah	3,84	24,23	32,49	37,70	1,74	100,00
73 Sulawesi Selatan	3,50	20,15	34,91	37,55	3,89	100,00
74 Sulawesi Tenggara	5,12	23,28	34,64	35,95	1,01	100,00
75 Gorontalo	3,73	23,99	31,75	37,74	2,78	100,00
76 Sulawesi Barat	4,66	21,58	39,20	31,02	3,55	100,00
81 Maluku	4,82	13,10	30,77	46,87	4,45	100,00
82 Maluku Utara	4,57	14,79	34,84	44,10	1,70	100,00
91 Papua Barat	4,37	20,26	41,84	32,30	1,24	100,00
94 Papua	7,24	23,96	46,93	20,98	0,89	100,00
Indonesia	**4,74**	**28,08**	**35,05**	**30,46**	**1,68**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.12.4 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2021

Perempuan

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	20,79	11,74	35,97	29,31	2,18	100,00
12 Sumatera Utara	16,05	16,57	27,92	37,23	2,24	100,00
13 Sumatera Barat	14,31	14,33	26,14	42,77	2,45	100,00
14 Riau	10,14	19,16	30,47	38,42	1,81	100,00
15 Jambi	12,68	20,96	28,76	34,90	2,70	100,00
16 Sumatera Selatan	10,82	19,02	24,83	41,97	3,36	100,00
17 Bengkulu	13,15	23,65	26,22	35,33	1,66	100,00
18 Lampung	11,15	19,03	25,26	42,69	1,87	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	14,46	23,51	27,35	31,97	2,71	100,00
21 Kepulauan Riau	10,74	17,55	31,84	36,70	3,16	100,00
31 DKI Jakarta	12,12	15,03	35,81	29,46	7,59	100,00
32 Jawa Barat	19,89	22,75	25,33	29,56	2,47	100,00
33 Jawa Tengah	14,86	19,24	19,95	42,46	3,50	100,00
34 DI Yogyakarta	13,56	19,03	22,90	40,16	4,35	100,00
35 Jawa Timur	15,39	16,85	21,77	41,22	4,78	100,00
36 Banten	13,17	16,39	32,68	36,20	1,56	100,00
51 Bali	6,19	15,98	18,32	51,69	7,82	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	17,23	19,12	22,97	37,80	2,88	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	9,21	8,82	25,49	48,75	7,74	100,00
61 Kalimantan Barat	9,09	13,70	31,13	42,71	3,37	100,00
62 Kalimantan Tengah	14,29	21,47	26,23	33,14	4,88	100,00
63 Kalimantan Selatan	19,06	17,14	24,55	34,80	4,45	100,00
64 Kalimantan Timur	12,37	18,90	26,34	38,14	4,26	100,00
65 Kalimantan Utara	8,77	15,00	24,03	49,48	2,73	100,00
71 Sulawesi Utara	10,01	18,58	25,26	41,78	4,37	100,00
72 Sulawesi Tengah	10,43	16,53	24,97	44,62	3,46	100,00
73 Sulawesi Selatan	11,16	11,12	27,02	40,92	9,79	100,00
74 Sulawesi Tenggara	13,37	14,31	22,91	44,94	4,46	100,00
75 Gorontalo	9,90	16,51	22,05	45,64	5,90	100,00
76 Sulawesi Barat	10,88	12,21	29,75	39,96	7,19	100,00
81 Maluku	6,04	9,57	24,43	54,18	5,78	100,00
82 Maluku Utara	6,15	8,93	31,48	49,52	3,93	100,00
91 Papua Barat	9,72	15,12	30,83	42,40	1,94	100,00
94 Papua	11,08	19,97	41,09	24,54	3,32	100,00
Indonesia	**14,78**	**17,96**	**24,74**	**38,59**	**3,92**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.12.5 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2021

Total

Provinsi	Status Tinggal Bersama					Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	12,80	16,33	43,17	26,26	1,45	100,00
12 Sumatera Utara	11,78	20,99	33,23	32,16	1,84	100,00
13 Sumatera Barat	9,78	18,35	31,57	38,14	2,16	100,00
14 Riau	7,36	23,36	36,58	31,14	1,57	100,00
15 Jambi	8,67	26,07	33,62	29,80	1,84	100,00
16 Sumatera Selatan	7,33	23,83	30,10	36,34	2,40	100,00
17 Bengkulu	8,82	28,08	29,67	32,22	1,22	100,00
18 Lampung	7,17	23,47	30,66	37,33	1,36	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	11,15	27,82	30,25	28,43	2,35	100,00
21 Kepulauan Riau	8,49	21,17	37,58	29,88	2,88	100,00
31 DKI Jakarta	8,90	18,20	42,81	24,70	5,39	100,00
32 Jawa Barat	12,83	28,06	31,74	25,53	1,84	100,00
33 Jawa Tengah	9,90	24,27	24,37	39,07	2,38	100,00
34 DI Yogyakarta	9,80	23,33	26,37	37,09	3,41	100,00
35 Jawa Timur	10,45	22,52	25,01	38,64	3,38	100,00
36 Banten	8,36	20,31	40,40	30,05	0,88	100,00
51 Bali	4,62	19,40	21,51	48,10	6,37	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	11,11	25,46	27,53	33,66	2,24	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	6,64	11,46	29,70	46,35	5,86	100,00
61 Kalimantan Barat	7,34	16,60	34,61	38,64	2,80	100,00
62 Kalimantan Tengah	9,80	25,57	33,00	28,36	3,28	100,00
63 Kalimantan Selatan	12,45	24,93	29,85	29,35	3,43	100,00
64 Kalimantan Timur	8,42	21,54	32,44	34,23	3,36	100,00
65 Kalimantan Utara	7,44	16,07	31,66	42,61	2,22	100,00
71 Sulawesi Utara	8,67	21,87	27,01	37,78	4,68	100,00
72 Sulawesi Tengah	7,17	20,34	28,69	41,19	2,61	100,00
73 Sulawesi Selatan	7,75	15,14	30,53	39,42	7,16	100,00
74 Sulawesi Tenggara	9,42	18,60	28,52	40,64	2,81	100,00
75 Gorontalo	7,03	19,99	26,56	41,97	4,45	100,00
76 Sulawesi Barat	7,99	16,57	34,14	35,80	5,50	100,00
81 Maluku	5,44	11,29	27,52	50,62	5,13	100,00
82 Maluku Utara	5,36	11,85	33,15	46,82	2,82	100,00
91 Papua Barat	6,87	17,85	36,69	37,02	1,56	100,00
94 Papua	8,92	22,22	44,38	22,54	1,95	100,00
Indonesia	**9,99**	**22,78**	**29,66**	**34,71**	**2,85**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.13.1 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, 2021

Perkotaan

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	7,41	0,39	5,2	6,65	8,17	1,36	15 455
12 Sumatera Utara	8,87	0,36	4,02	8,17	9,57	4,49	36 791
13 Sumatera Barat	9,37	0,85	9,11	7,69	11,04	8,13	19 728
14 Riau	6,24	0,28	4,52	5,69	6,8	1,32	11 906
15 Jambi	9,38	0,38	4,03	8,63	10,12	0,69	7 335
16 Sumatera Selatan	8,61	0,31	3,56	8,01	9,22	1,34	13 331
17 Bengkulu	8,35	1,06	12,66	6,27	10,43	3,35	6 267
18 Lampung	9,33	0,61	6,52	8,13	10,52	4,13	10 092
19 Kep. Bangka Belitung	9,57	0,4	4,14	8,79	10,34	0,52	7 127
21 Kepulauan Riau	5,14	1,86	36,27	1,48	8,8	53,62	10 839
31 DKI Jakarta	9,23	0,35	3,82	8,54	9,92	5,44	19 840
32 Jawa Barat	9,44	0,63	6,72	8,19	10,69	63,3	59 297
33 Jawa Tengah	13,51	0,54	4,03	12,44	14,58	15,73	55 905
34 DI Yogyakarta	13,77	0,71	5,13	12,38	15,16	4,25	8 829
35 Jawa Timur	13,57	0,79	5,84	12,01	15,13	40,56	59 364
36 Banten	7,74	0,35	4,52	7,05	8,43	5,52	18 248
51 Bali	11,64	1,9	16,34	7,9	15,38	38,09	14 843
52 Nusa Tenggara Barat	9,34	0,34	3,69	8,66	10,02	1,27	10 520
53 Nusa Tenggara Timur	8,27	1,15	13,95	6	10,53	8,35	8 822
61 Kalimantan Barat	9,07	0,42	4,6	8,25	9,89	1,35	9 659
62 Kalimantan Tengah	7,42	0,31	4,23	6,8	8,03	0,55	9 284
63 Kalimantan Selatan	9,38	0,35	3,68	8,71	10,06	1,01	11 486
64 Kalimantan Timur	8,11	0,4	4,97	7,32	8,9	1,91	13 705
65 Kalimantan Utara	7,48	0,94	12,59	5,63	9,33	1,96	5 648
71 Sulawesi Utara	12	0,94	7,8	10,16	13,84	3,91	12 618
72 Sulawesi Tengah	8,34	0,76	9,13	6,84	9,83	2,52	6 568
73 Sulawesi Selatan	10,02	0,97	9,65	8,12	11,92	14,34	20 588
74 Sulawesi Tenggara	7,12	0,88	12,31	5,4	8,85	3,93	8 116
75 Gorontalo	9,77	0,26	2,63	9,27	10,28	0,13	4 391
76 Sulawesi Barat	8,45	0,93	11,05	6,62	10,29	1,1	2 540
81 Maluku	8	0,42	5,24	7,18	8,82	0,65	8 647
82 Maluku Utara	7,37	0,49	6,66	6,41	8,34	0,44	5 017
91 Papua Barat	5,88	0,25	4,23	5,4	6,37	0,17	5 745
94 Papua	7,95	0,96	12,04	6,07	9,84	4,25	11 481
Indonesia	**10,24**	**0,25**	**2,46**	**9,74**	**10,73**	**36,74**	**530 032**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.13.2 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, 2021

Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	8,45	0,39	4,66	7,68	9,22	4,65	35 576
12 Sumatera Utara	9,30	0,46	4,90	8,41	10,20	10,50	47 570
13 Sumatera Barat	10,33	0,80	7,76	8,76	11,91	12,66	25 849
14 Riau	6,67	0,47	6,99	5,75	7,59	9,44	19 613
15 Jambi	9,67	0,64	6,62	8,41	10,93	7,36	18 010
16 Sumatera Selatan	9,27	0,25	2,74	8,77	9,77	2,67	27 981
17 Bengkulu	10,25	0,42	4,09	9,43	11,08	1,65	14 507
18 Lampung	10,64	0,40	3,75	9,85	11,42	6,29	27 612
19 Kep. Bangka Belitung	8,49	0,49	5,76	7,53	9,45	1,28	6 949
21 Kepulauan Riau	10,44	0,80	7,69	8,86	12,02	0,78	4 278
31 DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
32 Jawa Barat	12,82	0,61	4,73	11,63	14,01	23,05	28 623
33 Jawa Tengah	14,89	0,48	3,24	13,94	15,84	19,85	48 534
34 DI Yogyakarta	20,52	0,84	4,09	18,87	22,17	2,84	4 505
35 Jawa Timur	15,68	0,48	3,05	14,74	16,62	20,18	51 652
36 Banten	10,24	0,78	7,62	8,71	11,78	15,73	9 170
51 Bali	15,26	0,84	5,48	13,61	16,90	4,54	9 468
52 Nusa Tenggara Barat	9,52	0,26	2,78	8,99	10,04	1,39	13 474
53 Nusa Tenggara Timur	9,72	0,44	4,49	8,86	10,57	5,82	46 088
61 Kalimantan Barat	8,61	0,33	3,84	7,96	9,26	2,93	24 255
62 Kalimantan Tengah	7,86	0,53	6,74	6,82	8,91	3,96	18 850
63 Kalimantan Selatan	10,20	0,56	5,46	9,11	11,30	4,83	16 830
64 Kalimantan Timur	8,67	0,55	6,34	7,59	9,75	2,84	9 074
65 Kalimantan Utara	8,90	0,84	9,39	7,26	10,55	1,51	5 243
71 Sulawesi Utara	13,62	0,82	6,03	12,00	15,23	4,26	19 164
72 Sulawesi Tengah	9,24	0,38	4,13	8,49	9,99	2,39	23 118
73 Sulawesi Selatan	12,24	0,47	3,85	11,31	13,16	6,52	39 484
74 Sulawesi Tenggara	8,58	0,39	4,54	7,82	9,35	2,17	29 550
75 Gorontalo	9,22	0,39	4,18	8,46	9,97	0,76	8 973
76 Sulawesi Barat	7,81	0,86	10,97	6,13	9,50	7,26	11 851
81 Maluku	8,97	0,54	6,04	7,91	10,04	2,33	18 834
82 Maluku Utara	7,95	0,32	3,97	7,33	8,57	0,79	17 511
91 Papua Barat	5,80	0,52	8,89	4,78	6,81	1,78	21 459
94 Papua	4,38	0,69	15,74	3,02	5,73	17,77	43 810
Indonesia	**11,60**	**0,16**	**1,39**	**11,28**	**11,91**	**19,06**	**747 465**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.13.3 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, 2021

Laki-Laki

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	7,59	0,25	3,24	7,11	8,07	1,10	25 370
12 Sumatera Utara	8,34	0,21	2,50	7,93	8,75	2,01	41 921
13 Sumatera Barat	9,17	0,56	6,12	8,06	10,27	4,97	22 442
14 Riau	6,53	0,32	4,92	5,90	7,16	2,87	15 954
15 Jambi	9,47	0,42	4,47	8,64	10,30	1,82	12 726
16 Sumatera Selatan	8,64	0,19	2,20	8,27	9,01	0,94	20 871
17 Bengkulu	9,59	0,61	6,32	8,40	10,78	2,05	10 615
18 Lampung	10,20	0,43	4,18	9,37	11,04	4,11	19 163
19 Kep. Bangka Belitung	9,12	0,32	3,46	8,50	9,74	0,43	7 274
21 Kepulauan Riau	5,60	1,97	35,20	1,73	9,46	41,15	7 561
31 DKI Jakarta	8,90	0,29	3,20	8,34	9,46	2,50	9 873
32 Jawa Barat	9,77	0,57	5,83	8,65	10,89	44,10	44 266
33 Jawa Tengah	13,34	0,38	2,87	12,58	14,09	10,36	51 722
34 DI Yogyakarta	14,27	1,19	8,33	11,94	16,60	10,70	6 549
35 Jawa Timur	13,63	0,51	3,78	12,62	14,64	21,02	54 901
36 Banten	8,32	0,48	5,75	7,38	9,26	9,39	13 849
51 Bali	11,95	1,45	12,13	9,11	14,80	21,10	12 227
52 Nusa Tenggara Barat	8,67	0,27	3,15	8,14	9,21	1,16	11 925
53 Nusa Tenggara Timur	8,81	0,46	5,25	7,91	9,72	3,47	27 086
61 Kalimantan Barat	8,59	0,22	2,61	8,15	9,03	0,79	17 257
62 Kalimantan Tengah	7,96	0,34	4,21	7,31	8,62	1,02	14 357
63 Kalimantan Selatan	9,30	0,26	2,77	8,79	9,81	0,81	14 202
64 Kalimantan Timur	8,45	0,32	3,83	7,82	9,09	1,22	11 608
65 Kalimantan Utara	8,34	0,74	8,92	6,88	9,80	1,29	5 646
71 Sulawesi Utara	12,06	0,64	5,28	10,81	13,31	2,33	16 113
72 Sulawesi Tengah	8,74	0,41	4,66	7,94	9,54	1,55	15 154
73 Sulawesi Selatan	10,25	0,61	5,93	9,05	11,44	8,27	29 260
74 Sulawesi Tenggara	7,69	0,43	5,64	6,84	8,54	1,71	18 653
75 Gorontalo	8,78	0,27	3,04	8,26	9,31	0,25	6 704
76 Sulawesi Barat	7,34	0,45	6,11	6,46	8,22	0,98	7 237
81 Maluku	8,23	0,56	6,85	7,12	9,33	1,81	13 777
82 Maluku Utara	7,62	0,35	4,61	6,93	8,31	0,53	11 337
91 Papua Barat	5,98	0,35	5,94	5,28	6,67	0,55	13 814
94 Papua	5,79	0,64	11,00	4,54	7,05	6,33	28 842
Indonesia	**10,28**	**0,16**	**1,60**	**9,96**	**10,60**	**18,80**	**640 256**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.13.4 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, 2021

Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	8,61	0,39	4,50	7,85	9,37	2,46	25 661
12 Sumatera Utara	9,78	0,40	4,04	9,01	10,56	6,25	42 440
13 Sumatera Barat	10,54	0,70	6,66	9,17	11,92	6,96	23 135
14 Riau	6,47	0,31	4,73	5,87	7,07	2,52	15 565
15 Jambi	9,68	0,49	5,03	8,73	10,64	2,30	12 619
16 Sumatera Selatan	9,41	0,24	2,51	8,95	9,87	1,32	20 441
17 Bengkulu	9,66	0,64	6,67	8,39	10,92	2,21	10 159
18 Lampung	10,24	0,42	4,14	9,40	11,07	3,89	18 541
19 Kep. Bangka Belitung	9,08	0,39	4,28	8,31	9,84	0,63	6 802
21 Kepulauan Riau	5,47	1,93	35,34	1,68	9,26	40,11	7 556
31 DKI Jakarta	9,56	0,45	4,73	8,67	10,45	5,99	9 967
32 Jawa Barat	10,60	0,64	6,00	9,35	11,85	49,64	43 654
33 Jawa Tengah	15,00	0,39	2,61	14,23	15,77	10,02	52 717
34 DI Yogyakarta	16,74	1,37	8,18	14,05	19,43	12,71	6 785
35 Jawa Timur	15,40	0,57	3,71	14,28	16,52	24,10	56 115
36 Banten	8,59	0,55	6,36	7,51	9,66	11,53	13 569
51 Bali	13,47	1,66	12,31	10,21	16,72	24,74	12 084
52 Nusa Tenggara Barat	10,16	0,18	1,81	9,80	10,52	0,47	12 069
53 Nusa Tenggara Timur	9,89	0,52	5,26	8,87	10,91	4,04	27 824
61 Kalimantan Barat	8,98	0,33	3,73	8,32	9,64	1,64	16 657
62 Kalimantan Tengah	7,37	0,36	4,87	6,67	8,08	1,17	13 777
63 Kalimantan Selatan	10,32	0,45	4,40	9,43	11,21	2,25	14 114
64 Kalimantan Timur	8,11	0,35	4,36	7,42	8,80	1,42	11 171
65 Kalimantan Utara	7,66	0,82	10,72	6,05	9,28	1,54	5 245
71 Sulawesi Utara	13,46	0,76	5,62	11,97	14,94	2,88	15 669
72 Sulawesi Tengah	9,18	0,39	4,22	8,42	9,94	1,30	14 532
73 Sulawesi Selatan	12,19	0,76	6,22	10,70	13,68	11,63	30 812
74 Sulawesi Tenggara	8,43	0,55	6,54	7,35	9,52	2,54	19 013
75 Gorontalo	10,14	0,32	3,16	9,51	10,77	0,32	6 660
76 Sulawesi Barat	8,55	1,00	11,73	6,58	10,52	4,21	7 154
81 Maluku	8,87	0,36	4,05	8,17	9,58	0,67	13 704
82 Maluku Utara	7,95	0,27	3,46	7,41	8,49	0,30	11 191
91 Papua Barat	5,68	0,29	5,08	5,11	6,25	0,35	13 390
94 Papua	4,98	0,66	13,32	3,68	6,28	7,15	26 449
Indonesia	**11,37**	**0,19**	**1,64**	**11,01**	**11,74**	**22,07**	**637 241**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.13.5 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, 2021

Total

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	8,10	0,31	3,87	7,49	8,72	3,39	51 031
12 Sumatera Utara	9,06	0,30	3,28	8,48	9,65	7,54	84 361
13 Sumatera Barat	9,86	0,63	6,40	8,62	11,10	11,85	45 577
14 Riau	6,50	0,31	4,73	5,90	7,10	5,17	31 519
15 Jambi	9,57	0,45	4,67	8,70	10,45	3,97	25 345
16 Sumatera Selatan	9,02	0,20	2,18	8,64	9,41	1,93	41 312
17 Bengkulu	9,62	0,62	6,39	8,42	10,83	4,13	20 774
18 Lampung	10,22	0,42	4,09	9,40	11,04	7,75	37 704
19 Kep. Bangka Belitung	9,10	0,34	3,76	8,43	9,77	0,99	14 076
21 Kepulauan Riau	5,53	1,95	35,27	1,70	9,36	81,28	15 117
31 DKI Jakarta	9,23	0,35	3,82	8,54	9,92	7,46	19 840
32 Jawa Barat	10,18	0,60	5,90	9,00	11,36	93,24	87 920
33 Jawa Tengah	14,17	0,38	2,71	13,42	14,93	19,94	104 439
34 DI Yogyakarta	15,52	1,28	8,28	13,00	18,04	23,53	13 334
35 Jawa Timur	14,53	0,54	3,72	13,46	15,59	44,63	111 016
36 Banten	8,45	0,50	5,92	7,47	9,43	19,93	27 418
51 Bali	12,71	1,55	12,22	9,66	15,75	45,73	24 311
52 Nusa Tenggara Barat	9,43	0,22	2,32	9,00	9,86	1,39	23 994
53 Nusa Tenggara Timur	9,36	0,48	5,15	8,41	10,30	7,22	54 910
61 Kalimantan Barat	8,78	0,27	3,10	8,25	9,31	2,25	33 914
62 Kalimantan Tengah	7,68	0,34	4,40	7,02	8,34	2,07	28 134
63 Kalimantan Selatan	9,81	0,34	3,47	9,14	10,47	2,66	28 316
64 Kalimantan Timur	8,29	0,33	3,96	7,64	8,93	2,47	22 779
65 Kalimantan Utara	8,02	0,77	9,66	6,50	9,54	2,76	10 891
71 Sulawesi Utara	12,74	0,69	5,41	11,39	14,10	5,11	31 782
72 Sulawesi Tengah	8,96	0,39	4,39	8,19	9,73	2,79	29 686
73 Sulawesi Selatan	11,24	0,68	6,09	9,90	12,58	19,82	60 072
74 Sulawesi Tenggara	8,06	0,48	5,90	7,13	8,99	3,94	37 666
75 Gorontalo	9,46	0,26	2,74	8,95	9,97	0,44	13 364
76 Sulawesi Barat	7,94	0,71	8,91	6,55	9,33	4,51	14 391
81 Maluku	8,55	0,43	5,07	7,70	9,40	2,05	27 481
82 Maluku Utara	7,78	0,29	3,77	7,21	8,36	0,72	22 528
91 Papua Barat	5,83	0,31	5,34	5,22	6,45	0,84	27 204
94 Papua	5,41	0,64	11,91	4,14	6,67	13,13	55 291
Indonesia	**10,82**	**0,17**	**1,61**	**10,48**	**11,17**	**40,47**	**1 277 497**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.14 Nilai *Sampling Error* Rasio Ketergantungan Lansia Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	12,77	0,54	4,20	11,72	13,83	3,26	51 031
12 Sumatera Utara	14,43	0,55	3,84	13,34	15,51	8,22	84 361
13 Sumatera Barat	15,80	1,23	7,81	13,38	18,22	13,73	45 577
14 Riau	10,09	0,50	4,93	9,12	11,07	4,78	31 519
15 Jambi	14,67	0,75	5,09	13,20	16,13	3,72	25 345
16 Sumatera Selatan	14,09	0,34	2,42	13,42	14,76	1,90	41 312
17 Bengkulu	14,77	1,09	7,39	12,63	16,91	4,35	20 774
18 Lampung	15,89	0,77	4,83	14,38	17,39	8,37	37 704
19 Kep. Bangka Belitung	13,83	0,52	3,72	12,82	14,84	0,78	14 076
21 Kepulauan Riau	8,30	3,04	36,65	2,33	14,26	76,57	15 117
31 DKI Jakarta	13,52	0,54	4,00	12,46	14,58	6,55	19 840
32 Jawa Barat	15,61	1,01	6,46	13,63	17,58	86,83	87 920
33 Jawa Tengah	22,31	0,72	3,23	20,90	23,73	19,88	104 439
34 DI Yogyakarta	24,08	2,48	10,31	19,21	28,95	24,84	13 334
35 Jawa Timur	22,46	0,99	4,39	20,52	24,39	43,43	111 016
36 Banten	12,79	0,92	7,19	10,98	14,59	23,84	27 418
51 Bali	19,43	2,79	14,35	13,96	24,91	46,11	24 311
52 Nusa Tenggara Barat	14,90	0,47	3,18	13,97	15,83	2,07	23 994
53 Nusa Tenggara Timur	15,33	0,96	6,24	13,45	17,20	8,31	54 910
61 Kalimantan Barat	13,50	0,46	3,38	12,60	14,39	2,15	33 914
62 Kalimantan Tengah	11,45	0,57	5,02	10,32	12,58	2,22	28 134
63 Kalimantan Selatan	15,32	0,59	3,87	14,15	16,48	2,60	28 316
64 Kalimantan Timur	12,40	0,54	4,38	11,33	13,47	2,48	22 779
65 Kalimantan Utara	12,42	1,36	10,96	9,75	15,09	2,91	10 891
71 Sulawesi Utara	19,79	1,24	6,24	17,37	22,22	4,95	31 782
72 Sulawesi Tengah	13,89	0,72	5,17	12,48	15,30	3,10	29 686
73 Sulawesi Selatan	17,50	1,30	7,44	14,95	20,06	22,36	60 072
74 Sulawesi Tenggara	12,91	0,94	7,25	11,07	14,74	4,84	37 666
75 Gorontalo	14,35	0,45	3,13	13,47	15,23	0,46	13 364
76 Sulawesi Barat	12,49	1,20	9,60	10,13	14,84	4,28	14 391
81 Maluku	13,63	0,97	7,14	11,72	15,54	3,27	27 481
82 Maluku Utara	12,15	0,60	4,95	10,97	13,33	1,02	22 528
91 Papua Barat	9,02	0,52	5,77	8,00	10,04	0,84	27 204
94 Papua	8,07	1,00	12,43	6,10	10,04	12,52	55 291
Indonesia	**16,76**	**,30**	**1,81**	**16,16**	**17,35**	**38,80**	**1 277 497**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.15.1 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi, 2021

Perkotaan

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	23,09	1,41	6,10	20,32	25,86	1,73	4 011
12 Sumatera Utara	26,15	0,98	3,73	24,24	28,07	3,52	9 407
13 Sumatera Barat	28,19	2,51	8,90	23,25	33,12	7,22	4 977
14 Riau	17,81	1,15	6,44	15,55	20,06	2,20	3 075
15 Jambi	26,50	0,96	3,63	24,61	28,39	0,50	1 939
16 Sumatera Selatan	25,81	0,98	3,79	23,89	27,74	1,38	3 450
17 Bengkulu	22,86	2,79	12,19	17,38	28,34	2,73	1 705
18 Lampung	26,96	1,05	3,88	24,91	29,02	1,34	2 667
19 Kep. Bangka Belitung	25,16	1,01	4,00	23,18	27,14	0,43	2 021
21 Kepulauan Riau	14,14	4,97	35,11	4,38	23,90	41,87	2 992
31 DKI Jakarta	24,09	0,67	2,78	22,77	25,41	2,55	5 775
32 Jawa Barat	25,40	1,49	5,88	22,46	28,34	43,94	16 892
33 Jawa Tengah	36,14	1,29	3,57	33,60	38,67	12,23	15 861
34 DI Yogyakarta	32,19	2,29	7,13	27,68	36,70	7,36	2 765
35 Jawa Timur	35,94	1,86	5,17	32,29	39,59	31,90	17 176
36 Banten	21,88	1,13	5,15	19,67	24,10	6,25	4 827
51 Bali	29,26	5,51	18,81	18,44	40,08	41,66	3 836
52 Nusa Tenggara Barat	24,27	0,89	3,65	22,53	26,02	1,11	3 037
53 Nusa Tenggara Timur	25,10	4,16	16,56	16,94	33,27	10,64	2 125
61 Kalimantan Barat	28,05	1,40	4,98	25,31	30,79	1,53	2 433
62 Kalimantan Tengah	20,48	0,85	4,17	18,80	22,15	0,48	2 563
63 Kalimantan Selatan	26,27	1,04	3,96	24,22	28,32	1,11	3 311
64 Kalimantan Timur	22,86	1,04	4,56	20,81	24,91	1,42	3 576
65 Kalimantan Utara	22,26	3,21	14,42	15,95	28,57	2,28	1 394
71 Sulawesi Utara	31,93	2,36	7,38	27,30	36,56	3,19	3 365
72 Sulawesi Tengah	24,96	2,47	9,88	20,12	29,81	2,73	1 675
73 Sulawesi Selatan	30,13	2,73	9,07	24,76	35,50	12,04	5 117
74 Sulawesi Tenggara	22,56	3,34	14,83	15,98	29,13	5,24	1 998
75 Gorontalo	28,42	2,06	7,25	24,37	32,47	0,95	1 130
76 Sulawesi Barat	25,69	1,97	7,65	21,83	29,56	0,47	603
81 Maluku	24,65	1,74	7,04	21,24	28,06	1,07	2 002
82 Maluku Utara	22,75	2,10	9,25	18,61	26,88	0,79	1 261
91 Papua Barat	18,38	0,73	3,96	16,95	19,81	0,12	1 369
94 Papua	23,10	3,17	13,73	16,87	29,34	4,85	2 787
Indonesia	**28,00**	**0,64**	**2,27**	**26,75**	**29,25**	**28,77**	**143 122**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.15.2 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi, 2021

Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	26,38	1,26	4,79	23,90	28,87	4,67	9 283
12 Sumatera Utara	27,47	1,04	3,78	25,43	29,51	5,70	11 752
13 Sumatera Barat	30,97	2,23	7,22	26,58	35,37	10,22	6 571
14 Riau	20,19	1,36	6,74	17,52	22,86	7,66	5 141
15 Jambi	26,69	1,30	4,88	24,13	29,25	3,56	4 970
16 Sumatera Selatan	25,60	0,54	2,09	24,55	26,65	1,35	7 604
17 Bengkulu	26,86	1,02	3,81	24,85	28,87	1,23	4 038
18 Lampung	28,46	0,88	3,09	26,73	30,19	3,78	7 774
19 Kep. Bangka Belitung	22,68	1,33	5,85	20,07	25,29	1,13	1 968
21 Kepulauan Riau	28,66	2,29	7,99	24,16	33,16	0,78	1 176
31 DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
32 Jawa Barat	30,76	1,27	4,12	28,27	33,25	15,71	8 921
33 Jawa Tengah	38,72	1,06	2,75	36,63	40,81	13,98	14 009
34 DI Yogyakarta	51,46	1,86	3,61	47,81	55,12	2,44	1 279
35 Jawa Timur	40,07	0,97	2,42	38,16	41,97	12,74	15 286
36 Banten	29,45	2,05	6,95	25,42	33,47	12,09	2 409
51 Bali	40,54	2,64	6,51	35,35	45,72	6,05	2 467
52 Nusa Tenggara Barat	23,74	0,80	3,35	22,17	25,30	1,72	3 925
53 Nusa Tenggara Timur	31,10	1,04	3,34	29,06	33,14	3,01	10 418
61 Kalimantan Barat	25,16	1,08	4,30	23,03	27,29	3,28	6 302
62 Kalimantan Tengah	21,02	1,32	6,27	18,43	23,61	2,92	5 307
63 Kalimantan Selatan	27,57	1,34	4,86	24,94	30,20	3,54	4 928
64 Kalimantan Timur	24,53	1,59	6,48	21,40	27,66	2,62	2 368
65 Kalimantan Utara	26,17	2,43	9,30	21,39	30,96	1,31	1 277
71 Sulawesi Utara	36,12	1,47	4,07	33,23	39,02	1,83	5 171
72 Sulawesi Tengah	27,40	0,91	3,31	25,61	29,18	1,39	5 846
73 Sulawesi Selatan	35,61	1,38	3,87	32,90	38,32	6,49	10 094
74 Sulawesi Tenggara	26,82	1,21	4,52	24,43	29,20	2,00	7 218
75 Gorontalo	26,75	0,75	2,79	25,28	28,22	0,31	2 289
76 Sulawesi Barat	24,58	2,52	10,25	19,63	29,53	5,83	2 903
81 Maluku	29,83	1,68	5,64	26,52	33,14	1,85	3 955
82 Maluku Utara	25,31	0,81	3,19	23,72	26,89	0,45	4 095
91 Papua Barat	17,63	1,62	9,19	14,45	20,82	1,59	4 960
94 Papua	12,17	1,98	16,29	8,27	16,07	14,98	11 206
Indonesia	**31,53**	**0,37**	**1,17**	**30,81**	**32,25**	**12,43**	**196 910**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.15.3 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi, 2021

Total

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	25,29	1,05	4,15	23,23	27,35	3,68	13 294
12 Sumatera Utara	26,75	0,76	2,84	25,26	28,24	5,14	21 159
13 Sumatera Barat	29,61	1,82	6,14	26,04	33,17	10,13	11 548
14 Riau	19,24	1,02	5,33	17,22	21,25	5,60	8 216
15 Jambi	26,63	0,93	3,51	24,79	28,46	2,01	6 909
16 Sumatera Selatan	25,68	0,50	1,94	24,70	26,65	1,36	11 054
17 Bengkulu	25,55	1,49	5,83	22,63	28,47	2,98	5 743
18 Lampung	28,00	0,76	2,70	26,52	29,49	3,03	10 441
19 Kep. Bangka Belitung	24,08	0,87	3,60	22,38	25,79	0,79	3 989
21 Kepulauan Riau	15,23	5,22	34,28	4,98	25,48	63,67	4 168
31 DKI Jakarta	24,09	0,67	2,78	22,77	25,40	3,44	5 775
32 Jawa Barat	26,66	1,31	4,93	24,09	29,24	58,13	25 813
33 Jawa Tengah	37,40	0,87	2,34	35,68	39,11	14,63	29 870
34 DI Yogyakarta	36,83	3,58	9,73	29,80	43,86	30,01	4 044
35 Jawa Timur	37,83	1,21	3,19	35,46	40,20	32,85	32 462
36 Banten	24,01	1,49	6,20	21,09	26,93	19,22	7 236
51 Bali	32,51	4,61	14,19	23,46	41,57	52,40	6 303
52 Nusa Tenggara Barat	24,00	0,60	2,49	22,83	25,17	1,40	6 962
53 Nusa Tenggara Timur	29,54	1,62	5,49	26,36	32,73	7,61	12 543
61 Kalimantan Barat	26,18	0,94	3,59	24,34	28,02	2,77	8 735
62 Kalimantan Tengah	20,80	0,86	4,11	19,12	22,48	1,56	7 870
63 Kalimantan Selatan	26,95	0,85	3,16	25,28	28,62	2,06	8 239
64 Kalimantan Timur	23,39	0,88	3,76	21,66	25,11	1,96	5 944
65 Kalimantan Utara	23,75	2,49	10,49	18,86	28,64	2,87	2 671
71 Sulawesi Utara	33,87	1,64	4,84	30,65	37,09	3,78	8 536
72 Sulawesi Tengah	26,64	1,14	4,28	24,40	28,87	2,42	7 521
73 Sulawesi Selatan	33,20	1,86	5,60	29,55	36,85	16,24	15 211
74 Sulawesi Tenggara	25,29	1,66	6,56	22,04	28,55	4,51	9 216
75 Gorontalo	27,47	0,96	3,49	25,59	29,36	0,66	3 419
76 Sulawesi Barat	24,80	2,05	8,27	20,77	28,83	3,56	3 506
81 Maluku	27,41	1,77	6,45	23,94	30,89	3,00	5 957
82 Maluku Utara	24,53	1,08	4,42	22,40	26,66	0,88	5 356
91 Papua Barat	17,95	0,98	5,44	16,03	19,86	0,73	6 329
94 Papua	15,19	1,90	12,53	11,45	18,92	11,78	13 993
Indonesia	**29,52**	**0,43**	**1,47**	**28,67**	**30,37**	**30,77**	**340 032**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 3.16 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal Sendiri Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	12,80	1,00	7,83	10,83	14,76	1,66	3 940
12 Sumatera Utara	11,78	0,59	5,05	10,61	12,95	1,93	7 113
13 Sumatera Barat	9,78	1,04	10,58	7,75	11,81	2,81	4 978
14 Riau	7,36	0,71	9,59	5,97	8,74	1,40	2 065
15 Jambi	8,67	0,94	10,87	6,82	10,52	1,64	2 126
16 Sumatera Selatan	7,33	0,83	11,31	5,71	8,96	3,32	3 620
17 Bengkulu	8,82	0,73	8,22	7,40	10,24	0,53	1 826
18 Lampung	7,17	0,41	5,70	6,37	7,97	0,92	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	11,15	0,98	8,81	9,22	13,08	0,55	1 193
21 Kepulauan Riau	8,49	1,29	15,17	5,96	11,01	1,17	1 170
31 DKI Jakarta	8,90	1,03	11,52	6,89	10,91	5,33	1 794
32 Jawa Barat	12,83	0,49	3,86	11,86	13,80	4,66	9 183
33 Jawa Tengah	9,90	0,43	4,33	9,06	10,75	4,26	14 432
34 DI Yogyakarta	9,80	0,45	4,59	8,92	10,69	0,59	2 258
35 Jawa Timur	10,45	0,46	4,39	9,55	11,35	5,48	15 797
36 Banten	8,36	0,92	11,05	6,55	10,17	5,14	2 023
51 Bali	4,62	0,59	12,74	3,46	5,77	1,86	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	11,11	1,16	10,40	8,84	13,38	2,82	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	6,64	0,88	13,27	4,91	8,37	2,74	5 403
61 Kalimantan Barat	7,34	0,80	10,96	5,76	8,92	1,80	2 828
62 Kalimantan Tengah	9,80	1,39	14,18	7,07	12,52	1,91	1 898
63 Kalimantan Selatan	12,45	0,64	5,10	11,20	13,70	0,66	2 305
64 Kalimantan Timur	8,42	0,75	8,94	6,94	9,89	0,94	1 608
65 Kalimantan Utara	7,44	1,18	15,91	5,11	9,76	0,49	703
71 Sulawesi Utara	8,67	0,79	9,09	7,12	10,22	1,06	3 840
72 Sulawesi Tengah	7,17	0,77	10,70	5,66	8,68	1,03	2 372
73 Sulawesi Selatan	7,75	0,57	7,34	6,63	8,86	1,91	6 626
74 Sulawesi Tenggara	9,42	0,91	9,62	7,65	11,20	0,89	2 881
75 Gorontalo	7,03	0,70	9,93	5,66	8,40	0,35	1 059
76 Sulawesi Barat	7,99	0,74	9,30	6,53	9,45	0,35	1 156
81 Maluku	5,44	1,11	20,34	3,27	7,62	1,54	2 169
82 Maluku Utara	5,36	0,65	12,19	4,08	6,64	0,35	1 585
91 Papua Barat	6,87	0,83	12,02	5,25	8,49	0,26	1 388
94 Papua	8,92	0,94	10,54	7,07	10,76	0,84	2 068
Indonesia	**9,99**	**0,18**	**1,80**	**9,64**	**10,34**	**4,43**	**122 694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 4. PENDIDIKAN

"RATA-RATA LANSIA **BERSEKOLAH** SAMPAI KELAS **5 SD/** SEDERAJAT"

https://www.bps.go.id

2017	2018	2019	2020	2021
2,98	5,73	7,94	11,44	14,10

Akses internet oleh lansia mengalami peningkatan yang pesat dalam lima tahun terakhir

https://www.bps.go.id

Bab 4 Pendidikan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada mereka, lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu hak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan tersebut, diharapkan dapat menimbulkan kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Pada bab ini, disajikan gambaran tingkat pendidikan penduduk lansia, seperti kemampuan baca tulis dan rata-rata lama sekolah. Selain itu, juga disajikan informasi akses lansia terhadap teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

https://www.bps.go.id

4.1. Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis merupakan salah satu kemampuan keaksaraan dasar yang perlu dikuasai oleh setiap individu. Menurut Hunter dalam Syukri (2008), kemampuan keaksaraan memiliki keterkaitan dengan kemampuan dasar yang sangat bermanfaat untuk berbagai macam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan tersebut, seseorang dapat mempelajari keahlian dan keterampilan baru yang belum dimiliki, mendapatkan informasi tertentu, memperoleh pekerjaan, bahkan mendapatkan status dan posisi tertentu dalam masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir, **Angka Melek Huruf** lansia terus meningkat.

Berdasarkan hasil Susenas dalam kurun lima tahun terakhir, Angka Melek Huruf (AMH) Lansia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, AMH lansia mencapai 81,72 persen. Meskipun sama-sama mengalami kenaikan sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, AMH lansia perempuan mengalami kenaikan persen

poin yang lebih tinggi dibanding lansia laki-laki, yaitu sebesar 5,46 persen poin berbanding 1,33 persen poin.

Gambar 4.1 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Jenis Kelamin (persen), 2017-2021

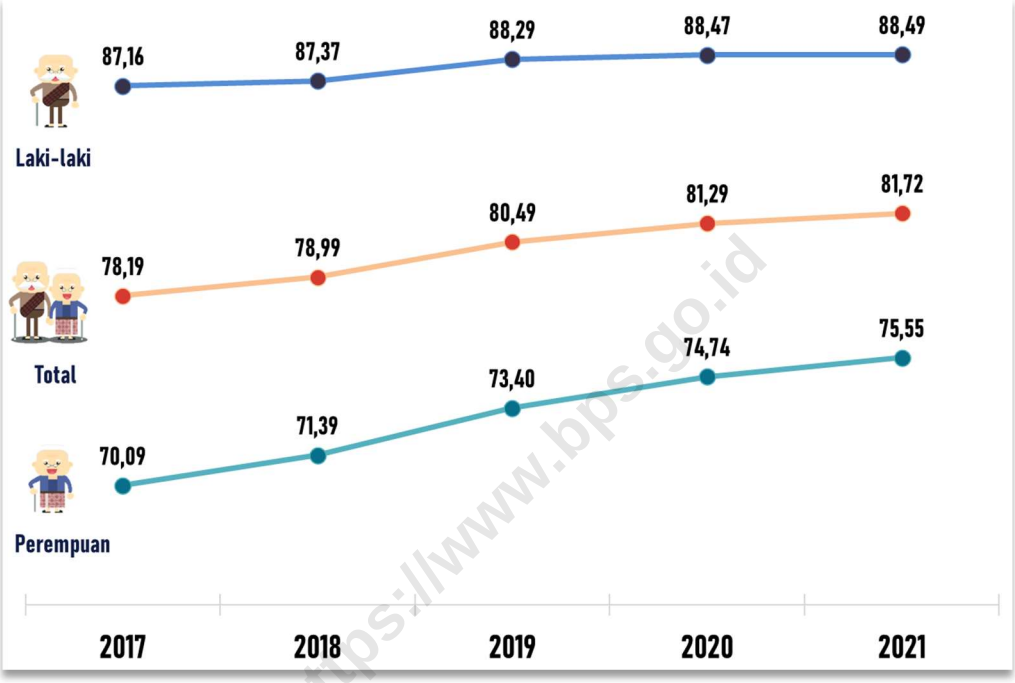

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Jika dilihat dari berbagai karakteristik, terdapat perbedaan pencapaian kemampuan baca tulis lansia. AMH lansia di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan, dengan besaran masing-masing 87,78 persen dan 74,67 persen. Keterbatasan berbagai fasilitas pendidikan di perdesaan pada masa lalu, dapat menjadi salah satu faktor penyebabnya. Budaya dan keterbatasan perempuan dalam mengenyam pendidikan di masa lalu juga berdampak pada lansia di masa sekarang. Terlihat bahwa AMH lansia laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan AMH lansia perempuan (88,49 persen berbanding 75,55 persen).

Dari gambar 4.2 di bawah terlihat bahwa kemampuan baca tulis memiliki korelasi yang positif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga lansia, yang diukur menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita rumah tangga sebulan. Semakin tinggi pengeluaran perkapita rumah tangga sebulan menunjukkan

kondisi ekonomi yang tinggi juga. Di sisi lain, ditemukan sekitar 29,72 persen lansia penyandang disabilitas yang buta huruf, di mana besarnya hampir dua kali lipat dari lansia bukan penyandang disabilitas. Menurut kelompok umur, persentase AMH lansia semakin rendah seiring bertambahnya umur. Dapat dikatakan bahwa penurunan kemampuan membaca dan menulis lansia saling terkait antara penambahan usia dan status disabilitasnya.

Gambar 4.2 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Status Disabilitas, dan Kelompok Pengeluaran (persen), 2021

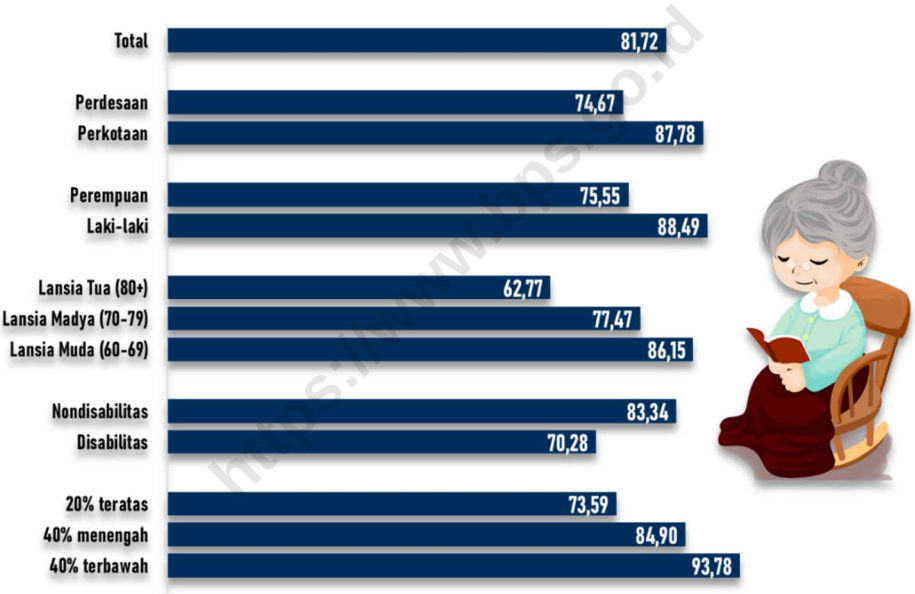

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 4.3 di bawah merepresentasikan Angka Melek Huruf lansia menurut provinsi di wilayah Indonesia. Warna yang lebih gelap menunjukkan nilai AMH lansia yang berada di atas AMH lansia nasional (81,72 persen). Terlihat bahwa Pulau Sumatera secara utuh berwarna lebih gelap, yang berarti bahwa seluruh provinsi di Pulau Sumatera telah memiliki AMH lansia di atas angka nasional. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai AMH lansia yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yaitu sebesar 53,13 persen. Yang menarik adalah, meskipun Pulau Jawa merupakan daerah yang dikenal paling

maju, namun untuk Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta memiliki AMH lansia yang di bawah angka nasional.

Gambar 4.3 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi (persen), 2021

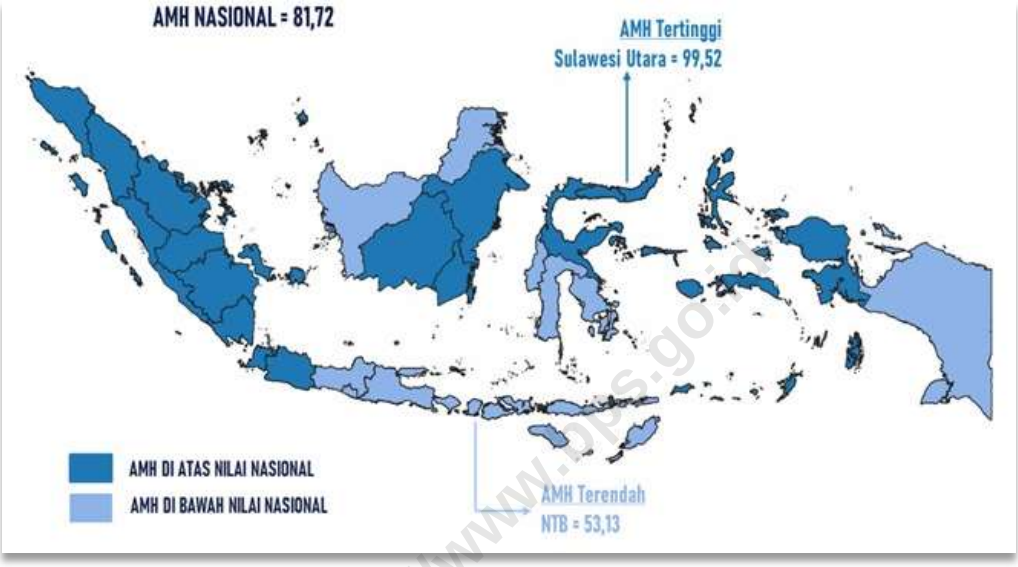

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Pemerintah telah melaksanakan program Keaksaraan Dasar untuk pemberantasan buta huruf bagi penduduk usia 15-59 tahun. Selain itu, program kegiatan keaksaraan lanjutan seperti pendidikan multikeaksaraan dan keaksaraan usaha mandiri (KUM) juga dilaksanakan agar penduduk yang sudah melek huruf tersebut tidak menjadi buta huruf kembali (Kemendikbud, 2021). Harapannya, program-program tersebut dapat membantu penduduk pra lansia dengan kemampuan keaksaraannya dapat menjaga kualitas hidupnya di masa usia lanjut.

4.2. Tingkat Pendidikan

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) mengklasifikasikan kesejahteraan dalam dua indikator, yaitu memiliki kualitas hidup dan kondisi kehidupan yang baik. Salah satu penyusun indikator kualitas hidup adalah pendidikan. Pendidikan berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan seseorang karena orang yang memiliki pendidikan tinggi mempunyai peluang yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan yang layak

dengan gaji yang lebih tinggi (The PRAKARSA, 2020). Sayangnya kondisi saat ini kurang menguntungkan bagi lansia karena aspek pendidikan belum menjadi prioritas pada masa lalu.

Secara umum, sebagian besar lansia berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 63,27 persen. Bahkan, masih ada sekitar 13,15 persen lansia yang tidak pernah bersekolah. Sementara itu, hanya ada sekitar 15,16 persen lansia yang memiliki pendidikan SM/sederajat ke atas.

Gambar 4.4 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Tingkat Pendidikan, 2021

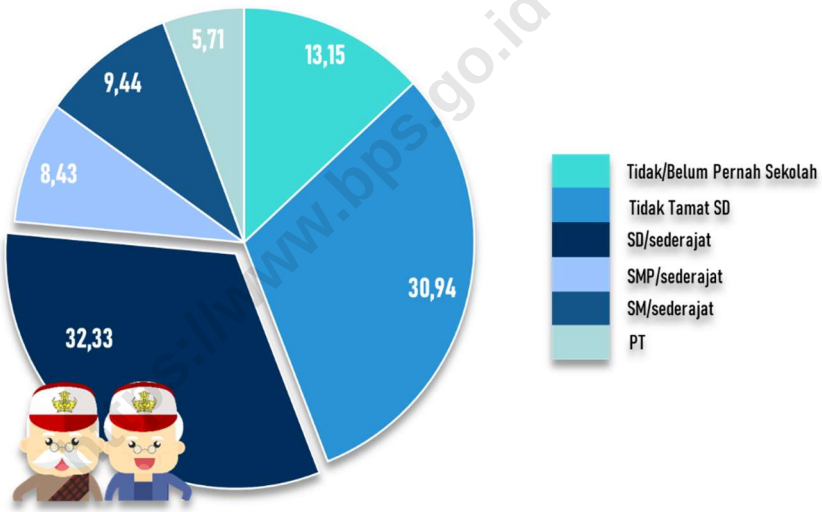

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Terdapat pola keterkaitan karakteristik demografi dan ekonomi terhadap tingkat pendidikan lansia. Menurut tipe daerah, lansia yang tinggal di perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik daripada mereka yang tinggal di perdesaan. Sebanyak 22,97 persen lansia di perkotaan berpendidikan SM/sederajat ke atas, lebih besar daripada persentase lansia yang tamat SM/sederajat ke atas di perdesaan (6,08 persen). Akses pendidikan di wilayah perdesaan yang masih sangat minim dapat menjadi salah satu penyebabnya.

Kesenjangan tingkat pendidikan antara lansia laki-laki dan perempuan juga terlihat cukup lebar. Adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sejak usia muda menyebabkan pada saat memasuki usia lansia pun kesenjangan tersebut

masih cukup tinggi (Permeneg PP&PA, 2010). Hal ini terlihat dari persentase lansia perempuan yang tidak pernah sekolah lebih besar dibandingkan persentase lansia laki-laki yang tidak pernah sekolah (18,20 persen berbanding 7,60 persen).

Gambar 4.5 Tingkat Pendidikan Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Pengeluaran (persen), 2021

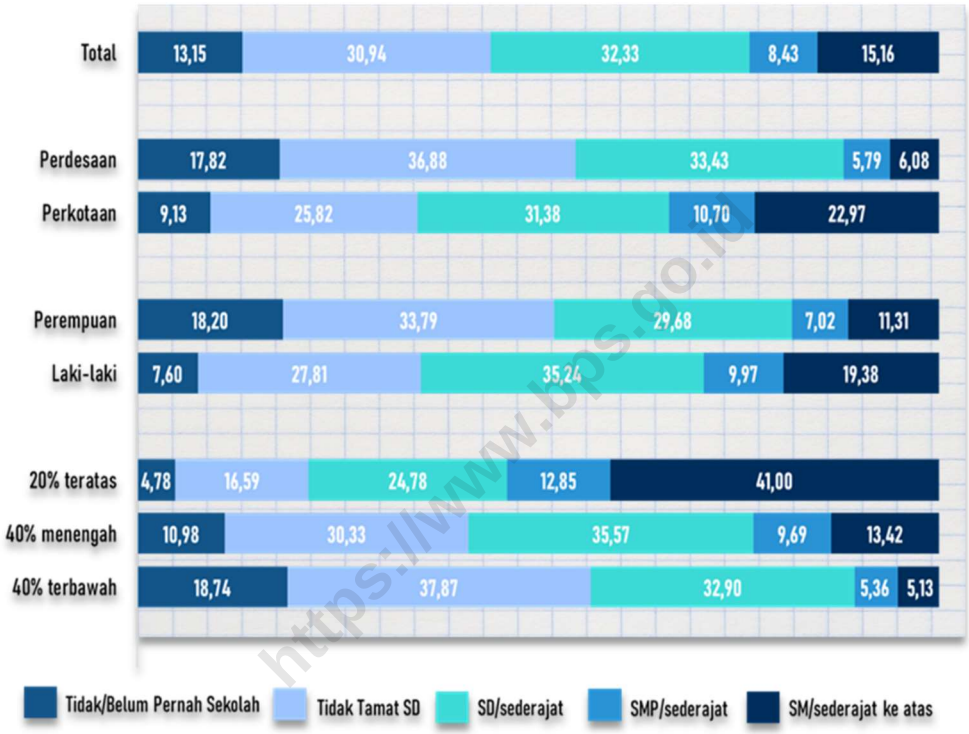

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Begitu pula kesenjangan tingkat pendidikan menurut kelompok pengeluaran. Perbedaan kemampuan orang tua dan kondisi sosial dan ekonomi yang dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya dapat memengaruhi akses terhadap pendidikan yang layak (Nolan et al., dikutip dalam Warda et al., 2018). Terlebih lagi jika biaya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi semakin besar, dapat menyebabkan orang miskin semakin sulit mengakses pendidikan. Pada tahun 2021 terdapat sekitar 41,00 persen lansia pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas tamat SM/sederajat ke atas. Sebaliknya, hanya 5,13 persen lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen yang menamatkan pendidikan SM/sederajat ke atas.

Rendahnya tingkat pendidikan lansia sejalan dengan rendahnya rata-rata lama sekolah lansia. Secara umum, rata-rata lansia bersekolah selama 5,14 tahun atau setara dengan belum tamat SD/sederajat. Angka tersebut lebih rendah daripada rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas secara nasional yang sebesar 8,97 tahun (BPS, 2021). Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah lansia mengalami peningkatan dari 4,65 tahun pada tahun 2017 menjadi 5,14 tahun pada tahun 2021.

Gambar 4.6 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Lansia (tahun), 2017-2021

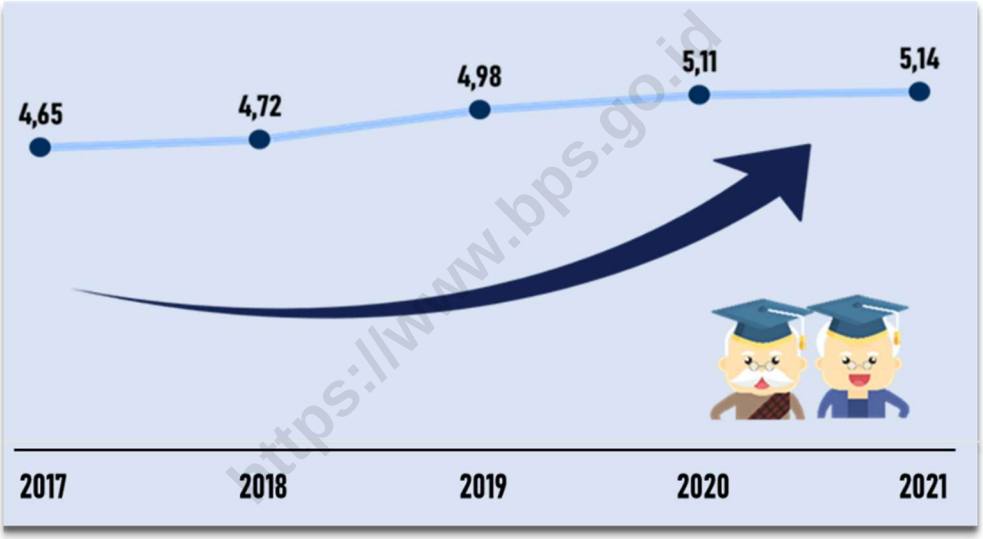

https://www.bps.go.id

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Ketimpangan angka rata-rata lama sekolah lansia terlihat nyata di perkotaan dan perdesaan, di mana rata-rata lama sekolah lansia di perkotaan (6,24 tahun) lebih besar dibandingkan di perdesaan (3,86 tahun). Dilihat menurut jenis kelamin, lansia laki-laki bersekolah dua tahun lebih lama dibandingkan lansia perempuan, yaitu dengan nilai rata-rata lama sekolah 6,03 tahun berbanding 4,32 tahun. Menurut kelompok umur, semakin bertambah umur lansia maka semakin kecil rata-rata lama sekolahnya.

Perbedaan kondisi ekonomi juga mempengaruhi tingkat pendidikan. Lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah hanya dapat mencapai pendidikan setara dengan kelas 3 SD/sederajat. Sebaliknya, lansia pada rumah

tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas dapat mencapai pendidikan hingga setara dengan kelas 8 jenjang SMP/sederajat.

Gambar 4.7 Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Kelompok Pengeluaran (tahun), 2021

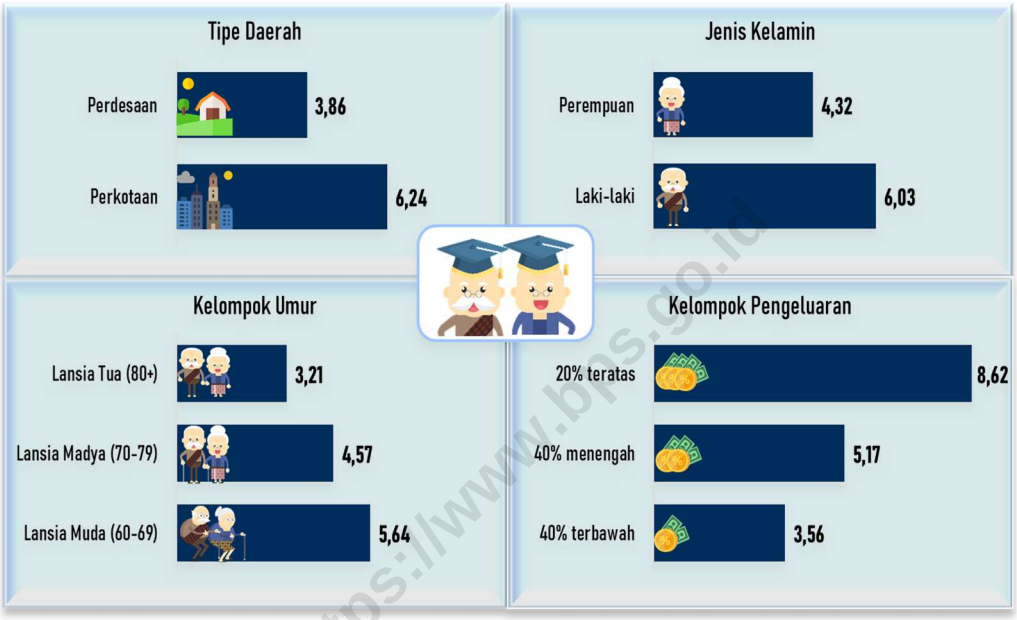

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Lansia juga dihadapkan pada kesenjangan pencapaian pendidikan berdasarkan wilayah. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi, Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata lama sekolah lansia tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 9,38 tahun atau setara dengan tamat jenjang SMP/sederajat. Nilai rata-rata lama sekolah yang paling rendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 2,99 tahun atau hampir setara dengan kelas 3 SD/sederajat. Sementara itu, beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Bali seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali yang secara umum dianggap lebih maju, ternyata memiliki nilai rata-rata lama sekolah lansia yang di bawah angka nasional.

Gambar 4.8 Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi (tahun), 2021

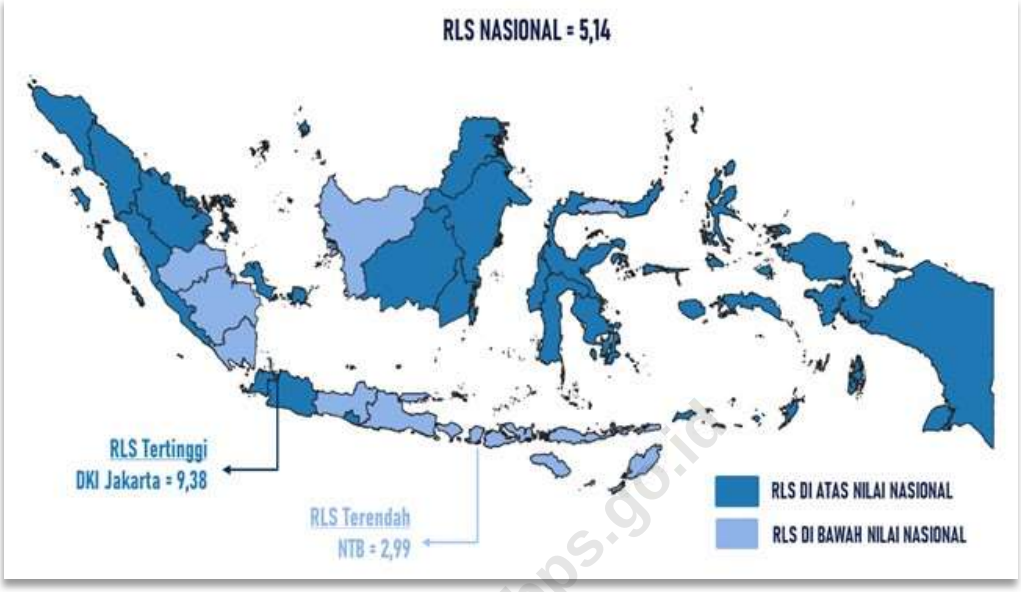

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

4.3. Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Akses teknologi informasi dan komunikasi bagi lansia dapat memudahkan mereka untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga dan memberikan kesempatan untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pola interaksi dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya tuntutan untuk menjaga jarak sosial, keterbatasan dalam mobilitas penduduk dan pertemuan tatap muka, menyebabkan semakin dominannya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai platform dan jaringan internet. Hal ini juga berimplikasi pada aktivitas lansia yang beradaptasi dengan perubahan pola interaksi tersebut (Salsabilla & Zainuddin, 2021).

Data Susenas Maret memperlihatkan bahwa akses internet oleh lansia mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, sebesar 14,10 persen lansia pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Angka tersebut meningkat secara nyata dari tahun 2017, di mana hanya sebesar 2,98 persen lansia yang mengakses internet. Kepemilikan telepon seluler oleh lansia relatif stabil dalam lima tahun terakhir, di mana tidak pernah lebih dari separuh

lansia yang memiliki telepon seluler. Padahal, telepon seluler merupakan alat komunikasi yang relatif paling mudah digunakan oleh lansia untuk berhubungan dengan keluarga dan kerabatnya. Dalam lima tahun terakhir, persentase lansia yang menggunakan komputer sedikit mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin mudahnya akses telepon seluler dan internet, sehingga lansia tidak lagi membutuhkan komputer.

Gambar 4.9 Perkembangan Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Fasilitas, 2017-2021

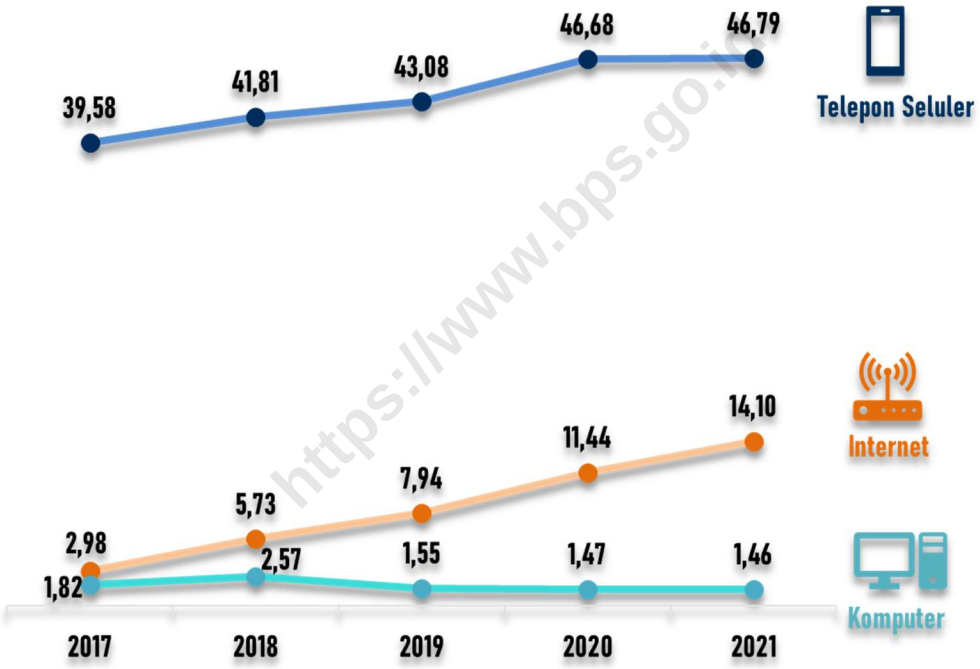

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Rendahnya akses lansia dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat disebabkan oleh beberapa hambatan yang dialami lansia. Hambatan pertama yaitu hambatan intrapersonal, yang ditandai dengan perasaan tidak percaya diri dan takut melakukan kesalahan, sehingga lansia menjadi kurang berminat untuk mempelajari teknologi. Hambatan kedua adalah hambatan struktural, yaitu kesulitan ekonomi lansia untuk mengakses paket data internet, ataupun kurang memadainya sinyal dari penyedia jasa internet di daerah tempat tinggalnya. Ketiga adalah hambatan fungsional, yang dicirikan dengan

menurunnya kondisi kesehatan dari lansia itu sendiri. Penyakit yang timbul dari kondisi lansia yang semakin tua dapat menjadi suatu hambatan dalam menggunakan teknologi dan media sosial, misalnya lansia merasa lelah untuk mengetik, tangan merasa pegal, dan matanya tidak bisa terlalu lama menatap layar (Ashari, 2018).

Gambar 4.10 Persentase Lansia yang Memiliki/Menguasai dan Menggunakan Telepon Seluler, 2021

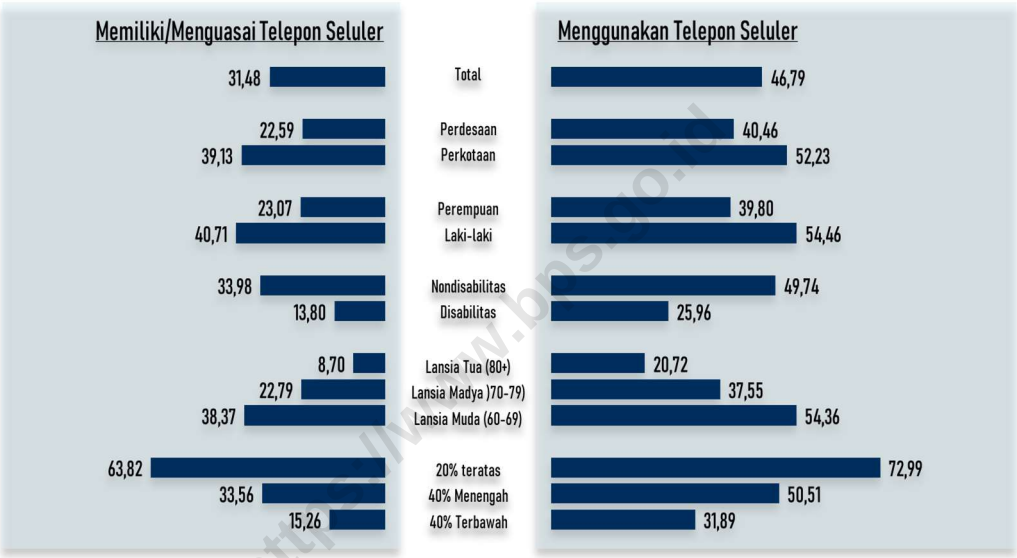

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa sekitar 31,48 persen lansia memiliki telepon seluler dan 46,79 persen lansia menggunakan telepon seluler untuk sarana komunikasi. Menurut jenis kelamin, lansia laki-laki cenderung lebih memiliki akses pada teknologi Informasi dan komunikasi, di mana 40,71 persennya memiliki telepon seluler dan lebih dari separuh lansia laki-laki menggunakan telepon seluler (54,46 persen), sementara lansia perempuan hanya sekitar 23,07 persen yang memiliki telepon seluler dan 39,80 persen yang menggunakan telepon seluler. Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan komputer dan akses internet.

Dalam hal akses internet, persentase lansia perkotaan yang mengakses internet jauh lebih besar daripada lansia di perdesaan, yaitu 22,04 persen berbanding 4,88 persen. Menurut kondisi ekonomi rumah tangga, semakin tinggi

kelompok pengeluaran rumah tangga maka semakin besar pula persentase lansia yang menggunakan telepon seluler, komputer, maupun mengakses internet. Dilihat dari status disabilitas, lansia penyandang disabilitas lebih rentan untuk tidak terpapar teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar 4.11 Persentase Lansia yang Memiliki Akses Komputer dan Internet Menurut Tipe Derah, Jenis Kelamin, Status Disabilitas, dan Kelompok Pengeluaran, 2021

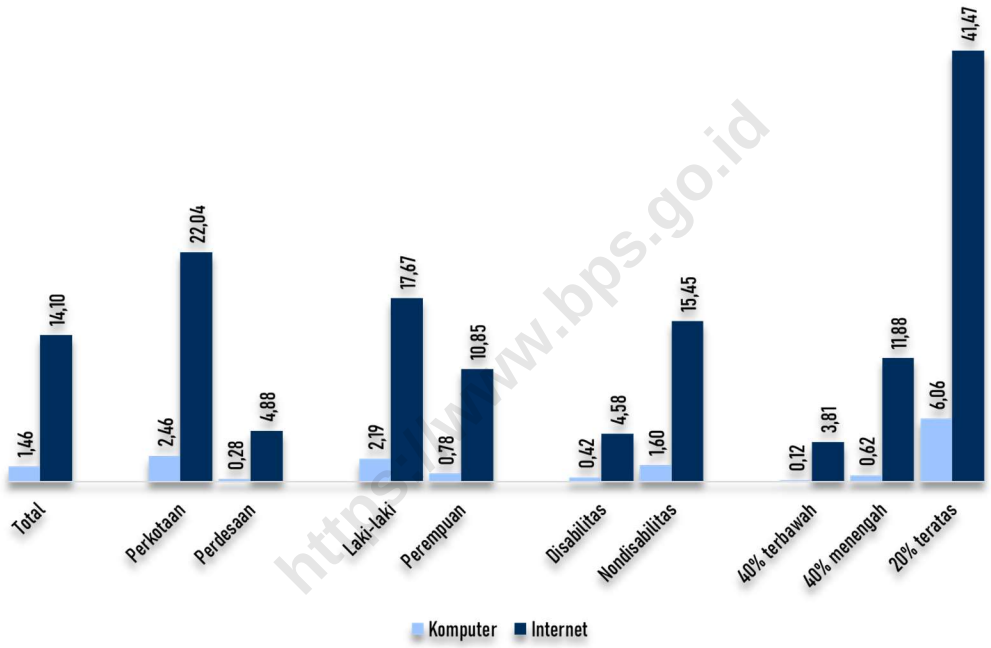

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Meskipun mengalami berbagai hambatan dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi, upaya lansia dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi sebuah modal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan mereka. Salah satu kebutuhan sosial lansia yang dapat terpenuhi melalui teknologi adalah kemudahan untuk berinteraksi dengan keluarga serta kemudahan untuk mengakses fasilitas dan layanan dasar seperti kesehatan dan konsumsi makanan.

Tabel 4.1 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Lanjut Usia Menurut Tipe Daerah (persen), 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	92,73	83,40	88,49
Perempuan	83,14	66,98	75,55
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	91,49	79,79	86,15
Lansia Madya (70-79 Tahun)	84,28	69,66	77,47
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	70,24	55,23	62,77
Kelompok Ekonomi			
20 Persen Teratas	96,16	85,76	93,78
40 Persen Menengah	89,64	79,73	84,90
40 Persen Terbawah	79,47	68,84	73,59
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	77,63	62,76	70,28
Non Disabilitas	89,12	76,49	83,34
Indonesia	**87,78**	**74,67**	**81,72**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.2 Persentase Lansia menurut Tingkat Pendidikan, 2021

Karakteristik	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tipe Daerah							
Perkotaan	9,13	25,82	31,38	10,70	14,56	8,41	100,00
Perdesaan	17,82	36,88	33,43	5,79	3,50	2,59	100,00
Jenis Kelamin							
Laki-laki	7,60	27,81	35,24	9,97	12,28	7,10	100,00
Perempuan	18,20	33,79	29,68	7,02	6,86	4,45	100,00
Kelompok Umur							
Lansia Muda	9,71	29,16	34,48	9,43	10,79	6,44	100,00
Lansia Madya	16,15	33,53	30,19	7,36	7,96	4,82	100,00
Lansia Tua	28,76	35,75	23,43	4,46	4,35	3,24	100,00
Kelompok Ekonomi							
20 Persen Teratas	4,78	16,59	24,78	12,85	23,07	17,92	100,00
40 Persen Menengah	10,98	30,33	35,57	9,69	9,37	4,06	100,00
40 Persen Terbawah	18,74	37,87	32,90	5,36	3,43	1,70	100,00
Status Disabilitas							
Disabilitas	21,96	34,51	26,80	6,31	6,36	4,06	100,00
Non Disabilitas	11,90	30,43	33,11	8,72	9,88	5,95	100,00
Indonesia	**13,15**	**30,94**	**32,33**	**8,43**	**9,44**	**5,71**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lanjut Usia Menurut Tipe Daerah (tahun), 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	7,13	4,72	6,03
Perempuan	5,40	3,10	4,32
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	6,80	4,27	5,64
Lansia Madya (70-79 Tahun)	5,61	3,39	4,57
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	3,89	2,51	3,21
Kelompok Ekonomi			
20 Persen Teratas	9,53	5,55	8,62
40 Persen Menengah	6,00	4,25	5,17
40 Persen Terbawah	3,94	3,25	3,56
	6,24	3,86	
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	4,85	3,07	3,97
Non Disabilitas	6,42	3,98	5,30
Indonesia	**6,24**	**3,86**	**5,14**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Fasilitas, 2021

Karakteristik	Jenis Fasilitas			
	Telepon Seluler		Komputer/ Laptop	Akses Internet
	Memiliki	Menggunakan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tipe Daerah				
Perkotaan	52,23	39,13	2,46	22,04
Perdesaan	40,46	22,59	0,28	4,88
Jenis Kelamin				
Laki-laki	54,46	40,71	2,19	17,67
Perempuan	39,80	23,07	0,78	10,85
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60-69 Tahun)	54,36	38,37	1,93	17,85
Lansia Madya (70-79 Tahun)	37,55	22,79	0,76	9,02
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	20,72	8,70	0,22	2,81
Kelompok Ekonomi				
20 Persen Teratas	72,99	63,82	6,06	41,47
40 Persen Menengah	50,51	33,56	0,62	11,88
40 Persen Terbawah	31,89	15,26	0,12	3,81
Status Disabilitas				
Penyandang Disabilitas	25,96	13,80	0,42	4,58
Non Disabilitas	49,74	33,98	1,60	15,45
Indonesia	**31,48**	**46,79**	**1,46**	**14,10**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.5.1 Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2021

Perkotaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
11 Aceh	97,33	94,13	95,65
12 Sumatera Utara	98,85	95,93	97,31
13 Sumatera Barat	98,70	96,02	97,28
14 Riau	96,92	93,50	95,27
15 Jambi	95,57	90,15	92,87
16 Sumatera Selatan	98,79	95,91	97,29
17 Bengkulu	96,95	87,85	92,51
18 Lampung	96,04	86,53	91,35
19 Kep. Bangka Bellitung	96,39	88,45	92,62
21 Kepulauan Riau	94,89	89,41	92,22
31 DKI Jakarta	98,52	97,88	98,18
32 Jawa Barat	95,59	87,31	91,40
33 Jawa Tengah	86,90	73,38	79,79
34 DI Yogyakarta	89,98	78,09	83,58
35 Jawa Timur	89,69	76,55	82,78
36 Banten	94,35	81,35	87,98
51 Bali	90,59	73,15	81,56
52 Nusa Tenggara Barat	67,53	46,82	56,37
53 Nusa Tenggara Timur	91,23	86,54	88,77
61 Kalimantan Barat	89,48	70,54	79,91
62 Kalimantan Tengah	96,35	92,05	94,40
63 Kalimantan Selatan	97,57	91,95	94,71
64 Kalimantan Timur	95,63	92,42	94,11
65 Kalimantan Utara	86,58	87,11	86,81
71 Sulawesi Utara	99,68	99,89	99,79
72 Sulawesi Tengah	99,78	94,90	97,29
73 Sulawesi Selatan	88,31	83,32	85,58
74 Sulawesi Tenggara	87,03	71,85	79,33
75 Gorontalo	99,00	97,09	97,97
76 Sulawesi Barat	88,70	76,47	82,08
81 Maluku	98,62	98,31	98,45
82 Maluku Utara	99,73	94,32	96,93
91 Papua Barat	98,20	95,95	97,13
94 Papua	96,24	92,77	94,67
Indonesia	**92,73**	**83,14**	**87,78**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.5.2 Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2021

Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
11 Aceh	91,43	76,77	83,57
12 Sumatera Utara	95,87	91,16	93,26
13 Sumatera Barat	96,52	92,94	94,58
14 Riau	93,28	86,16	89,79
15 Jambi	88,21	77,93	83,08
16 Sumatera Selatan	94,71	85,39	89,92
17 Bengkulu	90,20	71,64	81,08
18 Lampung	88,39	71,46	80,11
19 Kep. Bangka Bellitung	96,38	77,39	86,90
21 Kepulauan Riau	87,07	83,89	85,44
31 DKI Jakarta	-	-	-
32 Jawa Barat	93,18	82,69	87,61
33 Jawa Tengah	80,49	58,36	68,53
34 DI Yogyakarta	82,24	56,64	68,04
35 Jawa Timur	72,83	51,77	61,29
36 Banten	87,30	76,54	81,74
51 Bali	77,52	53,77	64,58
52 Nusa Tenggara Barat	64,58	38,33	49,98
53 Nusa Tenggara Timur	79,82	67,72	73,34
61 Kalimantan Barat	75,36	52,61	63,95
62 Kalimantan Tengah	93,02	86,73	90,06
63 Kalimantan Selatan	91,96	76,42	83,72
64 Kalimantan Timur	93,56	78,10	86,29
65 Kalimantan Utara	80,81	59,20	70,84
71 Sulawesi Utara	99,48	99,01	99,24
72 Sulawesi Tengah	91,64	81,16	86,36
73 Sulawesi Selatan	70,27	57,66	63,21
74 Sulawesi Tenggara	83,39	63,04	72,63
75 Gorontalo	92,62	90,91	91,72
76 Sulawesi Barat	80,36	57,80	68,33
81 Maluku	98,39	98,23	98,31
82 Maluku Utara	94,59	80,95	87,82
91 Papua Barat	87,99	77,03	82,93
94 Papua	65,65	61,84	64,03
Indonesia	**83,40**	**66,98**	**74,67**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.5.3 Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2021

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
11 Aceh	93,27	82,00	87,26
12 Sumatera Utara	97,53	93,69	95,46
13 Sumatera Barat	97,56	94,36	95,84
14 Riau	94,69	88,95	91,90
15 Jambi	90,58	81,84	86,23
16 Sumatera Selatan	96,16	89,18	92,56
17 Bengkulu	92,15	76,27	84,37
18 Lampung	90,61	75,87	83,39
19 Kep. Bangka Bellitung	96,38	83,82	90,29
21 Kepulauan Riau	93,84	88,59	91,26
31 DKI Jakarta	98,52	97,88	98,18
32 Jawa Barat	94,95	85,99	90,35
33 Jawa Tengah	83,70	65,66	74,08
34 DI Yogyakarta	87,39	70,61	78,26
35 Jawa Timur	81,65	64,19	72,28
36 Banten	92,00	79,64	85,83
51 Bali	86,14	66,07	75,56
52 Nusa Tenggara Barat	66,06	42,45	53,13
53 Nusa Tenggara Timur	82,37	71,78	76,72
61 Kalimantan Barat	80,60	59,33	69,90
62 Kalimantan Tengah	94,37	88,81	91,80
63 Kalimantan Selatan	94,62	83,46	88,80
64 Kalimantan Timur	94,95	87,75	91,55
65 Kalimantan Utara	84,17	75,08	80,05
71 Sulawesi Utara	99,58	99,46	99,52
72 Sulawesi Tengah	93,96	85,17	89,52
73 Sulawesi Selatan	77,61	67,78	72,16
74 Sulawesi Tenggara	84,58	65,75	74,76
75 Gorontalo	95,45	93,75	94,54
76 Sulawesi Barat	82,14	61,89	71,31
81 Maluku	98,48	98,26	98,37
82 Maluku Utara	95,94	84,68	90,28
91 Papua Barat	92,36	85,35	89,08
94 Papua	78,28	75,32	76,99
Indonesia	**88,49**	**75,55**	**81,72**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.6.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2021

Perkotaan

Provinsi	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	2,50	20,40	40,02	16,07	14,88	6,12	100,00
12 Sumatera Utara	1,85	17,11	32,58	17,63	22,74	8,09	100,00
13 Sumatera Barat	2,60	27,75	23,39	15,93	19,30	11,03	100,00
14 Riau	4,95	19,28	31,79	12,31	19,71	11,97	100,00
15 Jambi	4,70	27,93	29,45	7,42	19,80	10,71	100,00
16 Sumatera Selatan	2,68	18,89	35,92	10,85	21,26	10,40	100,00
17 Bengkulu	3,18	23,46	26,34	12,22	21,69	13,11	100,00
18 Lampung	3,28	38,68	26,00	8,90	15,34	7,80	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	4,12	27,27	36,25	13,50	16,90	1,96	100,00
21 Kepulauan Riau	11,23	25,13	30,85	13,54	13,45	5,80	100,00
31 DKI Jakarta	2,10	9,78	27,62	17,81	27,32	15,37	100,00
32 Jawa Barat	7,04	26,15	38,56	8,23	13,04	6,98	100,00
33 Jawa Tengah	13,21	32,24	27,69	9,11	11,47	6,27	100,00
34 DI Yogyakarta	12,44	27,94	24,58	12,24	14,48	8,32	100,00
35 Jawa Timur	13,41	29,58	30,79	9,40	9,07	7,75	100,00
36 Banten	9,33	25,26	31,18	10,56	15,01	8,66	100,00
51 Bali	16,56	24,42	33,05	8,31	8,85	8,81	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	27,98	30,71	19,12	4,98	9,27	7,93	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	3,62	26,18	26,02	10,94	21,12	12,12	100,00
61 Kalimantan Barat	18,87	24,47	20,53	13,11	16,95	6,06	100,00
62 Kalimantan Tengah	3,39	15,86	30,04	13,19	17,40	20,11	100,00
63 Kalimantan Selatan	3,21	25,13	30,07	13,29	18,43	9,87	100,00
64 Kalimantan Timur	3,06	24,45	34,31	14,44	18,79	4,94	100,00
65 Kalimantan Utara	2,19	24,22	28,85	19,79	17,47	7,48	100,00
71 Sulawesi Utara	0,42	22,85	24,16	16,71	25,44	10,42	100,00
72 Sulawesi Tengah	4,54	10,20	32,64	12,12	25,48	15,01	100,00
73 Sulawesi Selatan	7,09	23,23	26,79	11,14	18,23	13,51	100,00
74 Sulawesi Tenggara	5,55	21,85	22,99	8,10	20,12	21,39	100,00
75 Gorontalo	24,50	30,08	28,04	8,78	5,07	3,53	100,00
76 Sulawesi Barat	9,65	29,67	25,62	6,16	13,25	15,65	100,00
81 Maluku	1,98	8,96	33,25	18,09	28,05	9,67	100,00
82 Maluku Utara	4,24	17,62	29,81	13,77	21,79	12,77	100,00
91 Papua Barat	1,71	10,93	25,29	19,17	32,30	10,61	100,00
94 Papua	20,54	10,16	27,72	16,51	16,92	8,16	100,00
Indonesia	**9,13**	**25,82**	**31,38**	**10,70**	**14,56**	**8,41**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.6.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2021

Perdesaan

Provinsi	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	5,85	32,46	42,79	10,36	4,88	3,66	100,00
12 Sumatera Utara	6,30	34,14	35,76	13,00	7,84	2,95	100,00
13 Sumatera Barat	4,00	42,65	27,99	12,75	8,47	4,14	100,00
14 Riau	9,85	40,07	33,90	10,27	3,56	2,34	100,00
15 Jambi	12,49	37,90	32,33	8,50	6,72	2,06	100,00
16 Sumatera Selatan	8,88	43,54	37,74	5,82	3,03	0,99	100,00
17 Bengkulu	13,24	42,61	28,11	6,22	5,64	4,19	100,00
18 Lampung	9,66	48,19	32,49	5,63	2,54	1,49	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	12,41	44,42	32,15	5,31	2,72	2,99	100,00
21 Kepulauan Riau	13,49	47,28	25,58	3,12	1,65	8,90	100,00
31 DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
32 Jawa Barat	9,84	32,28	50,85	2,65	1,68	2,70	100,00
33 Jawa Tengah	20,65	38,98	30,09	5,02	2,84	2,41	100,00
34 DI Yogyakarta	23,56	29,43	31,75	6,57	3,35	5,35	100,00
35 Jawa Timur	28,29	35,47	28,66	4,24	1,88	1,46	100,00
36 Banten	16,01	40,84	37,13	3,33	1,24	1,45	100,00
51 Bali	28,78	28,36	32,14	4,53	3,59	2,60	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	40,43	35,46	17,76	2,73	2,39	1,23	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	18,52	38,19	32,87	3,32	4,74	2,36	100,00
61 Kalimantan Barat	26,40	37,08	24,87	6,60	2,77	2,29	100,00
62 Kalimantan Tengah	5,84	33,75	43,67	8,41	4,72	3,62	100,00
63 Kalimantan Selatan	0,02	49,09	30,38	5,32	3,76	11,42	100,00
64 Kalimantan Timur	6,37	40,50	35,14	6,85	6,19	4,95	100,00
65 Kalimantan Utara	9,22	37,13	31,27	11,14	7,78	3,45	100,00
71 Sulawesi Utara	1,16	33,52	35,81	13,80	12,01	3,70	100,00
72 Sulawesi Tengah	9,76	24,53	41,01	10,36	6,78	7,56	100,00
73 Sulawesi Selatan	23,61	34,91	26,89	5,42	5,77	3,40	100,00
74 Sulawesi Tenggara	22,93	32,89	35,54	6,64	0,80	1,21	100,00
75 Gorontalo	0,55	55,20	28,88	5,65	5,36	4,36	100,00
76 Sulawesi Barat	17,76	28,29	33,97	6,06	7,75	6,17	100,00
81 Maluku	4,83	28,19	49,46	9,89	6,52	1,11	100,00
82 Maluku Utara	6,52	36,66	38,26	9,57	6,62	2,36	100,00
91 Papua Barat	18,73	33,99	31,65	6,61	6,32	2,70	100,00
94 Papua	35,94	15,52	30,57	8,86	6,06	3,05	100,00
Indonesia	**17,82**	**36,88**	**33,43**	**5,79**	**3,50**	**2,59**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.6.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2021

Laki-Laki

Provinsi	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	2,19	25,08	40,59	16,43	11,12	4,59	100,00
12 Sumatera Utara	2,21	19,52	33,65	18,74	20,07	5,80	100,00
13 Sumatera Barat	1,99	32,35	26,56	14,13	16,93	8,03	100,00
14 Riau	4,67	30,25	33,70	11,77	12,73	6,88	100,00
15 Jambi	5,50	29,97	34,30	9,88	14,76	5,59	100,00
16 Sumatera Selatan	3,51	30,06	38,96	9,01	13,75	4,71	100,00
17 Bengkulu	4,96	32,71	31,32	10,78	13,21	7,02	100,00
18 Lampung	4,25	40,53	35,49	7,79	8,03	3,92	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	4,34	29,33	35,92	11,77	16,34	2,29	100,00
21 Kepulauan Riau	10,39	26,27	27,92	13,31	16,74	5,36	100,00
31 DKI Jakarta	1,09	7,01	23,63	18,20	30,56	19,51	100,00
32 Jawa Barat	4,20	24,78	43,20	8,08	12,50	7,25	100,00
33 Jawa Tengah	9,73	32,79	34,05	8,55	9,41	5,48	100,00
34 DI Yogyakarta	8,64	26,54	30,84	12,13	13,76	8,09	100,00
35 Jawa Timur	13,31	30,11	34,72	8,38	7,26	6,24	100,00
36 Banten	5,70	26,10	35,78	10,71	13,21	8,50	100,00
51 Bali	10,87	23,32	36,48	8,72	10,83	9,78	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	21,39	33,07	24,43	5,44	8,40	7,26	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	5,38	33,71	33,98	7,68	12,49	6,77	100,00
61 Kalimantan Barat	12,29	34,34	27,66	9,97	10,92	4,82	100,00
62 Kalimantan Tengah	1,54	19,67	40,90	11,89	11,68	14,31	100,00
63 Kalimantan Selatan	1,06	30,24	33,36	11,75	15,11	8,48	100,00
64 Kalimantan Timur	1,11	22,25	35,09	11,49	21,37	8,68	100,00
65 Kalimantan Utara	2,08	24,79	29,76	16,93	19,22	7,23	100,00
71 Sulawesi Utara	0,08	26,22	30,36	14,91	20,80	7,62	100,00
72 Sulawesi Tengah	0,18	14,26	44,98	12,59	17,22	10,77	100,00
73 Sulawesi Selatan	10,71	28,04	28,15	8,59	14,91	9,60	100,00
74 Sulawesi Tenggara	9,87	26,37	38,01	8,18	9,32	8,26	100,00
75 Gorontalo	10,70	46,11	24,92	9,77	6,23	2,28	100,00
76 Sulawesi Barat	8,30	25,21	38,65	5,14	13,24	9,46	100,00
81 Maluku	1,91	17,29	42,95	15,13	17,41	5,32	100,00
82 Maluku Utara	1,55	26,81	36,05	12,82	16,43	6,34	100,00
91 Papua Barat	8,55	20,89	27,28	12,61	22,35	8,30	100,00
94 Papua	27,17	11,97	27,28	12,70	14,21	6,67	100,00
Indonesia	**7,60**	**27,81**	**35,24**	**9,97**	**12,28**	**7,10**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.6.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2021

Perempuan

Provinsi	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	7,13	32,01	43,13	8,32	5,15	4,25	100,00
12 Sumatera Utara	5,32	29,51	34,36	12,75	12,38	5,68	100,00
13 Sumatera Barat	4,52	38,58	25,22	14,32	10,59	6,77	100,00
14 Riau	11,43	34,01	32,45	10,30	6,66	5,15	100,00
15 Jambi	14,51	39,47	28,48	6,42	7,05	4,07	100,00
16 Sumatera Selatan	9,61	39,08	35,33	6,32	5,62	4,03	100,00
17 Bengkulu	15,95	41,70	23,74	4,99	7,16	6,46	100,00
18 Lampung	11,50	50,51	25,51	5,32	4,44	2,72	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	10,84	39,48	33,16	8,46	5,59	2,47	100,00
21 Kepulauan Riau	12,74	30,30	32,37	10,78	6,66	7,14	100,00
31 DKI Jakarta	3,03	12,34	31,29	17,45	24,33	11,55	100,00
32 Jawa Barat	11,24	30,74	40,76	5,37	7,45	4,43	100,00
33 Jawa Tengah	23,34	38,17	24,41	5,72	5,06	3,30	100,00
34 DI Yogyakarta	22,60	30,05	23,84	8,77	8,09	6,65	100,00
35 Jawa Timur	27,05	34,49	25,46	5,58	4,09	3,32	100,00
36 Banten	17,58	35,15	30,67	5,43	7,32	3,85	100,00
51 Bali	29,85	28,04	29,37	5,41	3,56	3,78	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	44,96	33,16	13,47	2,52	3,62	2,28	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	23,89	37,18	29,09	2,63	4,70	2,51	100,00
61 Kalimantan Barat	34,76	30,44	18,89	8,09	5,22	2,59	100,00
62 Kalimantan Tengah	8,71	34,64	35,12	8,50	7,57	5,45	100,00
63 Kalimantan Selatan	1,89	45,13	27,37	6,49	6,36	12,76	100,00
64 Kalimantan Timur	7,54	38,04	34,01	12,47	7,17	0,77	100,00
65 Kalimantan Utara	8,89	35,60	30,02	15,16	6,32	4,01	100,00
71 Sulawesi Utara	1,44	29,83	29,43	15,62	17,02	6,65	100,00
72 Sulawesi Tengah	16,15	26,39	32,34	9,18	7,24	8,69	100,00
73 Sulawesi Selatan	22,05	32,00	25,80	7,01	7,42	5,71	100,00
74 Sulawesi Tenggara	24,35	32,15	25,67	6,11	4,72	7,00	100,00
75 Gorontalo	11,97	41,86	31,61	4,72	4,36	5,47	100,00
76 Sulawesi Barat	22,69	31,52	26,53	6,90	5,21	7,15	100,00
81 Maluku	5,32	23,10	42,62	11,50	13,47	3,99	100,00
82 Maluku Utara	10,22	36,17	35,89	8,62	5,08	4,03	100,00
91 Papua Barat	14,55	27,53	30,72	11,42	12,13	3,64	100,00
94 Papua	32,34	14,91	32,05	11,31	6,06	3,33	100,00
Indonesia	**18,20**	**33,79**	**29,68**	**7,02**	**6,86**	**4,45**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.6.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2021

Total

Provinsi	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	4,82	28,77	41,95	12,11	7,94	4,41	100,00
12 Sumatera Utara	3,89	24,91	34,03	15,51	15,92	5,74	100,00
13 Sumatera Barat	3,35	35,70	25,84	14,23	13,52	7,36	100,00
14 Riau	7,97	32,08	33,09	11,05	9,77	6,04	100,00
15 Jambi	9,99	34,70	31,40	8,15	10,92	4,84	100,00
16 Sumatera Selatan	6,66	34,71	37,09	7,62	9,56	4,36	100,00
17 Bengkulu	10,35	37,11	27,60	7,94	10,25	6,75	100,00
18 Lampung	7,80	45,42	30,60	6,58	6,27	3,33	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	7,49	34,25	34,58	10,17	11,13	2,38	100,00
21 Kepulauan Riau	11,54	28,25	30,11	12,07	11,79	6,24	100,00
31 DKI Jakarta	2,10	9,78	27,62	17,81	27,32	15,37	100,00
32 Jawa Barat	7,81	27,84	41,95	6,69	9,91	5,80	100,00
33 Jawa Tengah	16,98	35,66	28,91	7,04	7,09	4,31	100,00
34 DI Yogyakarta	16,24	28,45	27,03	10,30	10,67	7,31	100,00
35 Jawa Timur	20,68	32,46	29,75	6,88	5,56	4,67	100,00
36 Banten	11,63	30,62	33,23	8,07	10,27	6,18	100,00
51 Bali	20,88	25,81	32,73	6,98	6,99	6,61	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	34,30	33,12	18,43	3,84	5,78	4,53	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	15,25	35,56	31,37	4,99	8,33	4,50	100,00
61 Kalimantan Barat	23,59	32,38	23,25	9,03	8,06	3,70	100,00
62 Kalimantan Tengah	4,86	26,60	38,23	10,32	9,78	10,21	100,00
63 Kalimantan Selatan	1,49	38,00	30,24	9,01	10,55	10,71	100,00
64 Kalimantan Timur	4,15	29,71	34,58	11,95	14,66	4,94	100,00
65 Kalimantan Utara	5,17	29,69	29,88	16,13	13,37	5,77	100,00
71 Sulawesi Utara	0,78	28,09	29,88	15,28	18,84	7,12	100,00
72 Sulawesi Tengah	8,25	20,39	38,59	10,87	12,18	9,72	100,00
73 Sulawesi Selatan	17,00	30,24	26,85	7,71	10,76	7,44	100,00
74 Sulawesi Tenggara	17,42	29,39	31,57	7,10	6,92	7,60	100,00
75 Gorontalo	11,38	43,84	28,50	7,07	5,23	3,99	100,00
76 Sulawesi Barat	16,00	28,59	32,16	6,08	8,94	8,22	100,00
81 Maluku	3,66	20,27	42,78	13,27	15,39	4,64	100,00
82 Maluku Utara	5,90	31,51	35,97	10,71	10,72	5,18	100,00
91 Papua Barat	11,36	24,00	28,89	12,06	17,58	6,12	100,00
94 Papua	29,43	13,25	29,36	12,09	10,65	5,21	100,00
Indonesia	**13,15**	**30,94**	**32,33**	**8,43**	**9,44**	**5,71**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.7 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin (tahun), 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	6,72	4,83	6,12	4,78	5,41
12 Sumatera Utara	7,84	5,28	7,41	6,03	6,67
13 Sumatera Barat	7,35	5,25	7,05	5,52	6,23
14 Riau	7,47	4,01	5,95	4,71	5,34
15 Jambi	6,67	4,20	5,91	4,08	5,00
16 Sumatera Selatan	7,52	3,60	5,79	4,26	5,00
17 Bengkulu	8,04	4,58	6,46	4,66	5,58
18 Lampung	5,91	3,79	5,13	3,66	4,41
19 Kep. Bangka Belitung	6,21	3,97	6,04	4,51	5,30
21 Kepulauan Riau	5,75	3,99	5,92	5,07	5,50
31 DKI Jakarta	9,38	-	10,23	8,60	9,38
32 Jawa Barat	5,86	4,25	6,14	4,73	5,42
33 Jawa Tengah	5,39	3,64	5,43	3,69	4,50
34 DI Yogyakarta	6,00	4,37	6,35	4,68	5,44
35 Jawa Timur	5,21	2,81	4,95	3,25	4,03
36 Banten	6,25	3,55	6,40	4,24	5,32
51 Bali	5,42	3,49	6,10	3,52	4,74
52 Nusa Tenggara Barat	4,03	1,97	4,36	1,85	2,99
53 Nusa Tenggara Timur	7,23	3,99	6,34	3,27	4,70
61 Kalimantan Barat	6,47	3,06	5,22	3,45	4,33
62 Kalimantan Tengah	8,86	4,89	7,80	4,94	6,47
63 Kalimantan Selatan	7,11	5,44	7,38	5,14	6,21
64 Kalimantan Timur	6,83	5,21	7,65	4,79	6,30
65 Kalimantan Utara	7,51	5,17	7,48	5,36	6,52
71 Sulawesi Utara	8,46	6,50	7,77	7,25	7,50
72 Sulawesi Tengah	8,94	6,09	8,12	5,73	6,91
73 Sulawesi Selatan	7,56	4,03	6,43	4,65	5,44
74 Sulawesi Tenggara	8,57	3,67	6,08	4,43	5,22
75 Gorontalo	4,40	5,00	4,68	4,77	4,73
76 Sulawesi Barat	7,05	5,13	6,54	4,68	5,54
81 Maluku	8,99	5,57	7,46	6,52	6,98
82 Maluku Utara	8,27	5,22	7,08	5,02	6,04
91 Papua Barat	9,19	4,51	7,37	5,59	6,54
94 Papua	6,84	4,22	5,92	4,57	5,33
Indonesia	**6,24**	**3,86**	**6,03**	**4,32**	**5,14**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.8 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2021

Provinsi	Jenis Fasilitas			
	Telepon Seluler		Komputer/ Laptop	Akses Internet
	Memiliki	Menggunakan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	33,26	48,90	1,50	7,60
12 Sumatera Utara	48,48	71,46	1,78	14,59
13 Sumatera Barat	45,74	69,31	0,88	11,88
14 Riau	50,51	65,98	0,82	11,45
15 Jambi	36,93	50,10	1,15	9,98
16 Sumatera Selatan	36,35	53,76	0,98	10,25
17 Bengkulu	36,54	50,49	NA	8,28
18 Lampung	31,22	59,52	NA	11,07
19 Kep. Bangka Bellitung	42,19	54,16	NA	13,50
21 Kepulauan Riau	63,43	72,32	NA	28,32
31 DKI Jakarta	61,53	69,52	6,49	52,42
32 Jawa Barat	30,38	41,60	2,06	16,98
33 Jawa Tengah	20,92	35,44	0,68	10,22
34 DI Yogyakarta	27,13	42,25	1,76	18,56
35 Jawa Timur	23,26	37,43	0,87	11,67
36 Banten	30,24	37,89	2,68	19,60
51 Bali	30,13	39,46	1,60	13,53
52 Nusa Tenggara Barat	25,43	57,15	NA	9,20
53 Nusa Tenggara Timur	27,86	57,95	0,74	6,24
61 Kalimantan Barat	31,84	44,58	0,49	11,93
62 Kalimantan Tengah	45,32	54,60	1,66	13,63
63 Kalimantan Selatan	42,17	56,66	1,99	15,75
64 Kalimantan Timur	57,24	68,32	2,27	20,65
65 Kalimantan Utara	59,70	72,48	0,95	21,34
71 Sulawesi Utara	45,38	60,10	1,42	12,63
72 Sulawesi Tengah	30,69	49,10	0,73	6,61
73 Sulawesi Selatan	36,66	61,12	1,39	9,74
74 Sulawesi Tenggara	42,15	64,57	0,88	7,06
75 Gorontalo	32,27	60,34	1,16	6,65
76 Sulawesi Barat	26,59	54,98	0,77	4,22
81 Maluku	38,87	56,93	2,32	10,20
82 Maluku Utara	37,73	53,24	NA	7,01
91 Papua Barat	51,47	63,44	1,78	12,71
94 Papua	43,12	48,92	2,55	14,48
Indonesia	**31,48**	**46,79**	**1,46**	**14,10**

Keterangan: NA (*Not Applicable*) berarti data tidak dapat ditampilkan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.9 Nilai *Sampling Error* Angka Melek Huruf Lansia Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	87,26	1,91	2,19	83,51	91,01	6,07	3 940
12 Sumatera Utara	95,46	0,82	0,86	93,86	97,06	8,71	7 113
13 Sumatera Barat	95,84	0,70	0,73	94,46	97,22	2,85	4 978
14 Riau	91,90	1,25	1,36	89,44	94,35	4,02	2 065
15 Jambi	86,23	1,42	1,65	83,44	89,01	2,47	2 126
16 Sumatera Selatan	92,56	1,62	1,76	89,37	95,75	12,58	3 620
17 Bengkulu	84,37	1,80	2,13	80,84	87,89	1,98	1 826
18 Lampung	83,39	1,39	1,66	80,66	86,11	5,11	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	90,29	1,68	1,86	87,00	93,58	1,81	1 193
21 Kepulauan Riau	91,26	1,82	2,00	87,69	94,84	2,28	1 170
31 DKI Jakarta	98,18	0,52	0,53	97,17	99,20	6,15	1794
32 Jawa Barat	90,35	1,83	2,03	86,75	93,95	82,28	9 183
33 Jawa Tengah	74,08	1,21	1,64	71,70	76,46	15,92	14 432
34 DI Yogyakarta	78,26	4,75	6,07	68,94	87,58	34,11	2 258
35 Jawa Timur	72,28	2,00	2,77	68,35	76,21	48,95	15 797
36 Banten	85,83	1,12	1,31	83,63	88,03	4,78	2 023
51 Bali	75,56	4,19	5,55	67,32	83,79	22,59	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	53,13	5,12	9,64	43,07	63,19	21,99	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	76,72	3,26	4,24	70,33	83,11	12,96	5 403
61 Kalimantan Barat	69,90	3,49	4,99	63,05	76,75	10,97	2 828
62 Kalimantan Tengah	91,80	1,04	1,14	89,75	93,84	1,26	1 898
63 Kalimantan Selatan	88,80	1,65	1,86	85,57	92,04	4,84	2 305
64 Kalimantan Timur	91,55	1,34	1,47	88,91	94,19	3,00	1 608
65 Kalimantan Utara	80,05	2,80	3,50	74,54	85,55	1,19	703
71 Sulawesi Utara	99,52	0,13	0,13	99,27	99,77	0,45	3 840
72 Sulawesi Tengah	89,52	1,51	1,69	86,55	92,49	2,85	2 372
73 Sulawesi Selatan	72,16	2,89	4,00	66,49	77,83	17,51	6 626
74 Sulawesi Tenggara	74,76	2,46	3,29	69,93	79,58	2,96	2 881
75 Gorontalo	94,54	1,30	1,38	91,99	97,10	1,55	1 059
76 Sulawesi Barat	71,31	3,34	4,68	64,76	77,86	2,52	1156
81 Maluku	98,37	0,37	0,38	97,64	99,10	0,56	2 169
82 Maluku Utara	90,28	1,90	2,10	86,56	94,00	1,69	1 585
91 Papua Barat	89,08	2,21	2,49	84,74	93,43	1,24	1 388
94 Papua	76,99	4,53	5,89	68,09	85,88	9,00	2 068
Indonesia	**81,72**	**0,65**	**0,79**	**80,44**	**82,99**	**34,75**	**122 694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.10 Nilai *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	5,41	0,22	4,97	5,84	4,14	4,65	3 940
12 Sumatera Utara	6,67	0,46	5,76	7,58	6,96	57,85	7 113
13 Sumatera Barat	6,23	0,44	5,37	7,09	7,01	18,82	4 978
14 Riau	5,34	0,59	4,18	6,51	11,12	28,20	2 065
15 Jambi	5,00	0,50	4,02	5,97	9,97	16,16	2 126
16 Sumatera Selatan	5,00	0,73	3,57	6,43	14,54	83,58	3 620
17 Bengkulu	5,58	0,55	4,49	6,66	9,88	11,29	1 826
18 Lampung	4,41	0,40	3,61	5,20	9,19	34,71	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	5,30	0,28	4,75	5,84	5,24	2,55	1 193
21 Kepulauan Riau	5,50	0,25	5,00	6,00	4,63	1,39	1 170
31 DKI Jakarta	9,38	0,22	8,95	9,81	2,34	9,65	1 794
32 Jawa Barat	5,42	0,36	4,71	6,12	6,64	124,27	9 183
33 Jawa Tengah	4,50	0,18	4,15	4,85	3,99	33,75	14 432
34 DI Yogyakarta	5,44	0,51	4,44	6,45	9,41	26,43	2 258
35 Jawa Timur	4,03	0,31	3,43	4,64	7,59	104,69	15 797
36 Banten	5,32	0,50	4,34	6,30	9,36	48,94	2 023
51 Bali	4,74	0,58	3,60	5,88	12,26	33,09	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	2,99	0,45	2,10	3,87	15,08	19,07	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	4,70	0,28	4,15	5,25	5,94	8,40	5 403
61 Kalimantan Barat	4,33	0,51	3,34	5,33	11,69	23,37	2 828
62 Kalimantan Tengah	6,47	0,43	5,64	7,31	6,57	6,48	1 898
63 Kalimantan Selatan	6,21	0,34	5,55	6,88	5,45	7,34	2 305
64 Kalimantan Timur	6,30	0,41	5,48	7,11	6,58	10,97	1 608
65 Kalimantan Utara	6,52	0,35	5,82	7,21	5,44	1,51	703
71 Sulawesi Utara	7,50	0,39	6,72	8,27	5,27	11,83	3 840
72 Sulawesi Tengah	6,91	0,31	6,30	7,53	4,54	5,14	2 372
73 Sulawesi Selatan	5,44	0,51	4,44	6,45	9,37	44,53	6 626
74 Sulawesi Tenggara	5,22	0,57	4,11	6,33	10,82	12,73	2 881
75 Gorontalo	4,73	0,15	4,43	5,03	3,26	0,71	1 059
76 Sulawesi Barat	5,54	0,37	4,82	6,27	6,64	2,65	1 156
81 Maluku	6,98	0,78	5,44	8,51	11,20	24,35	2 169
82 Maluku Utara	6,04	0,51	5,04	7,05	8,47	6,16	1 585
91 Papua Barat	6,54	0,72	5,12	7,96	11,04	5,98	1 388
94 Papua	5,33	0,28	4,78	5,88	5,23	2,53	2 068
Indonesia	**5,14**	**0,11**	**4,92**	**5,36**	**2,17**	**66,54**	**122 694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.11 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Memiliki Telepon Seluler Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	33,26	2,13	6,41	29,07	37,44	3,79	3 940
12 Sumatera Utara	48,48	2,49	5,13	43,60	53,35	14,01	7 113
13 Sumatera Barat	45,74	3,10	6,78	39,65	51,83	8,96	4 978
14 Riau	50,51	4,55	9,00	41,59	59,44	15,85	2 065
15 Jambi	36,93	3,72	10,06	29,64	44,22	8,64	2 126
16 Sumatera Selatan	36,35	4,89	13,46	26,75	45,95	33,92	3 620
17 Bengkulu	36,54	3,20	8,75	30,26	42,81	3,57	1 826
18 Lampung	31,22	2,64	8,46	26,04	36,41	11,95	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	42,19	2,28	5,39	37,73	46,66	1,20	1 193
21 Kepulauan Riau	63,43	4,14	6,53	55,30	71,56	4,05	1 170
31 DKI Jakarta	61,53	2,06	3,34	57,50	65,57	7,35	1 794
32 Jawa Barat	30,38	2,39	7,86	25,69	35,06	57,41	9 183
33 Jawa Tengah	20,92	1,31	6,25	18,36	23,49	21,41	14 432
34 DI Yogyakarta	27,13	3,60	13,28	20,06	34,20	16,91	2 258
35 Jawa Timur	23,26	1,92	8,25	19,49	27,02	50,32	15 797
36 Banten	30,24	4,19	13,84	22,02	38,46	38,34	2 023
51 Bali	30,13	3,68	12,22	22,90	37,36	15,27	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	25,43	3,19	12,56	19,16	31,69	11,23	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	27,86	2,10	7,52	23,75	31,98	4,77	5 403
61 Kalimantan Barat	31,84	4,30	13,50	23,40	40,28	16,14	2828
62 Kalimantan Tengah	45,32	2,79	6,16	39,84	50,80	2,75	1 898
63 Kalimantan Selatan	42,17	3,64	8,64	35,01	49,32	9,64	2 305
64 Kalimantan Timur	57,24	3,85	6,72	49,69	64,79	7,77	1 608
65 Kalimantan Utara	59,70	3,90	6,54	52,04	67,37	1,53	703
71 Sulawesi Utara	45,38	3,86	8,51	37,80	52,96	8,11	3 840
72 Sulawesi Tengah	30,69	3,23	10,54	24,34	37,04	5,74	2 372
73 Sulawesi Selatan	36,66	2,61	7,12	31,53	41,78	12,36	6 626
74 Sulawesi Tenggara	42,15	3,09	7,34	36,08	48,22	3,62	2 881
75 Gorontalo	32,27	3,53	10,93	25,34	39,19	2,69	1 059
76 Sulawesi Barat	26,59	1,93	7,26	22,80	30,38	0,89	1 156
81 Maluku	38,87	4,10	10,56	30,82	46,92	4,57	2 169
82 Maluku Utara	37,73	4,85	12,85	28,22	47,25	4,13	1 585
91 Papua Barat	51,47	3,70	7,19	44,21	58,74	1,35	1 388
94 Papua	43,12	5,40	12,53	32,51	53,72	9,24	2 068
Indonesia	**31,48**	**0,77**	**2,46**	**29,96**	**33,00**	**34,17**	**122 694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.12 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	48,90	2,83	5,79	43,34	54,46	5,93	3 940
12 Sumatera Utara	71,46	1,74	2,44	68,04	74,88	8,43	7 113
13 Sumatera Barat	69,31	2,26	3,25	64,89	73,74	5,53	4 978
14 Riau	65,98	3,68	5,58	58,75	73,20	11,58	2 065
15 Jambi	50,10	3,09	6,16	44,04	56,16	5,56	2 126
16 Sumatera Selatan	53,76	4,44	8,26	45,05	62,48	26,01	3 620
17 Bengkulu	50,49	3,93	7,79	42,77	58,21	5,02	1 826
18 Lampung	59,52	2,17	3,64	55,26	63,77	7,17	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	54,16	2,56	4,72	49,14	59,18	1,49	1 193
21 Kepulauan Riau	72,32	3,87	5,35	64,74	79,91	4,09	1 170
31 DKI Jakarta	69,52	2,16	3,10	65,29	73,75	9,02	1 794
32 Jawa Barat	41,60	2,20	5,30	37,27	45,93	42,62	9 183
33 Jawa Tengah	35,44	1,64	4,63	32,22	38,66	24,35	14 432
34 DI Yogyakarta	42,25	4,59	10,85	33,25	51,25	22,18	2 258
35 Jawa Timur	37,43	2,06	5,51	33,39	41,48	44,30	15 797
36 Banten	37,89	3,81	10,05	30,42	45,36	28,42	2023
51 Bali	39,46	3,67	9,31	32,25	46,67	13,40	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	57,15	4,12	7,21	49,07	65,23	14,45	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	57,95	2,24	3,86	53,56	62,35	4,50	5 403
61 Kalimantan Barat	44,58	4,85	10,89	35,06	54,11	18,07	2828
62 Kalimantan Tengah	54,60	2,51	4,60	49,67	59,53	2,22	1 898
63 Kalimantan Selatan	56,66	3,31	5,84	50,17	63,15	7,88	2 305
64 Kalimantan Timur	68,32	3,00	4,39	62,44	74,21	5,33	1 608
65 Kalimantan Utara	72,48	3,38	4,66	65,85	79,11	1,38	703
71 Sulawesi Utara	60,10	2,98	4,96	54,25	65,95	5,00	3 840
72 Sulawesi Tengah	49,10	3,41	6,94	42,41	55,79	5,42	2 372
73 Sulawesi Selatan	61,12	1,75	2,87	57,68	64,56	5,45	6 626
74 Sulawesi Tenggara	64,57	2,58	3,99	59,51	69,64	2,69	2881
75 Gorontalo	60,34	1,53	2,54	57,33	63,35	0,47	1 059
76 Sulawesi Barat	54,98	2,96	5,39	49,17	60,80	1,64	1 156
81 Maluku	56,93	2,38	4,18	52,26	61,60	1,49	2 169
82 Maluku Utara	53,24	5,36	10,06	42,73	63,75	4,75	1 585
91 Papua Barat	63,44	3,19	5,03	57,18	69,71	1,08	1 388
94 Papua	48,92	5,31	10,85	38,51	59,34	8,75	2 068
Indonesia	**46,79**	**0,79**	**1,69**	**45,24**	**48,34**	**30,84**	**122 694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.13 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Memiliki Komputer/Laptop Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	1,50	0,42	28,33	0,66	2,33	2,25	3 940
12 Sumatera Utara	1,78	0,84	47,29	0,13	3,43	22,97	7 113
13 Sumatera Barat	0,88	0,29	32,52	0,32	1,44	2,17	4 978
14 Riau	0,82	0,26	31,29	0,32	1,32	1,55	2 065
15 Jambi	1,15	0,47	40,76	0,23	2,07	2,82	2 126
16 Sumatera Selatan	0,98	0,48	49,26	0,03	1,92	7,85	3 620
17 Bengkulu	NA	0,44	60,66	NA	NA	2,17	1 826
18 Lampung	NA	0,43	61,47	NA	NA	9,68	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	NA	0,44	50,49	NA	NA	1,28	1193
21 Kepulauan Riau	NA	1,33	52,37	NA	NA	3,92	1 170
31 DKI Jakarta	6,49	0,38	5,78	5,76	7,23	0,95	1 794
32 Jawa Barat	2,06	0,45	22,08	1,16	2,95	21,82	9 183
33 Jawa Tengah	0,68	0,18	26,44	0,33	1,03	9,94	14 432
34 DI Yogyakarta	1,76	0,47	26,60	0,84	2,68	3,26	2 258
35 Jawa Timur	0,87	0,25	28,43	0,38	1,35	17,31	15 797
36 Banten	2,68	0,64	23,74	1,43	3,93	7,17	2 023
51 Bali	1,60	0,57	35,97	0,47	2,72	4,98	3320
52 Nusa Tenggara Barat	NA	0,40	68,97	NA	NA	5,76	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	0,74	0,24	32,34	0,27	1,21	1,70	5 403
61 Kalimantan Barat	0,49	0,20	40,63	0,10	0,88	1,54	2 828
62 Kalimantan Tengah	1,66	0,74	44,43	0,21	3,10	2,91	1 898
63 Kalimantan Selatan	1,99	0,64	32,12	0,73	3,24	3,70	2 305
64 Kalimantan Timur	2,27	0,72	31,92	0,85	3,69	3,04	1 608
65 Kalimantan Utara	0,95	0,43	45,59	0,10	1,80	0,48	703
71 Sulawesi Utara	1,42	0,48	34,17	0,47	2,37	2,26	3 840
72 Sulawesi Tengah	0,73	0,21	28,97	0,31	1,14	0,72	2 372
73 Sulawesi Selatan	1,39	0,64	46,02	0,13	2,64	12,55	6 626
74 Sulawesi Tenggara	0,88	0,36	40,61	0,18	1,59	1,36	2 881
75 Gorontalo	1,16	0,47	40,74	0,23	2,10	0,93	1 059
76 Sulawesi Barat	0,77	0,33	42,50	0,13	1,41	0,65	1 156
81 Maluku	2,32	1,04	44,87	0,28	4,36	3,08	2169
82 Maluku Utara	0,77	0,38	50,15	0,01	1,52	0,80	1 585
91 Papua Barat	1,78	0,60	33,46	0,61	2,95	0,50	1 388
94 Papua	2,55	1,08	42,47	0,42	4,68	3,67	2 068
Indonesia	**1,46**	**0,12**	**8,38**	**1,22**	**1,69**	**12,79**	**122 694**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Warna merah berarti angka estimasi tidak akurat, tidak bisa digunakan
NA (*Not Applicable*) berarti data tidak dapat ditampilkan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 4.14 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	7,60	1,79	23,51	4,09	11,11	8,40	3 940
12 Sumatera Utara	14,59	3,37	23,10	7,98	21,21	51,66	7 113
13 Sumatera Barat	11,88	2,81	23,67	6,36	17,40	17,46	4 978
14 Riau	11,45	2,99	26,09	5,59	17,31	16,86	2 065
15 Jambi	9,98	3,02	30,23	4,06	15,91	14,77	2 126
16 Sumatera Selatan	10,25	4,05	39,51	2,30	18,20	58,52	3 620
17 Bengkulu	8,28	2,92	35,21	2,56	14,00	9,08	1 826
18 Lampung	11,07	2,60	23,46	5,97	16,16	25,20	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	13,50	2,54	18,82	8,51	18,48	3,13	1 193
21 Kepulauan Riau	28,32	4,83	17,07	18,83	37,81	6,30	1 170
31 DKI Jakarta	52,42	2,56	4,88	47,40	57,44	10,77	1794
32 Jawa Barat	16,98	2,64	15,55	11,80	22,16	105,36	9 183
33 Jawa Tengah	10,22	1,21	11,82	7,85	12,59	32,97	14 432
34 DI Yogyakarta	18,56	4,20	22,64	10,32	26,81	30,06	2 258
35 Jawa Timur	11,67	1,84	15,78	8,05	15,28	80,32	15 797
36 Banten	19,60	4,42	22,54	10,93	28,27	57,16	2 023
51 Bali	13,53	3,17	23,41	7,31	19,75	20,33	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	9,20	2,26	24,62	4,75	13,64	12,81	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	6,24	1,33	21,33	3,63	8,86	6,61	5 403
61 Kalimantan Barat	11,93	3,24	27,17	5,57	18,29	18,95	2 828
62 Kalimantan Tengah	13,63	3,42	25,08	6,92	20,34	8,67	1 898
63 Kalimantan Selatan	15,75	2,73	17,33	10,39	21,10	9,93	2 305
64 Kalimantan Timur	20,65	4,15	20,11	12,50	28,81	13,52	1 608
65 Kalimantan Utara	21,34	2,42	11,33	16,60	26,09	0,84	703
71 Sulawesi Utara	12,63	3,25	25,75	6,25	19,01	12,94	3 840
72 Sulawesi Tengah	6,61	1,53	23,19	3,60	9,62	4,45	2 372
73 Sulawesi Selatan	9,74	2,69	27,66	4,45	15,02	34,76	6 626
74 Sulawesi Tenggara	7,06	2,23	31,56	2,69	11,44	6,99	2 881
75 Gorontalo	6,65	1,94	29,13	2,85	10,45	2,86	1 059
76 Sulawesi Barat	4,22	0,53	12,62	3,18	5,27	0,33	1 156
81 Maluku	10,20	4,34	42,61	1,67	18,72	13,30	2 169
82 Maluku Utara	7,01	2,51	35,77	2,09	11,94	3,98	1 585
91 Papua Barat	12,71	2,64	20,79	7,52	17,89	1,54	1 388
94 Papua	14,48	3,09	21,32	8,42	20,54	5,98	2 068
Indonesia	**14,10**	**0,78**	**5,55**	**12,56**	**15,64**	**62,40**	**122 694**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

BAB 5. KESEHATAN

"4 dari 10 lansia memiliki keluhan kesehatan, dan 2 diantaranya mengalami sakit"

"Mayoritas lansia (35,81%) berobat jalan ke praktik dokter/bidan ketika mengalami keluhan kesehatan"

"1 dari 5 lansia (22,10%) masih merokok setiap hari. Bahkan, 13,31% lansia berusia 80 tahun ke atas merokok setiap hari hingga sebulan terakhir"

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

Bab 5 Kesehatan

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, tidak terkecuali bagi penduduk lanjut usia (lansia). Pelayanan kesehatan tersebut dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan mereka agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

Keluhan kesehatan dan **angka kesakitan lansia** merupakan indikator kesehatan dasar pada Penduduk Lanjut Usia

---

https://www.bps.go.id

Menurut *World Health Organization* (dalam BPS, 2021), kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang membutuhkan kondisi sehat, baik secara fisik maupun psikis, agar tetap dapat menikmati hidup, produktif dan bermanfaat.

Inilah yang menjadi salah satu tantangan lansia, dimana seiring dengan bertambahnya usia, terjadi penurunan kapasitas intrinsik dan fungsional tubuh yang berdampak terhadap sistem imun tubuh. Kondisi kesehatan yang menurun menyebabkan lansia sering sakit dan memiliki banyak keluhan kesehatan. Di sisi lain, biaya kesehatan sendiri tidaklah murah, sehingga lansia yang tidak mandiri secara ekonomi memerlukan perlindungan jaminan kesehatan. Bab ini akan membahas aspek kesehatan lansia yang mencakup kondisi kesehatan lansia, perilaku berobat, pemanfaatan jaminan kesehatan, hingga perilaku hidup sehat lansia yang dilihat dari kebiasaan merokok.

5.1. Kondisi Kesehatan Lansia

Setidaknya, ada dua indikator kesehatan dasar lansia yang dihasilkan melalui kegiatan Susenas Maret 2021. Indikator pertama adalah persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan, yakni keadaan seseorang lansia yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dicatat adalah keluhan fisik maupun psikis yang dialami lansia selama kurun waktu sebulan terakhir. Indikator kedua adalah angka kesakitan lansia (morbidity), yaitu kondisi ketika seseorang lansia mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk (Kemenkes, 2021).

Sekitar **dua** dari **lima** **lansia** memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan **satu** di antaranya mengalami sakit

---

https://www.bps.go.id

Pada umumnya, penyakit yang dialami lansia merupakan penyakit yang tidak menular, bersifat degeneratif, atau disebabkan oleh faktor usia, misalnya penyakit jantung, diabetes mellitus, stroke, rematik dan cidera (Kemenkes, 2021). Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit kronis, berbiaya besar, dan apabila tidak tersembuhkan akan menimbulkan ketidakmampuan atau disabilitas sehingga lansia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Pada tahun 2021, hampir separuh lansia di Indonesia memiliki keluhan kesehatan, baik fisik maupun psikis (43,22 persen). Lansia yang tinggal di perkotaan cenderung lebih banyak memiliki keluhan kesehatan (45,47 persen) dibandingkan lansia di perdesaan (40,61 persen). Di sisi lain, lansia penyandang disabilitas yang memiliki keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan lansia non disabiitas, yaitu sebesar 58,36 persen berbanding 41,08 persen. Jika dilihat menurut kelompok umur, semakin bertambahnya umur lansia cenderung lebih banyak memiliki keluhan kesehatan. Hal ini terjadi seiring bertambahnya usia,

menurunnya kondisi fisik, dan makin rentannya mereka mengalami keluhan kesehatan dan sakit (TNP2K, 2020).

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Lansia, 2021

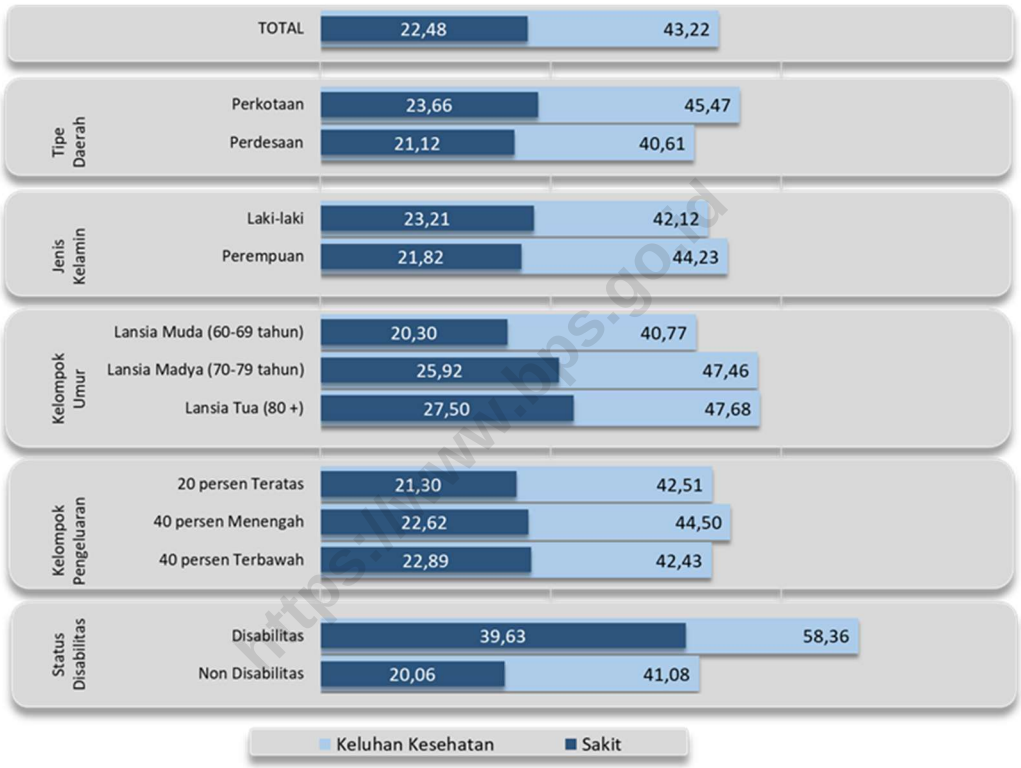

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Setidaknya, setengah dari lansia yang mengalami keluhan kesehatan terganggu aktivitas atau kegiatannya sehari-hari. Angka kesakitan lansia tahun 2021 adalah sebesar 22,48 persen, ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari lima orang lansia di Indonesia mengalami sakit dalam sebulan terakhir. Secara umum, angka kesakitan lansia memiliki pola yang sama dengan persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan. Namun jika ditelisik lebih dalam, terdapat perbedaan pola menurut jenis kelamin. Persentase lansia perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih besar daripada lansia laki-laki, sementara angka kesakitan lansia laki-laki lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa secara

umum, keluhan kesehatan yang dialami lansia perempuan tidak menghambatnya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari daripada lansia laki-laki.

Angka kesakitan lansia penyandang disabilitas dua kali lebih besar dibandingkan lansia non disabiitas, yaitu sebesar 39,63 persen berbanding 20,06 persen. Keberadaan lansia penyandang disabilitas di rumah merupakan tantangan tersendiri bagi keluarga yang merawatnya, mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya ekonomi maupun sosial. Untuk itu, dibutuhkan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lansia penyandang disabilitas, agar mereka dapat memperoleh hak yang sama.

Gambar 5.2 Perkembangan Angka Kesakitan Lansia (persen), 2015-2021

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Angka kesakitan lansia mencapai titik terendah selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2015, angka kesakitan lansia sebesar 28,62 persen, terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai 22,48 persen pada tahun 2021. Penyakit pada lansia umumnya merupakan gabungan dari kelainan-kelainan yang timbul akibat gaya hidup di masa muda dan proses penuaan secara alami. Penyakit degeneratif yang dialami lansia disebut juga new communicable disease, karena dianggap dapat menular melalui gaya hidup seperti pola makan, kehidupan seksual dan komunikasi global (Kemenkes, 2013).

Oleh karena itu, harus dilakukan berbagai tindakan preventif, seperti memiliki pola hidup yang sehat, baik bagi lansia maupun penduduk yang masih muda. Tindakan preventif bagi kaum muda perlu dilakukan agar kelak menjadi lansia yang sehat dan tetap produktif. Sedangkan bagi lansia juga diperlukan tindakan perawatan tubuh untuk menjaga kebugaran agar memiliki kualitas kesehatan yang baik.

5.2. Tindakan Pengobatan

Keluhan kesehatan yang dialami oleh lansia, baik yang mengganggu aktivitas sehari-hari maupun tidak, membutuhkan suatu tindakan pengobatan. Beberapa tindakan pengobatan yang menjadi alternatif pilihan bagi lansia untuk meredakan keluhan yang dirasa, seperti mengobati sendiri, berobat jalan, atau bahkan melakukan keduanya (mengobati sendiri dan berobat jalan). Namun demikian, masih ada beberapa lansia yang bahkan tidak melakukan pengobatan sama sekali.

https://www.bps.go.id

Gambar 5.3 Tindakan Pengobatan Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir (persen), 2021

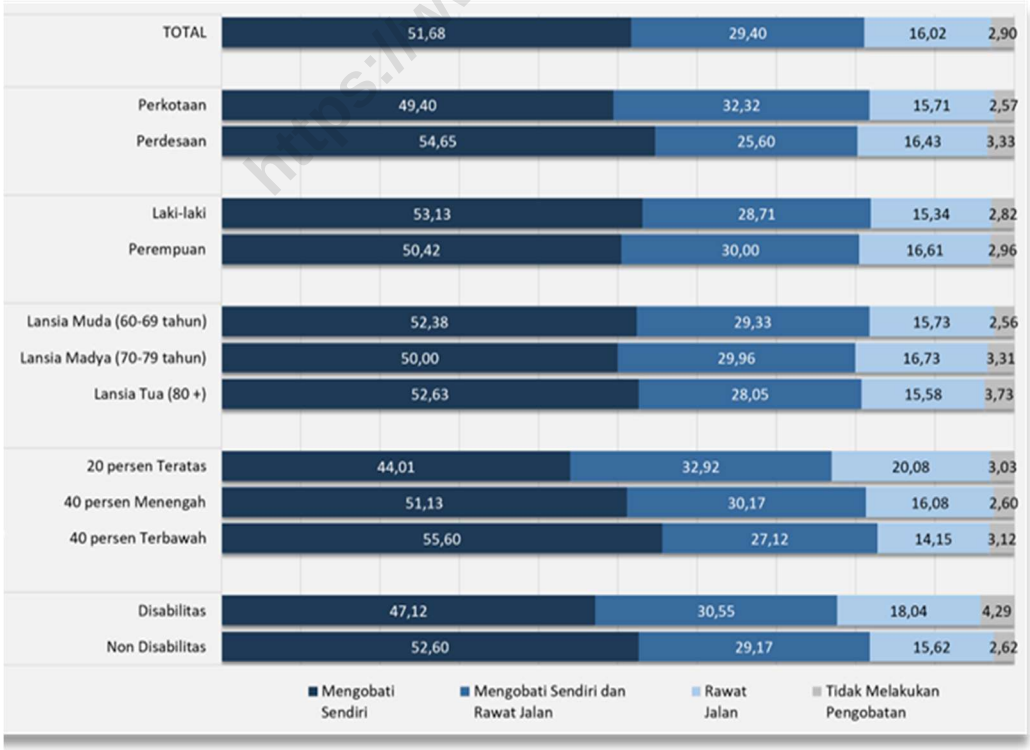

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Hampir semua lansia di Indonesia sudah memiliki respon positif dengan melakukan tindakan pengobatan atas keluhan kesehatan yang mereka alami, baik dengan cara mengobati sendiri maupun berobat jalan (97,10 persen). Lansia yang memiliki keluhan kesehatan cenderung melakukan tindakan pengobatan sendiri (51,68 persen) atau kombinasi antara berobat jalan dan mengobati sendiri (29,40 persen). Pandemi COVID-19 menyebabkan lansia lebih memilih untuk melakukan pengobatan sendiri ketimbang harus melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan. Hal ini sangat wajar, mengingat lansia sebagai kelompok yang paling rentan, karena memiliki penyakit penyerta (komorbid), yang dapat mengakibat resiko fatal jika terpapar COVID-19. Bahkan, lansia memiliki risiko hampir 20 kali lipat lebih tinggi dibanding kelompok umur lainnya (Kemenkes, 2021).

Meskipun demikian, masih ada sekitar 2,9 persen lansia yang enggan untuk mengobati keluhan kesehatan yang mereka alami, seperti yang tertuang pada Gambar 5.3 di atas. Kecenderungan terbesar untuk tidak melakukan pengobatan sama sekali terjadi pada lansia penyandang disabilitas, yaitu sebesar 4,29 persen. Sedangkan pada karateristik lainnya, tidak terdapat perbedaan pola tidak melakukan pengobatan, baik menurut tipe daerah, jenis kelamin, kelompok umur, maupun kelompok pengeluaran rumah tangga. Lansia cenderung mengalami penurunan kondisi kesehatan dan kemungkinan menyandang disabilitas (TNP2K, 2020). Kondisi ini mengakibatkan lansia kesulitan untuk mengurus diri sendiri dan membutuhkan pihak lain untuk melakukan tindakan pengobatan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pelayanan kesehatan yang ramah lansia untuk mengakomodasi kebutuhan mereka akan layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan strategi RAN Kesehatan Lansia 2020-2024, yaitu berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang santun lansia, akses terhadap pelayanan kesehatan yang santun lansia, serta perawatan jangka panjang.

Tindakan pengobatan sendiri memang sudah cukup untuk merespon keluhan kesehatan yang dialami lansia. Namun, tetap perlu dilakukan konsultasi kepada tenaga kesehatan. Berobat jalan yang dilakukan melalui konsultasi dan kunjungan ke fasilitas kesehatan, dapat diambil tindakan pengobatan yang lebih tepat terkait gejala penyakit yang dirasakan oleh lansia. Namun demikian, sekitar satu dari dua lansia (54,58 persen) yang mengalami keluhan kesehatan tidak berobat jalan (Tabel 5.4).

https://www.bps.go.id

Gambar 5.4 Alasan Utama Lansia Tidak Berobat Jalan (persen), 2021

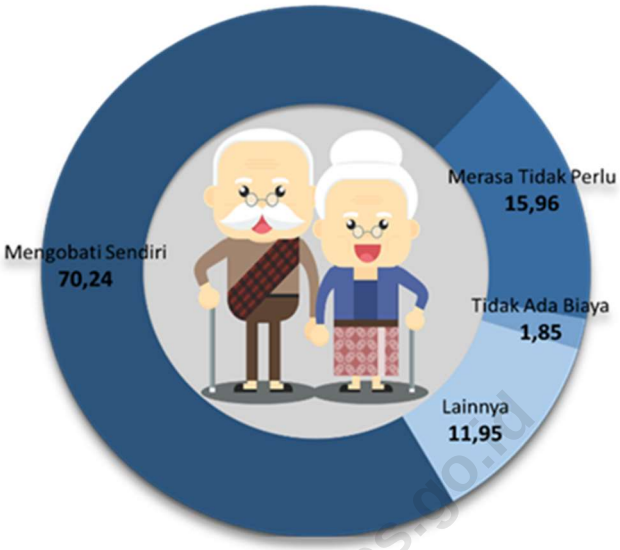

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Keengganan lansia untuk berobat jalan tentunya didasarkan pada berbagai alasan. Gambar 5.4 di atas menunjukkan bahwa 70,24 persen lansia enggan untuk berobat jalan karena memilih untuk melakukan pengobatan mandiri atau mengobati sendiri untuk meringankan keluhan kesehatannya. Sementara itu, sebanyak 15,96 persen lansia merasa tidak perlu berobat jalan. Di sisi lain, masih ada 2,36 persen lansia yang tidak berobat jalan karena tidak ada biaya, baik itu biaya untuk berobat maupun untuk transportasi ke tempat berobat. Persentase lansia yang tidak berobat jalan karena alasan lainnya juga cukup besar, antara lain karena tidak ada sarana transportasi, tidak ada yang mendampingi, waktu tunggu pelayanan yang dirasakan lama, hingga kuatir terpapar COVID-19.

Beragam pilihan fasilitas pelayanan kesehatan sesungguhnya telah tersedia bagi lansia untuk melakukan berobat jalan maupun rawat inap. Akan tetapi, beberapa di antaranya belum mempertimbangkan aksesibilitas lansia dalam menjangkau fasilitas tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan hendaknya mempertimbangkan kebutuhan para lansia. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat, perencanaan pelayanan kesehatan harus dirancang berdasarkan

https://www.bps.go.id

kondisi lanjut usia dan pola pelayanan yang dibutuhkan, mengacu pada pilihan sarana pelayanan kesehatan yang diakses lanjut usia dalam mencari pengobatan.

Gambar 5.5 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan, 2021

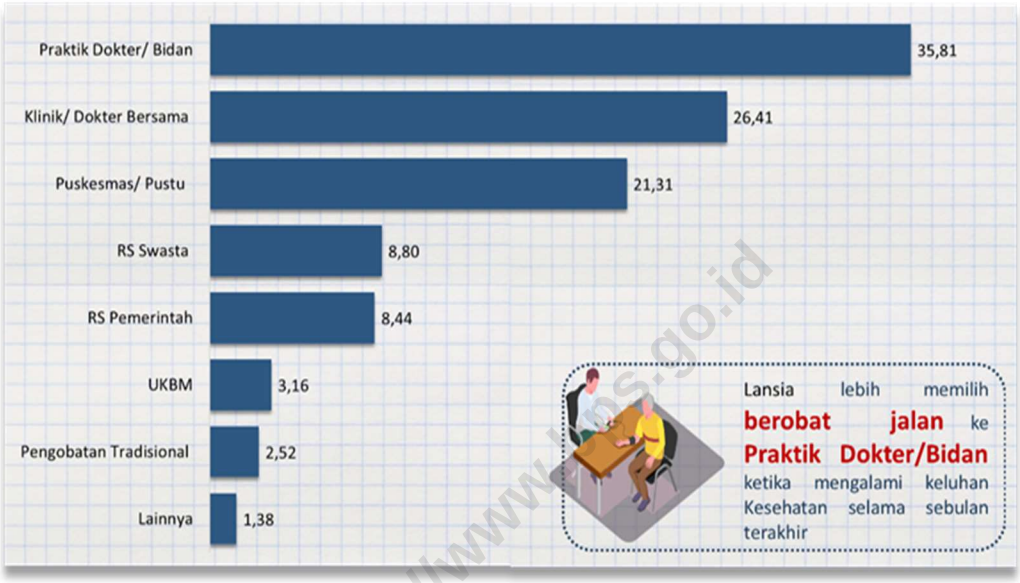

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Hampir seluruh lansia yang mengalami keluhan kesehatan melakukan konsultasi kesehatan dan kunjungan ke fasilitas kesehatan yang dikelola oleh tenaga kesehatan yang terdidik, baik pemerintah maupun swasta. Hanya sedikit saja yang melakukan pengobatan tradisional atau alternatif, yaitu sebesar 2,52 persen. Praktik Dokter/Bidan menjadi tujuan utama lansia yang berobat jalan, yaitu sebesar 35,81 persen. Selain praktik dokter/bidan, fasilitas kesehatan lain yang paling diandalkan oleh lansia ketika berobat jalan adalah klinik atau praktik dokter bersama (26,41 persen) dan Puskesmas/ Puskesmas pembantu (21,31 persen).

Gambar 5.6 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan, Tipe Daerah, dan Kelompok Pengeluaran, 2021

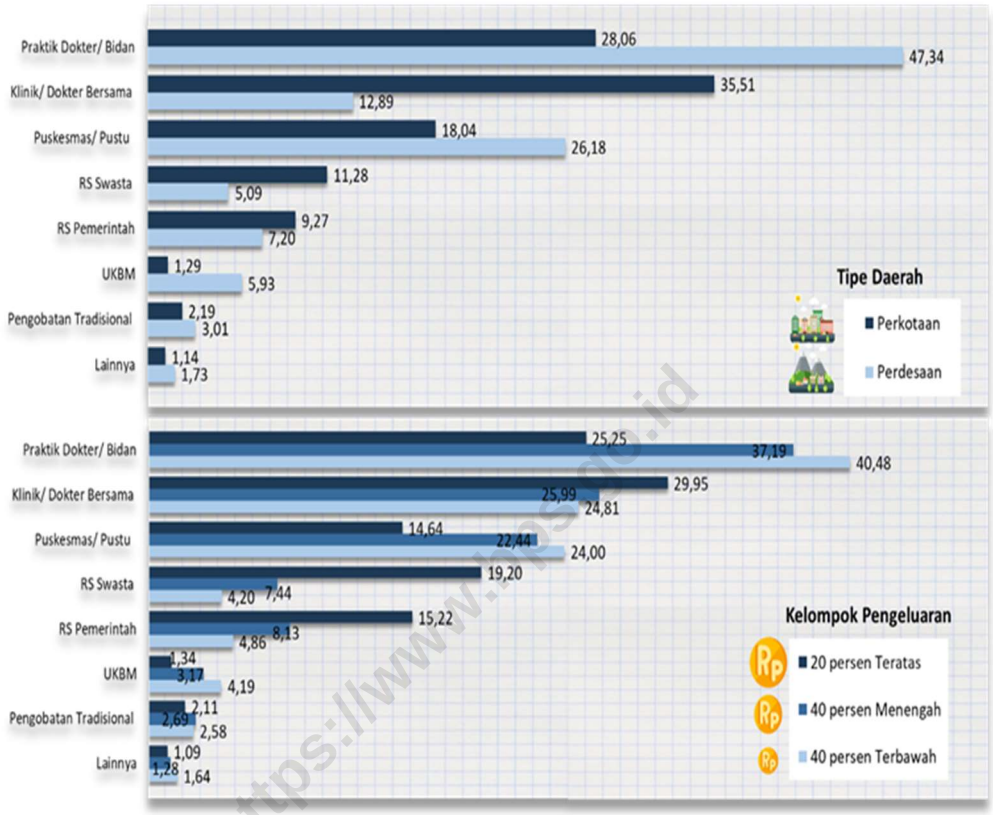

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Lansia yang tinggal di perdesaan lebih memilih untuk berobat jalan ke praktik dokter atau bidan (47,34 persen) dan Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (26,18 persen). Sementara, lansia di perkotaan berobat jalan ke klinik atau praktik dokter bersama (35,51 persen) dan praktik dokter atau bidan (28,06 persen). Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, lansia yang tingal di rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas lebih banyak berobat jalan ke klinik atau praktik dokter bersama (29,95 persen). Lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah mayoritas berobat ke praktik dokter atau bidan (40,48 persen). Fasilitas kesehatan pemerintah sepertinya kurang diminati lansia untuk berobat jalan.

Gambar 5.7 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2021

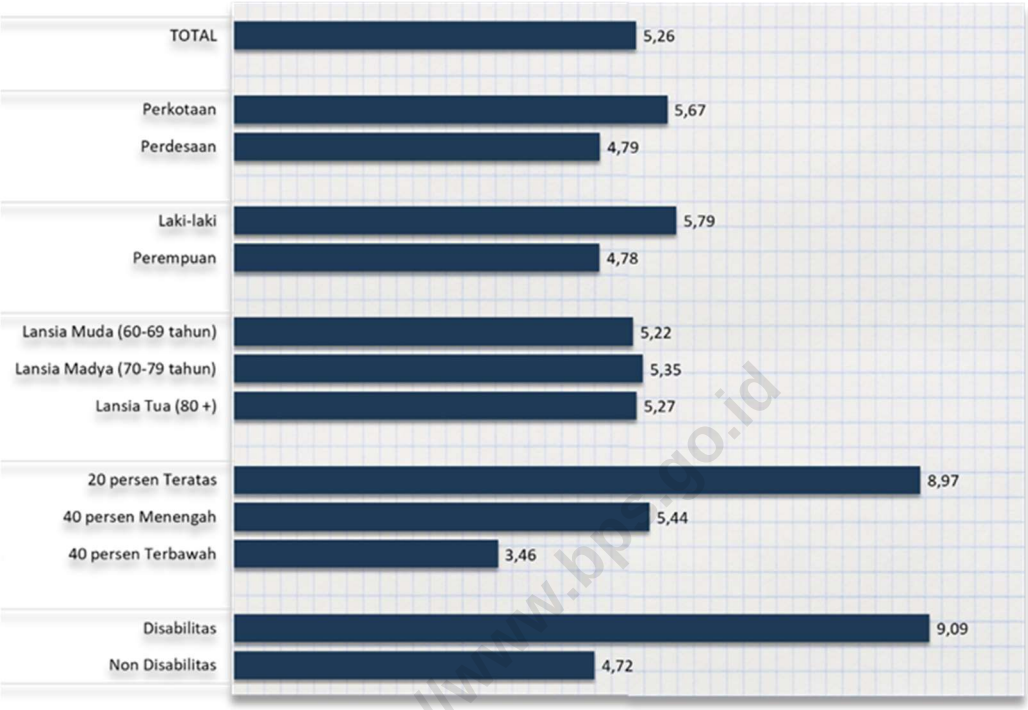

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tingkat keparahan penyakit dan daya tahan tubuh menentukan lama waktu seseorang untuk sembuh. Pada umumnya, lansia memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses penyembuhannya akibat kemunduran fungsi organ dan penurunan imunitas tubuh. Bahkan, beberapa keluhan kesehatan memerlukan penanganan yang lebih serius, sehingga mengharuskan penderita untuk dirawat inap. Lama rawat yang panjang menunjukkan penyakit cenderung lebih buruk atau sudah terdapat komplikasi atau memiliki penyakit penyerta lainnya (Vera, 2011).

Pada tahun 2021, sebanyak 5,26 persen lansia pernah rawat inap dalam setahun terakhir (Gambar 5.7). Menurut karakteristiknya, persentase lansia yang pernah dirawat inap didominasi oleh lansia yang tinggal di perkotaan (5,67 persen), laki-laki (5,79 persen), kelompok pengeluaran 20 persen teratas (8,97 persen) dan penyandang disabilitas (9,09).

Gambar 5.8 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan, 2021

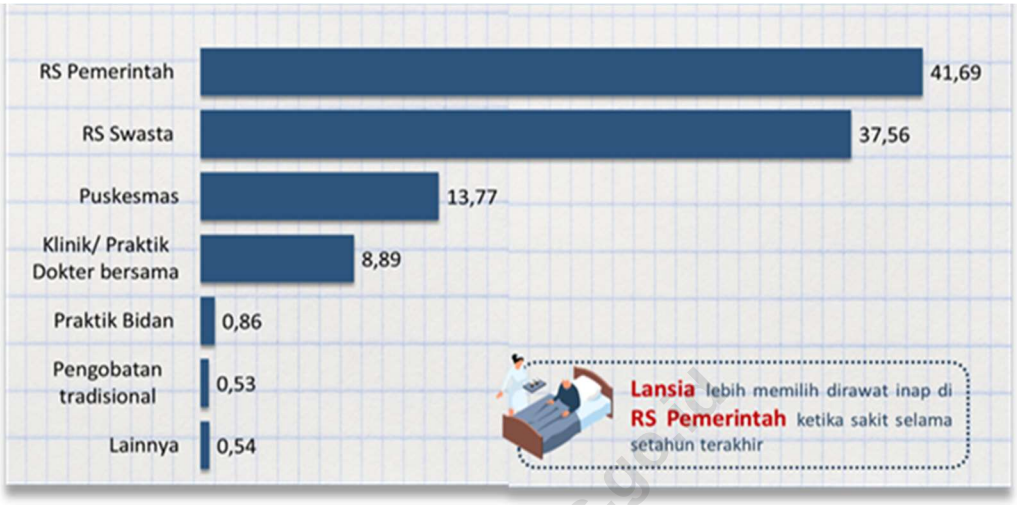

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Jika dilihat menurut lokasi rawat inap, rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang menjadi prioritas oleh sebagian besar lansia untuk rawat inap, di mana lansia yang dirawat inap di rumah sakit pemerintah sebanyak 41,69 persen dan rumah sakit swasta sebanyak 37,56 pesen. Tingginya persentase lansia yang rawat inap di rumah sakit pemerintah diasumsikan disebabkan oleh kelengkapan fasilitas dan layanan kesehatan dan biaya pengobatan yang lebih murah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit yang menyatakan bahwa dengan kondisi multi penyakit, berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologis, dan sosial ekonomi serta lingkungan pada warga lanjut usia, pelayanan terhadap warga lanjut usia di rumah sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin.

Dalam proses penyembuhannya, lansia perlu dirawat inap selama rata-rata kurang dari seminggu, yaitu sekitar lima hingga enam hari. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga lansia, cenderung lebih lama ketika dirawat inap. Seperti yang digambarkan pada Gambar 5.9 di bawah, lansia dari rumah tangga dengan pengeluaran 20 persen teratas membutuhkan waktu tujuh hari untuk rawat inap, sedangkan lansia dari rumah tangga dengan kelompok pengeluaran

https://www.bps.go.id

40 persen terbawah hanya memerlukan lima hari rawat inap. Hal ini dimungkinkan karena faktor biaya merupakan salah satu faktor nonmedis yang turut berperan dalam penanganan pasien di ICU (Vera, 2011).

Gambar 5.9 Rata-Rata Lama Rawat Inap Lansia (hari), 2021

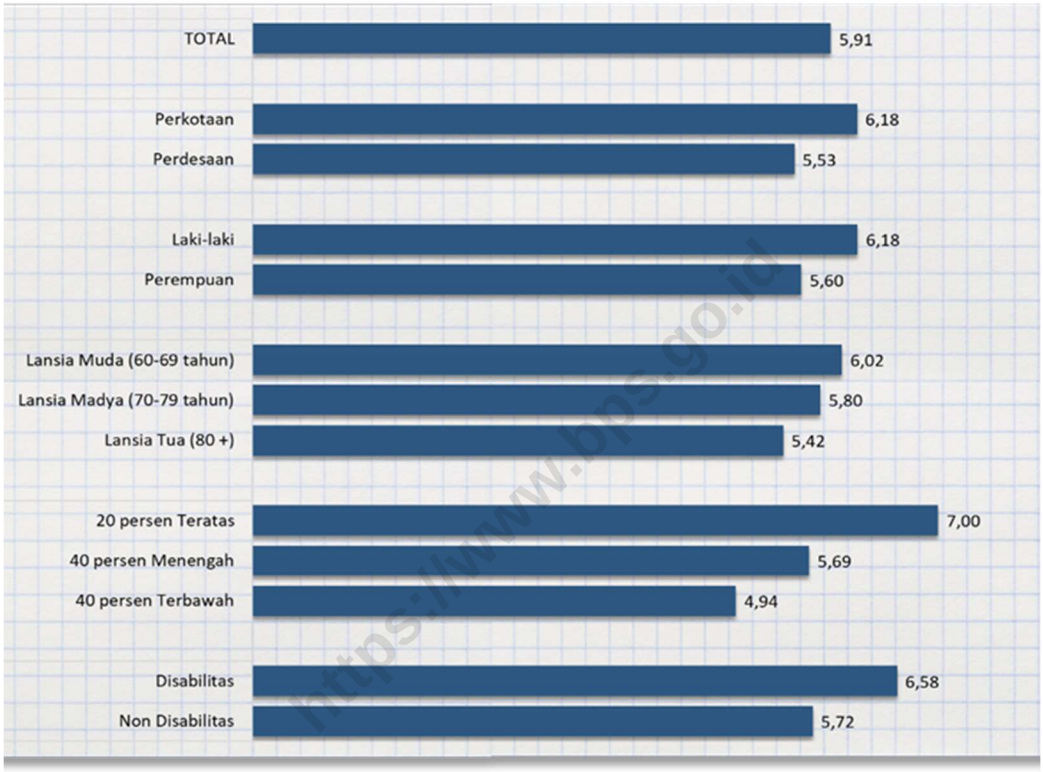

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Di sisi lain, semakin bertambah umur lansia, kecenderungan waktu yang dibutuhkan untuk rawat inap lebih singkat. Fenomena ini cukup menarik, karena menurut hasil penelitian Bagshaw et al, 2009, (dalam Vera, 2011) ada kecenderungan pasien yang berumur lebih dari 80 tahun memang memiliki lama rawat inap yang lebih panjang. Sehingga harus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan lansia tua cenderung lebih singkat dirawat inap ketika sakit.

Gambar 5.10 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kelompok Umur dan Lamanya Rawat Inap, 2021

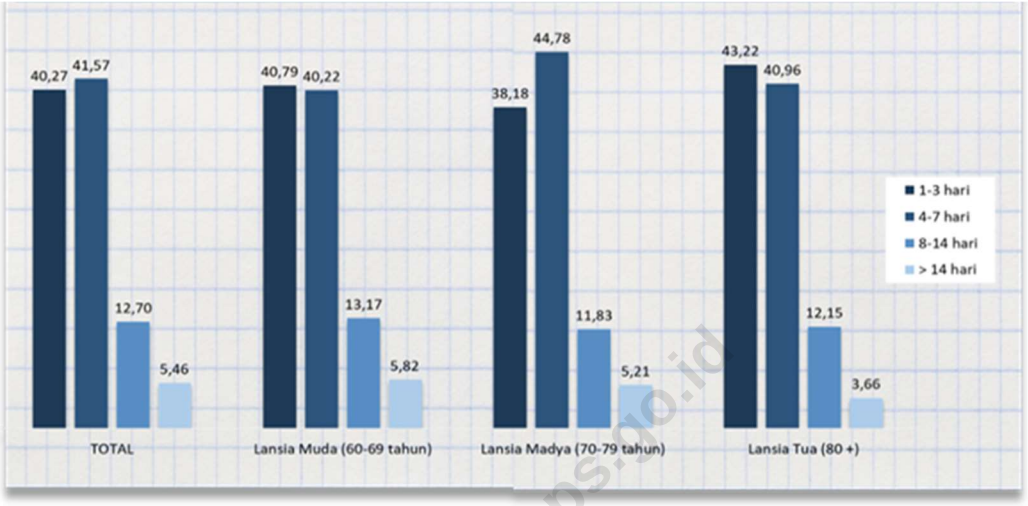

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Sebagaimana yang tersaji pada Gambar 5.10 di atas, sebagian besar lansia (41,57 persen) yang rawat inap membutuhkan sekitar 4-7 hari perawatan, dan 1-3 hari (40,27 persen). Jika dilihat menurut kelompok umur, lansia muda, madya maupun tua mayoritas membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari atau 4-7 hari untuk dirawat inap ketika mengalami sakit dalam setahun terakhir.

5.3. Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Rencana Aksi Nasional (RAN) Lanjut Usia 2020-2024 berupaya untuk mensinergikan seluruh pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kesehatan lansia, salah satunya melalui ketersediaan jaminan kesehatan bagi lansia. Informasi jaminan kesehatan yang dikumpulkan melalui Susenas Maret 2021 antara lain BPJS PBI, BPJS non PBI, Jamkesda, asuransi swasta dan fasilitas dari perusahaan/kantornya. Gambar 5.11 di bawah menunjukkan penggunaan jaminan kesehatan lansia untuk berobat jalan dan rawat inap.

Pada tahun 2021, sekitar tujuh dari sepuluh lansia yang dirawat inap menggunakan jaminan kesehatan. Sementara untuk keperluan berobat jalan,

tidak sampai separuh lansia yang menggunakan jaminan kesehatan (46,87 persen). Lansia di perkotaan lebih banyak yang menggunakan jaminan kesehatan dibanding lansia di perdesaan, baik untuk berobat jalan ataupun rawat inap. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, kelompok lansia muda yang paling banyak menggunakan jaminan kesehatan, baik untuk berobat jalan maupun rawat inap. Sedangkan jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, lansia pada rumah tangga kelompok pengeluaran tertinggi cenderung lebih banyak yang menggunakan jaminan kesehatan ketika rawat inap maupun berobat jalan.

Gambar 5.11 Persentase Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap, 2021

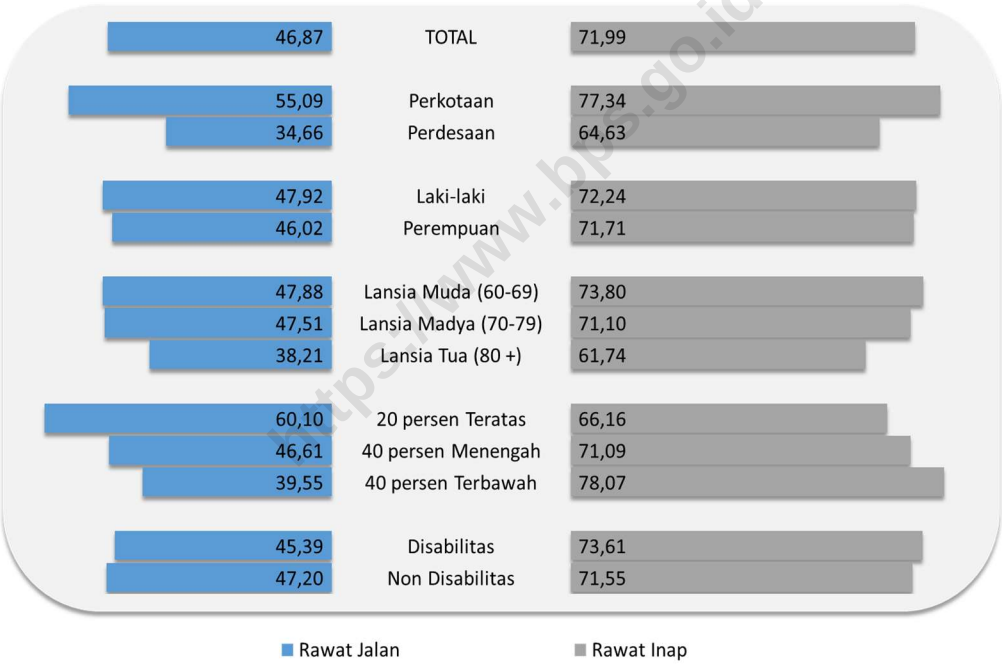

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Penggunaan jaminan kesehatan dari pemerintah (BPJS PBI dan non PBI) mendominasi pembiayaan untuk berobat jalan maupun rawat inap. Namun penggunaan BPJS PBI masih lebih banyak dibanding non PBI, baik untuk rawat inap maupun berobat jalan. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas lansia yang menggunakan jaminan kesehatan, pembayaran premi/ iuran jaminan kesehatannya masih ditanggung oleh pemerintah.

Gambar 5.12 Persentase Lansia yang Berobat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2021

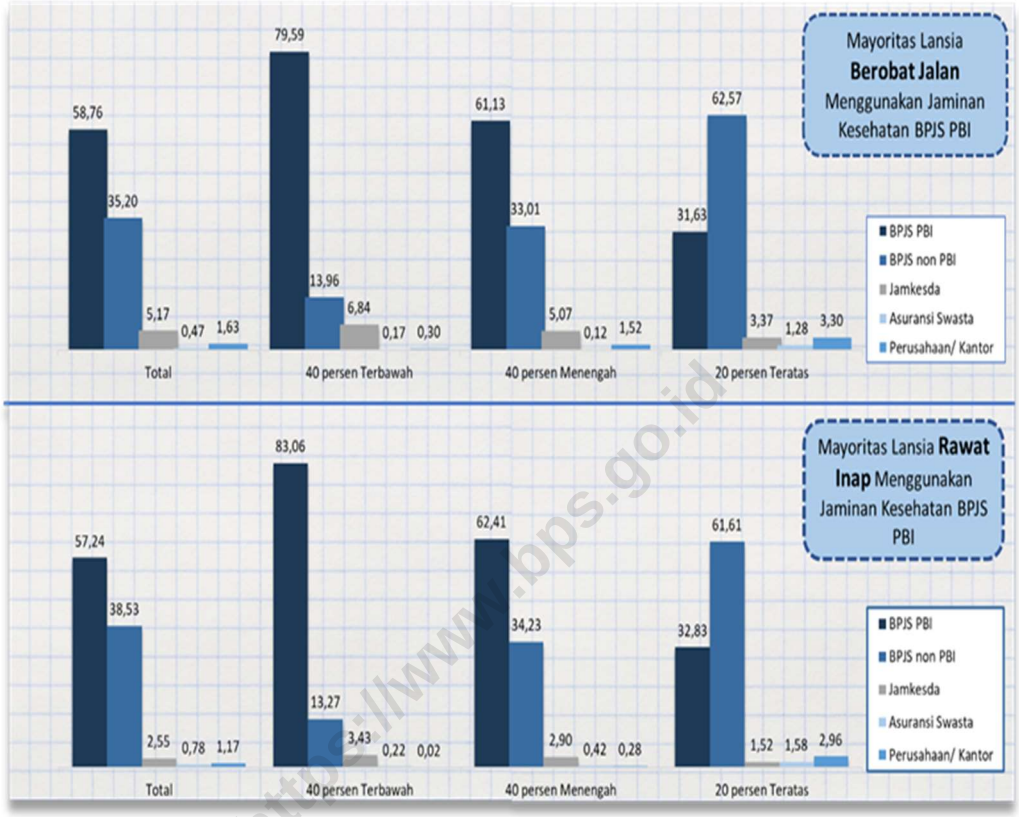

Sumber: BPS, Susenas Maret BPS

Penggunaan jaminan kesehatan berkaitan dengan kondisi ekonomi suatu rumah tangga, dimana mereka yang berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah cenderung memanfaatkan BPJS PBI untuk berobat jalan (79,59 persen), sedangkan rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas cenderung memanfaatkan BPJS non PBI (62,57 persen). Pola yang sama juga terjadi untuk lansia yang rawat inap.

Namun demikian, masih ada cukup banyak lansia yang tidak menggunakan jaminan kesehatan apapun, bahkan untuk rawat inap yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Gambar 5.11 menunjukkan bahwa setidaknya dari 10 lansia yang rawat inap setahun terakhir, 3 orang diantaranya tidak menggunakan jaminan kesehatan. Mayoritas lansia yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap tinggal di perdesaan (35,37 persen), lansia kelompok umur 80

tahun ke atas (38,26 persen) dan lansia dari kelompok pengeluaran terendah (33,84 persen).

Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan sesuatu hal yang penting bagi lansia, mengingat salah satu tantangan terbesar lansia adalah menurunnya tingkat kesehatan. Kondisi lansia yang sering sakit, menyebabkan lansia membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk biaya kesehatan. Jaminan kesehatan dapat memenuhi kebutuhan yang meningkat tidak hanya pada layanan kesehatan namun juga perawatan sosial jangka panjang (PJP) atau *long term care* (LTC) dengan cara yang berkelanjutan secara finansial, memadai, dan berkualitas tinggi (BPJS Kesehatan, 2020). Pentingnya LTC bagi lansia adalah untuk mempertahankan tingkat kemandirian, mengurangi ketergantungan, mencegah komplikasi penyakit atau disabilitas, mencegah kecelakaan, menjaga harga diri dan kualitas hidup, mengurangi rasa sakit, serta merasa bermartabat. Dengan demikian kualitas hidup lansia dapat dijaga dengan seoptimal mungkin.

https://www.bps.go.id

5.4. Kebiasaan Merokok

Fokus pemeliharaan kesehatan lansia tidak hanya terbatas pada tindakan kuratif dan rehabilitatif semata, tetapi juga menjaga kebiasaan hidup sehat, seperti pola makan, olahraga, dan menghindari konsumsi rokok dan zat aditif lainnya. Umumnya, masyarakat sudah mengetahui bahaya rokok bagi kesehatan, seperti perubahan fungsi paru-paru dengan segala gejalanya. Dampak negatif lainnya seperti penyakit jantung, stroke, masalah kesuburan, dan gangguan pada paru-paru, misalnya PPOK (penyakit paru obstruktif kronis) dan kanker paru-paru (alodoktor.com). Diperkirakan ada lebih dari 7 000 bahan kimia yang terdapat di dalam sebatang rokok dan sekitar 70 di antaranya dapat menyebabkan kanker. Rokok juga berbahaya bagi orang lain di sekitar perokok, yang mungkin terpapar dengan asap rokok (perokok pasif). Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan lansia untuk meredam kebiasaan mereka untuk merokok.

Gambar 5.13 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021

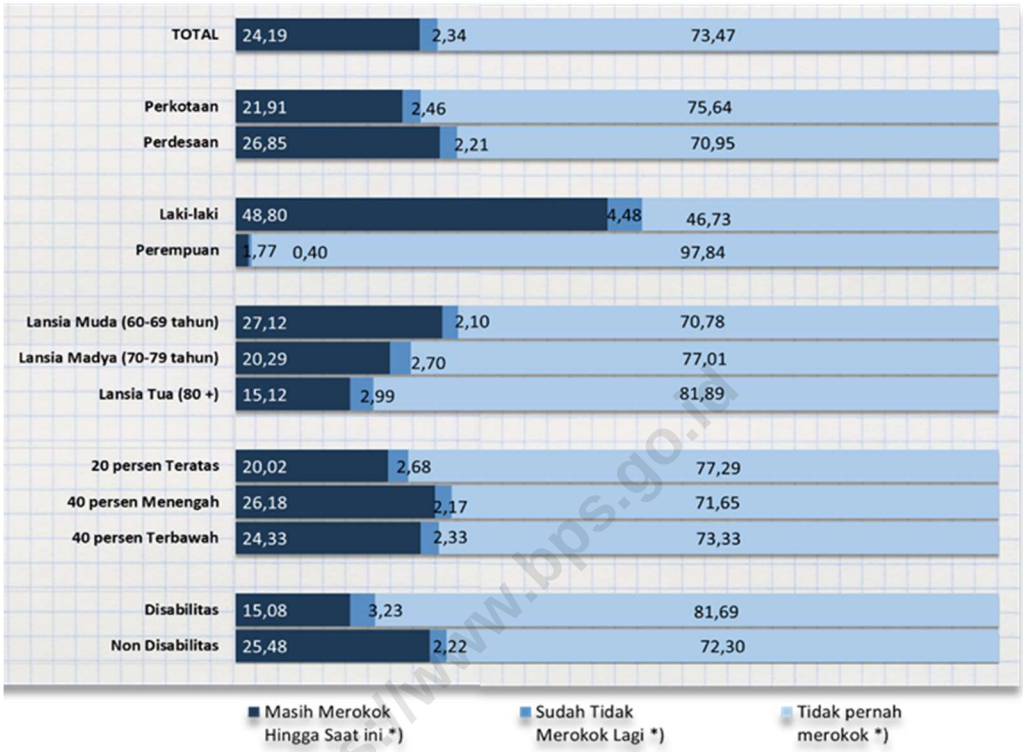

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Gambar 5.13 di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 73,47 persen lansia mengaku tidak pernah merokok dan 2,34 persen lansia pernah merokok setidaknya satu bulan sebelum waktu wawancara. Namun demikian, terdapat sekitar 24,19 persen lansia yang masih merokok dalam sebulan terakhir. Meskipun terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara lansia laki-laki dan perempuan yang pernah dan masih merokok, namun persentase lansia laki-laki yang tidak pernah merokok sama sekali juga cukup tinggi (46,73 persen). Di sisi lain, meskipun merokok sangat berdampak negatif bagi kesehatan, terutama lansia, namun masih terdapat sekitar 15,12 persen lansia berusia 80 tahun ke atas yang masih merokok hingga saat ini. Pada umumnya, seseorang memulai mencoba merokok di usia remaja dan menjadi suatu kebiasaan sampai dewasa dan lansia. Semakin lama penggunaan rokok, tingkat ketergantungan merokok akan semakin tinggi (Risdiana & Proboningrum, 2019).

Gambar 5.14 Persentase Lansia Menurut Kebiasaan Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Hasil Susenas Maret 2021 menunjukkan bahwa 24,19 persen lansia masih merokok dalam sebulan terakhir, dengan intensitas merokok yang berbeda-beda. Intensitas merokok mencerminkan seberapa akut kebiasaan merokok. Lansia yang merokok setiap hari tentu jauh lebih berisiko terkena penyakit daripada yang tidak setiap hari. Sayangnya, persentase lansia yang merokok setiap hari jauh lebih besar (22,10 persen) dibandingkan yang merokok tidak setiap hari (2,09 persen). Bahkan lansia yang berusia 80 tahun ke atas, persentasenya juga masih cukup tinggi (13,31 persen). Menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang merokok jauh lebih besar dari lansia perempuan (44,72 persen berbanding 1,49 persen). Menurut status disabilitas, masih ada sebanyak 13,04 persen lansia penyandang disabilitas yang merokok setiap hari.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	44,02	39,83	42,12
Perempuan	46,83	41,30	44,23
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	42,70	38,47	40,77
Lansia Madya (70-79 Tahun)	50,54	43,93	47,46
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	50,30	45,04	47,68
Kelompok Ekonomi			
20 Persen Teratas	42,37	42,97	42,51
40 Persen Menengah	46,58	42,24	44,50
40 Persen Terbawah	46,74	38,95	42,43
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	60,63	56,04	58,36
Non Disabilitas	43,47	38,25	41,08
Indonesia	**45,47**	**40,61**	**43,22**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.2 Angka Kesakitan Penduduk Lanjut Usia Menurut Tipe Daerah (persen), 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	25,06	20,99	23,21
Perempuan	22,35	21,23	21,82
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	21,43	18,96	20,30
Lansia Madya (70-79 Tahun)	27,56	24,04	25,92
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	28,14	26,86	27,50
Kelompok Ekonomi			
20 Persen Teratas	21,06	22,09	21,30
40 Persen Menengah	23,59	21,58	22,62
40 Persen Terbawah	25,73	20,59	22,89
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	39,96	39,28	39,63
Non Disabilitas	21,51	18,34	20,06
Indonesia	**23,66**	**21,12**	**22,48**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.3 Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	82,66	80,73	81,83
Perempuan	80,89	79,83	80,43
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	81,87	81,50	81,71
Lansia Madya (70-79 Tahun)	81,55	77,86	79,96
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	81,34	79,95	80,69
Kelompok Ekonomi			
20 Persen Teratas	84,49	81,02	82,73
40 Persen Menengah	82,36	80,04	81,30
40 Persen Terbawah	76,84	77,23	76,93
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	78,05	77,25	77,67
Non Disabilitas	82,40	80,91	81,76
Indonesia	**81,72**	**80,24**	**81,08**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.4 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	46,48	40,82	44,05
Perempuan	49,41	43,04	46,62
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	48,03	41,15	45,06
Lansia Madya (70-79 Tahun)	48,92	43,76	46,69
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	45,07	42,02	43,64
Kelompok Ekonomi			
20 Persen Teratas	43,79	38,84	41,28
40 Persen Menengah	47,84	44,36	46,26
40 Persen Terbawah	54,41	48,33	53,00
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	51,13	45,77	48,58
Non Disabilitas	47,46	41,19	44,79
Indonesia	**48,03**	**42,02**	**45,42**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	6,13	5,38	5,79
Perempuan	5,24	4,27	4,78
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	5,67	4,69	5,22
Lansia Madya (70-79 Tahun)	5,60	5,06	5,35
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	5,87	4,66	5,27
Kelompok Ekonomi			
20 Persen Teratas	8,63	10,13	8,97
40 Persen Menengah	5,44	5,44	5,44
40 Persen Terbawah	3,63	3,32	3,46
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	9,94	8,22	9,09
Non Disabilitas	5,11	4,26	4,72
Indonesia	**5,67**	**4,79**	**5,26**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.6 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Kebiasaan Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021

Karakteristik	Kebiasaan Merokok					Jumlah (4)+(5)+(6)
	Sebulan Terakhir			Pernah Merokok Sebelumnya	Tidak Pernah Merokok	
	Frekuensi		Masih Merokok			
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	20,04	1,86	21,91	2,46	75,64	100,00
Perdesaan	24,49	2,36	26,85	2,21	70,95	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	44,72	4,08	48,80	4,48	46,73	100,00
Perempuan	1,49	0,28	1,77	0,40	97,84	100,00
Kelompok Umur						
Lansia Muda	24,97	2,15	27,12	2,10	70,78	100,00
Lansia Madya	18,26	2,04	20,29	2,70	77,01	100,00
Lansia Tua	13,31	1,81	15,12	2,99	81,89	100,00
Kelompok Ekonomi						
20 Persen Teratas	18,63	1,39	20,02	2,68	77,29	100,00
40 Persen Menengah	24,19	1,99	26,18	2,17	71,65	100,00
40 Persen Terbawah	21,84	2,50	24,33	2,33	73,33	100,00
Status Disabilitas						
Penyandang Disabilitas	13,04	2,04	15,08	3,23	81,69	100,00
Non Disabilitas	23,38	2,10	25,48	2,22	72,30	100,00
Indonesia	**22,10**	**2,09**	**24,19**	**2,34**	**73,47**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.7 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	45,83	49,15	43,15	52,50	48,14
12 Sumatera Utara	36,74	41,89	37,17	40,75	39,10
13 Sumatera Barat	42,42	41,09	40,16	43,05	41,71
14 Riau	48,68	37,03	39,91	43,19	41,51
15 Jambi	28,83	35,70	31,43	35,58	33,50
16 Sumatera Selatan	50,70	43,57	44,55	47,60	46,12
17 Bengkulu	54,48	40,01	43,62	44,74	44,17
18 Lampung	49,33	43,52	43,60	46,89	45,21
19 Kep. Bangka Belitung	49,42	44,51	46,00	48,94	47,42
21 Kepulauan Riau	32,62	31,12	29,47	35,45	32,41
31 DKI Jakarta	40,90	-	41,19	40,64	40,90
32 Jawa Barat	46,81	44,94	45,88	46,69	46,29
33 Jawa Tengah	47,56	38,54	42,03	43,82	42,98
34 DI Yogyakarta	46,28	34,52	41,76	42,68	42,26
35 Jawa Timur	46,23	36,38	40,30	42,39	41,42
36 Banten	48,05	42,12	43,15	48,88	46,01
51 Bali	31,90	36,81	34,58	32,79	33,63
52 Nusa Tenggara Barat	56,88	62,91	59,77	60,09	59,94
53 Nusa Tenggara Timur	46,89	48,73	47,62	48,94	48,32
61 Kalimantan Barat	36,13	43,23	39,66	41,50	40,58
62 Kalimantan Tengah	41,87	35,81	37,03	39,63	38,23
63 Kalimantan Selatan	59,31	52,34	52,91	58,01	55,57
64 Kalimantan Timur	44,30	33,76	40,27	41,49	40,85
65 Kalimantan Utara	45,51	44,04	42,14	48,20	44,88
71 Sulawesi Utara	40,58	34,19	37,52	37,37	37,44
72 Sulawesi Tengah	56,15	45,15	46,81	49,81	48,33
73 Sulawesi Selatan	44,77	38,28	38,31	42,94	40,88
74 Sulawesi Tenggara	48,46	43,00	44,36	45,07	44,73
75 Gorontalo	61,59	52,94	52,98	60,22	56,85
76 Sulawesi Barat	52,16	41,70	45,36	42,76	43,97
81 Maluku	28,58	30,37	28,65	30,57	29,63
82 Maluku Utara	30,30	35,85	33,81	34,88	34,35
91 Papua Barat	40,78	35,88	37,91	38,11	38,00
94 Papua	27,83	27,13	28,91	25,52	27,43
Indonesia	**45,47**	**40,61**	**42,12**	**44,23**	**43,22**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.8 Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin (persen), 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	23,53	30,35	26,18	30,09	28,27
12 Sumatera Utara	18,88	23,07	20,36	21,17	20,80
13 Sumatera Barat	22,82	22,73	22,96	22,61	22,77
14 Riau	24,18	18,31	23,31	17,69	20,57
15 Jambi	11,65	18,31	15,43	16,92	16,17
16 Sumatera Selatan	24,82	18,82	19,71	22,15	20,97
17 Bengkulu	28,72	21,51	24,44	22,69	23,58
18 Lampung	23,49	22,10	22,83	22,16	22,50
19 Kep. Bangka Belitung	21,18	18,78	23,09	17,14	20,20
21 Kepulauan Riau	13,81	17,68	13,27	15,47	14,35
31 DKI Jakarta	17,42	-	21,62	13,55	17,42
32 Jawa Barat	23,60	22,91	28,26	18,80	23,41
33 Jawa Tengah	28,48	19,73	24,32	23,80	24,04
34 DI Yogyakarta	19,83	15,54	21,69	15,58	18,36
35 Jawa Timur	25,94	17,08	21,88	21,37	21,61
36 Banten	23,14	24,32	18,44	28,67	23,55
51 Bali	18,67	23,24	22,23	18,54	20,28
52 Nusa Tenggara Barat	26,65	40,39	33,26	33,92	33,62
53 Nusa Tenggara Timur	19,75	29,32	27,06	27,36	27,22
61 Kalimantan Barat	15,30	23,75	18,93	22,25	20,60
62 Kalimantan Tengah	17,57	16,45	14,81	19,32	16,90
63 Kalimantan Selatan	29,08	24,36	27,71	25,47	26,54
64 Kalimantan Timur	23,53	19,81	16,64	28,64	22,31
65 Kalimantan Utara	21,94	22,68	19,46	25,61	22,25
71 Sulawesi Utara	17,76	20,14	17,33	20,43	18,93
72 Sulawesi Tengah	26,28	27,77	23,98	30,63	27,34
73 Sulawesi Selatan	22,32	18,66	17,22	22,46	20,13
74 Sulawesi Tenggara	22,40	24,77	25,36	22,79	24,02
75 Gorontalo	31,57	32,08	27,51	35,63	31,85
76 Sulawesi Barat	36,47	23,68	28,77	24,44	26,45
81 Maluku	13,94	20,31	17,10	18,24	17,69
82 Maluku Utara	19,86	23,41	23,03	21,87	22,45
91 Papua Barat	18,89	17,06	22,61	12,44	17,85
94 Papua	16,61	16,56	17,50	15,39	16,58
Indonesia	**23,66**	**21,12**	**23,21**	**21,82**	**22,48**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.9 Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	74,73	73,62	74,81	73,32	73,94
12 Sumatera Utara	81,05	79,00	79,42	80,54	80,05
13 Sumatera Barat	65,29	67,06	69,00	63,98	66,22
14 Riau	80,33	82,50	80,73	82,29	81,52
15 Jambi	79,80	83,76	84,99	80,59	82,66
16 Sumatera Selatan	84,58	84,15	83,91	84,68	84,32
17 Bengkulu	84,11	80,37	82,81	80,57	81,69
18 Lampung	85,70	77,24	79,19	80,64	79,93
19 Kep. Bangka Belitung	80,70	77,40	79,49	79,39	79,44
21 Kepulauan Riau	66,39	68,20	64,13	68,80	66,64
31 DKI Jakarta	79,68	-	80,45	78,95	79,68
32 Jawa Barat	84,99	86,61	86,82	84,13	85,43
33 Jawa Tengah	81,01	80,37	82,41	79,30	80,72
34 DI Yogyakarta	70,86	67,24	69,00	70,54	69,85
35 Jawa Timur	81,79	80,66	81,77	80,92	81,30
36 Banten	88,48	91,52	90,07	88,88	89,44
51 Bali	66,10	61,50	64,87	63,79	64,32
52 Nusa Tenggara Barat	83,77	76,97	78,79	81,27	80,15
53 Nusa Tenggara Timur	77,93	74,18	75,40	74,62	74,98
61 Kalimantan Barat	76,24	83,88	84,39	78,46	81,34
62 Kalimantan Tengah	88,05	86,94	86,33	88,62	87,43
63 Kalimantan Selatan	87,32	89,75	87,52	89,41	88,55
64 Kalimantan Timur	78,96	86,44	80,71	81,29	80,99
65 Kalimantan Utara	67,20	70,13	70,55	66,17	68,42
71 Sulawesi Utara	75,70	70,20	74,74	71,83	73,24
72 Sulawesi Tengah	86,18	79,44	81,76	81,65	81,70
73 Sulawesi Selatan	83,20	78,34	80,07	80,76	80,47
74 Sulawesi Tenggara	85,06	83,59	85,15	83,13	84,09
75 Gorontalo	72,71	81,36	79,69	75,16	77,12
76 Sulawesi Barat	80,14	77,78	79,85	77,03	78,38
81 Maluku	80,86	73,90	79,61	74,04	76,66
82 Maluku Utara	74,52	78,90	79,52	76,25	77,85
91 Papua Barat	82,84	68,90	72,88	78,22	75,38
94 Papua	66,11	60,02	62,12	63,39	62,64
Indonesia	**81,72**	**80,24**	**81,83**	**80,43**	**81,08**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.10 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	59,42	64,21	64,85	61,35	62,82
12 Sumatera Utara	46,73	44,64	48,62	43,44	45,71
13 Sumatera Barat	65,50	53,24	58,52	59,48	59,05
14 Riau	47,85	34,79	48,80	32,79	40,68
15 Jambi	50,49	35,00	36,93	41,38	39,28
16 Sumatera Selatan	57,04	31,91	41,13	42,40	41,81
17 Bengkulu	48,74	43,09	47,04	43,11	45,09
18 Lampung	49,15	43,05	49,02	41,09	44,99
19 Kep. Bangka Belitung	43,96	39,20	50,33	33,97	42,14
21 Kepulauan Riau	49,32	43,23	50,99	46,36	48,50
31 DKI Jakarta	54,66	-	64,66	45,31	54,66
32 Jawa Barat	46,25	38,87	51,88	37,18	44,27
33 Jawa Tengah	47,61	43,60	34,73	55,07	45,79
34 DI Yogyakarta	50,65	53,13	58,89	45,16	51,35
35 Jawa Timur	47,09	40,69	37,84	49,68	44,34
36 Banten	46,04	36,77	35,87	49,53	43,12
51 Bali	67,10	66,18	69,50	64,15	66,75
52 Nusa Tenggara Barat	48,59	56,31	55,36	50,52	52,70
53 Nusa Tenggara Timur	34,46	42,31	40,08	41,12	40,64
61 Kalimantan Barat	47,65	36,08	34,62	44,93	39,92
62 Kalimantan Tengah	39,00	30,04	28,38	40,01	33,96
63 Kalimantan Selatan	41,38	29,84	39,70	32,06	35,54
64 Kalimantan Timur	51,25	38,98	34,52	62,43	47,92
65 Kalimantan Utara	45,29	49,83	42,84	51,75	47,18
71 Sulawesi Utara	49,03	54,50	41,58	60,77	51,49
72 Sulawesi Tengah	38,77	40,30	35,38	43,83	39,78
73 Sulawesi Selatan	42,35	36,48	34,03	42,65	39,05
74 Sulawesi Tenggara	31,03	31,87	32,77	30,51	31,58
75 Gorontalo	52,10	46,73	40,50	56,14	49,36
76 Sulawesi Barat	49,99	32,89	35,63	38,82	37,29
81 Maluku	38,11	38,37	41,55	35,35	38,27
82 Maluku Utara	36,30	39,73	39,69	38,16	38,91
91 Papua Barat	45,09	48,33	58,15	33,98	46,82
94 Papua	55,45	45,06	47,29	52,79	49,52
Indonesia	**48,03**	**42,02**	**44,05**	**46,62**	**45,42**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.11 Persentase Lansia yang Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Fasilitas Kesehatan, 2021

Provinsi	Fasilitas Kesehatan							
	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Dokter Bersama	Puskes-mas/ Pustu	UKBM	Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 Aceh	23,87	3,64	32,01	12,73	40,64	5,45	3,07	1,45
12 Sumatera Utara	9,60	9,38	51,29	9,54	21,27	1,63	2,81	1,59
13 Sumatera Barat	14,32	8,81	38,04	15,14	23,84	2,95	3,67	0,71
14 Riau	10,31	10,14	31,70	30,00	17,40	2,46	1,54	0,00
15 Jambi	11,68	7,26	41,35	9,84	33,72	2,20	2,64	0,67
16 Sumatera Selatan	8,58	4,40	35,68	33,07	13,16	7,45	1,99	0,89
17 Bengkulu	7,83	9,34	44,96	20,54	20,65	4,72	1,98	1,12
18 Lampung	2,78	7,41	49,20	25,18	17,25	1,23	3,22	0,40
19 Kep. Bangka Belitung	13,29	13,01	22,88	24,88	25,41	0,96	2,16	3,50
21 Kepulauan Riau	20,91	21,98	17,81	9,55	28,01	1,39	1,86	5,39
31 DKI Jakarta	22,77	16,23	5,62	40,72	20,14	0,17	1,56	1,18
32 Jawa Barat	7,05	10,22	31,58	36,59	17,92	1,24	2,96	1,70
33 Jawa Tengah	6,16	9,93	37,67	30,52	15,37	2,62	1,96	1,27
34 DI Yogyakarta	5,59	20,93	26,13	28,70	22,43	0,84	1,03	0,69
35 Jawa Timur	6,01	7,41	47,50	22,53	14,25	4,27	3,58	1,21
36 Banten	6,79	10,91	22,40	41,55	26,29	0,53	2,06	1,44
51 Bali	7,66	11,39	49,71	12,37	23,71	1,45	1,29	0,75
52 Nusa Tenggara Barat	7,59	1,30	48,80	15,03	29,28	5,95	3,94	3,56
53 Nusa Tenggara Timur	6,80	3,86	15,37	9,52	51,81	18,13	1,08	1,16
61 Kalimantan Barat	8,57	3,97	37,52	10,55	36,25	7,30	2,92	2,44
62 Kalimantan Tengah	13,45	1,44	33,21	23,92	23,77	7,18	0,64	0,91
63 Kalimantan Selatan	9,97	6,36	33,85	19,99	23,91	8,30	3,04	0,30
64 Kalimantan Timur	13,16	11,42	14,08	36,70	28,32	1,84	0,58	0,65
65 Kalimantan Utara	30,23	1,78	13,66	17,50	48,24	2,38	0,05	0,00
71 Sulawesi Utara	10,15	5,51	33,65	20,38	31,08	3,57	0,28	0,62
72 Sulawesi Tengah	7,83	1,00	22,75	17,57	43,71	6,84	0,96	1,40
73 Sulawesi Selatan	8,71	6,84	26,83	23,35	32,62	3,06	1,73	2,93
74 Sulawesi Tenggara	9,30	6,60	14,08	15,85	54,74	3,59	1,60	2,13
75 Gorontalo	9,10	0,69	36,16	21,22	27,38	6,97	0,91	0,42
76 Sulawesi Barat	14,80	0,28	20,94	16,79	51,31	1,16	1,43	2,39
81 Maluku	12,43	4,94	26,00	9,97	48,12	3,19	0,43	3,42
82 Maluku Utara	13,21	2,18	15,86	6,30	58,33	6,70	2,90	0,35
91 Papua Barat	12,48	3,73	12,70	29,41	41,55	1,35	1,31	0,58
94 Papua	15,80	3,58	8,54	11,51	64,71	1,09	0,06	0,25
Indonesia	**8,44**	**8,80**	**35,81**	**26,41**	**21,31**	**3,16**	**2,52**	**1,38**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.12 Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2021

Provinsi	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan				Jumlah
	Tidak Ada Biaya	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	1,00	67,68	20,35	10,97	100,00
12 Sumatera Utara	2,24	68,89	23,06	5,81	100,00
13 Sumatera Barat	2,08	66,89	21,90	9,13	100,00
14 Riau	1,77	55,81	23,97	18,46	100,00
15 Jambi	2,20	68,20	18,58	11,02	100,00
16 Sumatera Selatan	2,14	73,87	15,90	8,09	100,00
17 Bengkulu	2,20	64,11	20,80	12,90	100,00
18 Lampung	1,03	63,47	23,05	12,44	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	0,63	69,10	12,05	18,21	100,00
21 Kepulauan Riau	1,09	66,23	22,18	10,50	100,00
31 DKI Jakarta	0,00	55,51	15,39	29,10	100,00
32 Jawa Barat	3,60	61,59	14,96	19,85	100,00
33 Jawa Tengah	0,86	80,08	13,85	5,21	100,00
34 DI Yogyakarta	0,26	65,22	12,72	21,80	100,00
35 Jawa Timur	0,99	78,19	15,40	5,42	100,00
36 Banten	5,37	59,82	17,00	17,81	100,00
51 Bali	0,66	77,17	13,51	8,66	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	3,04	76,24	15,06	5,66	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	1,44	73,69	11,96	12,92	100,00
61 Kalimantan Barat	2,23	67,17	25,36	5,24	100,00
62 Kalimantan Tengah	1,33	73,17	10,49	15,01	100,00
63 Kalimantan Selatan	0,81	77,87	9,21	12,11	100,00
64 Kalimantan Timur	0,08	47,28	15,88	36,75	100,00
65 Kalimantan Utara	2,77	55,30	15,32	26,61	100,00
71 Sulawesi Utara	0,60	65,47	12,56	21,37	100,00
72 Sulawesi Tengah	1,63	66,34	17,92	14,10	100,00
73 Sulawesi Selatan	1,12	67,99	15,50	15,39	100,00
74 Sulawesi Tenggara	2,45	69,48	14,09	13,97	100,00
75 Gorontalo	0,60	79,06	10,60	9,73	100,00
76 Sulawesi Barat	2,80	71,45	14,12	11,63	100,00
81 Maluku	4,58	65,73	22,88	6,81	100,00
82 Maluku Utara	1,91	68,65	18,68	10,75	100,00
91 Papua Barat	0,59	56,85	20,06	22,51	100,00
94 Papua	2,20	55,34	27,60	14,85	100,00
Indonesia	**1,85**	**70,24**	**15,96**	**11,95**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.13 Persentase Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2021

Provinsi	Menggunakan Jaminan Kesehatan	Jenis Jaminan Kesehatan				
		BPJS PBI	BPJS Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Fasilitas Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	65,10	88,74	9,88	1,84	0,00	0,35
12 Sumatera Utara	34,67	57,79	34,12	1,99	0,65	5,51
13 Sumatera Barat	48,58	51,33	43,79	3,00	0,05	1,83
14 Riau	47,76	48,49	43,77	18,87	0,00	1,19
15 Jambi	41,72	49,44	49,96	0,60	0,00	0,00
16 Sumatera Selatan	49,22	42,37	50,12	4,21	1,99	1,31
17 Bengkulu	45,69	51,38	47,97	0,65	0,00	0,00
18 Lampung	35,07	61,15	29,87	7,65	0,00	1,59
19 Kep. Bangka Belitung	67,38	51,27	48,25	0,04	0,00	0,44
21 Kepulauan Riau	60,85	45,46	54,54	0,00	0,00	0,00
31 DKI Jakarta	72,94	57,74	39,95	0,00	0,89	3,00
32 Jawa Barat	46,10	57,36	35,70	5,41	0,61	1,63
33 Jawa Tengah	46,76	61,56	32,98	7,05	0,09	0,76
34 DI Yogyakarta	55,82	62,75	34,97	0,00	0,00	2,28
35 Jawa Timur	34,29	53,34	36,73	6,99	0,56	3,69
36 Banten	48,58	59,30	36,90	5,70	1,56	0,00
51 Bali	48,77	47,73	42,44	8,55	0,99	0,29
52 Nusa Tenggara Barat	25,40	70,48	28,15	2,33	0,00	0,00
53 Nusa Tenggara Timur	70,03	81,04	13,68	5,64	0,00	0,05
61 Kalimantan Barat	44,64	61,87	30,15	6,50	0,00	1,48
62 Kalimantan Tengah	47,05	48,32	49,97	0,00	1,71	0,00
63 Kalimantan Selatan	53,73	40,65	57,49	1,21	0,00	0,65
64 Kalimantan Timur	71,35	50,49	43,65	1,49	2,77	2,98
65 Kalimantan Utara	75,60	63,47	36,53	0,00	0,00	0,00
71 Sulawesi Utara	64,39	60,00	37,27	1,38	0,00	1,35
72 Sulawesi Tengah	63,39	70,36	29,06	0,58	0,00	0,00
73 Sulawesi Selatan	62,04	56,94	40,39	1,54	0,07	1,07
74 Sulawesi Tenggara	70,36	71,56	23,28	5,16	0,00	0,00
75 Gorontalo	48,71	75,15	23,23	0,50	0,00	1,11
76 Sulawesi Barat	67,10	58,47	29,58	14,65	0,00	0,00
81 Maluku	54,74	69,28	23,22	7,51	0,00	0,00
82 Maluku Utara	67,59	61,46	19,11	20,41	0,00	0,00
91 Papua Barat	71,51	72,02	11,61	19,35	0,00	0,00
94 Papua	79,94	58,29	8,99	33,94	0,00	0,00
Indonesia	**65,10**	**88,74**	**9,88**	**1,84**	**0,00**	**0,35**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.14 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	10,31	11,21	11,64	10,31	10,93
12 Sumatera Utara	6,46	4,38	5,74	5,31	5,51
13 Sumatera Barat	5,97	4,30	5,33	4,87	5,08
14 Riau	5,57	5,02	5,99	4,43	5,23
15 Jambi	5,52	5,36	6,01	4,80	5,41
16 Sumatera Selatan	5,65	3,49	5,32	3,28	4,26
17 Bengkulu	5,70	4,75	6,17	3,83	5,02
18 Lampung	5,52	5,43	5,46	5,46	5,46
19 Kep. Bangka Belitung	4,89	6,10	5,94	4,79	5,38
21 Kepulauan Riau	4,22	4,33	5,53	2,89	4,24
31 DKI Jakarta	6,33	-	7,76	5,01	6,33
32 Jawa Barat	5,42	6,09	6,37	4,88	5,61
33 Jawa Tengah	6,51	4,55	5,77	5,29	5,51
34 DI Yogyakarta	4,74	4,79	5,81	3,88	4,76
35 Jawa Timur	4,84	4,23	4,94	4,19	4,54
36 Banten	4,67	4,25	4,82	4,24	4,53
51 Bali	4,46	3,59	5,76	2,71	4,15
52 Nusa Tenggara Barat	7,62	8,03	9,35	6,56	7,82
53 Nusa Tenggara Timur	5,22	3,95	4,85	3,68	4,23
61 Kalimantan Barat	5,80	3,76	4,56	4,49	4,52
62 Kalimantan Tengah	3,67	3,41	4,06	2,89	3,52
63 Kalimantan Selatan	5,70	3,38	5,17	3,80	4,46
64 Kalimantan Timur	6,76	5,08	6,36	6,04	6,21
65 Kalimantan Utara	11,32	8,32	10,69	9,28	10,05
71 Sulawesi Utara	7,00	5,88	5,71	7,13	6,45
72 Sulawesi Tengah	7,62	5,39	6,33	5,74	6,03
73 Sulawesi Selatan	6,70	4,41	5,59	5,11	5,33
74 Sulawesi Tenggara	2,94	3,57	4,01	2,79	3,37
75 Gorontalo	7,76	7,09	6,50	8,16	7,39
76 Sulawesi Barat	3,05	4,26	3,21	4,68	4,00
81 Maluku	3,33	2,40	4,29	1,34	2,78
82 Maluku Utara	6,19	4,42	5,69	4,12	4,90
91 Papua Barat	7,86	2,95	5,87	4,18	5,08
94 Papua	5,67	2,57	3,85	3,92	3,88
Indonesia	**5,67**	**4,79**	**5,79**	**4,78**	**5,26**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.15 Rata-rata Lama Rawat Inap Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin (hari), 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	6,56	5,72	6,37	5,56	5,96
12 Sumatera Utara	7,57	6,93	7,42	7,26	7,33
13 Sumatera Barat	6,73	6,41	7,32	5,90	6,59
14 Riau	8,54	4,97	7,46	4,97	6,43
15 Jambi	4,65	6,08	6,16	4,92	5,61
16 Sumatera Selatan	6,09	4,34	4,99	5,44	5,17
17 Bengkulu	4,68	4,83	4,76	4,81	4,78
18 Lampung	5,78	4,04	5,09	3,99	4,55
19 Kep. Bangka Belitung	6,29	4,35	6,00	4,61	5,40
21 Kepulauan Riau	8,06	4,64	8,88	4,96	7,56
31 DKI Jakarta	7,32	-	7,55	7,00	7,32
32 Jawa Barat	5,32	5,16	5,24	5,31	5,27
33 Jawa Tengah	5,54	5,57	5,76	5,35	5,55
34 DI Yogyakarta	5,78	6,24	6,33	5,46	5,94
35 Jawa Timur	6,61	5,32	6,46	5,58	6,03
36 Banten	5,34	5,11	5,43	5,07	5,26
51 Bali	5,93	5,28	5,92	5,37	5,73
52 Nusa Tenggara Barat	5,31	6,20	7,21	4,08	5,77
53 Nusa Tenggara Timur	5,79	5,36	5,93	4,95	5,47
61 Kalimantan Barat	5,53	5,52	6,26	4,79	5,53
62 Kalimantan Tengah	5,48	6,98	7,62	4,29	6,35
63 Kalimantan Selatan	7,60	6,02	8,28	5,31	6,96
64 Kalimantan Timur	5,49	6,23	5,99	5,34	5,69
65 Kalimantan Utara	8,67	6,76	7,18	9,13	8,00
71 Sulawesi Utara	8,21	6,35	7,01	7,65	7,38
72 Sulawesi Tengah	4,36	7,15	6,78	5,42	6,13
73 Sulawesi Selatan	8,04	5,29	6,52	6,82	6,68
74 Sulawesi Tenggara	5,40	4,42	5,41	3,73	4,69
75 Gorontalo	9,48	5,84	8,45	6,96	7,57
76 Sulawesi Barat	8,21	5,79	7,91	5,17	6,19
81 Maluku	5,14	4,96	5,18	4,64	5,05
82 Maluku Utara	4,77	7,22	6,74	5,89	6,38
91 Papua Barat	9,47	4,56	9,70	4,90	7,85
94 Papua	10,86	18,90	11,93	16,48	13,94
Indonesia	**6,18**	**5,53**	**6,18**	**5,60**	**5,91**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.16 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Lama Rawat Inap, 2021

Provinsi	Lama Rawat Inap (hari)				Jumlah
	1 – 3 hari	4 – 7 hari	8 – 14 hari	Lebih dari 14 hari	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	36,70	43,87	13,02	6,41	100,00
12 Sumatera Utara	30,21	48,51	12,18	9,10	100,00
13 Sumatera Barat	31,59	40,67	19,55	8,19	100,00
14 Riau	39,74	45,59	12,12	2,54	100,00
15 Jambi	40,15	41,12	13,42	5,31	100,00
16 Sumatera Selatan	52,16	31,91	13,21	2,73	100,00
17 Bengkulu	47,41	41,52	8,79	2,28	100,00
18 Lampung	55,97	31,63	10,14	2,26	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	49,94	35,98	8,21	5,87	100,00
21 Kepulauan Riau	28,65	44,28	24,96	2,11	100,00
31 DKI Jakarta	23,12	50,96	19,89	6,03	100,00
32 Jawa Barat	46,95	36,46	10,77	5,82	100,00
33 Jawa Tengah	43,41	40,47	12,50	3,63	100,00
34 DI Yogyakarta	28,54	53,02	10,59	7,85	100,00
35 Jawa Timur	33,68	47,73	13,26	5,33	100,00
36 Banten	36,16	50,76	9,50	3,59	100,00
51 Bali	39,12	41,18	15,62	4,08	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	46,76	38,33	9,29	5,62	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	46,41	40,63	8,70	4,27	100,00
61 Kalimantan Barat	48,47	30,92	15,79	4,82	100,00
62 Kalimantan Tengah	44,32	28,05	19,89	7,74	100,00
63 Kalimantan Selatan	42,60	33,85	11,59	11,97	100,00
64 Kalimantan Timur	44,92	32,83	15,28	6,97	100,00
65 Kalimantan Utara	31,41	39,45	19,37	9,77	100,00
71 Sulawesi Utara	26,09	45,92	21,93	6,06	100,00
72 Sulawesi Tengah	45,07	41,22	5,71	8,01	100,00
73 Sulawesi Selatan	41,55	36,99	13,94	7,51	100,00
74 Sulawesi Tenggara	58,70	27,14	11,40	2,77	100,00
75 Gorontalo	30,88	43,95	14,22	10,95	100,00
76 Sulawesi Barat	39,67	41,46	10,10	8,78	100,00
81 Maluku	43,18	44,16	10,88	1,78	100,00
82 Maluku Utara	44,39	35,41	13,59	6,61	100,00
91 Papua Barat	48,95	29,17	10,18	11,70	100,00
94 Papua	31,56	39,88	16,12	12,43	100,00
Indonesia	**40,27**	**41,57**	**12,70**	**5,46**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.17 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2021

Provinsi	Tempat Rawat Inap						
	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Dokter Bersama	Puskes-mas/ Pustu	Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	67,74	17,11	0,63	2,84	14,82	0,22	0,00
12 Sumatera Utara	38,00	54,74	1,56	4,97	2,04	0,63	0,52
13 Sumatera Barat	60,58	24,34	1,43	3,63	15,01	0,48	0,00
14 Riau	38,28	47,25	2,66	6,86	4,39	1,19	0,00
15 Jambi	45,77	30,68	3,68	8,42	20,52	0,00	0,00
16 Sumatera Selatan	46,24	33,77	6,58	10,71	2,93	0,54	0,66
17 Bengkulu	53,37	39,73	0,00	5,95	7,03	0,00	0,00
18 Lampung	23,42	45,05	3,77	19,32	10,38	0,80	0,88
19 Kep. Bangka Belitung	54,18	35,83	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
21 Kepulauan Riau	68,43	18,18	0,00	3,78	11,07	0,00	1,38
31 DKI Jakarta	60,81	35,05	0,00	3,91	2,75	1,02	0,00
32 Jawa Barat	33,53	39,54	0,40	14,38	13,75	0,70	0,90
33 Jawa Tengah	34,92	45,17	0,15	8,90	12,99	1,07	0,08
34 DI Yogyakarta	28,33	63,97	0,00	3,87	6,09	0,00	0,00
35 Jawa Timur	38,73	37,83	0,89	11,31	16,17	0,00	0,90
36 Banten	33,50	41,27	2,17	9,28	13,03	1,71	1,45
51 Bali	42,30	52,25	0,00	2,15	4,91	0,00	0,00
52 Nusa Tenggara Barat	34,27	12,78	1,81	12,44	41,61	0,00	2,51
53 Nusa Tenggara Timur	50,15	29,49	0,00	0,41	23,16	0,00	0,00
61 Kalimantan Barat	60,13	25,26	0,00	2,79	13,85	0,00	0,00
62 Kalimantan Tengah	66,54	19,21	0,00	2,49	15,56	0,86	1,21
63 Kalimantan Selatan	67,41	21,57	0,00	4,75	13,28	0,00	0,00
64 Kalimantan Timur	61,29	35,69	0,00	2,76	5,29	0,00	0,00
65 Kalimantan Utara	91,38	2,87	0,00	0,95	9,98	0,00	0,00
71 Sulawesi Utara	46,22	45,48	0,93	0,15	11,30	0,00	0,00
72 Sulawesi Tengah	58,81	11,69	0,00	0,79	30,09	0,00	0,00
73 Sulawesi Selatan	50,42	23,42	0,17	5,44	25,41	0,00	0,52
74 Sulawesi Tenggara	56,87	11,78	0,00	0,54	31,91	0,00	0,00
75 Gorontalo	76,94	3,59	0,00	1,47	21,52	0,00	0,00
76 Sulawesi Barat	55,17	12,80	0,00	0,00	33,45	2,32	0,00
81 Maluku	75,03	16,65	1,54	1,12	7,36	1,54	1,54
82 Maluku Utara	59,32	21,87	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00
91 Papua Barat	66,01	31,79	0,00	1,36	8,29	0,00	0,00
94 Papua	69,44	15,33	0,00	4,27	12,80	0,00	0,00
Indonesia	**41,69**	**37,56**	**0,86**	**8,89**	**13,77**	**0,53**	**0,54**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.18 Persentase Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Rawat Inap Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2021

Provinsi	Menggunakan Jaminan Kesehatan	Jenis Jaminan Kesehatan				
		BPJS PBI	BPJS Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Fasilitas Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	94,37	88,37	11,50	1,00	0,00	0,00
12 Sumatera Utara	76,34	51,98	45,34	1,41	0,11	0,64
13 Sumatera Barat	80,16	48,23	47,74	2,04	0,11	1,88
14 Riau	68,32	46,20	48,91	4,86	0,00	1,01
15 Jambi	56,36	51,19	47,72	1,09	0,00	0,00
16 Sumatera Selatan	65,74	30,06	65,11	1,32	0,00	3,51
17 Bengkulu	78,76	59,84	39,10	1,06	0,00	0,00
18 Lampung	64,99	53,12	44,39	3,28	0,00	0,00
19 Kep. Bangka Belitung	97,79	47,63	52,37	0,00	0,00	0,00
21 Kepulauan Riau	88,86	47,66	52,34	5,33	0,00	0,00
31 DKI Jakarta	90,43	49,13	42,61	0,03	6,01	3,66
32 Jawa Barat	65,50	50,35	44,42	3,57	0,28	1,76
33 Jawa Tengah	68,06	63,51	33,95	1,35	0,48	0,70
34 DI Yogyakarta	71,14	60,45	35,96	0,00	0,00	3,59
35 Jawa Timur	62,05	57,72	35,47	4,18	1,03	1,50
36 Banten	74,20	55,38	40,71	2,06	2,41	1,51
51 Bali	88,49	48,23	40,87	7,50	2,95	0,46
52 Nusa Tenggara Barat	68,61	76,14	22,37	1,49	0,00	0,00
53 Nusa Tenggara Timur	89,68	69,71	25,31	4,96	0,00	0,17
61 Kalimantan Barat	74,02	64,29	34,34	1,78	0,00	0,00
62 Kalimantan Tengah	71,03	61,67	37,69	0,64	0,00	0,00
63 Kalimantan Selatan	81,80	43,28	53,56	3,16	0,00	0,00
64 Kalimantan Timur	86,47	46,39	49,15	0,00	3,62	0,84
65 Kalimantan Utara	90,95	54,07	45,93	0,00	0,00	0,00
71 Sulawesi Utara	95,12	54,26	41,32	1,65	0,00	2,76
72 Sulawesi Tengah	89,51	65,56	33,44	1,00	0,00	0,00
73 Sulawesi Selatan	83,93	57,36	41,10	1,38	0,00	0,16
74 Sulawesi Tenggara	90,59	73,19	23,80	3,00	0,00	0,00
75 Gorontalo	83,59	77,81	22,19	0,00	0,00	0,00
76 Sulawesi Barat	87,32	66,52	33,48	0,00	0,00	0,00
81 Maluku	92,63	67,90	30,56	1,54	0,00	0,00
82 Maluku Utara	69,45	61,35	28,54	10,11	0,00	0,00
91 Papua Barat	91,93	57,73	29,78	13,35	0,00	0,00
94 Papua	95,24	51,26	27,31	21,54	0,00	0,00
Indonesia	**71,99**	**57,24**	**38,53**	**2,55**	**0,78**	**1,17**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.19 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021

Provinsi	Kebiasaan Merokok					Jumlah (4)+(5)+(6)
	Dalam Sebulan Terakhir			Pernah Merokok Sebelumnya	Tidak Pernah Merokok	
	Frekuensi		Masih Merokok			
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	19,91	1,67	21,58	1,96	76,47	100,00
12 Sumatera Utara	20,09	1,44	21,53	2,09	76,38	100,00
13 Sumatera Barat	22,39	1,88	24,27	3,05	72,68	100,00
14 Riau	25,16	1,17	26,34	1,98	71,69	100,00
15 Jambi	19,90	1,82	21,73	2,20	76,07	100,00
16 Sumatera Selatan	23,02	2,43	25,45	1,99	72,56	100,00
17 Bengkulu	27,71	1,09	28,80	2,06	69,15	100,00
18 Lampung	28,91	1,79	30,69	2,96	66,34	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	18,98	1,64	20,61	1,62	77,77	100,00
21 Kepulauan Riau	20,64	0,33	20,97	4,55	74,48	100,00
31 DKI Jakarta	13,87	1,07	14,94	3,93	81,13	100,00
32 Jawa Barat	26,03	2,60	28,63	2,39	68,98	100,00
33 Jawa Tengah	23,18	2,02	25,20	2,25	72,55	100,00
34 DI Yogyakarta	17,43	1,97	19,40	4,36	76,24	100,00
35 Jawa Timur	21,76	2,06	23,81	2,03	74,15	100,00
36 Banten	24,66	2,03	26,68	1,03	72,29	100,00
51 Bali	11,01	0,77	11,78	1,39	86,83	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	27,17	2,04	29,20	2,38	68,42	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	14,64	4,20	18,84	2,54	78,62	100,00
61 Kalimantan Barat	22,94	1,30	24,24	3,15	72,62	100,00
62 Kalimantan Tengah	25,51	1,86	27,38	2,10	70,53	100,00
63 Kalimantan Selatan	16,67	1,17	17,84	3,61	78,54	100,00
64 Kalimantan Timur	17,34	1,41	18,76	2,40	78,84	100,00
65 Kalimantan Utara	19,43	1,74	21,17	2,91	75,92	100,00
71 Sulawesi Utara	18,13	3,57	21,70	3,05	75,25	100,00
72 Sulawesi Tengah	21,71	2,21	23,92	3,27	72,81	100,00
73 Sulawesi Selatan	17,09	1,88	18,96	1,80	79,24	100,00
74 Sulawesi Tenggara	19,91	2,11	22,01	3,15	74,83	100,00
75 Gorontalo	22,97	4,40	27,37	2,41	70,21	100,00
76 Sulawesi Barat	19,69	1,37	21,06	3,04	75,90	100,00
81 Maluku	17,90	4,94	22,84	1,74	75,43	100,00
82 Maluku Utara	23,39	3,86	27,25	2,13	70,62	100,00
91 Papua Barat	18,03	4,59	22,62	1,36	76,01	100,00
94 Papua	15,95	5,90	21,84	2,80	75,35	100,00
Indonesia	**22,10**	**2,09**	**24,19**	**2,34**	**73,47**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.20 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	48,14	2,14	4,44	43,94	52,33	3,38	3 940
12 Sumatera Utara	39,10	1,77	4,53	35,63	42,57	7,45	7 113
13 Sumatera Barat	41,71	1,92	4,61	37,94	45,48	3,51	4 978
14 Riau	41,51	2,72	6,56	36,16	46,85	5,85	2 065
15 Jambi	33,50	2,42	7,24	28,74	38,25	3,84	2 126
16 Sumatera Selatan	46,12	2,41	5,23	41,39	50,86	7,68	3 620
17 Bengkulu	44,17	3,35	7,57	37,60	50,74	3,68	1 826
18 Lampung	45,21	2,48	5,49	40,34	50,08	9,14	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	47,42	3,15	6,64	41,24	53,61	2,25	1 193
21 Kepulauan Riau	32,41	3,80	11,73	24,95	39,86	3,61	1 170
31 DKI Jakarta	40,90	2,70	6,60	35,60	46,20	12,40	1 794
32 Jawa Barat	46,29	3,28	7,08	39,86	52,73	92,22	9 183
33 Jawa Tengah	42,98	2,01	4,67	39,05	46,92	34,03	14 432
34 DI Yogyakarta	42,26	4,51	10,66	33,41	51,11	21,42	2 258
35 Jawa Timur	41,42	1,68	4,06	38,12	44,72	28,45	15 797
36 Banten	46,01	5,38	11,70	35,44	56,58	53,87	2 023
51 Bali	33,63	2,48	7,36	28,77	38,50	6,52	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	59,94	3,22	5,38	53,62	66,27	9,03	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	48,32	1,82	3,77	44,75	51,90	2,90	5 403
61 Kalimantan Barat	40,58	1,97	4,85	36,72	44,45	3,05	2 828
62 Kalimantan Tengah	38,23	2,37	6,21	33,57	42,89	2,08	1 898
63 Kalimantan Selatan	55,57	2,36	4,25	50,94	60,20	3,99	2 305
64 Kalimantan Timur	40,85	3,25	7,95	34,48	47,22	5,60	1 608
65 Kalimantan Utara	44,88	2,59	5,77	39,80	49,97	0,65	703
71 Sulawesi Utara	37,44	3,37	9,01	30,82	44,06	6,56	3 840
72 Sulawesi Tengah	48,33	2,07	4,28	44,27	52,38	2,00	2 372
73 Sulawesi Selatan	40,88	2,00	4,90	36,95	44,81	6,99	6 626
74 Sulawesi Tenggara	44,73	2,59	5,78	39,65	49,81	2,50	2 881
75 Gorontalo	56,85	3,02	5,32	50,92	62,79	1,76	1 059
76 Sulawesi Barat	43,97	2,12	4,81	39,82	48,12	0,84	1 156
81 Maluku	29,63	1,60	5,40	26,50	32,77	0,79	2 169
82 Maluku Utara	34,35	1,34	3,89	31,73	36,97	0,33	1 585
91 Papua Barat	38,00	3,15	8,28	31,83	44,18	1,03	1 388
94 Papua	27,43	2,13	7,76	23,25	31,60	1,77	2 068
Indonesia	**43,22**	**0,82**	**1,91**	**41,60**	**44,84**	**34,09**	**122 694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.21 Nilai *Sampling Error* Angka Kesakitan Lansia, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	28,27	1,27	25,78	30,76	4,49	1,47	3 940
12 Sumatera Utara	20,80	1,25	18,33	23,26	6,03	5,42	7 113
13 Sumatera Barat	22,77	1,94	18,97	26,58	8,51	4,93	4 978
14 Riau	20,57	1,04	18,53	22,61	5,05	1,27	2 065
15 Jambi	16,17	2,04	12,17	20,18	12,63	4,48	2 126
16 Sumatera Selatan	20,97	1,90	17,24	24,70	9,07	7,16	3 620
17 Bengkulu	23,58	2,24	19,18	27,99	9,51	2,27	1 826
18 Lampung	22,50	1,79	19,00	26,01	7,94	6,73	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	20,20	2,50	15,30	25,11	12,38	2,19	1 193
21 Kepulauan Riau	14,35	1,93	10,56	18,15	13,47	1,66	1 170
31 DKI Jakarta	17,42	1,50	14,48	20,37	8,62	6,44	1 794
32 Jawa Barat	23,41	1,46	20,54	26,27	6,24	25,33	9 183
33 Jawa Tengah	24,04	1,65	20,81	27,27	6,85	30,75	14 432
34 DI Yogyakarta	18,36	1,38	15,65	21,08	7,54	3,29	2 258
35 Jawa Timur	21,61	1,38	18,90	24,32	6,38	27,40	15 797
36 Banten	23,55	2,66	18,34	28,76	11,28	18,08	2 023
51 Bali	20,28	1,44	17,45	23,12	7,12	3,06	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	33,62	3,41	26,92	40,32	10,15	10,88	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	27,22	1,50	24,27	30,17	5,52	2,49	5 403
61 Kalimantan Barat	20,60	1,56	17,53	23,67	7,59	2,83	2 828
62 Kalimantan Tengah	16,90	1,14	14,67	19,13	6,72	0,80	1 898
63 Kalimantan Selatan	26,54	1,52	23,56	29,53	5,73	2,10	2 305
64 Kalimantan Timur	22,31	1,92	18,53	26,08	8,62	2,74	1 608
65 Kalimantan Utara	22,25	2,69	16,96	27,54	12,11	1,01	703
71 Sulawesi Utara	18,93	1,10	16,78	21,08	5,79	1,06	3 840
72 Sulawesi Tengah	27,34	1,36	24,68	30,00	4,96	1,08	2 372
73 Sulawesi Selatan	20,13	1,69	16,81	23,44	8,40	7,49	6 626
74 Sulawesi Tenggara	24,02	2,15	19,79	28,24	8,96	2,34	2 881
75 Gorontalo	31,85	3,02	25,92	37,78	9,49	1,99	1 059
76 Sulawesi Barat	26,45	2,43	21,68	31,22	9,19	1,41	1 156
81 Maluku	17,69	1,40	14,93	20,44	7,94	0,87	2 169
82 Maluku Utara	22,45	1,35	19,80	25,10	6,01	0,43	1 585
91 Papua Barat	17,85	2,51	12,92	22,79	14,08	1,06	1 388
94 Papua	16,58	1,70	13,24	19,92	10,25	1,62	2 068
Indonesia	**22,48**	**0,51**	**21,49**	**23,48**	**2,25**	**18,15**	**122 694**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.22 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	73,94	2,82	3,82	68,40	79,49	3,41	1 904
12 Sumatera Utara	80,05	2,16	2,69	75,82	84,28	5,96	2 888
13 Sumatera Barat	66,22	2,85	4,30	60,63	71,81	3,24	1 971
14 Riau	81,52	1,46	1,80	78,65	84,40	1,05	749
15 Jambi	82,66	2,76	3,34	77,25	88,08	2,40	735
16 Sumatera Selatan	84,32	1,69	2,00	81,01	87,63	3,01	1 665
17 Bengkulu	81,69	2,30	2,81	77,18	86,21	1,17	782
18 Lampung	79,93	2,19	2,74	75,63	84,22	4,59	1 618
19 Kep. Bangka Belitung	79,44	2,29	2,88	74,95	83,93	0,80	516
21 Kepulauan Riau	66,64	7,12	10,69	52,66	80,61	3,75	344
31 DKI Jakarta	79,68	3,20	4,02	73,39	85,97	9,87	638
32 Jawa Barat	85,43	1,45	1,70	82,58	88,28	15,46	3 801
33 Jawa Tengah	80,72	1,21	1,50	78,34	83,10	7,82	5 506
34 DI Yogyakarta	69,85	3,85	5,51	62,29	77,40	7,08	880
35 Jawa Timur	81,30	1,02	1,25	79,31	83,30	6,36	5 935
36 Banten	89,44	1,25	1,40	86,98	91,90	3,27	851
51 Bali	64,32	1,67	2,60	61,04	67,60	0,90	1 066
52 Nusa Tenggara Barat	80,15	1,79	2,23	76,64	83,66	2,33	1 235
53 Nusa Tenggara Timur	74,98	2,20	2,93	70,66	79,29	2,51	2 585
61 Kalimantan Barat	81,34	2,49	3,06	76,45	86,23	2,91	1 178
62 Kalimantan Tengah	87,43	2,18	2,49	83,15	91,70	1,33	686
63 Kalimantan Selatan	88,55	1,28	1,45	86,03	91,07	1,48	1 181
64 Kalimantan Timur	80,99	2,00	2,47	77,06	84,92	1,26	576
65 Kalimantan Utara	68,42	3,39	4,96	61,75	75,08	0,53	275
71 Sulawesi Utara	73,24	3,70	5,06	65,97	80,50	3,27	1 330
72 Sulawesi Tengah	81,70	2,25	2,75	77,29	86,11	1,76	1 059
73 Sulawesi Selatan	80,47	1,95	2,42	76,64	84,30	3,86	2 610
74 Sulawesi Tenggara	84,09	2,40	2,86	79,38	88,81	1,65	1 204
75 Gorontalo	77,12	3,42	4,44	70,41	83,84	1,65	584
76 Sulawesi Barat	78,38	3,53	4,51	71,45	85,32	1,39	484
81 Maluku	76,66	2,36	3,08	72,03	81,29	0,55	687
82 Maluku Utara	77,85	2,74	3,52	72,48	83,22	0,57	541
91 Papua Barat	75,38	2,92	3,88	69,65	81,12	0,40	477
94 Papua	62,64	4,48	7,15	53,84	71,43	1,69	559
Indonesia	**81,08**	**0,53**	**0,66**	**80,04**	**82,12**	**9,08**	**49 100**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.23 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Berobat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	62,82	1,97	3,14	58,94	66,69	1,37	1 904
12 Sumatera Utara	45,71	1,75	3,83	42,27	49,14	2,53	2 888
13 Sumatera Barat	59,05	2,07	3,51	54,98	63,12	1,59	1 971
14 Riau	40,68	2,39	5,88	35,98	45,37	1,75	749
15 Jambi	39,28	4,15	10,58	31,13	47,44	3,27	735
16 Sumatera Selatan	41,81	6,08	14,53	29,88	53,73	21,25	1 665
17 Bengkulu	45,09	2,57	5,70	40,05	50,13	0,88	782
18 Lampung	44,99	1,67	3,71	41,71	48,27	1,74	1 618
19 Kep. Bangka Belitung	42,14	2,78	6,59	36,69	47,59	0,79	516
21 Kepulauan Riau	48,50	3,62	7,47	41,39	55,61	0,86	344
31 DKI Jakarta	54,66	3,76	6,89	47,27	62,04	8,90	638
32 Jawa Barat	44,27	1,13	2,55	42,05	46,49	4,73	3 801
33 Jawa Tengah	45,79	1,35	2,95	43,14	48,44	6,06	5 506
34 DI Yogyakarta	51,35	2,14	4,17	47,14	55,55	1,85	880
35 Jawa Timur	44,34	1,34	3,02	41,71	46,98	6,82	5 935
36 Banten	43,12	2,58	5,98	38,06	48,17	5,32	851
51 Bali	66,75	1,90	2,85	63,01	70,48	1,21	1 066
52 Nusa Tenggara Barat	52,70	3,32	6,31	46,18	59,23	5,13	1 235
53 Nusa Tenggara Timur	40,64	2,65	6,52	35,44	45,84	2,84	2 585
61 Kalimantan Barat	39,92	3,40	8,52	33,25	46,59	3,43	1 178
62 Kalimantan Tengah	33,96	3,37	9,92	27,35	40,58	1,57	686
63 Kalimantan Selatan	35,54	2,13	5,99	31,36	39,72	1,80	1 181
64 Kalimantan Timur	47,92	2,55	5,31	42,92	52,92	1,26	576
65 Kalimantan Utara	47,18	1,98	4,20	43,29	51,06	0,16	275
71 Sulawesi Utara	51,49	3,31	6,43	44,99	57,98	2,05	1 330
72 Sulawesi Tengah	39,78	2,22	5,57	35,44	44,13	1,07	1 059
73 Sulawesi Selatan	39,05	3,08	7,88	33,02	45,09	6,33	2 610
74 Sulawesi Tenggara	31,58	2,42	7,68	26,82	36,34	1,04	1 204
75 Gorontalo	49,36	2,38	4,83	44,68	54,04	0,57	584
76 Sulawesi Barat	37,29	4,20	11,25	29,06	45,52	1,42	484
81 Maluku	38,27	3,61	9,44	31,18	45,35	0,98	687
82 Maluku Utara	38,91	3,40	8,75	32,23	45,59	0,64	541
91 Papua Barat	46,82	2,70	5,76	41,53	52,11	0,25	477
94 Papua	49,52	3,92	7,92	41,82	57,22	1,21	559
Indonesia	**45,42**	**0,52**	**1,15**	**44,40**	**46,44**	**5,39**	**49 100**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.24 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	10,93	0,53	4,84	9,89	11,97	0,53	3 940
12 Sumatera Utara	5,51	0,36	6,50	4,81	6,21	1,40	7 113
13 Sumatera Barat	5,08	0,50	9,77	4,10	6,05	1,18	4 978
14 Riau	5,23	0,79	15,17	3,67	6,79	2,43	2 065
15 Jambi	5,41	0,78	14,36	3,89	6,94	1,72	2 126
16 Sumatera Selatan	4,26	0,40	9,44	3,47	5,05	1,30	3 620
17 Bengkulu	5,02	0,47	9,40	4,10	5,95	0,38	1 826
18 Lampung	5,46	0,48	8,80	4,52	6,40	1,65	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	5,38	0,70	13,04	4,00	6,76	0,55	1 193
21 Kepulauan Riau	4,24	1,30	30,73	1,68	6,79	2,29	1 170
31 DKI Jakarta	6,33	0,61	9,63	5,14	7,53	2,58	1 794
32 Jawa Barat	5,61	0,34	6,07	4,94	6,27	4,66	9 183
33 Jawa Tengah	5,51	0,31	5,54	4,91	6,11	3,71	14 432
34 DI Yogyakarta	4,76	0,25	5,33	4,26	5,26	0,37	2 258
35 Jawa Timur	4,54	0,24	5,27	4,07	5,01	3,23	15 797
36 Banten	4,53	0,54	12,02	3,46	5,60	3,16	2 023
51 Bali	4,15	0,43	10,38	3,31	5,00	1,11	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	7,82	1,04	13,34	5,77	9,87	3,15	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	4,23	0,50	11,83	3,24	5,21	1,35	5 403
61 Kalimantan Barat	4,52	0,49	10,93	3,55	5,50	1,07	2 828
62 Kalimantan Tengah	3,52	0,60	16,95	2,35	4,69	0,91	1 898
63 Kalimantan Selatan	4,46	0,67	15,08	3,14	5,77	1,88	2 305
64 Kalimantan Timur	6,21	1,03	16,60	4,18	8,23	2,34	1 608
65 Kalimantan Utara	10,05	1,25	12,48	7,59	12,51	0,42	703
71 Sulawesi Utara	6,45	0,32	4,91	5,82	7,07	0,22	3 840
72 Sulawesi Tengah	6,03	0,82	13,62	4,42	7,64	1,39	2 372
73 Sulawesi Selatan	5,33	0,46	8,61	4,43	6,23	1,76	6 626
74 Sulawesi Tenggara	3,37	0,52	15,29	2,36	4,38	0,75	2 881
75 Gorontalo	7,39	0,83	11,22	5,76	9,02	0,48	1 059
76 Sulawesi Barat	4,00	0,92	23,02	2,19	5,81	1,02	1 156
81 Maluku	2,78	0,36	13,07	2,07	3,49	0,31	2 169
82 Maluku Utara	4,90	0,77	15,81	3,38	6,42	0,53	1 585
91 Papua Barat	5,08	1,34	26,42	2,45	7,71	0,92	1 388
94 Papua	3,88	0,64	16,49	2,62	5,14	0,85	2 068
Indonesia	**5,26**	**0,11**	**2,07**	**5,05**	**5,48**	**2,92**	**122 694**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 5.25 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Masih Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	21,58	0,99	4,60	19,63	23,53	1,08	3 940
12 Sumatera Utara	21,53	1,30	6,05	18,97	24,09	5,69	7 113
13 Sumatera Barat	24,27	0,64	2,63	23,02	25,53	0,51	4 978
14 Riau	26,34	1,57	5,94	23,26	29,41	2,42	2 065
15 Jambi	21,73	1,23	5,67	19,31	24,14	1,30	2 126
16 Sumatera Selatan	25,45	1,98	7,77	21,57	29,33	6,77	3 620
17 Bengkulu	28,80	1,79	6,21	25,29	32,31	1,26	1 826
18 Lampung	30,69	0,94	3,06	28,85	32,54	1,52	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	20,61	1,19	5,76	18,29	22,94	0,49	1 193
21 Kepulauan Riau	20,97	2,61	12,46	15,84	26,10	2,25	1 170
31 DKI Jakarta	14,94	1,16	7,74	12,67	17,21	4,32	1 794
32 Jawa Barat	28,63	1,00	3,49	26,67	30,59	10,42	9 183
33 Jawa Tengah	25,20	0,86	3,40	23,52	26,88	8,05	14 432
34 DI Yogyakarta	19,40	1,55	8,00	16,35	22,45	3,97	2 258
35 Jawa Timur	23,81	0,86	3,63	22,12	25,51	10,06	15 797
36 Banten	26,68	2,05	7,70	22,65	30,71	9,96	2 023
51 Bali	11,78	1,42	12,02	9,00	14,56	4,58	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	29,20	2,17	7,44	24,94	33,47	4,77	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	18,84	1,52	8,06	15,86	21,82	3,29	5 403
61 Kalimantan Barat	24,24	1,33	5,49	21,63	26,85	1,83	2 828
62 Kalimantan Tengah	27,38	1,51	5,50	24,42	30,33	1,00	1 898
63 Kalimantan Selatan	17,84	1,39	7,77	15,12	20,56	2,32	2 305
64 Kalimantan Timur	18,76	1,52	8,13	15,76	21,75	1,96	1 608
65 Kalimantan Utara	21,17	1,96	9,24	17,33	25,01	0,55	703
71 Sulawesi Utara	21,70	1,76	8,09	18,26	25,15	2,45	3 840
72 Sulawesi Tengah	23,92	1,58	6,62	20,81	27,02	1,61	2 372
73 Sulawesi Selatan	18,96	1,00	5,27	17,00	20,92	2,74	6 626
74 Sulawesi Tenggara	22,01	1,44	6,53	19,19	24,83	1,11	2 881
75 Gorontalo	27,37	2,55	9,31	22,37	32,37	1,55	1 059
76 Sulawesi Barat	21,06	1,78	8,43	17,58	24,55	0,88	1 156
81 Maluku	22,84	2,45	10,72	18,03	27,64	2,19	2 169
82 Maluku Utara	27,25	2,28	8,35	22,79	31,72	1,08	1 585
91 Papua Barat	22,62	3,14	13,86	16,47	28,78	1,38	1 388
94 Papua	21,84	2,50	11,43	16,94	26,74	2,83	2 068
Indonesia	**24,19**	**0,34**	**1,42**	**23,52**	**24,87**	**7,97**	**122 694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

BAB 6. KETENAGAKERJAAN

"SEBESAR 86,02% LANSIA BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL"

Sekitar 3 dari 4 lansia bekerja dengan status pekerjaan rentan

https://www.bps.go.id

Bab 6 Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa lansia potensial adalah penduduk lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Dengan kata lain, lansia potensial adalah lansia yang bekerja. Oleh karena itu, pemberdayaan lansia potensial dalam berbagai aktivitas produktif merupakan salah satu upaya untuk menunjang kemandirian lansia, baik dari aspek ekonomi, psikologi, sosial, budaya, dan kesehatan. Informasi ketenagakerjaan lansia diperlukan untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat, sehingga upaya pemberdayaan lansia potensial dapat terlaksana dengan baik.

https://www.bps.go.id

6.1. Lansia Bekerja

Pada dasarnya, setiap individu memiliki waktu tetap dalam sehari, yaitu waktu yang digunakan untuk bekerja dan waktu luang atau *leisure* (Ehrenberg dan Smith, 2012). Teori *neoclassical model of labor-leisure choice* menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang menentukan keputusan individu untuk bekerja dan berapa banyak waktu yang digunakan untuk bekerja (Borjas, 2016). Keputusan individu untuk bekerja bergantung pada *reservation wage* (syarat upah) yang dimiliki. Jika upah yang ditawarkan lebih tinggi daripada *reservation wage*, maka individu akan memutuskan untuk bekerja. Namun, jika upah yang ditawarkan lebih rendah daripada *reservation wage*, maka individu akan memutuskan untuk tidak bekerja atau memilih *leisure*.

Pada tahun 2021, sekitar satu dari dua lansia masih bekerja dalam seminggu terakhir
---

Lansia aktif atau *active ageing* didefinisikan tidak hanya lansia yang masih bekerja, namun termasuk pula lansia yang berpartisipasi aktif di antaranya dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Adioetomo et al., 2018). Lansia

masa kini lebih mengutamakan kebebasan dan kemandirian sehingga lansia cenderung untuk hidup mandiri. Hal ini terlihat dari perkembangan persentase lansia bekerja yang cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2012 hingga tahun 2021, walaupun sempat mengalami hambatan pada beberapa titik tahun. Pada tahun 2012, persentase lansia bekerja sebesar 45,72 persen dan meningkat menjadi 49,46 persen di tahun 2021 (Gambar 6.1).

Gambar 6.1 Perkembangan Persentase Lansia Bekerja, 2012-2021

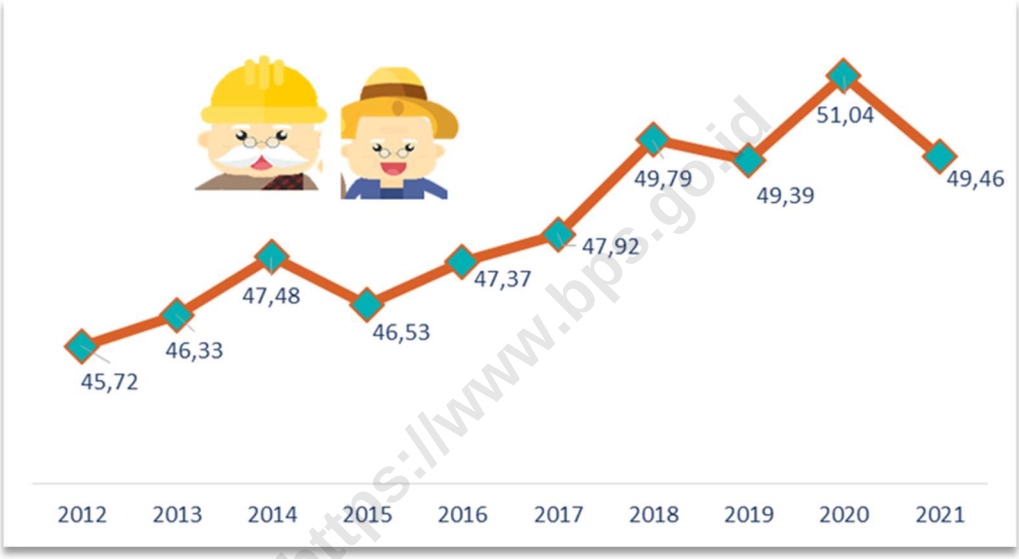

https://www.bps.go.id

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Proses menjadi tua bersifat alami yang pada umumnya antara lain diiringi dengan kemunduran kapasitas fisik (Brown, 1996 dalam Adioetomo et al., 2018). Namun demikian, tidak sedikit lansia yang masih bekerja. Hasil Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 49,46 persen lansia masih bekerja (Gambar 6.2). Idealnya, lansia yang bekerja memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Dengan demikian, tujuan SDGs goal 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dapat tercapai. Salah satunya, untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk usia lanjut.

Gambar 6.2 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2021

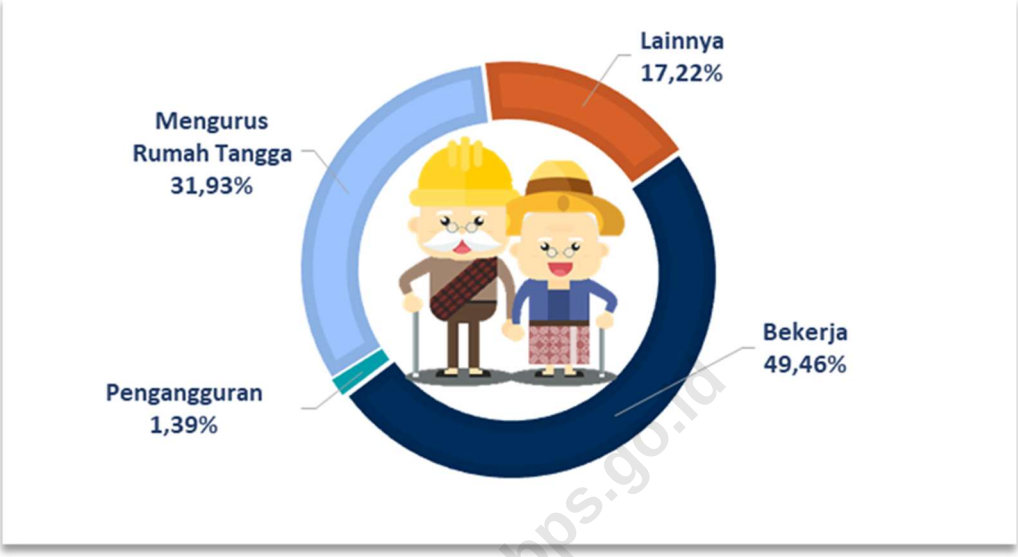

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Berbagai alasan melatarbelakangi lansia tetap bekerja, di antaranya karena keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak adanya *non-labor income* seperti jaminan pensiun, menuntut lansia untuk tetap bekerja (Jamalludin, 2021). Wirakartakusumah dan Anwar (1994) dalam Junaidi et al. (2017) menjelaskan faktor yang mempengaruhi lansia tetap bekerja, yaitu masih kuat secara fisik dan mental, desakan ekonomi, serta motif aktualisasi diri atau emosi. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kesehatan, beberapa penelitian lain menemukan bahwa lansia yang tetap bekerja justru memiliki hubungan dengan status kesehatan yang baik (Henning-Smith dan Gonzales, 2019). Lansia yang bekerja cenderung memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami gangguan mental emosional daripada lansia yang tidak bekerja (Nuraini, 2019).

https://www.bps.go.id

Gambar 6.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2021

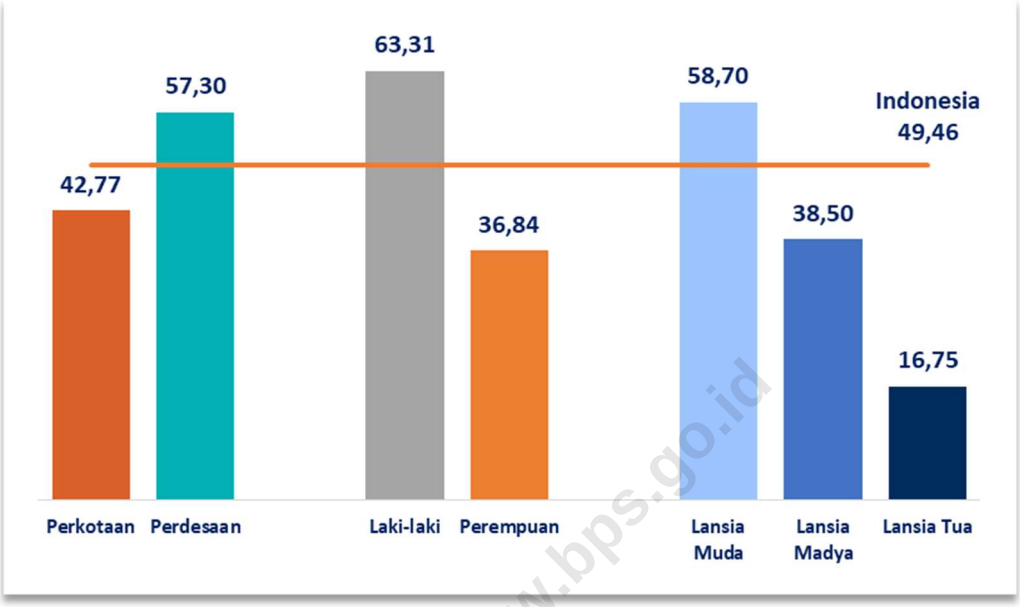

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Lansia bekerja didominasi oleh laki-laki (Jamalludin, 2021) dan tinggal di perdesaan (Junaidi et al., 2017). Hasil Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa persentase lansia laki-laki yang bekerja jauh lebih besar daripada lansia perempuan, yaitu 63,31 persen berbanding 36,84 persen. Menurut tipe daerah, persentase lansia di perdesaan yang bekerja lebih besar daripada lansia di perkotaan, yaitu 57,30 persen berbanding 42,77 persen (Gambar 6.3). Selanjutnya, persentase lansia perempuan yang mengurus rumah tangga lebih tinggi daripada lansia laki-laki, yaitu 49,62 persen berbanding 12,51 persen (Tabel 6.1).

Gambar 6.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2021

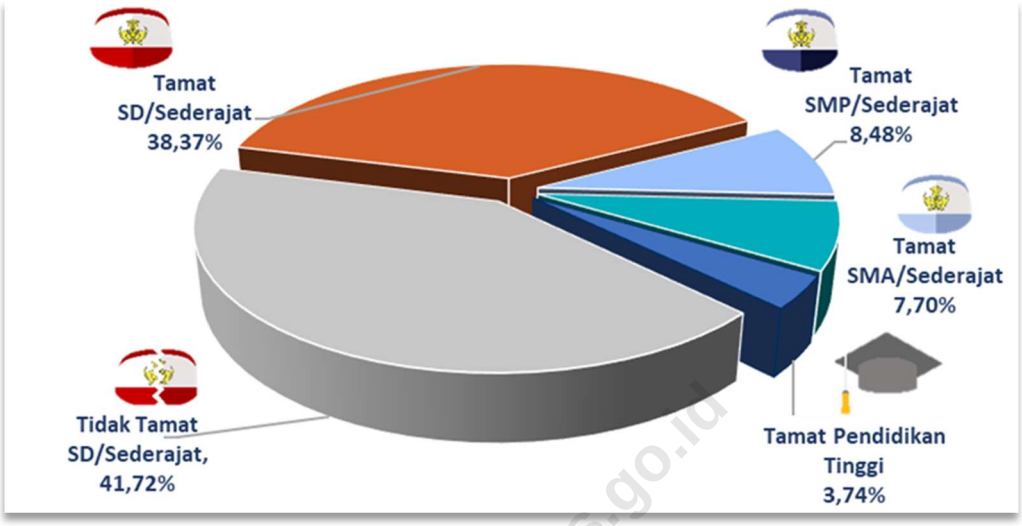

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Tingkat pendidikan dari lansia bekerja didominasi oleh tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat (Junaidi et al., 2017 dan Jamalludin, 2021). Data Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 41,72 persen lansia bekerja tidak tamat SD/sederajat dan 38,37 persen tamat SD/sederajat (Gambar 6.4). Semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka semakin rendah distribusi lansia bekerja.

https://www.bps.go.id

6.2. Karakteristik Pekerja Lansia

Lansia yang tetap bekerja cenderung berasal dari pekerja yang sebelumnya bekerja dengan jenis pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit konsentrasi (Jamalludin, 2021). Pada tahun 2021, lapangan usaha sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, yaitu sebesar 53,10 persen. Sektor pertanian cenderung membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit konsentrasi, serta tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, sehingga mayoritas lansia yang berpendidikan rendah lebih banyak terserap dalam lapangan usaha ini. Mayoritas lansia di perdesaan bekerja di sektor pertanian, sedangkan lansia di perkotaan lebih banyak yang bekerja di sektor manufaktur dan jasa. Menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka semakin tinggi pula

tingkat partisipasinya di sektor jasa, namun semakin rendah tingkat partisipasi di sektor pertanian (Gambar 6.5).

Gambar 6.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tipe Daerah, dan Tingkat Pendidikan, 2021

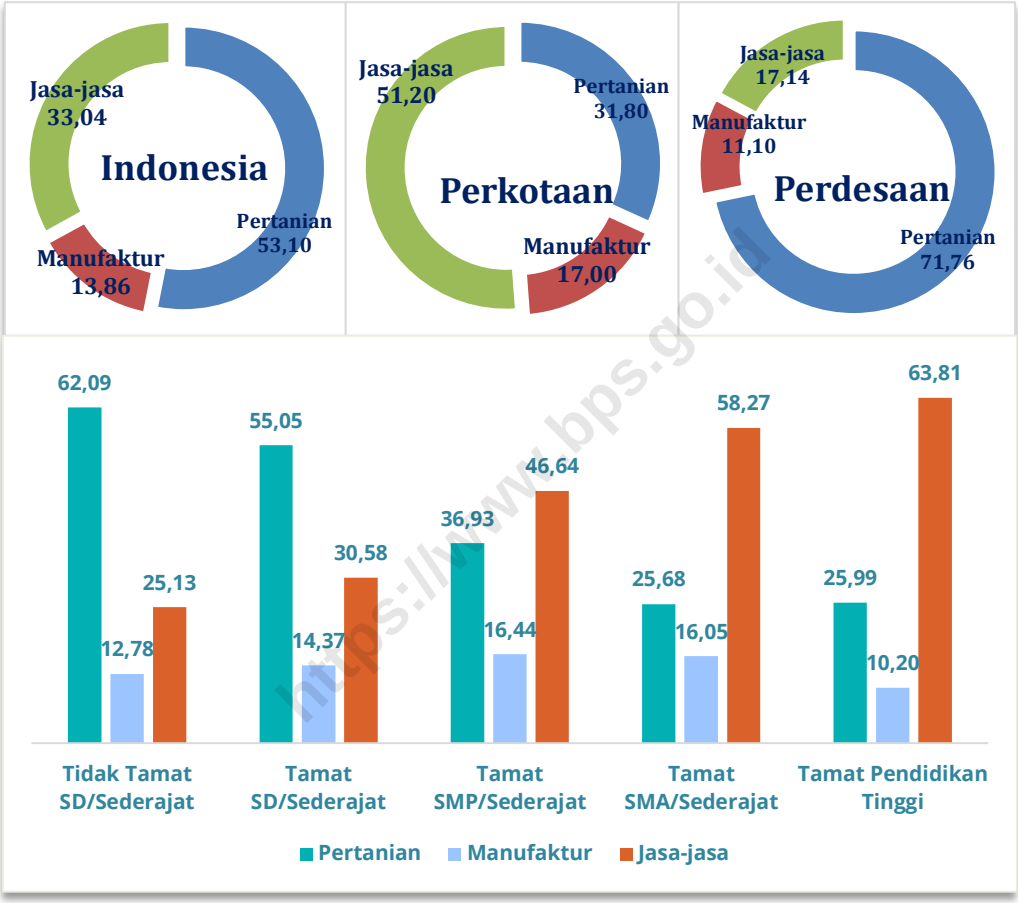

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Status pekerjaan dari lansia bekerja memberikan gambaran tentang kedudukan lansia dalam pekerjaan dan seberapa besar peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi. Hasil Sakernas Agustus 2021 memperlihatkan sekitar dua dari tiga lansia (66,33 persen) bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh dibayar (Tabel 6.4). Hal ini mengindikasikan bahwa lansia memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi dalam kegiatan ekonomi dengan cara berwirausaha. Semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka semakin tinggi pula persentase lansia yang bekerja

dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh dibayar dan buruh/karyawan. Di lain pihak, semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka semakin rendah persentase lansia yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar (Gambar 6.6).

Gambar 6.6 Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan, 2021

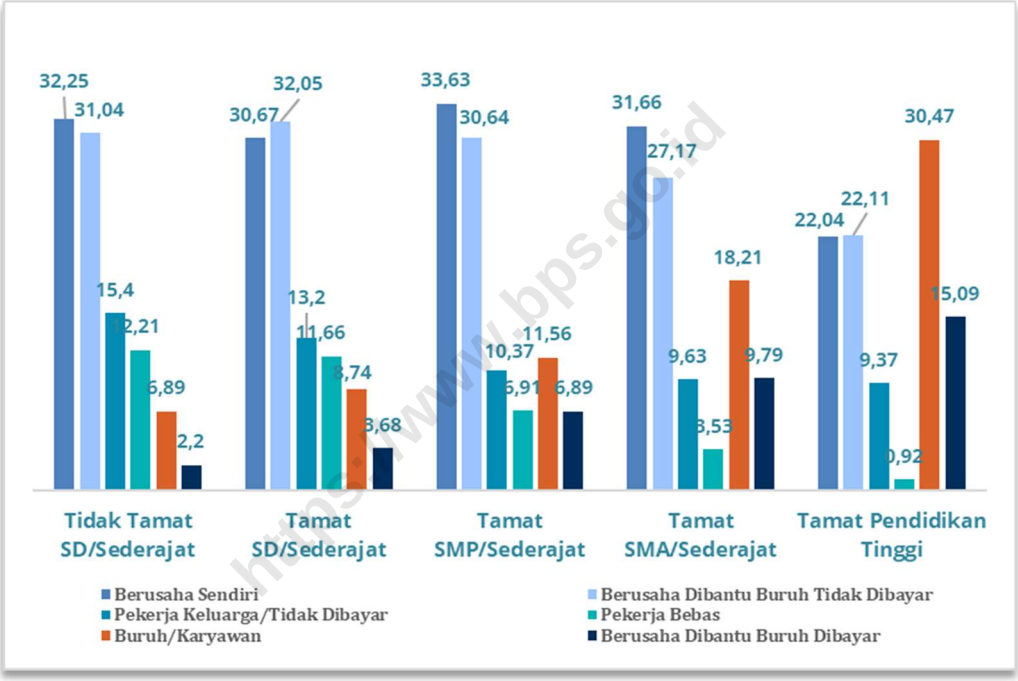

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Pekerja informal mencakup mereka yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Pekerja lansia didominasi oleh sektor informal (Junaidi et al., 2017). Pada tahun 2021, sebanyak 86,02 persen pekerja lansia bekerja di sektor informal. Semakin tinggi tingkat pendidikan lansia, maka semakin kecil persentase lansia yang bekerja di sektor informal (Gambar 6.7). Hal ini terjadi karena bekerja di sektor informal tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan dan keterampilan tertentu, sehingga cenderung cocok bagi lansia.

Gambar 6.7 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Informal Menurut Tipe Daerah dan Tingkat Pendidikan, 2021

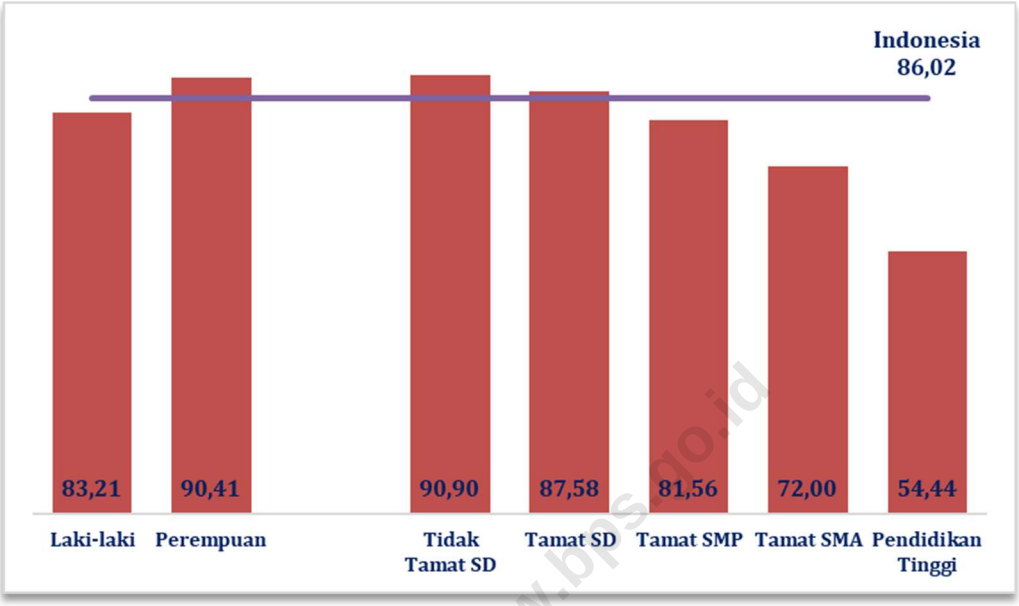

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Jenis pekerjaan rentan mencakup mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, dan pekerja keluarga. Lansia sebagai pekerja rentan memiliki risiko tinggi terhadap kerentanan ekonomi (*high economic risk*) dan berada dalam *decent work deficit*, yaitu tidak adanya cukup kesempatan kerja, tidak memadainya perlindungan sosial, penyangkalan hak atas pekerjaan, dan kekurangan dalam dialog sosial. Partisipasi pekerja rentan dalam pasar tenaga kerja menjadikan kesejahteraannya terancam karena sulitnya akses ke pekerjaan yang layak dan memenuhi persyaratan ke norma sosial dasar, bukan karena kurangnya kapasitas mereka atau kemauan untuk memperbaikinya (Saunders, 2006). Sakernas Agustus 2021 mencatat sebesar 75,56 persen lansia bekerja sebagai pekerja rentan. Artinya, sekitar tiga dari empat lansia bekerja dengan risiko tinggi untuk mengalami kerentanan ekonomi. Persentase lansia perempuan yang bekerja sebagai pekerja rentan lebih tinggi daripada lansia laki-laki. Menurut kelompok umur, semakin bertambah usia pekerja lansia justru semakin banyak yang bekerja sebagai pekerja rentan (Gambar 6.8). Padahal, kondisi fisik lansia semakin membutuhkan perhatian khusus seiring penambahan usianya.

Gambar 6.8 Persentase Lansia Bekerja Sebagai Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2021

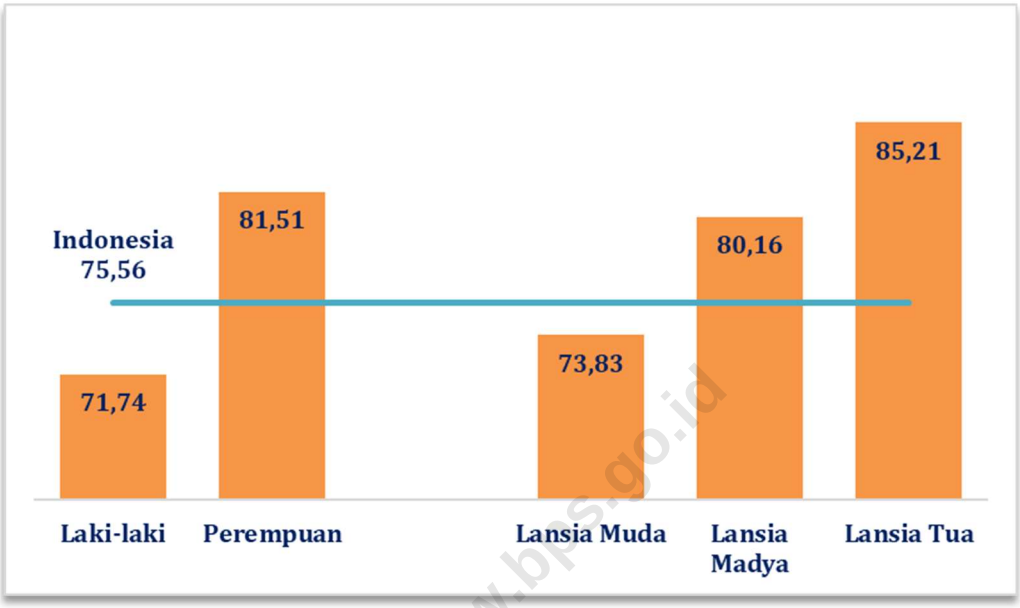

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Pekerja tidak tetap (*precarious employment*) mencakup mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas pertanian/non pertanian, buruh dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu, dan buruh dengan kontrak kerja lisan. Biasanya, *precarious employment* bekerja dalam jangka waktu pendek dan tidak terlindungi oleh jaminan sosial. Adanya fleksibilitas pasar tenaga kerja mengarah pada pekerjaan tidak tetap yang pada akhirnya memengaruhi kondisi pekerja dan kekuatan serikat dagang (Tjandraningsih, 2012). Persentase pekerja lansia yang termasuk *precarious employment* sebesar 10,46 persen, di mana *precarious employment* pada pekerja lansia laki-laki lebih tinggi daripada pekerja lansia perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka semakin rendah persentase lansia bekerja dengan status *precarious employment* (Gambar 6.9).

Gambar 6.9 Persentase Lansia Bekerja yang Termasuk *Precarious Employment* Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 2021

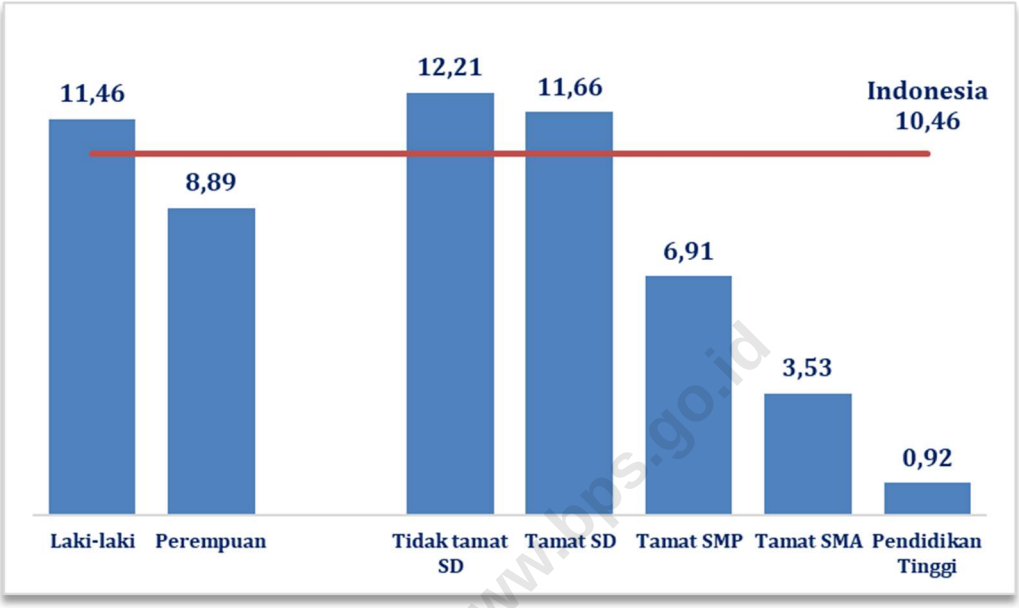

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

6.3. Jam Kerja Lansia

Selayaknya, jam kerja lansia semakin menurun seiring dengan penambahan usia dan makin melemahnya kondisi fisik. Partisipasi lansia di dalam pasar tenaga kerja lebih diutamakan pada kualitas kerja yang tercermin pada keahlian dan pengalamannya dibandingkan dengan kuantitas jam kerjanya. Pada tahun 2021, rata-rata jam kerja dari lansia yang bekerja adalah selama 32 jam. Akan tetapi, sebanyak 13,02 persen pekerja lansia memiliki jam kerja selama 41-48 jam dalam seminggu dan 19,54 persen memiliki jam kerja lebih dari 48 jam dalam seminggu (Tabel 6.8). Junaidi et al. (2017) juga menemukan bahwa lansia yang bekerja memiliki jam kerja yang relatif panjang.

Gambar 6.10 Persentase Lansia Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2021

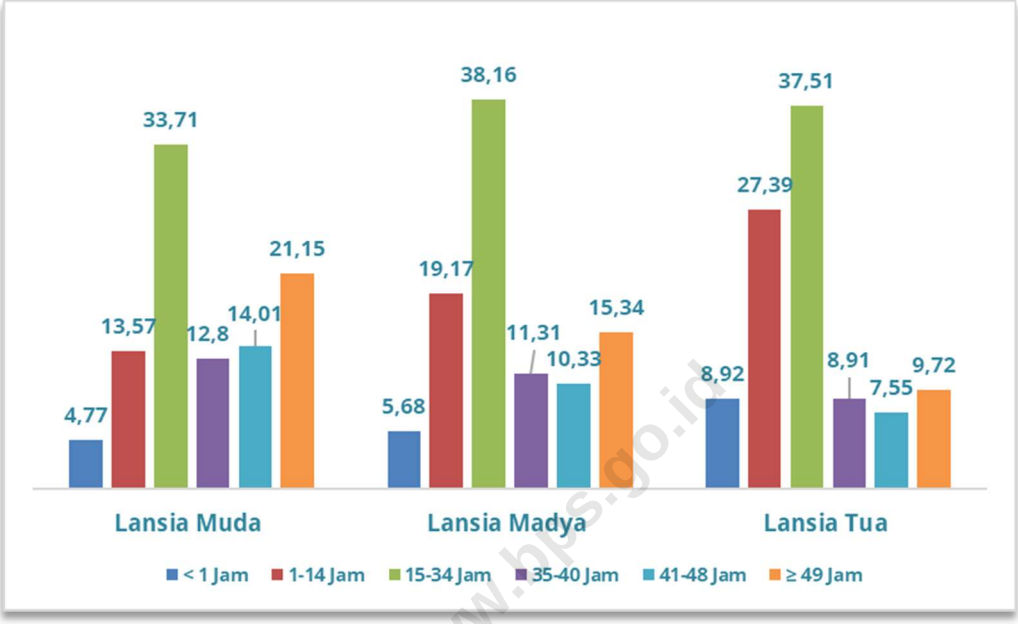

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Semakin tua lansia maka rata-rata jam kerja lansia dalam seminggu semakin rendah. Persentase jam kerja lansia muda, madya, maupun tua dalam seminggu paling tinggi terdapat pada jam kerja 15-34 jam. Baik pekerja lansia muda, madya, maupun tua memiliki persentase jam kerja lebih dari 48 jam dalam seminggu lebih tinggi daripada 41-48 jam dalam seminggu (Gambar 6.10).

Jam kerja berlebih dapat diamati melalui dua pendekatan. Menurut Konvensi *International Labour Organization* (ILO), jam kerja berlebih didefinisikan sebagai bekerja lebih dari 48 jam per minggu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jam kerja maksimum adalah selama 40 jam per minggu. Pada tahun 2021, sebanyak 19,54 persen pekerja lansia bekerja dengan jam kerja berlebih (*excessive hours*) menurut konsep ILO. Adapun pekerja lansia yang bekerja dengan jam kerja berlebih menurut konsep 40 jam per minggu adalah sebesar 32,56 persen.

Gambar 6.11 Persentase Pekerja Lansia yang Bekerja dengan Jam Kerja Berlebih Menurut Konsep Undang-Undang dan ILO, 2021

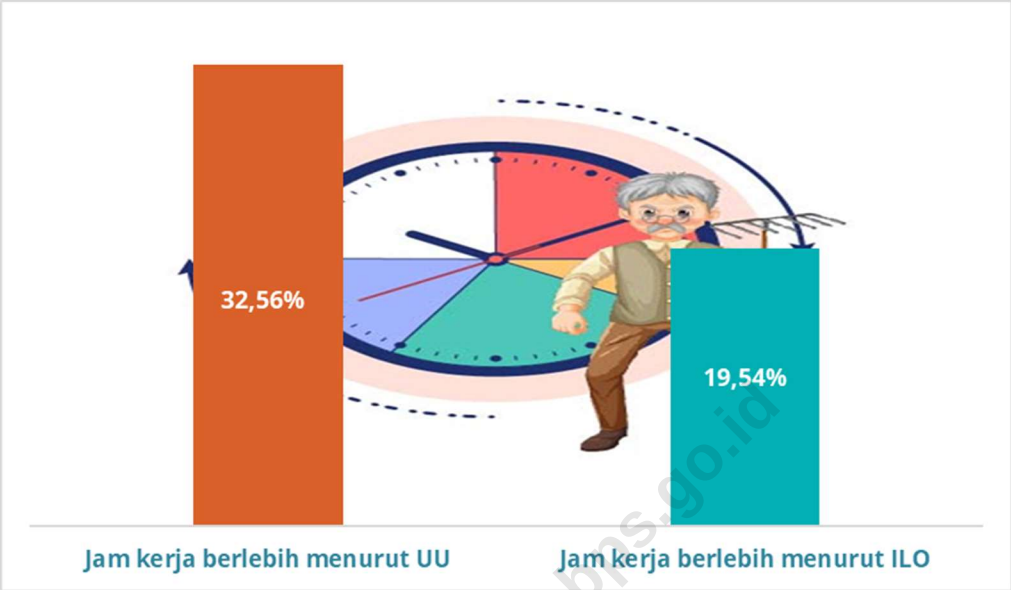

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

6.4. Penghasilan Lansia

Penelitian menemukan bahwa lansia bekerja dan memiliki penghasilan sendiri cenderung akan meningkatkan kesejahteraannya (Kartini dan Kartika, 2020). Upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang dikelola pemerintah juga ada yang secara khusus ditujukan untuk lansia potensial, atau mereka yang masih bekerja. Hanya saja, lansia bekerja biasanya memiliki penghasilan yang lebih sedikit daripada usia produktif. Padahal, kebutuhan hidup lansia tidak jauh berbeda daripada usia produktif bahkan cenderung lebih besar untuk perawatan kesehatannya.

Pada tahun 2021, rata-rata penghasilan dari lansia bekerja sebesar 1,34 juta rupiah per bulan. Lansia yang bekerja di lapangan usaha sektor pertanian memiliki penghasilan paling rendah dibandingkan dengan lainnya, yaitu sebesar 1,002 juta rupiah per bulan. Rata-rata penghasilan lansia laki-laki bekerja lebih besar daripada lansia perempuan, yaitu 1,57 juta rupiah berbanding 0,97 juta rupiah per bulan (Tabel 6.9). Data Sakernas Agustus 2021 juga memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka rata-rata penghasilannya juga semakin besar (Gambar 6.12).

Gambar 6.12 Rata-rata Penghasilan Lansia Bekerja dalam Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Tingkat Pendidikan (000 rupiah), 2021

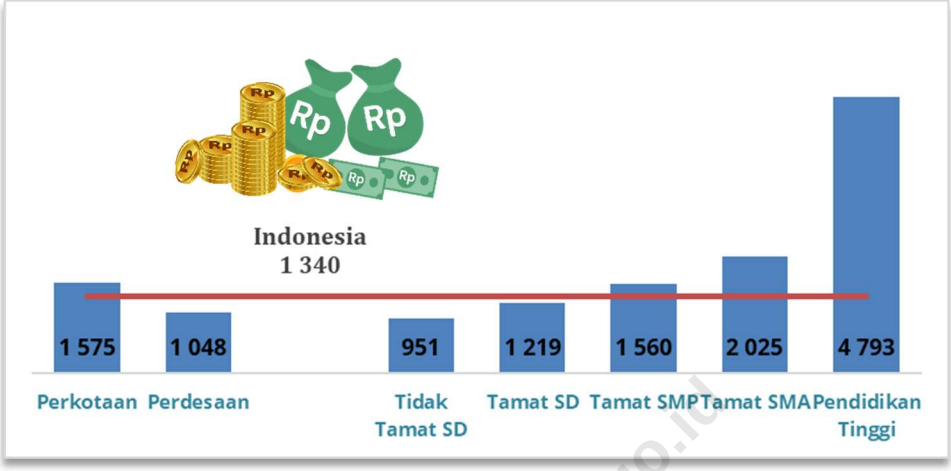

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Secara umum, rata-rata penghasilan lansia bekerja mengalami penurunan selama periode tahun 2018-2021. Rata-rata penghasilan lansia bekerja sebesar 1,49 juta rupiah per bulan pada tahun 2018, menurun menjadi 1,34 juta rupiah di tahun 2021. Walau demikian, rata-rata penghasilan dari lansia bekerja sempat mengalami peningkatan pada tahun 2019 (Gambar 6.13).

Gambar 6.13 Perkembangan Rata-rata Penghasilan Lansia Bekerja (000 rupiah), 2018-202

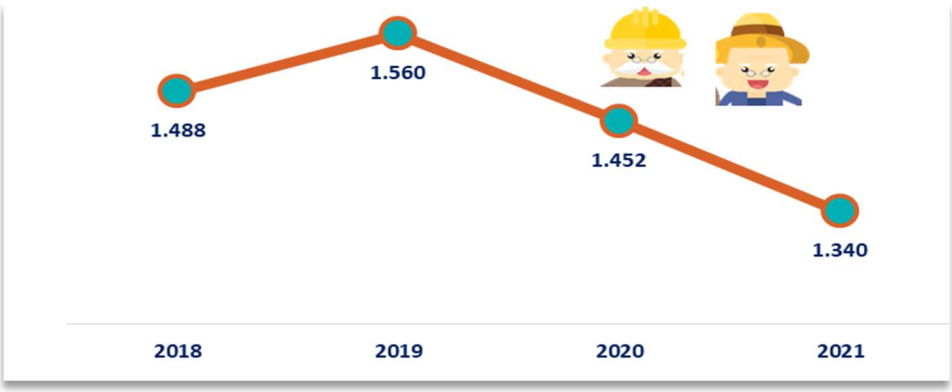

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Upah rendah ditentukan sebagai upah yang kurang dari dua per tiga nilai median upah dari seluruh pekerja (ILO, 2011). Upah rendah yang disajikan pada

https://www.bps.go.id

publikasi ini terbatas untuk status pekerjaan berusaha sendiri, buruh/karyawan, dan pekerja bebas baik pertanian maupun non pertanian. Hasil Sakernas Agustus 2021 memperlihatkan bahwa sekitar satu dari tiga pekerja lansia (32,79 persen) memiliki upah yang rendah. Lebih lanjut, upah rendah ini banyak dialami oleh pekerja lansia perempuan dan pekerja lansia di perdesaan. Hampir separuh pekerja lansia perempuan (45,20 persen) bekerja dengan upah rendah dan sekitar dua dari lima pekerja lansia di perdesaan (39,62 persen) yang bekerja dengan upah rendah (Gambar 6.14).

Gambar 6.14 Persentase Lansia Bekerja dengan Upah Rendah, 2021

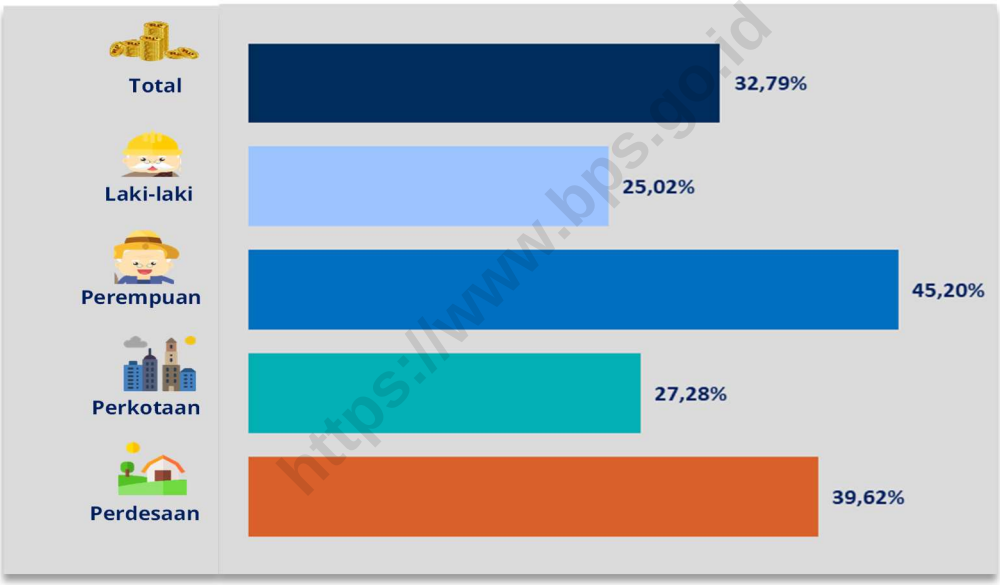

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

6.5. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 selama kurang lebih dua tahun, telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga ketenagakerjaan. Penyebaran pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah (baik secara regional maupun nasional) dan pembatasan sosial secara besar-besaran. Sebagai konsekuensi, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang pada akhirnya ditransmisikan kepada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan

termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah. Kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial yang diikuti dengan ketentuan pengurangan jam operasional usaha menyebabkan terjadinya hilangnya jam kerja karyawan maupun jumlah pekerjaan dan dampak terburuknya adalah meningkatnya pengangguran (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Pandemi COVID-19 juga memengaruhi kondisi ketenagakerjaan kelompok lansia. Di masa pandemi banyak lansia kehilangan pekerjaan. Tercermin dari persentase lansia menganggur yang meningkat menjadi 1,39 persen per Agustus 2021 dari 0,88 persen pada periode sama tahun sebelumnya. Menurut status pekerjaan, sekitar 86,02 persen lansia bekerja di sektor informal. Selain itu, sebesar 75,56 persen lansia termasuk kategori pekerja rentan dan 10,46 persen lansia termasuk *precarious employment*. Kondisi tersebut mengakibatkan lansia berisiko tinggi kehilangan pekerjaan dan penghasilan sewaktu-waktu.

https://www.bps.go.id

Gambar 6.15 Persentase Lansia Bekerja menurut Status Perubahan Jam Kerja dan Kelompok Umur, 2021

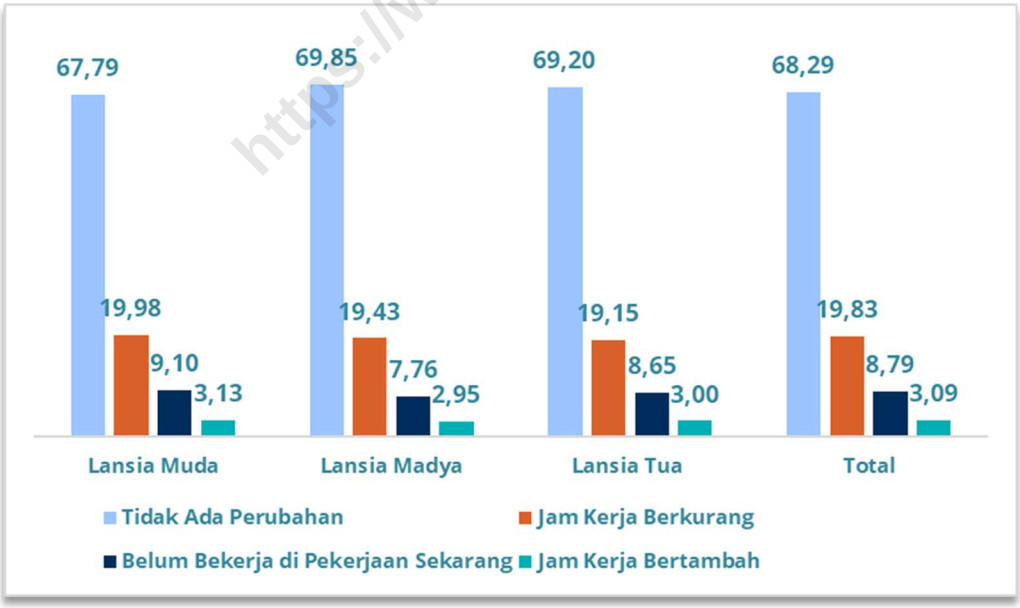

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Sekitar tiga persen baik lansia muda, madya, maupun tua yang mengalami penambahan jam kerja saat ini dibandingkan dengan jam kerja saat sebelum

terjadi pandemi COVID-19, sedangkan sekitar 19 persen yang mengalami pengurangan jam kerja. Secara umum, sebanyak 3,09 persen pekerja lansia mengalami penambahan jam kerja dan 19,83 persen mengalami pengurangan jam kerja jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 (Gambar 6.15). Sebanyak 48,31 persen pekerja lansia yang mengalami perubahan jam kerja mengaku diakibatkan secara langsung oleh pandemi COVID-19 (Tabel 6.12). Perubahan jam kerja terbesar terjadi pada lapangan usaha manufaktur, yaitu sebanyak 25,81 persen pekerja lansia yang bekerja di sektor manufaktur mengalami penurunan jumlah jam kerja jika dibandingkan dengan periode sebelum terjadi pandemi COVID-19 (Tabel 6.11).

Gambar 6.16 Persentase Lansia Bekerja menurut Status Perubahan Penghasilan dan Tingkat Pendidikan, 2021

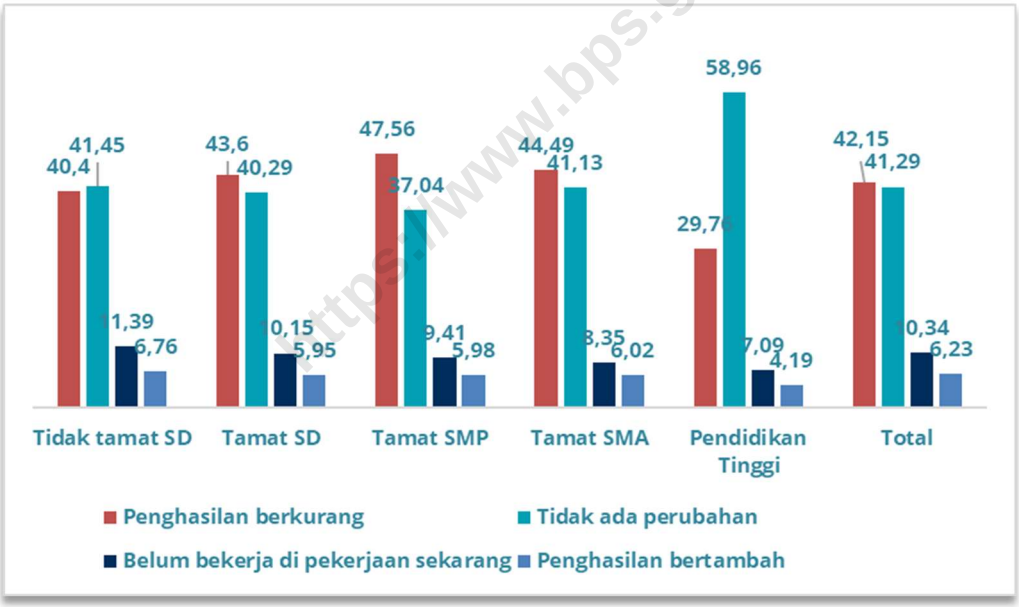

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

Jika dibandingkan dengan periode sebelum terjadinya pandemi COVID-19, sebanyak 42,15 persen pekerja lansia mengalami penurunan penghasilan. Pekerja lansia yang tamat pendidikan tinggi relatif aman dari penurunan penghasilan dibandingkan pekerja lansia dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sebanyak 29,76 persen pekerja lansia yang berpendidikan tinggi mengalami pengurangan penghasilan, sedangkan dari pekerja lansia yang tidak tamat

SD/sederajat, sebanyak 40,40 persen mengaku mengalami pengurangan penghasilan dibandingkan periode sebelum terjadi pandemi COVID-19 (Gambar 6.16).

https://www.bps.go.id

Tabel 6.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2021

Karakteristik	Jenis Kegiatan Utama				Jumlah
	Bekerja	Pengang-guran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	42,77	2,01	35,73	19,48	100,00
Perdesaan	57,30	0,65	27,48	14,57	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	63,31	2,55	12,51	21,62	100,00
Perempuan	36,84	0,33	49,62	13,22	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69 Tahun)	58,70	1,35	29,43	10,51	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	38,50	1,36	36,18	23,95	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	16,75	1,72	36,41	45,12	100,00
Indonesia	**49,46**	**1,39**	**31,93**	**17,22**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2021

Karakteristik	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	Tidak Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	34,83	36,30	10,98	11,92	5,97	100,00
Perdesaan	47,75	40,18	6,28	4,00	1,79	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	35,47	40,48	9,76	9,68	4,61	100,00
Perempuan	51,50	35,06	6,46	4,59	2,38	100,00
Kelompok Umur						
Lansia Muda	38,53	39,52	9,31	8,47	4,17	100,00
Lansia Madya	49,38	35,97	6,20	5,74	2,71	100,00
Lansia Tua	66,38	26,67	3,94	2,55	0,46	100,00
Indonesia	**41,72**	**38,37**	**8,48**	**7,70**	**3,74**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2021

Karakteristik	Lapangan Usaha			Jumlah
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tipe Daerah				
Perkotaan	31,80	17,00	51,20	100,00
Perdesaan	71,76	11,10	17,14	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	58,19	14,29	27,53	100,00
Perempuan	45,15	13,18	41,68	100,00
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60-69 Tahun)	51,01	14,64	34,35	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	58,67	11,45	29,88	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	65,14	11,76	23,10	100,00
Tingkat Pendidikan				
Tidak Tamat SD/Sederajat	62,09	12,78	25,13	100,00
Tamat SD/Sederajat	55,05	14,37	30,58	100,00
Tamat SMP/Sederajat	36,93	16,44	46,64	100,00
Tamat SMA/Sederajat	25,68	16,05	58,27	100,00
Tamat Pendidikan Tinggi	25,99	10,20	63,81	100,00
Indonesia	**53,10**	**13,86**	**33,04**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2021

Karakteristik	Status Pekerjaan						Jumlah
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Dibayar	Berusaha Dibantu Buruh Dibayar	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tipe Daerah							
Perkotaan	35,29	22,77	5,46	14,93	10,91	10,65	100,00
Perdesaan	27,88	37,76	3,16	5,22	10,06	15,92	100,00
Jenis Kelamin							
Laki-laki	29,21	37,91	5,51	11,28	11,47	4,62	100,00
Perempuan	34,66	19,56	2,24	7,35	8,89	27,29	100,00
Kelompok Umur							
Lansia Muda	30,37	29,70	4,22	10,77	11,18	13,76	100,00
Lansia Madya	33,80	33,89	4,27	7,03	8,54	12,47	100,00
Lansia Tua	37,64	34,50	4,24	4,04	6,50	13,07	100,00
Tingkat Pendidikan							
Tidak Tamat SD	32,25	31,04	2,20	6,89	12,21	15,40	100,00
Tamat SD	30,67	32,05	3,68	8,74	11,66	13,20	100,00
Tamat SMP	33,63	30,64	6,89	11,56	6,91	10,37	100,00
Tamat SMA	31,66	27,17	9,79	18,21	3,53	9,63	100,00
Pendidikan Tinggi	22,04	22,11	15,09	30,47	0,92	9,37	100,00
Indonesia	**31,34**	**30,76**	**4,23**	**9,75**	**10,46**	**13,46**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.5 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal dan Informal, 2021

Karakteristik	Sektor Pekerjaan		Jumlah
	Formal	Informal	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	20,39	79,61	100,00
Perdesaan	8,38	91,62	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	16,79	83,21	100,00
Perempuan	9,59	90,41	100,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	14,99	85,01	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	11,30	88,70	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	8,29	91,71	100,00
Tingkat Pendidikan			
Tidak Tamat SD/Sederajat	9,10	90,90	100,00
Tamat SD/Sederajat	12,42	87,58	100,00
Tamat SMP/Sederajat	18,44	81,56	100,00
Tamat SMA/Sederajat	28,00	72,00	100,00
Tamat Pendidikan Tinggi	45,56	54,44	100,00
Indonesia	**13,98**	**86,02**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.6 Persentase Lansia Bekerja Sebagai Pekerja Rentan dan Tidak Rentan, 2021

Karakteristik	Status Pekerjaan		Jumlah
	Pekerja Rentan	Pekerja Tidak Rentan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	68,71	31,30	100,00
Perdesaan	81,56	18,45	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	71,74	28,25	100,00
Perempuan	81,51	18,48	100,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	73,83	26,17	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	80,16	19,84	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	85,21	14,78	100,00
Tingkat Pendidikan			
Tidak Tamat SD/Sederajat	78,69	21,30	100,00
Tamat SD/Sederajat	75,92	24,08	100,00
Tamat SMP/Sederajat	74,64	25,36	100,00
Tamat SMA/Sederajat	68,46	31,53	100,00
Tamat Pendidikan Tinggi	53,52	46,48	100,00
Indonesia	**75,56**	**24,44**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.7 Persentase Lansia Bekerja Sebagai Pekerja Tetap dan Tidak Tetap (*Precarious Employment*), 2021

Karakteristik	Sektor Pekerjaan		Jumlah
	Pekerja Tetap	Pekerja Tidak Tetap	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	89,09	10,91	100,00
Perdesaan	89,93	10,07	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	88,54	11,46	100,00
Perempuan	91,11	8,89	100,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	88,82	11,18	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	91,46	8,54	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	93,50	6,50	100,00
Tingkat Pendidikan			
Tidak Tamat SD/Sederajat	87,79	12,21	100,00
Tamat SD/Sederajat	88,34	11,66	100,00
Tamat SMP/Sederajat	93,09	6,91	100,00
Tamat SMA/Sederajat	96,47	3,53	100,00
Tamat Pendidikan Tinggi	99,08	0,92	100,00
Indonesia	**89,54**	**10,46**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.8 Rata-rata Jumlah Jam Kerja dan Persentase Lansia Bekerja Menurut Jam Kerja dalam Seminggu, 2021

Karakteristik	Jam Kerja dalam Seminggu						Jumlah	Rata-rata Jumlah Jam Kerja
	< 1 Jam	1-14 Jam	15-34 Jam	35-40 Jam	41-48 Jam	≥ 49 Jam		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tipe Daerah								
Perkotaan	4,99	13,78	29,56	12,57	14,40	24,70	100,00	35
Perdesaan	5,17	16,44	39,38	12,18	11,81	15,03	100,00	30
Jenis Kelamin								
Laki-laki	5,41	11,98	33,61	13,50	15,26	20,24	100,00	33
Perempuan	4,59	20,23	36,65	10,58	9,50	18,45	100,00	30
Kelompok Umur								
Lansia Muda	4,77	13,57	33,71	12,80	14,01	21,15	100,00	33
Lansia Madya	5,68	19,17	38,16	11,31	10,33	15,34	100,00	29
Lansia Tua	8,92	27,39	37,51	8,91	7,55	9,72	100,00	24
Tingkat Pendidikan								
Tidak Tamat SD	5,27	17,19	37,37	11,78	11,55	16,83	100,00	30
Tamat SD	4,70	12,95	34,95	12,80	13,95	20,65	100,00	33
Tamat SMP	5,49	12,72	29,32	12,16	16,06	24,24	100,00	35
Tamat SMA	5,86	15,04	26,88	12,56	14,14	25,53	100,00	35
Pendidikan Tinggi	4,45	21,94	33,21	14,36	10,56	15,50	100,00	30
Indonesia	**5,09**	**15,20**	**34,80**	**12,36**	**13,02**	**19,54**	**100,00**	**32**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.9 Rata-rata Penghasilan dan Persentase Lansia Bekerja Menurut Jumlah Penghasilan dalam Sebulan, 2021

Karakteristik	Penghasilan dalam Sebulan (rupiah)				Jumlah	Rata-rata Penghasilan Lansia (000 rupiah)
	Kurang dari 1 000 000	1 000 000 - 1 999 999	2 000 000 - 2 999 999	3 000 000 atau Lebih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	45,61	30,13	11,67	12,59	100,00	1 575
Perdesaan	60,62	25,14	9,00	5,25	100,00	1 048
Jenis Kelamin						
Laki-laki	42,83	31,61	13,72	11,84	100,00	1 572
Perempuan	67,46	21,98	5,29	5,27	100,00	969
Kelompok Umur						
Lansia Muda	48,84	29,33	11,29	10,54	100,00	1 438
Lansia Madya	61,83	24,00	8,40	5,77	100,00	1 066
Lansia Tua	76,21	18,15	3,62	2,03	100,00	710
Tingkat Pendidikan						
Tidak Tamat SD	63,70	25,26	7,21	3,83	100,00	951
Tamat SD	50,21	31,13	11,38	7,28	100,00	1 219
Tamat SMP	40,35	30,78	16,38	12,49	100,00	1 560
Tamat SMA	31,09	28,38	17,57	22,96	100,00	2 025
Pendidikan Tinggi	20,93	17,27	8,97	52,83	100,00	4 793
Lapangan Usaha						
Pertanian	62,54	25,74	7,26	4,45	100,00	1 002
Manufaktur	45,66	26,62	16,08	11,64	100,00	1 519
Jasa-jasa	45,30	30,57	11,13	13,00	100,00	1 590
Indonesia	**52,31**	**27,90**	**10,48**	**9,31**	**100,00**	**1 340**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.10 Persentase Lansia Bekerja dengan Penghasilan Rendah, 2021

Karakteristik	Penghasilan Rendah
(1)	(2)
Tipe Daerah	
Perkotaan	27,28
Perdesaan	39,62
Jenis Kelamin	
Laki-laki	25,02
Perempuan	45,20
Kelompok Umur	
Lansia Muda (60-69 Tahun)	29,63
Lansia Madya (70-79 Tahun)	41,17
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	56,68
Indonesia	**32,79**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.11 Persentase Lansia Bekerja Menurut Perubahan Jam Kerja Dibandingkan Sebelum Pandemi COVID-19, 2021

Karakteristik	Perubahan Jam Kerja				Jumlah
	Jam Kerja Bertambah	Jam Kerja Berkurang	Tidak Ada Perubahan	Belum Bekerja di Pekerjaan Sekarang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	2,94	22,53	66,04	8,49	100,00
Perdesaan	3,22	17,48	70,25	9,05	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	3,19	19,68	68,36	8,77	100,00
Perempuan	2,92	20,08	68,17	8,82	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda	3,13	19,98	67,79	9,10	100,00
Lansia Madya	2,95	19,43	69,85	7,76	100,00
Lansia Tua	3,00	19,15	69,20	8,65	100,00
Lapangan Usaha					
Pertanian	3,32	15,27	73,07	8,34	100,00
Manufaktur	2,87	25,81	58,19	13,14	100,00
Jasa-jasa	2,80	24,67	64,83	7,69	100,00
Indonesia	**3,09**	**19,83**	**68,29**	**8,79**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.12 Persentase Lansia Bekerja yang Mengalami Perubahan Jam Kerja Karena Terkait COVID-19, 2021

Karakteristik	Terkait COVID-19		Jumlah
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tipe Daerah			
Perkotaan	66,38	33,62	100,00
Perdesaan	28,83	71,17	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	47,91	52,09	100,00
Perempuan	48,93	51,07	100,00
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	51,34	48,66	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	40,27	59,73	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	27,85	72,15	100,00
Lapangan Usaha			
Pertanian	15,51	84,49	100,00
Manufaktur	61,93	38,07	100,00
Jasa-jasa	78,02	21,98	100,00
Indonesia	**48,31**	**51,69**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.13 Persentase Lansia Bekerja Menurut Perubahan Penghasilan Dibandingkan Sebelum Pandemi COVID-19, 2021

Karakteristik	Perubahan Penghasilan				Jumlah
	Penghasilan Bertambah	Penghasilan Berkurang	Tidak Ada Perubahan	Belum Bekerja di Pekerjaan Sekarang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	5,31	45,98	39,17	9,53	100,00
Perdesaan	7,36	37,39	43,91	11,34	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	6,46	41,13	41,91	10,51	100,00
Perempuan	5,86	43,77	40,30	10,08	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda	6,18	42,54	40,69	10,59	100,00
Lansia Madya	6,44	41,39	43,00	9,17	100,00
Lansia Tua	5,92	36,86	44,78	12,43	100,00
Tingkat Pendidikan					
Tidak Tamat SD/Sederajat	6,76	40,40	41,45	11,39	100,00
Tamat SD/Sederajat	5,95	43,60	40,29	10,15	100,00
Tamat SMP/Sederajat	5,98	47,56	37,04	9,41	100,00
Tamat SMA/Sederajat	6,02	44,49	41,13	8,35	100,00
Tamat Pendidikan Tinggi	4,19	29,76	58,96	7,09	100,00
Lapangan Usaha					
Pertanian	7,62	33,05	48,32	11,01	100,00
Manufaktur	6,32	42,45	36,54	14,69	100,00
Jasa-jasa	4,83	50,85	36,54	7,78	100,00
Indonesia	**6,23**	**42,15**	**41,29**	**10,34**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.14.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2021

Perkotaan

Provinsi	Jenis Kegiatan				Jumlah
	Bekerja	Pengang-guran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	31,91	0,56	42,16	25,37	100,00
12 Sumatera Utara	42,36	0,82	35,71	21,12	100,00
13 Sumatera Barat	46,02	0,75	36,22	17,01	100,00
14 Riau	35,43	0,91	43,05	20,61	100,00
15 Jambi	41,72	1,50	34,21	22,57	100,00
16 Sumatera Selatan	38,99	1,26	39,70	20,05	100,00
17 Bengkulu	42,14	0,00	36,85	21,01	100,00
18 Lampung	46,25	0,76	35,46	17,52	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	35,89	0,00	46,83	17,28	100,00
21 Kepulauan Riau	36,81	1,31	41,73	20,15	100,00
31 DKI Jakarta	34,59	0,77	37,68	26,96	100,00
32 Jawa Barat	42,12	1,74	36,80	19,34	100,00
33 Jawa Tengah	45,38	2,78	33,05	18,79	100,00
34 DI Yogyakarta	49,72	3,03	36,66	10,59	100,00
35 Jawa Timur	46,84	4,07	32,68	16,41	100,00
36 Banten	36,59	0,73	36,28	26,40	100,00
51 Bali	50,48	0,85	35,96	12,72	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	51,79	0,64	29,81	17,76	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	45,21	1,95	30,75	22,09	100,00
61 Kalimantan Barat	31,00	1,66	41,10	26,24	100,00
62 Kalimantan Tengah	45,50	0,95	34,42	19,12	100,00
63 Kalimantan Selatan	35,43	0,94	45,17	18,47	100,00
64 Kalimantan Timur	43,72	0,36	37,12	18,80	100,00
65 Kalimantan Utara	39,71	0,00	37,96	22,34	100,00
71 Sulawesi Utara	39,93	1,06	39,25	19,75	100,00
72 Sulawesi Tengah	41,69	1,51	35,49	21,32	100,00
73 Sulawesi Selatan	35,08	0,41	41,19	23,33	100,00
74 Sulawesi Tenggara	39,70	1,93	39,65	18,72	100,00
75 Gorontalo	43,52	0,49	36,76	19,23	100,00
76 Sulawesi Barat	40,82	2,53	37,80	18,85	100,00
81 Maluku	40,99	1,30	35,46	22,24	100,00
82 Maluku Utara	34,78	2,06	35,17	27,98	100,00
91 Papua Barat	41,97	1,72	38,22	18,10	100,00
94 Papua	43,65	0,71	32,00	23,64	100,00
Indonesia	**42,77**	**2,01**	**35,73**	**19,48**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.14.2 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2021

Perdesaan

Provinsi	Jenis Kegiatan				Jumlah
	Bekerja	Pengang-guran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	46,18	0,32	31,35	22,16	100,00
12 Sumatera Utara	59,42	0,48	23,68	16,43	100,00
13 Sumatera Barat	54,06	0,26	29,84	15,84	100,00
14 Riau	53,94	0,45	31,26	14,35	100,00
15 Jambi	53,24	0,51	28,87	17,37	100,00
16 Sumatera Selatan	56,22	0,54	26,67	16,58	100,00
17 Bengkulu	61,27	0,23	27,82	10,68	100,00
18 Lampung	57,82	0,36	28,25	13,58	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	50,39	0,20	35,57	13,84	100,00
21 Kepulauan Riau	41,79	1,40	40,98	15,83	100,00
31 DKI Jakarta	-	-	-	-	-
32 Jawa Barat	54,37	2,71	30,12	12,80	100,00
33 Jawa Tengah	57,41	0,29	28,09	14,20	100,00
34 DI Yogyakarta	70,07	0,87	19,84	9,22	100,00
35 Jawa Timur	61,49	0,37	25,67	12,47	100,00
36 Banten	50,93	0,63	27,81	20,63	100,00
51 Bali	60,38	0,46	28,12	11,03	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	54,69	0,66	27,34	17,31	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	64,85	0,61	18,47	16,07	100,00
61 Kalimantan Barat	53,65	0,48	26,02	19,86	100,00
62 Kalimantan Tengah	56,72	0,14	28,53	14,62	100,00
63 Kalimantan Selatan	59,13	0,35	28,55	11,97	100,00
64 Kalimantan Timur	56,61	0,44	27,49	15,46	100,00
65 Kalimantan Utara	55,75	0,00	32,04	12,21	100,00
71 Sulawesi Utara	51,52	0,39	31,97	16,12	100,00
72 Sulawesi Tengah	52,99	0,49	28,68	17,84	100,00
73 Sulawesi Selatan	49,26	0,28	33,51	16,95	100,00
74 Sulawesi Tenggara	57,71	0,27	29,41	12,60	100,00
75 Gorontalo	54,19	0,09	28,60	17,12	100,00
76 Sulawesi Barat	59,96	0,45	24,29	15,30	100,00
81 Maluku	56,01	1,12	24,77	18,09	100,00
82 Maluku Utara	50,49	1,13	29,25	19,14	100,00
91 Papua Barat	65,78	1,43	21,25	11,54	100,00
94 Papua	73,11	1,39	15,40	10,10	100,00
Indonesia	**57,30**	**0,65**	**27,48**	**14,57**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.14.3 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2021

Laki-laki

Provinsi	Jenis Kegiatan				Jumlah
	Bekerja	Pengang-guran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	58,27	0,55	11,35	29,84	100,00
12 Sumatera Utara	61,56	1,04	13,23	24,17	100,00
13 Sumatera Barat	64,79	0,71	14,12	20,39	100,00
14 Riau	64,29	0,87	14,47	20,37	100,00
15 Jambi	65,96	1,41	10,22	22,41	100,00
16 Sumatera Selatan	64,61	1,31	12,35	21,72	100,00
17 Bengkulu	70,97	0,15	13,37	15,51	100,00
18 Lampung	70,09	0,67	12,43	16,81	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	58,39	0,16	22,39	19,06	100,00
21 Kepulauan Riau	51,79	2,42	20,03	25,77	100,00
31 DKI Jakarta	43,40	0,92	16,83	38,86	100,00
32 Jawa Barat	61,12	3,87	11,04	23,97	100,00
33 Jawa Tengah	64,21	2,80	13,11	19,88	100,00
34 DI Yogyakarta	68,54	4,90	16,13	10,43	100,00
35 Jawa Timur	67,84	4,53	10,08	17,55	100,00
36 Banten	55,82	0,99	10,37	32,81	100,00
51 Bali	60,35	1,44	23,21	15,01	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	67,44	1,26	11,79	19,52	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	71,19	1,14	9,10	18,57	100,00
61 Kalimantan Barat	58,09	1,65	13,90	26,36	100,00
62 Kalimantan Tengah	66,03	0,57	14,62	18,78	100,00
63 Kalimantan Selatan	61,04	0,98	18,33	19,65	100,00
64 Kalimantan Timur	60,09	0,73	16,08	23,10	100,00
65 Kalimantan Utara	64,91	0,00	15,60	19,49	100,00
71 Sulawesi Utara	62,61	1,14	13,44	22,81	100,00
72 Sulawesi Tengah	67,54	0,92	11,90	19,64	100,00
73 Sulawesi Selatan	62,56	0,49	13,55	23,39	100,00
74 Sulawesi Tenggara	64,02	1,62	19,08	15,28	100,00
75 Gorontalo	64,67	0,26	12,84	22,23	100,00
76 Sulawesi Barat	73,32	1,57	8,53	16,58	100,00
81 Maluku	60,37	1,62	13,60	24,41	100,00
82 Maluku Utara	60,82	0,48	11,57	27,13	100,00
91 Papua Barat	64,06	2,54	16,83	16,57	100,00
94 Papua	69,39	1,76	8,97	19,89	100,00
Indonesia	**63,31**	**2,55**	**12,51**	**21,62**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.14.4 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2021

Perempuan

Provinsi	Jenis Kegiatan				Jumlah
	Bekerja	Pengang-guran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	27,02	0,26	55,51	17,21	100,00
12 Sumatera Utara	40,43	0,34	44,70	14,53	100,00
13 Sumatera Barat	37,87	0,29	48,95	12,89	100,00
14 Riau	28,66	0,38	57,89	13,07	100,00
15 Jambi	33,11	0,26	50,89	15,75	100,00
16 Sumatera Selatan	36,22	0,31	49,29	14,18	100,00
17 Bengkulu	40,29	0,18	47,86	11,67	100,00
18 Lampung	38,22	0,27	48,88	12,63	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	24,58	0,00	63,00	12,42	100,00
21 Kepulauan Riau	23,16	0,19	64,03	12,62	100,00
31 DKI Jakarta	26,45	0,64	56,95	15,96	100,00
32 Jawa Barat	30,57	0,23	57,65	11,54	100,00
33 Jawa Tengah	40,30	0,41	45,78	13,51	100,00
34 DI Yogyakarta	46,55	0,13	43,45	9,88	100,00
35 Jawa Timur	41,96	0,33	45,84	11,87	100,00
36 Banten	27,07	0,40	56,41	16,12	100,00
51 Bali	48,41	0,06	42,00	9,53	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	41,50	0,14	42,47	15,88	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	51,33	0,71	31,58	16,38	100,00
61 Kalimantan Barat	32,34	0,20	49,23	18,23	100,00
62 Kalimantan Tengah	35,82	0,33	50,22	13,64	100,00
63 Kalimantan Selatan	36,31	0,28	52,81	10,60	100,00
64 Kalimantan Timur	34,90	0,00	53,69	11,41	100,00
65 Kalimantan Utara	25,15	0,00	58,87	15,97	100,00
71 Sulawesi Utara	29,58	0,36	56,54	13,52	100,00
72 Sulawesi Tengah	32,24	0,66	49,06	18,05	100,00
73 Sulawesi Selatan	28,23	0,20	55,14	16,43	100,00
74 Sulawesi Tenggara	41,54	0,02	44,69	13,75	100,00
75 Gorontalo	36,16	0,27	49,22	14,35	100,00
76 Sulawesi Barat	40,67	0,32	43,39	15,61	100,00
81 Maluku	40,34	0,80	43,38	15,47	100,00
82 Maluku Utara	31,72	2,28	50,13	15,88	100,00
91 Papua Barat	46,18	0,41	41,70	11,71	100,00
94 Papua	49,72	0,25	39,74	10,29	100,00
Indonesia	**36,84**	**0,33**	**49,62**	**13,22**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.14.5 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2021

Total

Provinsi	Jenis Kegiatan				Jumlah
	Bekerja	Pengang-guran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	41,72	0,39	34,72	23,16	100,00
12 Sumatera Utara	50,17	0,66	30,20	18,97	100,00
13 Sumatera Barat	50,38	0,48	32,76	16,37	100,00
14 Riau	46,76	0,63	35,83	16,78	100,00
15 Jambi	49,48	0,83	30,61	19,07	100,00
16 Sumatera Selatan	49,99	0,80	31,38	17,83	100,00
17 Bengkulu	55,83	0,16	30,39	13,62	100,00
18 Lampung	54,38	0,48	30,39	14,75	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	41,97	0,08	42,11	15,83	100,00
21 Kepulauan Riau	37,76	1,33	41,59	19,33	100,00
31 DKI Jakarta	34,59	0,77	37,68	26,96	100,00
32 Jawa Barat	45,42	2,00	35,00	17,58	100,00
33 Jawa Tengah	51,44	1,52	30,55	16,48	100,00
34 DI Yogyakarta	56,57	2,30	31,00	10,13	100,00
35 Jawa Timur	53,94	2,28	29,28	14,50	100,00
36 Banten	41,43	0,69	33,42	24,46	100,00
51 Bali	54,04	0,71	33,14	12,11	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	53,27	0,65	28,55	17,53	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	60,52	0,91	21,18	17,39	100,00
61 Kalimantan Barat	45,12	0,92	31,70	22,26	100,00
62 Kalimantan Tengah	52,21	0,46	30,90	16,43	100,00
63 Kalimantan Selatan	48,22	0,62	36,20	14,96	100,00
64 Kalimantan Timur	48,28	0,39	33,72	17,62	100,00
65 Kalimantan Utara	46,76	0,00	35,36	17,88	100,00
71 Sulawesi Utara	45,52	0,74	35,75	18,00	100,00
72 Sulawesi Tengah	49,75	0,79	30,63	18,83	100,00
73 Sulawesi Selatan	43,52	0,33	36,62	19,53	100,00
74 Sulawesi Tenggara	52,21	0,78	32,54	14,47	100,00
75 Gorontalo	49,52	0,27	32,17	18,04	100,00
76 Sulawesi Barat	55,84	0,90	27,20	16,06	100,00
81 Maluku	49,96	1,20	29,08	19,76	100,00
82 Maluku Utara	46,28	1,38	30,83	21,51	100,00
91 Papua Barat	55,73	1,55	28,41	14,31	100,00
94 Papua	60,87	1,11	22,30	15,73	100,00
Indonesia	**49,46**	**1,39**	**31,93**	**17,22**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.15 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2021

Provinsi	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	Tidak Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SMP/ Sederajat	Tamat SMA/ Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	26,15	45,64	13,88	10,35	3,99	100,00
12 Sumatera Utara	26,26	37,88	18,04	13,41	4,41	100,00
13 Sumatera Barat	41,79	30,82	12,30	10,84	4,26	100,00
14 Riau	40,03	35,69	11,58	9,85	2,86	100,00
15 Jambi	39,28	39,22	9,32	8,72	3,46	100,00
16 Sumatera Selatan	37,20	44,16	9,11	7,08	2,45	100,00
17 Bengkulu	41,70	36,41	10,41	6,65	4,83	100,00
18 Lampung	42,42	39,74	9,59	5,48	2,76	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	45,65	33,96	9,75	7,38	3,27	100,00
21 Kepulauan Riau	38,67	29,44	9,66	16,05	6,17	100,00
31 DKI Jakarta	17,94	31,25	16,13	24,36	10,32	100,00
32 Jawa Barat	31,42	51,04	6,19	7,10	4,25	100,00
33 Jawa Tengah	49,44	36,69	6,33	5,04	2,50	100,00
34 DI Yogyakarta	37,32	33,66	9,08	13,34	6,60	100,00
35 Jawa Timur	49,24	36,05	6,97	5,19	2,56	100,00
36 Banten	36,63	39,49	8,30	10,53	5,05	100,00
51 Bali	49,25	30,99	6,53	6,73	6,48	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	64,70	22,13	5,01	4,99	3,17	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	46,13	37,68	6,16	6,75	3,28	100,00
61 Kalimantan Barat	57,59	28,36	6,93	4,22	2,90	100,00
62 Kalimantan Tengah	30,87	45,30	11,18	8,28	4,37	100,00
63 Kalimantan Selatan	47,96	34,95	7,94	6,46	2,70	100,00
64 Kalimantan Timur	36,22	33,55	13,21	12,79	4,24	100,00
65 Kalimantan Utara	35,95	34,02	13,01	12,10	4,94	100,00
71 Sulawesi Utara	21,89	36,97	19,17	15,12	6,86	100,00
72 Sulawesi Tengah	26,67	47,81	12,51	8,84	4,17	100,00
73 Sulawesi Selatan	45,38	28,73	9,21	10,17	6,50	100,00
74 Sulawesi Tenggara	43,94	31,90	9,89	9,25	5,02	100,00
75 Gorontalo	46,33	33,72	8,05	7,68	4,21	100,00
76 Sulawesi Barat	52,03	31,32	6,72	7,44	2,50	100,00
81 Maluku	22,37	46,42	12,97	12,75	5,49	100,00
82 Maluku Utara	31,64	42,10	16,16	8,61	1,49	100,00
91 Papua Barat	32,70	36,13	13,17	12,37	5,63	100,00
94 Papua	48,15	26,20	11,35	10,75	3,55	100,00
Indonesia	**41,72**	**38,37**	**8,48**	**7,70**	**3,74**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.16 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2021

Provinsi	Lapangan Usaha			Jumlah
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	59,16	12,96	27,88	100,00
12 Sumatera Utara	54,28	10,87	34,84	100,00
13 Sumatera Barat	58,57	12,21	29,22	100,00
14 Riau	63,61	8,97	27,41	100,00
15 Jambi	66,95	8,21	24,84	100,00
16 Sumatera Selatan	63,57	8,32	28,11	100,00
17 Bengkulu	67,31	10,02	22,68	100,00
18 Lampung	62,84	10,53	26,63	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	45,72	20,93	33,36	100,00
21 Kepulauan Riau	28,69	18,40	52,91	100,00
31 DKI Jakarta	1,59	16,48	81,92	100,00
32 Jawa Barat	41,89	16,52	41,59	100,00
33 Jawa Tengah	54,66	16,82	28,52	100,00
34 DI Yogyakarta	47,93	21,82	30,26	100,00
35 Jawa Timur	58,43	11,59	29,98	100,00
36 Banten	35,83	15,01	49,17	100,00
51 Bali	49,17	21,96	28,88	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	55,38	11,76	32,86	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	71,24	15,14	13,62	100,00
61 Kalimantan Barat	71,36	9,14	19,50	100,00
62 Kalimantan Tengah	62,64	11,44	25,92	100,00
63 Kalimantan Selatan	54,07	11,14	34,79	100,00
64 Kalimantan Timur	42,57	11,38	46,05	100,00
65 Kalimantan Utara	54,55	12,45	32,99	100,00
71 Sulawesi Utara	46,98	17,77	35,25	100,00
72 Sulawesi Tengah	64,06	12,57	23,36	100,00
73 Sulawesi Selatan	60,54	9,88	29,58	100,00
74 Sulawesi Tenggara	58,47	12,05	29,48	100,00
75 Gorontalo	47,92	13,01	39,06	100,00
76 Sulawesi Barat	68,44	11,53	20,02	100,00
81 Maluku	54,88	16,94	28,18	100,00
82 Maluku Utara	53,75	24,22	22,03	100,00
91 Papua Barat	52,85	9,13	38,02	100,00
94 Papua	69,42	4,20	26,38	100,00
Indonesia	**53,10**	**13,86**	**33,04**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.17 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2021

Provinsi	Status Pekerjaan						Jumlah
	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh dibayar	Buruh/ Karya-wan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ tidak dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	39,10	27,91	5,07	9,81	10,06	8,05	100,00
12 Sumatera Utara	32,35	29,56	7,07	11,69	6,87	12,47	100,00
13 Sumatera Barat	34,18	31,74	4,79	5,86	8,87	14,56	100,00
14 Riau	37,23	25,44	11,85	9,75	7,90	7,84	100,00
15 Jambi	34,92	29,49	7,89	8,73	8,17	10,81	100,00
16 Sumatera Selatan	32,75	32,04	4,08	9,44	6,53	15,16	100,00
17 Bengkulu	31,38	34,78	7,06	4,55	5,62	16,61	100,00
18 Lampung	27,53	38,85	3,24	5,72	9,04	15,61	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	39,68	22,06	6,43	17,38	5,57	8,88	100,00
21 Kepulauan Riau	48,65	12,72	6,84	19,15	5,98	6,66	100,00
31 DKI Jakarta	43,75	12,00	8,80	25,02	5,38	5,05	100,00
32 Jawa Barat	33,51	23,86	4,29	11,41	17,29	9,64	100,00
33 Jawa Tengah	28,00	32,78	3,16	8,47	11,88	15,71	100,00
34 DI Yogyakarta	26,13	36,44	3,33	8,75	6,17	19,18	100,00
35 Jawa Timur	27,01	31,48	4,41	9,31	12,29	15,49	100,00
36 Banten	38,12	20,89	2,56	14,12	14,98	9,33	100,00
51 Bali	25,98	34,44	2,94	9,10	5,01	22,54	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	30,60	41,90	2,34	5,05	7,79	12,33	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	28,23	47,75	1,71	2,03	1,39	18,89	100,00
61 Kalimantan Barat	33,54	34,93	4,71	7,61	5,13	14,07	100,00
62 Kalimantan Tengah	37,89	31,95	2,61	10,39	6,73	10,42	100,00
63 Kalimantan Selatan	39,97	32,15	2,56	9,40	4,85	11,07	100,00
64 Kalimantan Timur	34,37	31,96	6,27	12,76	4,02	10,61	100,00
65 Kalimantan Utara	31,93	33,74	2,05	14,69	6,42	11,17	100,00
71 Sulawesi Utara	43,80	20,73	4,63	11,11	8,53	11,20	100,00
72 Sulawesi Tengah	35,92	35,57	4,44	7,56	5,86	10,66	100,00
73 Sulawesi Selatan	33,91	36,92	3,03	11,11	4,00	11,03	100,00
74 Sulawesi Tenggara	35,39	39,28	4,50	5,39	2,65	12,79	100,00
75 Gorontalo	37,41	31,81	3,57	9,69	5,99	11,53	100,00
76 Sulawesi Barat	31,30	48,91	0,86	3,85	2,70	12,39	100,00
81 Maluku	44,60	29,18	1,34	8,93	1,98	13,98	100,00
82 Maluku Utara	37,99	35,02	5,15	7,22	3,95	10,67	100,00
91 Papua Barat	34,91	34,86	2,92	10,77	1,72	14,81	100,00
94 Papua	28,30	44,21	1,66	7,07	0,61	18,16	100,00
Indonesia	**31,34**	**30,76**	**4,23**	**9,75**	**10,46**	**13,46**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.18 Persentase Lansia Bekerja pada Kategori *Precarious Employment* Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	8,81	10,45	10,31	9,56	10,06
12 Sumatera Utara	8,62	5,38	8,58	4,62	6,86
13 Sumatera Barat	5,87	11,02	8,74	9,06	8,87
14 Riau	7,60	8,02	8,57	6,33	7,90
15 Jambi	7,33	8,49	8,61	7,29	8,17
16 Sumatera Selatan	6,34	6,61	7,11	5,56	6,53
17 Bengkulu	4,54	5,91	4,89	6,95	5,62
18 Lampung	9,46	8,91	10,19	6,89	9,05
19 Kep. Bangka Belitung	4,99	6,14	5,66	5,34	5,57
21 Kepulauan Riau	5,92	6,22	7,42	2,62	5,98
31 DKI Jakarta	5,38	-	6,72	3,35	5,38
32 Jawa Barat	16,19	19,62	19,15	13,78	17,29
33 Jawa Tengah	11,32	12,30	13,34	9,83	11,87
34 DI Yogyakarta	5,85	6,61	8,73	3,01	6,17
35 Jawa Timur	12,17	12,40	12,63	11,82	12,29
36 Banten	13,99	16,38	14,62	15,72	14,98
51 Bali	5,17	4,76	6,80	3,01	5,01
52 Nusa Tenggara Barat	8,59	7,06	5,32	11,13	7,79
53 Nusa Tenggara Timur	0,28	1,61	1,38	1,41	1,39
61 Kalimantan Barat	7,06	4,45	6,21	3,22	5,13
62 Kalimantan Tengah	9,19	5,41	7,85	4,28	6,73
63 Kalimantan Selatan	6,88	3,80	5,91	3,18	4,84
64 Kalimantan Timur	5,73	1,61	5,80	0,55	4,02
65 Kalimantan Utara	8,37	4,64	7,15	4,15	6,42
71 Sulawesi Utara	7,66	9,25	10,92	3,80	8,53
72 Sulawesi Tengah	7,25	5,41	5,62	6,33	5,86
73 Sulawesi Selatan	3,53	4,22	3,44	4,99	4,00
74 Sulawesi Tenggara	2,41	2,72	3,79	1,07	2,65
75 Gorontalo	5,76	6,14	6,53	5,14	5,99
76 Sulawesi Barat	1,22	2,97	3,93	0,77	2,70
81 Maluku	2,56	1,69	2,11	1,80	1,98
82 Maluku Utara	2,60	4,29	5,59	0,81	3,95
91 Papua Barat	3,09	1,09	2,38	0,67	1,72
94 Papua	1,22	0,35	0,50	0,80	0,61
Indonesia	**10,91**	**10,07**	**11,46**	**8,89**	**10,46**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.19 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Informal Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	74,00	88,61	81,73	91,62	85,12
12 Sumatera Utara	72,45	88,66	75,88	88,22	81,24
13 Sumatera Barat	86,18	91,63	87,07	92,74	89,35
14 Riau	71,68	81,19	75,67	84,72	78,40
15 Jambi	77,48	85,62	79,51	91,06	83,38
16 Sumatera Selatan	77,56	89,98	83,85	90,88	86,47
17 Bengkulu	79,62	90,79	84,97	94,57	88,39
18 Lampung	86,44	92,59	89,63	93,69	91,04
19 Kep. Bangka Belitung	70,76	81,54	72,00	86,73	76,19
21 Kepulauan Riau	70,63	86,66	69,85	83,69	74,01
31 DKI Jakarta	66,18	-	60,31	75,07	66,18
32 Jawa Barat	80,68	91,91	81,95	88,74	84,30
33 Jawa Tengah	81,95	93,36	86,82	90,52	88,37
34 DI Yogyakarta	83,92	93,50	85,87	90,44	87,92
35 Jawa Timur	80,55	90,91	83,39	90,29	86,28
36 Banten	76,33	93,20	79,81	90,54	83,32
51 Bali	84,49	93,13	84,12	92,25	87,96
52 Nusa Tenggara Barat	90,79	94,27	90,04	96,09	92,62
53 Nusa Tenggara Timur	86,98	98,10	93,91	99,09	96,27
61 Kalimantan Barat	75,68	91,86	83,89	94,38	87,67
62 Kalimantan Tengah	85,08	88,02	85,32	90,67	86,99
63 Kalimantan Selatan	79,52	92,38	86,28	90,77	88,03
64 Kalimantan Timur	75,68	88,44	76,37	89,95	80,97
65 Kalimantan Utara	73,53	92,09	79,99	93,31	83,26
71 Sulawesi Utara	78,34	89,19	82,34	88,03	84,26
72 Sulawesi Tengah	73,32	92,63	86,26	91,57	88,00
73 Sulawesi Selatan	73,83	91,69	82,59	91,69	85,86
74 Sulawesi Tenggara	80,78	92,93	86,17	95,59	90,11
75 Gorontalo	82,36	89,47	87,63	85,33	86,74
76 Sulawesi Barat	88,06	96,65	93,19	98,58	95,29
81 Maluku	80,94	94,08	85,76	95,22	89,73
82 Maluku Utara	79,73	89,62	84,44	93,75	87,63
91 Papua Barat	80,21	89,15	80,31	95,85	86,31
94 Papua	82,18	95,12	88,51	96,30	91,27
Indonesia	**79,61**	**91,62**	**83,21**	**90,41**	**86,02**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.20 Rata-rata Jumlah Jam Kerja dan Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2021

Provinsi	Jam Kerja dalam Seminggu						Jumlah	Rata-rata Jumlah Jam Kerja
	Kurang dari 1 Jam	1-14 Jam	15-34 Jam	35-40 Jam	41-48 Jam	40 Jam atau Lebih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 Aceh	4,88	18,49	40,88	11,98	10,31	13,45	100,00	29
12 Sumatera Utara	5,59	15,72	36,83	11,33	14,36	16,17	100,00	31
13 Sumatera Barat	6,51	17,65	35,16	11,51	11,04	18,14	100,00	30
14 Riau	5,35	19,46	36,96	12,10	8,77	17,36	100,00	29
15 Jambi	5,47	13,46	45,42	11,92	12,07	11,66	100,00	29
16 Sumatera Selatan	4,12	12,59	38,42	14,32	15,48	15,06	100,00	32
17 Bengkulu	5,73	13,88	38,53	13,85	13,09	14,91	100,00	30
18 Lampung	5,65	16,82	35,72	10,51	13,95	17,35	100,00	30
19 Kep. Bangka Belitung	6,03	12,84	33,80	9,40	13,28	24,65	100,00	34
21 Kepulauan Riau	7,70	17,51	24,99	10,62	11,06	28,13	100,00	34
31 DKI Jakarta	3,21	16,09	19,41	16,14	11,08	34,07	100,00	39
32 Jawa Barat	4,41	13,56	33,55	13,63	13,38	21,47	100,00	34
33 Jawa Tengah	5,04	14,64	32,86	12,70	14,63	20,13	100,00	33
34 DI Yogyakarta	4,74	19,72	30,99	9,68	12,95	21,92	100,00	32
35 Jawa Timur	4,42	14,44	36,84	12,15	12,45	19,69	100,00	32
36 Banten	6,40	12,55	29,12	12,47	13,81	25,66	100,00	35
51 Bali	2,52	17,29	34,87	13,09	12,73	19,49	100,00	32
52 Nusa Tenggara Barat	6,81	19,82	34,49	8,75	10,73	19,39	100,00	30
53 Nusa Tenggara Timur	7,60	19,31	42,43	9,76	11,98	8,92	100,00	27
61 Kalimantan Barat	5,95	17,80	38,04	11,15	13,45	13,61	100,00	29
62 Kalimantan Tengah	6,93	15,16	35,80	12,00	11,53	18,59	100,00	31
63 Kalimantan Selatan	6,34	19,93	35,15	10,63	10,12	17,83	100,00	29
64 Kalimantan Timur	3,78	12,64	25,48	15,80	12,31	29,99	100,00	38
65 Kalimantan Utara	4,41	16,21	29,22	13,23	14,95	21,98	100,00	34
71 Sulawesi Utara	5,60	11,71	36,59	11,59	19,86	14,65	100,00	32
72 Sulawesi Tengah	8,35	14,18	35,17	14,16	13,15	14,98	100,00	30
73 Sulawesi Selatan	5,89	19,44	34,35	11,66	9,87	18,79	100,00	30
74 Sulawesi Tenggara	7,90	15,42	37,29	10,68	10,17	18,55	100,00	30
75 Gorontalo	7,15	13,92	29,05	11,32	10,80	27,77	100,00	34
76 Sulawesi Barat	13,08	26,54	32,75	7,42	10,96	9,24	100,00	23
81 Maluku	7,77	14,39	40,83	10,00	11,21	15,80	100,00	30
82 Maluku Utara	9,08	13,55	38,78	12,38	10,73	15,48	100,00	30
91 Papua Barat	4,78	12,88	37,61	10,75	14,40	19,58	100,00	32
94 Papua	3,71	9,22	47,40	15,12	12,40	12,15	100,00	31
Indonesia	**5,09**	**15,20**	**34,80**	**12,36**	**13,02**	**19,54**	**100,00**	**32**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.21 Rata-rata Penghasilan dan Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Penghasilan dalam Sebulan, 2021

Provinsi	Jumlah Penghasilan dalam Sebulan (rupiah)				Jumlah	Rata-rata Penghasilan Lansia (000 rupiah)
	Kurang dari 1 000 000	1 000 000 - 1 999 999	2 000 000 - 2 999 999	3 000 000 atau Lebih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	48,24	32,44	11,15	8,17	100,00	1 239
12 Sumatera Utara	47,91	31,09	12,16	8,85	100,00	1 311
13 Sumatera Barat	52,36	27,73	12,94	6,97	100,00	1 173
14 Riau	38,27	33,60	13,55	14,58	100,00	1 670
15 Jambi	37,05	36,32	16,30	10,32	100,00	1 494
16 Sumatera Selatan	51,80	29,35	10,96	7,88	100,00	1 218
17 Bengkulu	59,24	19,71	13,52	7,53	100,00	1 200
18 Lampung	51,55	31,30	11,26	5,90	100,00	1 314
19 Kep. Bangka Belitung	43,42	28,88	17,83	9,87	100,00	1 506
21 Kepulauan Riau	33,35	29,21	21,04	16,40	100,00	1 734
31 DKI Jakarta	19,70	28,39	16,64	35,27	100,00	2 701
32 Jawa Barat	49,27	30,89	10,39	9,46	100,00	1 363
33 Jawa Tengah	60,94	26,35	8,42	4,28	100,00	1 016
34 DI Yogyakarta	67,19	20,68	7,97	4,15	100,00	1 078
35 Jawa Timur	59,36	26,71	8,28	5,65	100,00	1 122
36 Banten	36,22	26,84	13,99	22,95	100,00	2 269
51 Bali	55,48	26,56	8,80	9,17	100,00	1 223
52 Nusa Tenggara Barat	66,31	21,77	7,04	4,88	100,00	946
53 Nusa Tenggara Timur	75,90	15,84	4,12	4,15	100,00	754
61 Kalimantan Barat	50,79	29,66	11,64	7,90	100,00	1 304
62 Kalimantan Tengah	46,11	26,31	16,81	10,77	100,00	1 539
63 Kalimantan Selatan	55,24	26,72	10,78	7,26	100,00	1 156
64 Kalimantan Timur	28,05	37,33	18,06	16,56	100,00	1 774
65 Kalimantan Utara	27,68	39,54	13,75	19,03	100,00	1 974
71 Sulawesi Utara	35,70	32,82	15,25	16,24	100,00	1 760
72 Sulawesi Tengah	55,57	24,26	9,73	10,45	100,00	1 392
73 Sulawesi Selatan	51,59	22,89	10,42	15,09	100,00	1 808
74 Sulawesi Tenggara	63,44	22,04	7,93	6,58	100,00	1 163
75 Gorontalo	56,10	27,07	10,00	6,83	100,00	1 118
76 Sulawesi Barat	71,30	15,17	6,70	6,83	100,00	985
81 Maluku	62,15	18,39	10,13	9,32	100,00	1 236
82 Maluku Utara	47,51	28,64	11,59	12,25	100,00	1 470
91 Papua Barat	34,66	26,80	18,89	19,66	100,00	2 019
94 Papua	29,87	27,49	19,60	23,05	100,00	2 485
Indonesia	**52,31**	**27,90**	**10,48**	**9,31**	**100,00**	**1 340**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.22 Persentase Lansia Bekerja yang Memperoleh Upah Rendah Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	20,65	19,57	14,62	43,73	20,06
12 Sumatera Utara	18,86	12,05	9,06	34,58	17,35
13 Sumatera Barat	14,18	31,74	14,05	37,38	21,56
14 Riau	10,56	18,51	10,36	23,53	13,91
15 Jambi	13,28	11,73	8,75	23,13	12,33
16 Sumatera Selatan	20,90	19,14	13,99	33,98	20,04
17 Bengkulu	40,02	11,68	12,27	41,70	21,93
18 Lampung	24,38	12,77	11,67	36,27	17,63
19 Kep. Bangka Belitung	22,86	11,98	15,20	38,39	19,07
21 Kepulauan Riau	7,38	21,41	4,12	29,78	8,96
31 DKI Jakarta	7,14	-	2,61	16,71	7,14
32 Jawa Barat	17,96	19,45	10,12	39,29	18,16
33 Jawa Tengah	23,18	29,55	16,57	40,67	25,25
34 DI Yogyakarta	19,71	15,25	17,37	20,65	18,49
35 Jawa Timur	22,27	27,24	16,96	37,90	24,03
36 Banten	14,77	20,42	11,48	36,17	15,43
51 Bali	9,49	27,49	9,80	22,19	13,76
52 Nusa Tenggara Barat	37,59	42,49	35,12	58,55	39,45
53 Nusa Tenggara Timur	21,28	35,63	30,35	16,37	28,49
61 Kalimantan Barat	13,56	13,41	6,98	45,02	13,49
62 Kalimantan Tengah	7,37	14,23	12,04	8,36	11,25
63 Kalimantan Selatan	14,51	51,50	23,64	48,02	31,13
64 Kalimantan Timur	3,07	34,16	3,79	35,88	10,16
65 Kalimantan Utara	11,62	5,53	11,43	0,00	10,15
71 Sulawesi Utara	6,06	15,84	8,56	10,52	9,14
72 Sulawesi Tengah	20,45	39,34	18,70	53,49	26,76
73 Sulawesi Selatan	17,77	38,92	19,12	45,56	25,09
74 Sulawesi Tenggara	13,55	31,58	20,27	38,84	24,91
75 Gorontalo	25,98	30,91	18,53	37,77	28,32
76 Sulawesi Barat	29,21	57,08	35,67	100,00	44,91
81 Maluku	15,01	19,22	11,86	35,43	16,53
82 Maluku Utara	14,35	1,74	8,04	4,31	7,19
91 Papua Barat	7,19	9,62	8,88	4,84	8,43
94 Papua	8,54	3,66	6,35	6,33	6,35
Indonesia	**17,92**	**24,53**	**13,19**	**35,71**	**19,81**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 6.23 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	41,72	1,05	2,53	39,67	43,80	0,77	1 765
12 Sumatera Utara	50,17	0,92	1,84	48,36	51,97	1,75	3 565
13 Sumatera Barat	50,38	1,06	2,10	48,31	52,45	0,92	2 247
14 Riau	46,76	1,30	2,78	44,23	49,31	1,23	1 024
15 Jambi	49,48	1,33	2,68	46,89	52,09	0,96	1 053
16 Sumatera Selatan	49,99	1,08	2,17	47,86	52,11	1,42	1 896
17 Bengkulu	55,83	1,46	2,61	52,96	58,67	0,65	956
18 Lampung	54,38	1,18	2,18	52,05	56,69	1,90	1 980
19 Kep. Bangka Belitung	41,97	1,65	3,92	38,79	45,23	0,60	510
21 Kepulauan Riau	37,76	2,28	6,03	33,41	42,31	1,17	423
31 DKI Jakarta	34,59	1,41	4,07	31,88	37,40	3,30	535
32 Jawa Barat	45,42	0,70	1,55	44,04	46,80	3,93	4 123
33 Jawa Tengah	51,44	0,55	1,06	50,37	52,51	2,24	7 169
34 DI Yogyakarta	56,57	1,38	2,44	53,85	59,25	1,77	1 166
35 Jawa Timur	53,94	0,54	1,00	52,89	55,00	2,59	8 135
36 Banten	41,43	1,40	3,38	38,71	44,20	3,49	867
51 Bali	54,04	1,17	2,17	51,74	56,32	1,15	1 673
52 Nusa Tenggara Barat	53,27	1,48	2,79	50,36	56,17	1,69	1 090
53 Nusa Tenggara Timur	60,52	0,88	1,46	58,78	62,23	0,64	2 998
61 Kalimantan Barat	45,12	1,20	2,67	42,77	47,48	1,04	1 368
62 Kalimantan Tengah	52,21	1,49	2,85	49,30	55,12	0,75	924
63 Kalimantan Selatan	48,22	1,38	2,87	45,52	50,93	1,30	1 054
64 Kalimantan Timur	48,28	1,78	3,68	44,81	51,76	1,55	728
65 Kalimantan Utara	46,76	2,68	5,73	41,56	52,03	0,67	305
71 Sulawesi Utara	45,52	1,16	2,54	43,26	47,79	0,67	1 652
72 Sulawesi Tengah	49,75	1,46	2,93	46,90	52,60	0,92	1 035
73 Sulawesi Selatan	43,52	0,84	1,93	41,88	45,17	1,11	2 728
74 Sulawesi Tenggara	52,21	1,48	2,83	49,30	55,10	0,75	1 061
75 Gorontalo	49,52	1,79	3,62	46,01	53,03	0,58	511
76 Sulawesi Barat	55,84	2,11	3,78	51,67	59,93	0,77	537
81 Maluku	49,96	1,48	2,96	47,06	52,85	0,52	1 001
82 Maluku Utara	46,28	1,78	3,84	42,82	49,78	0,49	626
91 Papua Barat	55,73	2,95	5,29	49,90	61,41	0,82	617
94 Papua	60,87	2,03	3,34	56,82	64,77	1,42	980
Indonesia	**49,46**	**0,23**	**0,46**	**49,02**	**49,90**	**2,31**	**58 302**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

https://www.bps.go.id

BAB 7. SOSIAL EKONOMI

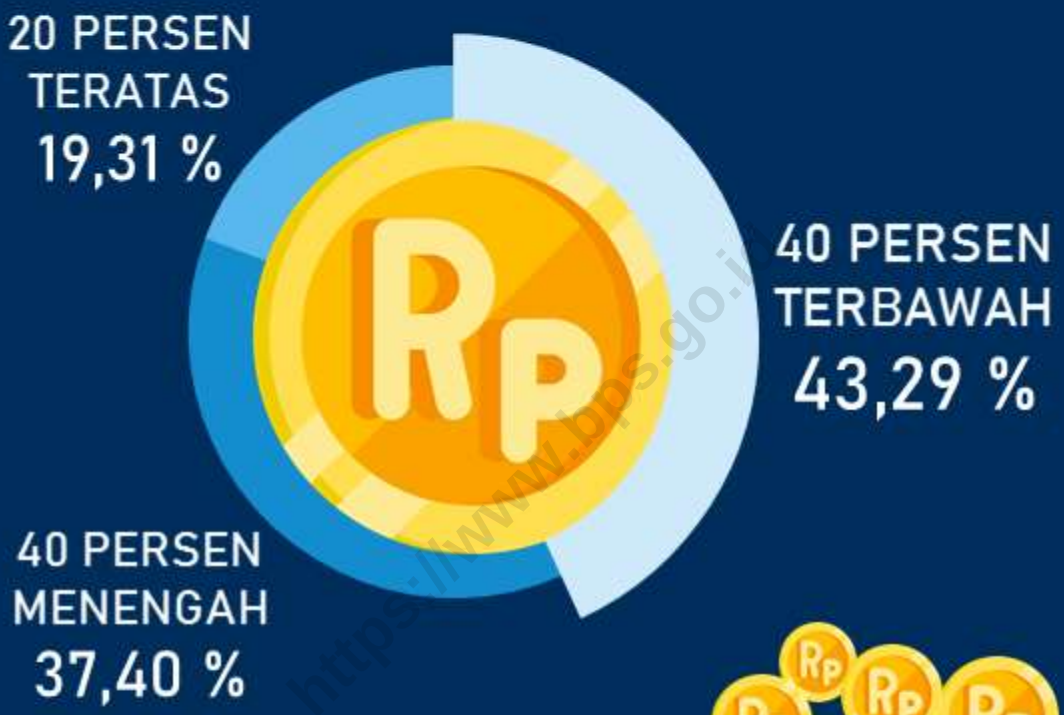

https://www.bps.go.id

mayoritas lansia berada pada kelompok ekonomi rendah

https://www.bps.go.id

Bab 7 Sosial Ekonomi

Kondisi fisik dan psikis yang menurun, membuat lansia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri yang semakin spesifik, seperti makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan, atau hubungan sosial. Bagi lansia yang memiliki jaminan hari tua, aset atau tabungan cukup, tidak terlalu menjadi masalah. Akan tetapi bagi lansia yang tidak memiliki jaminan hari tua dan tidak memiliki aset atau tabungan yang cukup, maka pilihan untuk memperoleh pendapatan jadi semakin terbatas (Silitonga, 2007). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi lansia untuk memperkirakan program dan kebijakan yang paling tepat untuk membantu lansia dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan di masa senja.

https://www.bps.go.id

7.1. Kondisi Ekonomi

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lansia adalah terancamnya status ekonomi karena lansia dianggap sudah tidak lagi produktif secara ekonomi. Dengan kemampuan kerja yang semakin menurun, maka jumlah pendapatan pun semakin menurun atau bahkan menjadi hilang sama sekali. Ketika memasuki masa senja, idealnya, lansia sudah memiliki kemapanan ekonomi. Sehingga pada saat produktivitas mulai menurun, kualitas hidup mereka masih terjaga (Styawan, 2021). Kondisi ekonomi lansia yang rendah akan menghambat lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menyebabkan lansia lebih rentan untuk hidup dalam kemiskinan. Sehingga, status ekonomi akan dapat menentukan kualitas hidup lansia.

Sekitar **dua** dari **lima** lansia berada di rumah tangga kelompok pengeluaran 40 persen terbawah

---

Status ekonomi rumah tangga lansia dilihat melalui pendekatan pengeluaran per kapita rumah tangga yang diurutkan, kemudian dikelompokkan ke dalam 40 persen ekonomi terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen

teratas. Gambar 7.1 di bawah memperlihatkan bahwa sebanyak 43,29 persen penduduk lanjut usia berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, sebanyak 37,40 persen lansia pada 40 persen menengah, dan 19,31 persen lansia pada 20 persen teratas. Berdasarkan data Susenas Maret 2021 tersebut, terlihat bahwa lansia lebih terdistribusi pada status ekonomi rendah, dengan angka persentase lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen yang lebih besar dari 40 persen dan persentase lansia pada kelompok pengeluaran 20 persen yang lebih kecil dari 20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas lansia berada pada kelompok ekonomi rendah.

Gambar 7.1 Persentase Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran, 2021

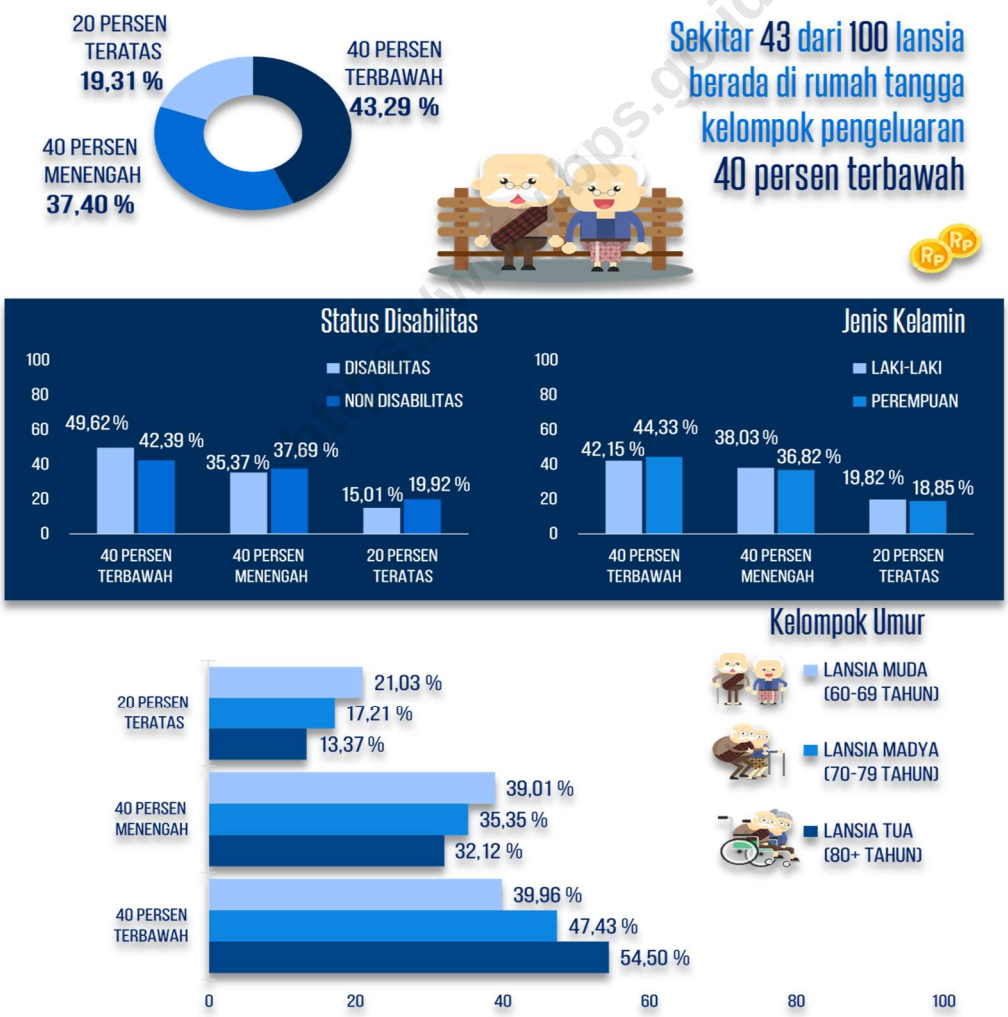

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Dilihat menurut jenis kelamin, persebaran status ekonomi lansia laki-laki cenderung lebih merata dibandingkan lansia perempuan. Hal ini ditandai dengan persentase lansia laki-laki pada kelompok ekonomi 40 persen terbawah yang lebih mendekati angka 40 persen daripada lansia perempuan (42,15 persen berbanding 44,33 persen) dan pada kelompok ekonomi 20 persen teratas yang lebih mendekati angka 20 persen (19,82 persen berbanding 18,85 persen). Di sisi lain, tingkat kesejahteraan lansia penyandang disabilitas tidak lebih baik dibandingkan lansia bukan penyandang disabilitas. Sekitar 49,62 persen atau hampir separuh dari lansia penyandang disabilitas tergolong dalam status ekonomi 40 persen terbawah. Sedangkan berdasar kelompok umur, lansia pada kelompok umur muda lebih sejahtera dibandingkan lansia pada kelompok umur yang lebih tua.

Selain berasal dari pendapatannya sendiri, pemenuhan kebutuhan sehari-hari lansia dapat berasal dari pensiun, tabungan, bantuan keluarga, atau sumber lainnya. Dirinci menurut sumber pembiayaan terbesar dalam rumah tangga, sebanyak 79,44 rumah tangga lansia memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja (Gambar 7.2). Sebanyak 14,48 persen rumah tangga lansia dengan sumber pembiayaan dari kiriman pihak lain dan hanya 5,48 persen yang berasal dari jaminan pensiun. Menurut tipe daerah, persentase rumah tangga lansia dengan sumber pembiayaan terbesar dari anggota rumah tangga yang bekerja lebih tinggi di perdesaan dibandingkan rumah tangga lansia di perkotaan (83,47 persen berbanding 75,98 persen). Sebaliknya, persentase rumah tangga lansia dengan sumber pembiayaan terbesar dari pensiunan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan (8,43 persen berbanding 2,04 persen).

https://www.bps.go.id

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Pembiayaan Terbesar, 2021

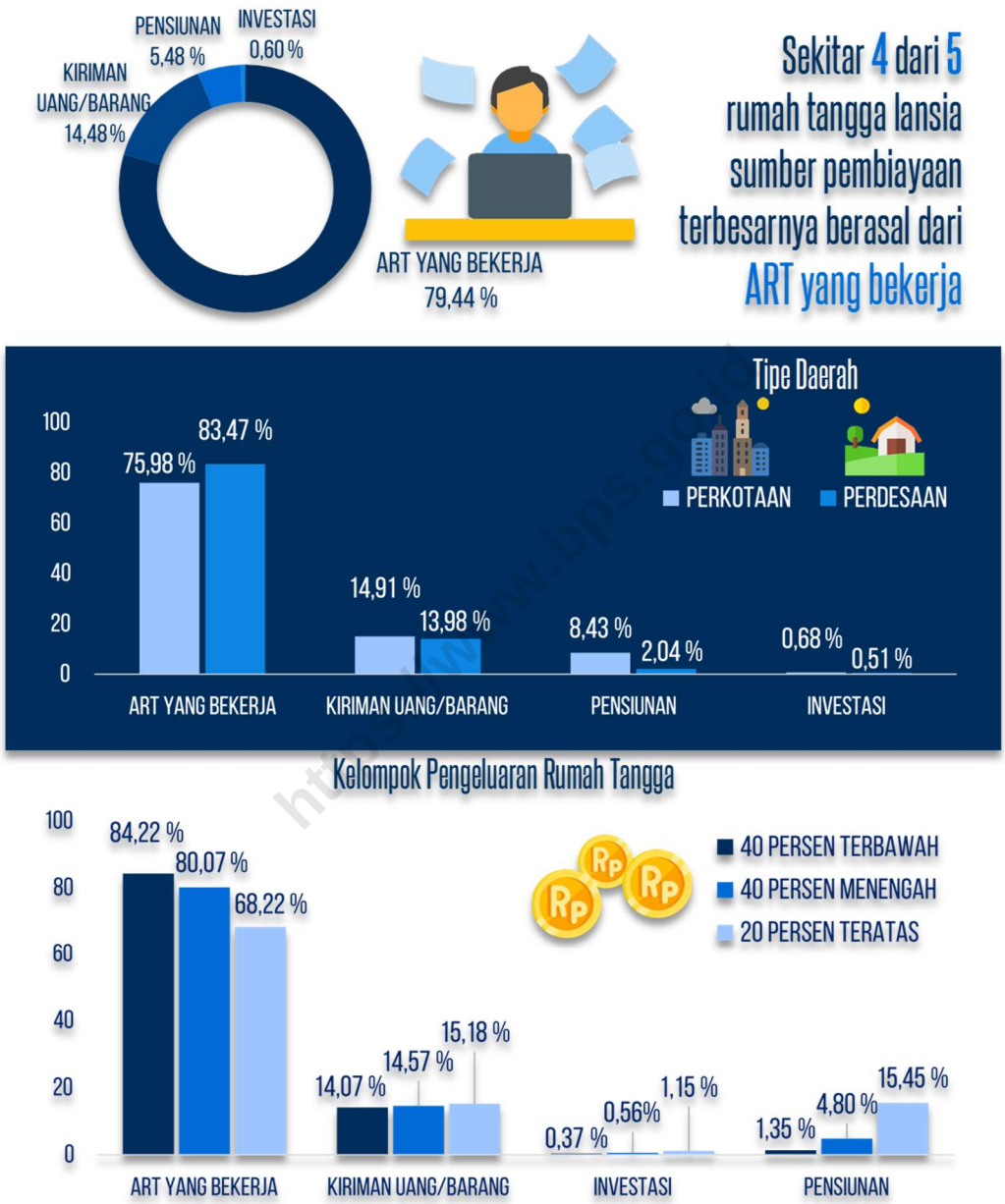

Keterangan: ART adalah anggota rumah tangga

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

7.2. Rumah Layak bagi Lansia

Kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan lansia dapat digambarkan melalui status kepemilikan rumah tempat tinggalnya. Bagi lansia, aspek perumahan menjadi hal yang penting dikarenakan lansia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Oleh karena itu, lansia memerlukan rumah yang nyaman, aman, dan sehat untuk ditinggali. Lansia yang tinggal di rumah sendiri dapat menjadi penyangga terhadap dampak dari kesepian emosional yang dialami serta menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik (Szabo et al, 2017).

Gambar 7.3 Persentase Lansia menurut Status Kepemilikan Rumah, 2021

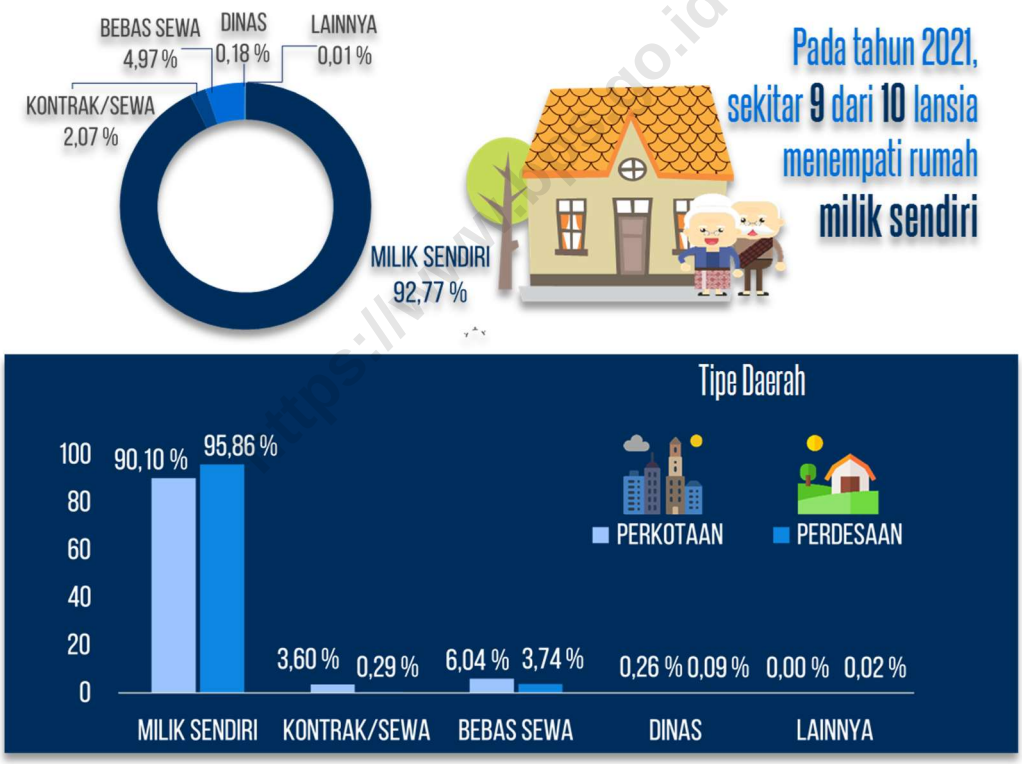

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, seperti yang terlihat pada Gambar 7.3 di atas, persentase lansia yang menempati rumah milik sendiri sebesar 92,77 persen. Perbedaan daerah tempat tinggal membuat adanya perbedaan status kepemilikan bangunan tempat tinggal lansia. Persentase lansia di perkotaan yang tinggal di rumah milik sendiri sedikit lebih rendah dibanding lansia perdesaan

(90,10 persen berbanding 95,86 persen). Sementara itu, lansia di perkotaan yang tinggal di rumah dengan status kontrak/sewa dan bebas sewa/dinas/lainnya persentasenya lebih besar dibanding perdesaan.

Gambar 7.4 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni, 2021

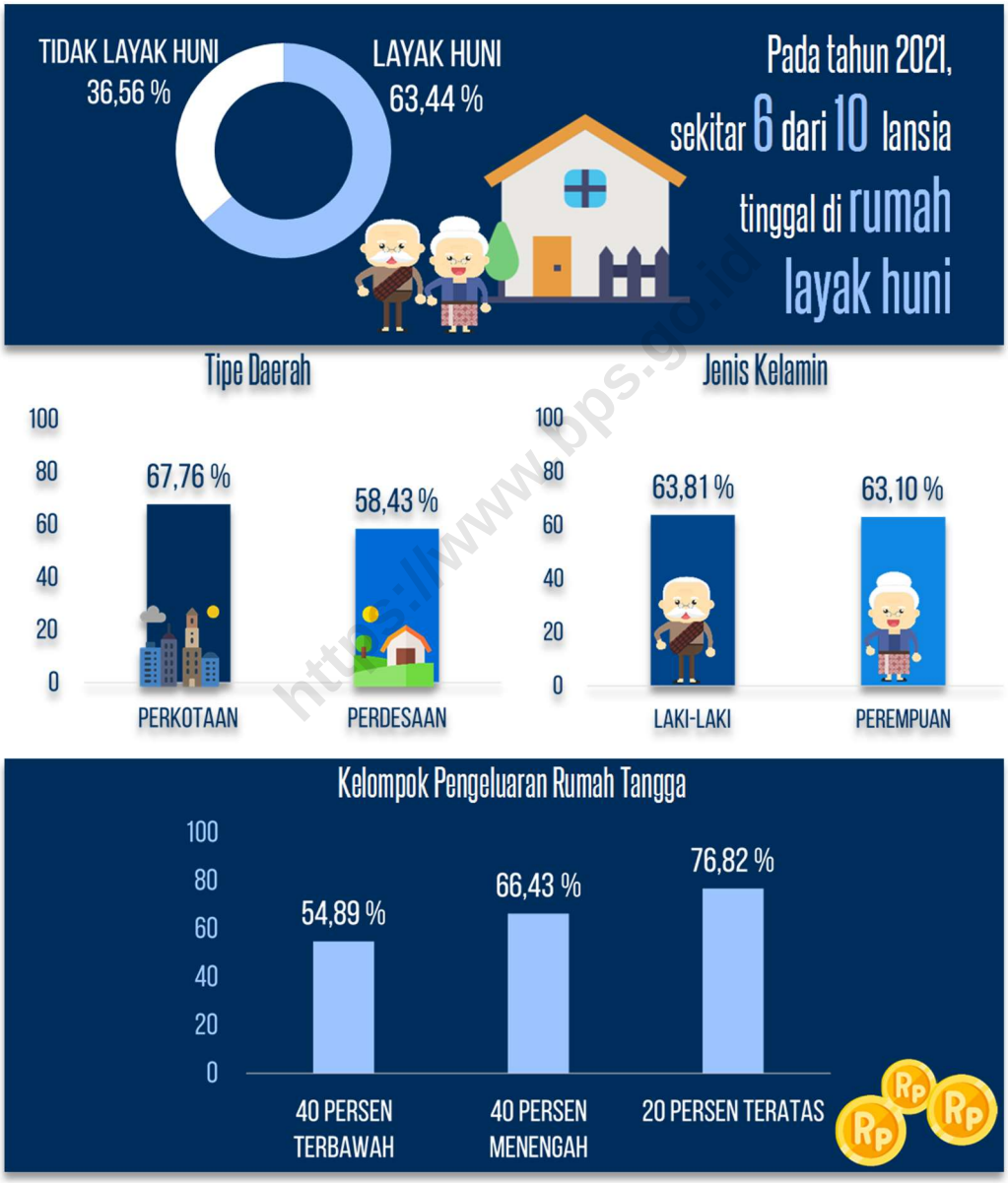

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Selain kepemilikan rumah, aspek lain yang perlu diperhatikan bagi lansia adalah kelayakan tempat tinggal. Perumahan yang layak merupakan salah satu aspek yang memengaruhi kemandirian dan kualitas hidup lansia (WHO, 2007). Bahkan, beberapa studi mendapati bahwa ada keterkaitan erat antara kondisi bangunan dan lingkungan dengan peluang kesakitan. Keterkaitan tersebut lebih terlihat pada lansia dikarenakan lansia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah (Blackman et al., 1989).

Rumah layak huni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, indikator persentase rumah layak huni yang dihitung BPS menggunakan pendekatan fasilitas dan bangunan tempat tinggal dengan kriteria kecukupan luas lantai minimal 7,2 meter persegi per kapita; memiliki akses air minum layak; memiliki sanitasi layak; dan memenuhi kriteria ketahanan bangunan (jenis atap, dinding, dan lantai). Apabila salah satu dari keempat kriteria di atas tidak dapat terpenuhi maka rumah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni.

Gambar 7.4 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 63,44 persen lansia tinggal di rumah layak huni dan 36,56 persen lansia tinggal di rumah tidak layak huni. Menurut tipe daerah, persentase lansia perkotaan yang tinggal di rumah layak huni (67,76 persen) lebih besar dibandingkan lansia di perdesaan (58,43 persen). Berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga lansia, terlihat bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kelayakan rumah tempat tinggal lansia. Semakin tinggi kelompok pengeluaran rumah tangga lansia, semakin besar persentase lansia yang tinggal di rumah layak huni. Sekitar tiga dari empat lansia pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas tinggal di rumah layak huni. Angka tersebut lebih besar dibandingkan kelompok pengeluaran 40 persen menengah (66,43 persen) dan 40 persen terbawah (54,89 persen).

7.3. Kehidupan Sosial

Masa lansia rentan dengan kehidupan monoton yang berpotensi mengganggu psikisnya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kemampuan fisik

https://www.bps.go.id

akibat penuaan, minimnya pilihan aktivitas ekonomi akibat pensiun, atau menurunnya intensitas sosial. Masa tua menyebabkan lansia memiliki banyak waktu luang dan seringkali tanpa kegiatan, sehingga menimbulkan kepenatan. Bagi lansia, hal ini akan berdampak terhadap penurunan kualitas hidup. Lansia perlu melakukan aktivitas yang membuat mereka berinteraksi dengan orang lain atau melihat dunia luar, salah satunya dengan berwisata. Bepergian atau berwisata dapat salah satu menjadi solusi untuk menghilangkan kejenuhan karena memberikan efek relaksasi yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas hidup lansia (Utami, 2018).

Susenas mencatat aktivitas bepergian yang dilakukan penduduk sebagai pergi atau keluar dari tempat tinggalnya selama kurang dari enam bulan, dalam wilayah geografis Indonesia, serta bukan bertujuan untuk sekolah atau bekerja secara rutin. Termasuk bepergian apabila pergi ke objek wisata komersial, menginap di akomodasi komersial, atau menempuh jarak perjalanan pulang pergi minimal 100 km.

Pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 8,00 persen lansia yang bepergian pada periode Januari-Desember 2020 (Gambar 7.5). Menurut tipe daerah, persentase lansia di perkotaan yang bepergian lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu sebesar 9,14 persen berbanding 6,68 persen. Dibandingkan kondisi pada tahun 2020, persentase lansia yang bepergian turun menjadi lebih dari separuhnya. Pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 dan kebijakan pembatasan sosial dari pemerintah, memaksa setiap individu untuk tetap di rumah saja guna menekan penyebaran COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial ini menyebabkan lansia tidak dapat bepergian, selain untuk melindunginya sebagai kelompok yang lebih rentan terpapar COVID-19.

Gambar 7.5 di bawah juga menunjukkan bahwa semakin bertambahnya umur lansia, semakin sedikit lansia yang bepergian. Persentase lansia muda yang bepergian (9,60 persen) tiga kali lipat lebih besar dibanding lansia tua (3,32 persen). Selain itu, kondisi finansial juga memberikan andil terhadap lansia yang bepergian (Isnutomo, 2012). Persentase lansia yang bepergian semakin meningkat seiring peningkatan status ekonomi lansia. Persentase lansia pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang bepergian mencapai empat kali lebih besar dari lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (16,66 persen berbanding 3,79 persen).

https://www.bps.go.id

Gambar 7.5 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bepergian*, 2021

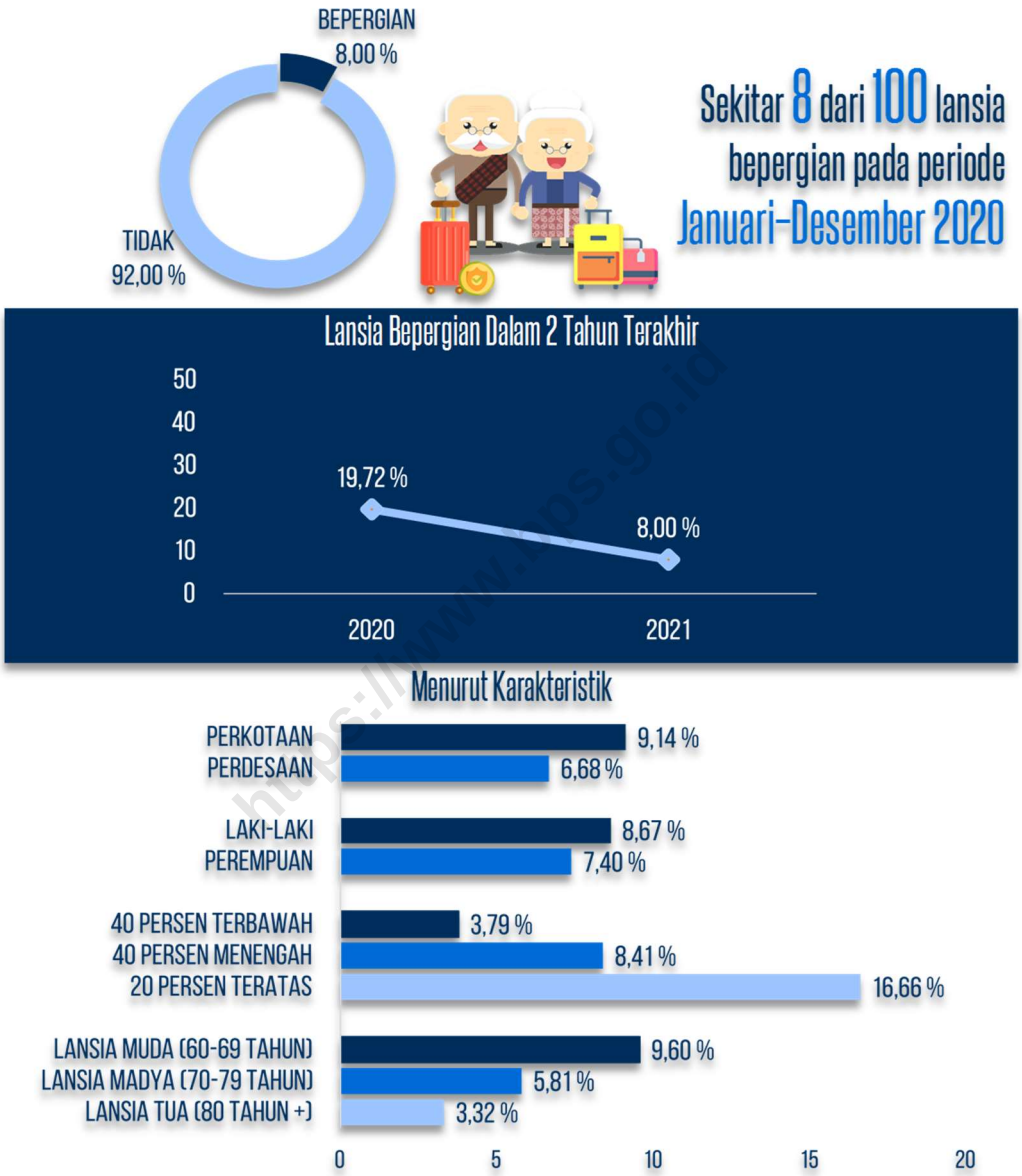

Keterangan: *) Bepergian yang dilakukan selama periode Januari s.d Desember 2020

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Selain aktivitas bepergian, masalah sosial yang dihadapi lansia dan tercatat pada Susenas adalah kejadian kriminalitas atau pengalaman sebagai korban

kejahatan. Lansia yang lemah sangat rentan terhadap tindakan kekerasan dan kejahatan. Faktor usia dan kondisi fisik lansia dianggap sebagai peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, karena para pelaku kejahatan berpikir para lansia tersebut tidak bisa berbuat apa-apa jika menjadi korban kejahatan (Pahlevi, 2008).

Gambar 7.6 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2021

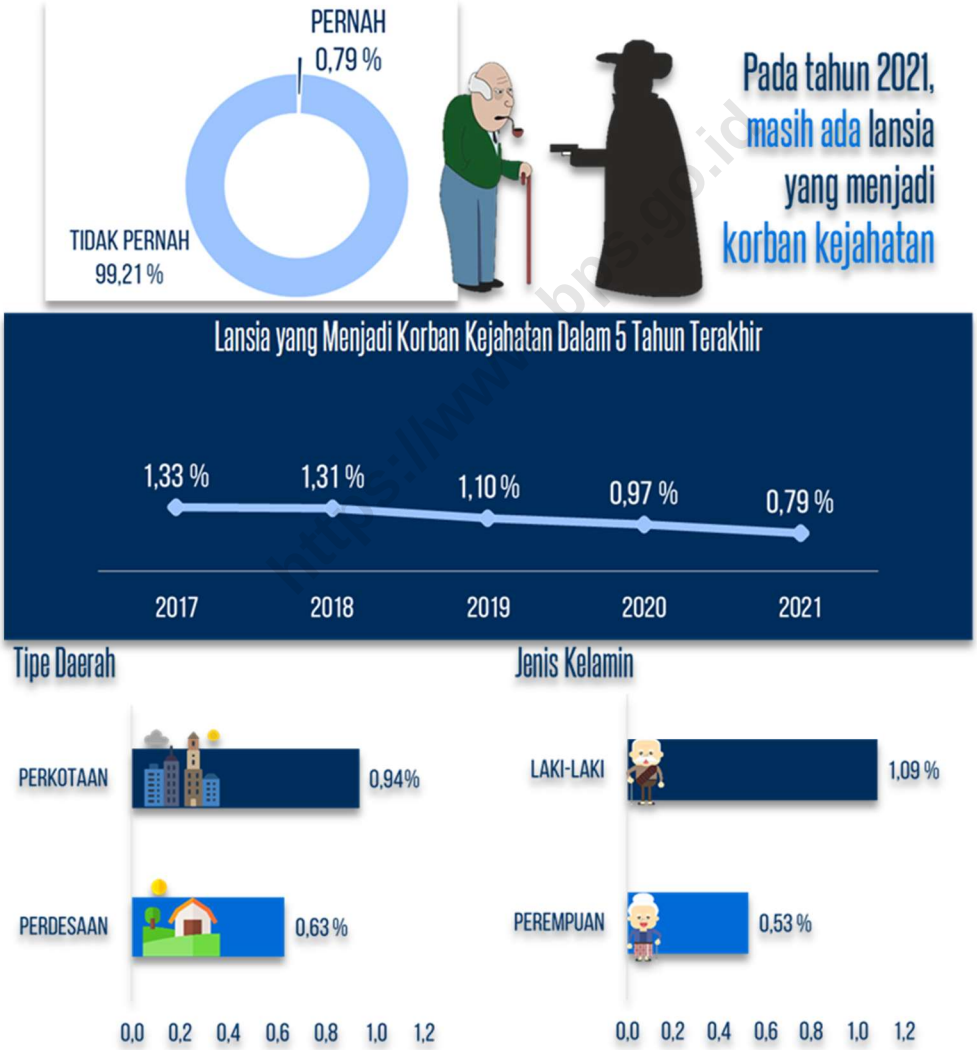

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 7.6 di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 0,79 persen lansia pernah menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir. Meskipun angka tersebut terbilang sangat kecil, akan tetapi, setiap tindak kejahatan tetap perlu mendapat perhatian. Hal ini karena kondisi yang paling ideal adalah tidak ada tindak kejahatan, terlebih kejahatan terhadap lansia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase lansia yang menjadi korban kejahatan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan semakin membaik bagi lansia.

https://www.bps.go.id

Tabel 7.1 Persentase Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga, 2021

Karakteristik	Kelompok Pengeluaran			Jumlah
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tipe Daerah				
Perkotaan	42,53	36,61	20,87	100,00
Perdesaan	42,98	37,72	19,29	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	42,15	38,03	19,82	100,00
Perempuan	44,33	36,82	18,85	100,00
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60-69 Tahun)	39,96	39,01	21,03	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	47,43	35,35	17,21	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	54,50	32,12	13,37	100,00
Status Disabilitas				
Penyandang Disabilitas	49,62	35,37	15,01	100,00
Non Disabilitas	42,39	37,69	19,92	100,00
Indonesia	**43,29**	**37,40**	**19,31**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Pembiayaan Terbesar, 2021

Karakteristik	Sumber Pembiayaan Terbesar Rumah Tangga				Jumlah
	Anggota Rumah Tangga Bekerja	Kiriman Uang/ Barang	Investasi	Pensiunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	75,98	14,91	0,68	8,43	100,00
Perdesaan	83,47	13,98	0,51	2,04	100,00
Kelompok Pengeluaran					
20 Persen Teratas	68,22	15,18	1,15	15,45	100,00
40 Persen Menengah	80,07	14,57	0,56	4,80	100,00
40 Persen Terbawah	84,22	14,07	0,37	1,35	100,00
Indonesia	**79,44**	**14,48**	**0,60**	**5,48**	**100,00**

Keterangan: investasi termasuk deposito, royalti, saham, bunga bank, dan lain-lain

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.3 Persentase Lansia Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2021

Karakteristik	Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	90,10	3,60	6,04	0,26	0,00	100,00
Perdesaan	95,86	0,29	3,74	0,09	0,02	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	93,42	2,15	4,23	0,20	0,01	100,00
Perempuan	92,17	1,99	5,65	0,17	0,01	100,00
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60-69 Tahun)	92,73	2,43	4,64	0,18	0,01	100,00
Lansia Madya (70-79 Tahun)	92,96	1,51	5,31	0,21	0,01	100,00
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	92,44	1,14	6,32	0,08	0,03	100,00
Kelompok Pengeluaran						
20 Persen Teratas	91,83	3,10	4,59	0,47	0,00	100,00
40 Persen Menengah	92,20	2,54	5,07	0,18	0,01	100,00
40 Persen Terbawah	93,68	1,20	5,06	0,05	0,01	100,00
Status Disabilitas						
Penyandang Disabilitas	91,62	1,63	6,57	0,17	0,01	100,00
Non Disabilitas	92,93	2,13	4,75	0,18	0,01	100,00
Indonesia	**92,77**	**2,07**	**4,97**	**0,18**	**0,01**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.4 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Tipe Daerah, 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	67,84	58,98	63,81
Perempuan	67,68	57,94	63,10
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	67,79	59,01	63,78
Lansia Madya (70-79 Tahun)	68,02	57,66	63,19
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	66,64	56,78	61,73
Kelompok Pengeluaran			
20 Persen Teratas	78,32	71,76	76,82
40 Persen Menengah	68,81	63,84	66,43
40 Persen Terbawah	58,57	51,91	54,89
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	63,32	54,83	59,12
Non Disabilitas	68,34	58,97	64,05
Indonesia	**67,76**	**58,43**	**63,44**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.5 Persentase Lansia yang Bepergian* Menurut Tipe Daerah, 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	9,71	7,42	8,67
Perempuan	8,61	6,03	7,40
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	10,98	7,95	9,60
Lansia Madya (70-79 Tahun)	6,47	5,05	5,81
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	3,59	3,05	3,32
Kelompok Pengeluaran			
20 Persen Teratas	16,81	16,14	16,66
40 Persen Menengah	8,58	8,22	8,41
40 Persen Terbawah	3,80	3,78	3,79
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	4,12	4,41	4,26
Non Disabilitas	9,80	7,03	8,53
Indonesia	**9,14**	**6,68**	**8,00**

Keterangan: *) Bepergian yang dilakukan selama periode Januari s.d Desember 2020

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.6 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah, 2021

Karakteristik	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	1,21	0,94	1,09
Perempuan	0,68	0,35	0,53
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69 Tahun)	1,04	0,71	0,89
Lansia Madya (70-79 Tahun)	0,84	0,48	0,67
Lansia Tua (80 Tahun ke Atas)	0,44	0,53	0,49
Kelompok Pengeluaran			
20 Persen Teratas	1,24	1,38	1,27
40 Persen Menengah	1,08	0,71	0,91
40 Persen Terbawah	0,55	0,42	0,48
Status Disabilitas			
Penyandang Disabilitas	0,62	0,64	0,63
Non Disabilitas	0,98	0,63	0,82
Indonesia	**0,94**	**0,63**	**0,79**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.7.1 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga, 2021

Perkotaan

Provinsi	Kelompok Pengeluaran			Jumlah
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	36,84	42,89	20,27	100,00
12 Sumatera Utara	32,36	40,45	27,19	100,00
13 Sumatera Barat	35,07	42,82	22,11	100,00
14 Riau	31,03	44,80	24,18	100,00
15 Jambi	34,17	37,74	28,09	100,00
16 Sumatera Selatan	33,18	39,66	27,16	100,00
17 Bengkulu	40,92	42,96	16,12	100,00
18 Lampung	42,97	38,70	18,33	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	37,05	38,92	24,04	100,00
21 Kepulauan Riau	36,61	44,03	19,36	100,00
31 DKI Jakarta	23,47	41,67	34,86	100,00
32 Jawa Barat	41,41	38,16	20,44	100,00
33 Jawa Tengah	44,89	36,12	18,99	100,00
34 DI Yogyakarta	46,92	38,34	14,74	100,00
35 Jawa Timur	46,18	36,06	17,76	100,00
36 Banten	38,78	38,26	22,96	100,00
51 Bali	46,27	36,00	17,73	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	39,05	40,42	20,54	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	36,47	44,05	19,47	100,00
61 Kalimantan Barat	39,52	39,71	20,77	100,00
62 Kalimantan Tengah	37,22	38,66	24,12	100,00
63 Kalimantan Selatan	33,89	43,50	22,61	100,00
64 Kalimantan Timur	38,60	41,01	20,38	100,00
65 Kalimantan Utara	39,68	38,68	21,64	100,00
71 Sulawesi Utara	36,11	40,26	23,63	100,00
72 Sulawesi Tengah	35,61	46,26	18,13	100,00
73 Sulawesi Selatan	37,37	39,92	22,71	100,00
74 Sulawesi Tenggara	41,94	37,68	20,38	100,00
75 Gorontalo	37,17	41,12	21,71	100,00
76 Sulawesi Barat	32,35	49,48	18,17	100,00
81 Maluku	39,18	38,36	22,46	100,00
82 Maluku Utara	40,13	40,43	19,43	100,00
91 Papua Barat	37,83	36,76	25,41	100,00
94 Papua	33,86	42,53	23,62	100,00
Indonesia	**42,53**	**36,61**	**20,87**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.7.2 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga, 2021

Perdesaan

Provinsi	Kelompok Pengeluaran			Jumlah
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	35,27	39,71	25,03	100,00
12 Sumatera Utara	30,38	39,01	30,60	100,00
13 Sumatera Barat	33,86	41,89	24,25	100,00
14 Riau	34,82	40,35	24,83	100,00
15 Jambi	36,39	40,14	23,47	100,00
16 Sumatera Selatan	35,52	42,00	22,48	100,00
17 Bengkulu	33,12	45,83	21,05	100,00
18 Lampung	40,80	38,46	20,74	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	39,83	35,01	25,16	100,00
21 Kepulauan Riau	38,53	43,36	18,11	100,00
31 DKI Jakarta	-	-	-	-
32 Jawa Barat	41,93	40,01	18,07	100,00
33 Jawa Tengah	46,24	37,33	16,43	100,00
34 DI Yogyakarta	43,89	38,20	17,91	100,00
35 Jawa Timur	46,17	37,58	16,24	100,00
36 Banten	40,76	36,45	22,79	100,00
51 Bali	42,03	36,75	21,22	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	44,54	38,85	16,61	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	36,74	40,47	22,79	100,00
61 Kalimantan Barat	41,25	39,41	19,34	100,00
62 Kalimantan Tengah	38,69	41,80	19,51	100,00
63 Kalimantan Selatan	42,44	38,70	18,86	100,00
64 Kalimantan Timur	35,38	42,19	22,43	100,00
65 Kalimantan Utara	30,08	45,37	24,56	100,00
71 Sulawesi Utara	34,94	40,08	24,98	100,00
72 Sulawesi Tengah	35,38	41,24	23,38	100,00
73 Sulawesi Selatan	41,57	38,84	19,59	100,00
74 Sulawesi Tenggara	39,10	39,58	21,32	100,00
75 Gorontalo	37,45	39,10	23,46	100,00
76 Sulawesi Barat	37,26	44,60	18,14	100,00
81 Maluku	32,20	40,78	27,02	100,00
82 Maluku Utara	34,96	39,33	25,71	100,00
91 Papua Barat	33,17	43,69	23,14	100,00
94 Papua	32,85	43,65	23,50	100,00
Indonesia	**42,98**	**37,72**	**19,29**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.7.3 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga, 2021

Laki-laki

Provinsi	Kelompok Pengeluaran			Jumlah
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	36,59	39,36	24,04	100,00
12 Sumatera Utara	29,73	41,13	29,14	100,00
13 Sumatera Barat	33,19	44,30	22,52	100,00
14 Riau	29,94	44,43	25,63	100,00
15 Jambi	33,14	40,88	25,98	100,00
16 Sumatera Selatan	32,87	41,32	25,81	100,00
17 Bengkulu	34,13	44,84	21,02	100,00
18 Lampung	40,23	40,54	19,23	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	36,85	39,03	24,12	100,00
21 Kepulauan Riau	39,38	43,09	17,53	100,00
31 DKI Jakarta	25,12	43,32	31,57	100,00
32 Jawa Barat	40,78	39,71	19,51	100,00
33 Jawa Tengah	45,26	36,74	18,00	100,00
34 DI Yogyakarta	47,06	38,56	14,37	100,00
35 Jawa Timur	46,34	36,49	17,17	100,00
36 Banten	39,24	37,97	22,79	100,00
51 Bali	43,97	39,10	16,93	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	41,66	38,70	19,64	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	39,19	41,34	19,47	100,00
61 Kalimantan Barat	38,97	40,00	21,03	100,00
62 Kalimantan Tengah	38,69	40,39	20,91	100,00
63 Kalimantan Selatan	37,82	40,53	21,65	100,00
64 Kalimantan Timur	38,01	41,50	20,50	100,00
65 Kalimantan Utara	34,04	43,74	22,22	100,00
71 Sulawesi Utara	36,38	40,07	23,56	100,00
72 Sulawesi Tengah	33,60	42,89	23,51	100,00
73 Sulawesi Selatan	39,49	40,33	20,17	100,00
74 Sulawesi Tenggara	37,49	42,24	20,27	100,00
75 Gorontalo	37,07	42,42	20,51	100,00
76 Sulawesi Barat	32,12	42,64	25,24	100,00
81 Maluku	34,30	44,69	21,01	100,00
82 Maluku Utara	37,75	38,54	23,71	100,00
91 Papua Barat	36,40	39,56	24,03	100,00
94 Papua	28,84	43,99	27,16	100,00
Indonesia	**42,15**	**38,03**	**19,82**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.7.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga, 2021

Perempuan

Provinsi	Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	36,08	41,12	22,80	100,00
12 Sumatera Utara	32,56	40,50	26,94	100,00
13 Sumatera Barat	36,10	42,89	21,00	100,00
14 Riau	35,37	42,64	21,99	100,00
15 Jambi	38,23	40,41	21,36	100,00
16 Sumatera Selatan	36,60	40,33	23,07	100,00
17 Bengkulu	40,13	40,28	19,59	100,00
18 Lampung	42,21	37,47	20,32	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	37,89	39,75	22,36	100,00
21 Kepulauan Riau	38,39	43,49	18,12	100,00
31 DKI Jakarta	21,96	40,15	37,89	100,00
32 Jawa Barat	43,29	38,02	18,68	100,00
33 Jawa Tengah	46,26	36,24	17,51	100,00
34 DI Yogyakarta	48,24	36,60	15,17	100,00
35 Jawa Timur	46,94	36,60	16,46	100,00
36 Banten	42,03	36,56	21,41	100,00
51 Bali	45,41	37,31	17,28	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	42,14	40,36	17,50	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	38,26	41,31	20,43	100,00
61 Kalimantan Barat	41,29	38,77	19,93	100,00
62 Kalimantan Tengah	40,18	39,03	20,79	100,00
63 Kalimantan Selatan	40,58	39,69	19,73	100,00
64 Kalimantan Timur	39,20	41,64	19,16	100,00
65 Kalimantan Utara	37,00	41,70	21,29	100,00
71 Sulawesi Utara	35,30	40,66	24,04	100,00
72 Sulawesi Tengah	37,12	42,19	20,68	100,00
73 Sulawesi Selatan	40,69	40,27	19,04	100,00
74 Sulawesi Tenggara	41,40	40,35	18,26	100,00
75 Gorontalo	38,26	38,05	23,69	100,00
76 Sulawesi Barat	40,07	44,78	15,14	100,00
81 Maluku	33,58	43,59	22,83	100,00
82 Maluku Utara	36,09	39,66	24,25	100,00
91 Papua Barat	36,73	41,45	21,82	100,00
94 Papua	29,85	44,73	25,42	100,00
Indonesia	**44,33**	**36,82**	**18,85**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.7.5 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga, 2021

Total

Provinsi	Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	36,32	40,30	23,38	100,00
12 Sumatera Utara	31,25	40,79	27,95	100,00
13 Sumatera Barat	34,75	43,54	21,70	100,00
14 Riau	32,59	43,56	23,85	100,00
15 Jambi	35,68	40,64	23,68	100,00
16 Sumatera Selatan	34,79	40,81	24,39	100,00
17 Bengkulu	37,07	42,61	20,32	100,00
18 Lampung	41,20	39,04	19,76	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	37,36	39,38	23,27	100,00
21 Kepulauan Riau	38,89	43,28	17,82	100,00
31 DKI Jakarta	23,47	41,67	34,86	100,00
32 Jawa Barat	42,07	38,84	19,09	100,00
33 Jawa Tengah	45,79	36,47	17,74	100,00
34 DI Yogyakarta	47,70	37,49	14,80	100,00
35 Jawa Timur	46,66	36,55	16,79	100,00
36 Banten	40,63	37,27	22,10	100,00
51 Bali	44,73	38,16	17,11	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	41,92	39,61	18,47	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	38,69	41,33	19,98	100,00
61 Kalimantan Barat	40,14	39,38	20,48	100,00
62 Kalimantan Tengah	39,38	39,76	20,86	100,00
63 Kalimantan Selatan	39,26	40,10	20,65	100,00
64 Kalimantan Timur	38,57	41,56	19,86	100,00
65 Kalimantan Utara	35,39	42,81	21,80	100,00
71 Sulawesi Utara	35,82	40,38	23,80	100,00
72 Sulawesi Tengah	35,38	42,54	22,08	100,00
73 Sulawesi Selatan	40,16	40,30	19,54	100,00
74 Sulawesi Tenggara	39,53	41,25	19,22	100,00
75 Gorontalo	37,71	40,08	22,21	100,00
76 Sulawesi Barat	36,37	43,79	19,84	100,00
81 Maluku	33,93	44,12	21,95	100,00
82 Maluku Utara	36,92	39,10	23,98	100,00
91 Papua Barat	36,56	40,44	23,00	100,00
94 Papua	29,28	44,32	26,40	100,00
Indonesia	**43,29**	**37,40**	**19,31**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.8.1 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2021

Perkotaan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	92,50	1,72	5,38	0,39	0,00	100,00
12 Sumatera Utara	80,77	7,42	10,69	1,09	0,03	100,00
13 Sumatera Barat	86,59	3,86	9,32	0,23	0,00	100,00
14 Riau	85,28	8,04	6,67	0,00	0,00	100,00
15 Jambi	90,20	4,84	4,61	0,34	0,00	100,00
16 Sumatera Selatan	86,95	5,66	7,25	0,13	0,00	100,00
17 Bengkulu	90,86	6,19	2,95	0,00	0,00	100,00
18 Lampung	93,00	2,06	4,94	0,00	0,00	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	91,37	3,91	4,71	0,00	0,00	100,00
21 Kepulauan Riau	86,81	7,31	5,68	0,21	0,00	100,00
31 DKI Jakarta	78,72	11,36	9,13	0,79	0,00	100,00
32 Jawa Barat	90,42	3,26	6,24	0,09	0,00	100,00
33 Jawa Tengah	93,35	1,20	5,43	0,03	0,00	100,00
34 DI Yogyakarta	93,99	1,66	4,34	0,01	0,00	100,00
35 Jawa Timur	92,99	2,21	4,57	0,23	0,00	100,00
36 Banten	93,22	3,56	3,13	0,10	0,00	100,00
51 Bali	92,43	4,07	3,50	0,00	0,00	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	91,95	0,90	7,02	0,12	0,00	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	90,09	3,05	6,86	0,00	0,00	100,00
61 Kalimantan Barat	89,88	4,00	6,12	0,00	0,00	100,00
62 Kalimantan Tengah	89,71	3,71	5,72	0,86	0,00	100,00
63 Kalimantan Selatan	87,29	5,98	6,70	0,03	0,00	100,00
64 Kalimantan Timur	87,15	8,18	4,05	0,62	0,00	100,00
65 Kalimantan Utara	90,25	2,94	6,10	0,72	0,00	100,00
71 Sulawesi Utara	84,11	1,83	13,34	0,71	0,00	100,00
72 Sulawesi Tengah	93,10	1,74	4,16	1,00	0,00	100,00
73 Sulawesi Selatan	89,32	3,57	6,28	0,83	0,00	100,00
74 Sulawesi Tenggara	92,16	0,90	6,94	0,00	0,00	100,00
75 Gorontalo	89,78	0,00	10,22	0,00	0,00	100,00
76 Sulawesi Barat	93,41	0,86	5,74	0,00	0,00	100,00
81 Maluku	87,92	2,48	8,83	0,77	0,00	100,00
82 Maluku Utara	91,65	2,16	6,19	0,00	0,00	100,00
91 Papua Barat	87,61	4,28	7,04	1,08	0,00	100,00
94 Papua	80,54	6,29	9,33	3,84	0,00	100,00
Indonesia	**90,10**	**3,60**	**6,04**	**0,26**	**0,00**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.8.2 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2021

Perdesaan

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	95,21	0,53	4,13	0,13	0,00	100,00
12 Sumatera Utara	90,87	1,29	7,55	0,29	0,00	100,00
13 Sumatera Barat	88,14	1,18	10,35	0,33	0,00	100,00
14 Riau	93,80	0,58	4,75	0,87	0,00	100,00
15 Jambi	95,51	0,67	3,72	0,10	0,00	100,00
16 Sumatera Selatan	94,03	0,30	5,43	0,25	0,00	100,00
17 Bengkulu	96,87	0,12	3,01	0,00	0,00	100,00
18 Lampung	96,23	0,48	3,30	0,00	0,00	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	97,96	0,45	1,42	0,16	0,00	100,00
21 Kepulauan Riau	98,54	0,00	1,46	0,00	0,00	100,00
31 DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
32 Jawa Barat	96,65	0,25	3,10	0,00	0,00	100,00
33 Jawa Tengah	96,61	0,08	3,25	0,06	0,00	100,00
34 DI Yogyakarta	98,38	0,10	1,52	0,00	0,00	100,00
35 Jawa Timur	97,14	0,13	2,73	0,00	0,00	100,00
36 Banten	99,06	0,29	0,65	0,00	0,00	100,00
51 Bali	97,63	0,03	2,34	0,00	0,00	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	94,34	0,17	5,50	0,00	0,00	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	96,52	0,10	2,96	0,08	0,35	100,00
61 Kalimantan Barat	96,68	0,10	2,96	0,25	0,00	100,00
62 Kalimantan Tengah	95,40	0,38	3,76	0,47	0,00	100,00
63 Kalimantan Selatan	95,12	0,36	4,32	0,20	0,00	100,00
64 Kalimantan Timur	94,45	1,14	3,93	0,46	0,02	100,00
65 Kalimantan Utara	90,83	0,65	8,52	0,00	0,00	100,00
71 Sulawesi Utara	93,41	0,42	6,14	0,03	0,00	100,00
72 Sulawesi Tengah	95,93	0,00	4,07	0,00	0,00	100,00
73 Sulawesi Selatan	94,20	0,22	5,29	0,03	0,25	100,00
74 Sulawesi Tenggara	96,03	0,06	3,91	0,00	0,00	100,00
75 Gorontalo	92,15	0,51	7,34	0,00	0,00	100,00
76 Sulawesi Barat	96,81	0,00	3,07	0,12	0,00	100,00
81 Maluku	93,81	0,42	5,06	0,67	0,04	100,00
82 Maluku Utara	95,59	0,74	3,24	0,43	0,00	100,00
91 Papua Barat	93,88	0,23	5,65	0,25	0,00	100,00
94 Papua	96,15	0,32	3,42	0,11	0,00	100,00
Indonesia	**95,86**	**0,29**	**3,74**	**0,09**	**0,02**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.8.3 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2021

Laki-laki

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	95,73	1,06	3,00	0,21	0,00	100,00
12 Sumatera Utara	86,51	4,75	8,09	0,66	0,00	100,00
13 Sumatera Barat	88,20	2,69	8,68	0,42	0,00	100,00
14 Riau	90,87	3,42	5,04	0,67	0,00	100,00
15 Jambi	94,88	1,65	3,29	0,18	0,00	100,00
16 Sumatera Selatan	93,32	1,91	4,56	0,21	0,00	100,00
17 Bengkulu	94,95	2,20	2,85	0,00	0,00	100,00
18 Lampung	96,19	0,91	2,91	0,00	0,00	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	93,61	2,82	3,48	0,08	0,00	100,00
21 Kepulauan Riau	89,82	7,42	2,76	0,00	0,00	100,00
31 DKI Jakarta	77,08	12,93	9,07	0,92	0,00	100,00
32 Jawa Barat	92,84	2,47	4,60	0,09	0,00	100,00
33 Jawa Tengah	96,00	0,65	3,29	0,07	0,00	100,00
34 DI Yogyakarta	97,20	0,73	2,07	0,01	0,00	100,00
35 Jawa Timur	95,19	1,23	3,41	0,16	0,00	100,00
36 Banten	96,46	1,66	1,87	0,00	0,00	100,00
51 Bali	93,95	3,39	2,66	0,00	0,00	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	95,09	0,30	4,61	0,00	0,00	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	96,26	0,57	2,90	0,08	0,19	100,00
61 Kalimantan Barat	94,98	1,57	3,38	0,08	0,00	100,00
62 Kalimantan Tengah	93,60	1,83	4,09	0,48	0,00	100,00
63 Kalimantan Selatan	91,30	3,77	4,83	0,09	0,00	100,00
64 Kalimantan Timur	89,65	6,36	3,43	0,56	0,00	100,00
65 Kalimantan Utara	92,35	1,27	6,37	0,00	0,00	100,00
71 Sulawesi Utara	89,81	1,03	8,76	0,40	0,00	100,00
72 Sulawesi Tengah	95,80	0,37	3,56	0,26	0,00	100,00
73 Sulawesi Selatan	92,88	1,46	5,20	0,30	0,17	100,00
74 Sulawesi Tenggara	95,70	0,47	3,83	0,00	0,00	100,00
75 Gorontalo	93,46	0,24	6,31	0,00	0,00	100,00
76 Sulawesi Barat	96,72	0,00	3,28	0,00	0,00	100,00
81 Maluku	91,72	1,56	6,24	0,49	0,00	100,00
82 Maluku Utara	95,21	1,28	3,20	0,31	0,00	100,00
91 Papua Barat	91,20	2,00	6,20	0,59	0,00	100,00
94 Papua	90,16	2,86	5,19	1,79	0,00	100,00
Indonesia	**93,42**	**2,15**	**4,23**	**0,20**	**0,01**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.8.4 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2021

Perempuan

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	93,20	0,75	5,84	0,21	0,00	100,00
12 Sumatera Utara	84,44	4,50	10,25	0,78	0,03	100,00
13 Sumatera Barat	86,74	2,21	10,89	0,16	0,00	100,00
14 Riau	90,16	3,48	5,96	0,39	0,00	100,00
15 Jambi	92,73	2,37	4,72	0,18	0,00	100,00
16 Sumatera Selatan	89,78	2,51	7,51	0,20	0,00	100,00
17 Bengkulu	95,35	1,51	3,14	0,00	0,00	100,00
18 Lampung	94,35	0,97	4,68	0,00	0,00	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	94,52	2,17	3,26	0,04	0,00	100,00
21 Kepulauan Riau	87,06	5,09	7,49	0,36	0,00	100,00
31 DKI Jakarta	80,24	9,90	9,19	0,67	0,00	100,00
32 Jawa Barat	91,47	2,39	6,10	0,04	0,00	100,00
33 Jawa Tengah	94,13	0,62	5,23	0,02	0,00	100,00
34 DI Yogyakarta	94,06	1,47	4,47	0,00	0,00	100,00
35 Jawa Timur	94,86	1,16	3,90	0,08	0,00	100,00
36 Banten	93,99	3,20	2,69	0,13	0,00	100,00
51 Bali	94,55	1,98	3,47	0,00	0,00	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	91,57	0,72	7,60	0,11	0,00	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	94,10	0,89	4,62	0,04	0,35	100,00
61 Kalimantan Barat	93,32	1,55	4,90	0,23	0,00	100,00
62 Kalimantan Tengah	92,57	1,57	5,06	0,80	0,00	100,00
63 Kalimantan Selatan	91,68	2,21	5,96	0,15	0,00	100,00
64 Kalimantan Timur	89,42	5,33	4,66	0,58	0,02	100,00
65 Kalimantan Utara	88,25	2,81	8,03	0,91	0,00	100,00
71 Sulawesi Utara	87,62	1,25	10,79	0,35	0,00	100,00
72 Sulawesi Tengah	94,44	0,63	4,62	0,31	0,00	100,00
73 Sulawesi Selatan	91,74	1,65	6,08	0,40	0,13	100,00
74 Sulawesi Tenggara	93,98	0,20	5,82	0,00	0,00	100,00
75 Gorontalo	89,01	0,31	10,67	0,00	0,00	100,00
76 Sulawesi Barat	95,50	0,35	3,97	0,17	0,00	100,00
81 Maluku	91,07	0,99	6,97	0,93	0,04	100,00
82 Maluku Utara	93,84	0,97	4,87	0,32	0,00	100,00
91 Papua Barat	91,11	1,96	6,30	0,63	0,00	100,00
94 Papua	88,76	2,82	6,87	1,55	0,00	100,00
Indonesia	**92,17**	**1,99**	**5,65**	**0,17**	**0,01**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.8.5 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2021

Total

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	94,38	0,89	4,51	0,21	0,00	100,00
12 Sumatera Utara	85,39	4,61	9,25	0,72	0,02	100,00
13 Sumatera Barat	87,42	2,43	9,87	0,28	0,00	100,00
14 Riau	90,52	3,45	5,49	0,54	0,00	100,00
15 Jambi	93,81	2,01	4,00	0,18	0,00	100,00
16 Sumatera Selatan	91,49	2,22	6,08	0,21	0,00	100,00
17 Bengkulu	95,15	1,86	2,99	0,00	0,00	100,00
18 Lampung	95,28	0,94	3,78	0,00	0,00	100,00
19 Kep. Bangka Belitung	94,05	2,51	3,38	0,07	0,00	100,00
21 Kepulauan Riau	88,46	6,28	5,09	0,18	0,00	100,00
31 DKI Jakarta	78,72	11,36	9,13	0,79	0,00	100,00
32 Jawa Barat	92,14	2,43	5,37	0,06	0,00	100,00
33 Jawa Tengah	95,00	0,63	4,32	0,04	0,00	100,00
34 DI Yogyakarta	95,49	1,13	3,37	0,00	0,00	100,00
35 Jawa Timur	95,02	1,19	3,67	0,12	0,00	100,00
36 Banten	95,23	2,43	2,28	0,06	0,00	100,00
51 Bali	94,27	2,64	3,09	0,00	0,00	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	93,16	0,53	6,25	0,06	0,00	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	95,11	0,74	3,81	0,06	0,27	100,00
61 Kalimantan Barat	94,15	1,56	4,14	0,16	0,00	100,00
62 Kalimantan Tengah	93,12	1,71	4,54	0,62	0,00	100,00
63 Kalimantan Selatan	91,50	2,96	5,42	0,12	0,00	100,00
64 Kalimantan Timur	89,54	5,87	4,01	0,57	0,01	100,00
65 Kalimantan Utara	90,49	1,97	7,12	0,41	0,00	100,00
71 Sulawesi Utara	88,68	1,14	9,81	0,38	0,00	100,00
72 Sulawesi Tengah	95,11	0,50	4,10	0,29	0,00	100,00
73 Sulawesi Selatan	92,25	1,56	5,69	0,35	0,15	100,00
74 Sulawesi Tenggara	94,80	0,33	4,87	0,00	0,00	100,00
75 Gorontalo	91,08	0,28	8,64	0,00	0,00	100,00
76 Sulawesi Barat	96,07	0,19	3,65	0,09	0,00	100,00
81 Maluku	91,39	1,27	6,61	0,71	0,02	100,00
82 Maluku Utara	94,52	1,12	4,04	0,31	0,00	100,00
91 Papua Barat	91,16	1,98	6,25	0,61	0,00	100,00
94 Papua	89,55	2,85	5,92	1,69	0,00	100,00
Indonesia	**92,77**	**2,07**	**4,97**	**0,18**	**0,01**	**100,00**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.9 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	79,09	61,36	66,11	67,37	66,78
12 Sumatera Utara	79,56	65,56	73,26	73,07	73,16
13 Sumatera Barat	67,82	54,34	60,81	60,47	60,63
14 Riau	87,51	64,40	73,98	72,56	73,28
15 Jambi	71,75	60,89	64,12	64,64	64,38
16 Sumatera Selatan	75,42	56,01	62,56	63,34	62,97
17 Bengkulu	57,99	47,59	50,88	50,26	50,57
18 Lampung	63,39	64,13	63,31	64,55	63,91
19 Kep. Bangka Belitung	45,98	28,99	37,44	40,79	39,07
21 Kepulauan Riau	51,56	20,38	46,18	48,18	47,16
31 DKI Jakarta	54,27	-	53,13	55,33	54,27
32 Jawa Barat	54,21	50,79	54,58	52,02	53,27
33 Jawa Tengah	70,03	60,59	65,79	64,76	65,24
34 DI Yogyakarta	86,09	82,30	84,83	84,76	84,79
35 Jawa Timur	73,18	60,57	67,95	66,22	67,02
36 Banten	68,52	47,52	63,77	58,80	61,29
51 Bali	90,33	80,63	87,02	86,80	86,90
52 Nusa Tenggara Barat	71,52	53,45	63,14	61,71	62,36
53 Nusa Tenggara Timur	68,30	36,10	43,99	42,43	43,16
61 Kalimantan Barat	75,93	57,93	63,89	65,39	64,64
62 Kalimantan Tengah	69,49	46,97	56,71	55,11	55,96
63 Kalimantan Selatan	69,77	46,44	55,80	58,56	57,24
64 Kalimantan Timur	81,16	46,66	69,10	70,68	69,85
65 Kalimantan Utara	70,37	60,52	66,98	65,24	66,20
71 Sulawesi Utara	73,74	71,77	72,10	73,40	72,78
72 Sulawesi Tengah	77,84	64,84	69,31	67,90	68,59
73 Sulawesi Selatan	77,27	63,75	69,72	68,71	69,16
74 Sulawesi Tenggara	81,96	67,56	72,11	72,13	72,12
75 Gorontalo	82,78	62,21	68,86	73,81	71,51
76 Sulawesi Barat	67,18	59,32	61,27	60,81	61,03
81 Maluku	76,40	55,35	63,65	64,36	64,01
82 Maluku Utara	88,78	62,12	67,55	71,10	69,33
91 Papua Barat	71,65	50,65	59,32	60,25	59,75
94 Papua	65,99	27,71	42,39	45,84	43,90
Indonesia	**67,76**	**58,43**	**63,81**	**63,10**	**63,44**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.10 Persentase Lansia yang Bepergian* menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	21,67	11,63	14,04	15,29	14,70
12 Sumatera Utara	14,96	12,74	13,47	14,34	13,94
13 Sumatera Barat	21,08	13,79	15,96	18,26	17,19
14 Riau	15,50	7,56	11,21	9,98	10,61
15 Jambi	11,21	7,50	10,12	7,25	8,69
16 Sumatera Selatan	11,65	8,67	11,03	8,52	9,73
17 Bengkulu	23,29	10,07	16,56	11,06	13,86
18 Lampung	7,51	10,90	10,52	9,27	9,91
19 Kep. Bangka Belitung	17,90	8,26	14,43	13,49	13,98
21 Kepulauan Riau	6,51	6,77	8,21	4,83	6,55
31 DKI Jakarta	12,65	-	13,22	12,13	12,65
32 Jawa Barat	7,70	4,83	7,57	6,29	6,91
33 Jawa Tengah	6,67	4,14	6,01	4,84	5,39
34 DI Yogyakarta	7,58	4,67	7,38	5,92	6,58
35 Jawa Timur	7,75	4,40	7,11	5,25	6,11
36 Banten	6,48	4,62	6,14	5,54	5,84
51 Bali	6,24	5,57	6,50	5,56	6,00
52 Nusa Tenggara Barat	9,73	8,21	8,31	9,49	8,96
53 Nusa Tenggara Timur	12,28	7,66	10,28	7,26	8,67
61 Kalimantan Barat	12,37	4,61	7,47	7,54	7,50
62 Kalimantan Tengah	12,56	10,35	12,81	9,40	11,23
63 Kalimantan Selatan	15,76	11,72	14,40	12,84	13,59
64 Kalimantan Timur	7,17	9,00	9,62	5,70	7,77
65 Kalimantan Utara	11,32	1,84	6,82	7,88	7,30
71 Sulawesi Utara	8,63	9,84	8,88	9,55	9,23
72 Sulawesi Tengah	11,23	8,14	10,10	7,99	9,03
73 Sulawesi Selatan	11,39	7,32	9,70	8,35	8,95
74 Sulawesi Tenggara	16,49	13,84	16,22	13,26	14,68
75 Gorontalo	7,00	8,82	8,00	8,00	8,00
76 Sulawesi Barat	12,45	9,38	11,78	8,54	10,05
81 Maluku	12,18	6,89	9,36	8,79	9,07
82 Maluku Utara	9,12	8,94	11,27	6,73	8,99
91 Papua Barat	4,19	18,15	13,44	10,56	12,10
94 Papua	8,60	5,03	7,44	5,38	6,54
Indonesia	**9,14**	**6,68**	**8,67**	**7,40**	**8,00**

Keterangan: *) Bepergian yang dilakukan selama periode Januari-Desember 2020
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.11 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	1,56	0,48	1,11	0,55	0,81
12 Sumatera Utara	1,68	0,77	1,49	1,08	1,27
13 Sumatera Barat	0,88	0,84	1,24	0,53	0,86
14 Riau	1,48	0,82	1,93	0,18	1,07
15 Jambi	0,51	1,55	1,89	0,54	1,22
16 Sumatera Selatan	1,69	1,35	2,39	0,60	1,47
17 Bengkulu	1,35	1,10	1,74	0,58	1,17
18 Lampung	0,70	1,03	1,53	0,32	0,94
19 Kep. Bangka Belitung	1,21	0,63	0,28	1,72	0,98
21 Kepulauan Riau	NA	NA	NA	NA	NA
31 DKI Jakarta	0,65	-	0,63	0,66	0,65
32 Jawa Barat	1,23	0,28	1,47	0,49	0,97
33 Jawa Tengah	0,56	0,27	0,62	0,22	0,41
34 DI Yogyakarta	0,68	0,34	0,48	0,64	0,56
35 Jawa Timur	0,58	0,39	0,53	0,46	0,49
36 Banten	0,52	0,56	0,88	0,19	0,53
51 Bali	0,14	0,16	0,18	0,12	0,15
52 Nusa Tenggara Barat	1,91	2,29	2,49	1,78	2,10
53 Nusa Tenggara Timur	1,02	1,27	1,36	1,08	1,21
61 Kalimantan Barat	1,99	0,77	1,76	0,70	1,23
62 Kalimantan Tengah	1,53	1,15	1,73	0,81	1,30
63 Kalimantan Selatan	1,07	0,67	1,16	0,58	0,86
64 Kalimantan Timur	1,61	0,99	2,15	0,58	1,41
65 Kalimantan Utara	NA	NA	NA	NA	NA
71 Sulawesi Utara	0,72	0,85	1,04	0,55	0,79
72 Sulawesi Tengah	2,97	0,69	1,65	1,05	1,35
73 Sulawesi Selatan	0,89	1,06	1,20	0,83	0,99
74 Sulawesi Tenggara	1,41	0,24	1,14	0,12	0,61
75 Gorontalo	NA	NA	NA	NA	NA
76 Sulawesi Barat	1,34	0,59	1,00	0,54	0,75
81 Maluku	1,32	0,73	1,25	0,71	0,97
82 Maluku Utara	2,01	1,66	2,93	0,59	1,75
91 Papua Barat	1,95	0,78	1,86	0,63	1,29
94 Papua	1,02	0,79	1,05	0,67	0,88
Indonesia	**0,94**	**0,63**	**1,09**	**0,53**	**0,79**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
NA (*Not Applicable*) berarti data tidak dapat ditampilkan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.12 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terbawah, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	36,32	3,69	10,15	29,09	43,55	10,85	3 940
12 Sumatera Utara	31,25	3,54	11,33	24,31	38,20	33,04	7 113
13 Sumatera Barat	34,75	3,45	9,93	27,98	41,52	12,14	4 978
14 Riau	32,59	3,63	11,15	25,46	39,72	11,52	2 065
15 Jambi	35,68	3,39	9,50	29,03	42,33	7,30	2 126
16 Sumatera Selatan	34,79	3,55	10,20	27,83	41,76	18,20	3 620
17 Bengkulu	37,07	2,48	6,70	32,20	41,94	2,14	1 826
18 Lampung	41,20	3,86	9,37	33,63	48,78	22,63	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	37,36	3,19	8,55	31,09	43,62	2,46	1 193
21 Kepulauan Riau	38,89	6,60	16,97	25,94	51,85	10,04	1 170
31 DKI Jakarta	23,47	2,52	10,74	18,52	28,42	14,56	1 794
32 Jawa Barat	42,07	3,07	7,29	36,05	48,09	82,29	9 183
33 Jawa Tengah	45,79	1,79	3,90	42,28	49,30	26,66	14 432
34 DI Yogyakarta	47,70	6,65	13,94	34,65	60,75	45,59	2 258
35 Jawa Timur	46,66	2,76	5,91	41,25	52,08	74,70	15 797
36 Banten	40,63	7,00	17,22	26,90	54,36	93,67	2 023
51 Bali	44,73	6,09	13,62	32,78	56,69	35,59	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	41,92	4,60	10,97	32,90	50,95	18,11	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	38,69	2,63	6,80	33,53	43,86	6,38	5 403
61 Kalimantan Barat	40,14	3,50	8,73	33,26	47,02	9,68	2 828
62 Kalimantan Tengah	39,38	3,73	9,47	32,07	46,70	5,08	1 898
63 Kalimantan Selatan	39,26	3,97	10,12	31,46	47,05	11,72	2 305
64 Kalimantan Timur	38,57	5,63	14,61	27,51	49,63	17,21	1 608
65 Kalimantan Utara	35,39	4,88	13,80	25,80	44,97	2,52	703
71 Sulawesi Utara	35,82	3,00	8,38	29,93	41,71	5,28	3 840
72 Sulawesi Tengah	35,38	3,29	9,30	28,92	41,84	5,53	2 372
73 Sulawesi Selatan	40,16	3,55	8,85	33,18	47,13	22,13	6 626
74 Sulawesi Tenggara	39,53	3,39	8,57	32,88	46,18	4,43	2 881
75 Gorontalo	37,71	3,15	8,36	31,52	43,90	2,00	1 059
76 Sulawesi Barat	36,37	3,09	8,49	30,31	42,44	1,91	1 156
81 Maluku	33,93	6,52	19,21	21,14	46,72	12,22	2 169
82 Maluku Utara	36,92	5,19	14,06	26,73	47,11	4,78	1 585
91 Papua Barat	36,56	5,41	14,81	25,93	47,19	3,10	1 388
94 Papua	29,28	3,68	12,56	22,06	36,50	5,08	2 068
Indonesia	**43,29**	**1,02**	**2,36**	**41,28**	**45,30**	**52,56**	**122 694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.13 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Kelompok Pengeluaran 40 Persen Menengah, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	40,30	2,32	5,75	35,75	44,85	4,12	3 940
12 Sumatera Utara	40,79	1,70	4,16	37,46	44,12	6,76	7 113
13 Sumatera Barat	43,54	1,42	3,27	40,75	46,34	1,90	4 978
14 Riau	43,56	1,61	3,70	40,40	46,72	2,02	2 065
15 Jambi	40,64	1,72	4,23	37,27	44,02	1,79	2 126
16 Sumatera Selatan	40,81	1,71	4,20	37,45	44,17	3,98	3 620
17 Bengkulu	42,61	2,08	4,89	38,52	46,70	1,44	1 826
18 Lampung	39,04	1,11	2,85	36,85	41,22	1,91	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	39,38	1,84	4,68	35,76	43,00	0,80	1 193
21 Kepulauan Riau	43,28	1,22	2,82	40,89	45,68	0,33	1 170
31 DKI Jakarta	41,67	3,14	7,54	35,50	47,84	16,71	1 794
32 Jawa Barat	38,84	1,33	3,43	36,23	41,46	15,92	9 183
33 Jawa Tengah	36,47	0,90	2,45	34,71	38,23	7,17	14 432
34 DI Yogyakarta	37,49	4,00	10,67	29,64	45,35	17,57	2 258
35 Jawa Timur	36,55	1,15	3,13	34,30	38,80	13,82	15 797
36 Banten	37,27	2,73	7,33	31,91	42,63	14,74	2 023
51 Bali	38,16	2,85	7,47	32,56	43,75	8,17	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	39,61	4,12	10,41	31,51	47,70	14,83	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	41,33	1,53	3,70	38,32	44,33	2,11	5 403
61 Kalimantan Barat	39,38	1,91	4,86	35,63	43,14	2,90	2 828
62 Kalimantan Tengah	39,76	2,05	5,17	35,73	43,79	1,54	1 898
63 Kalimantan Selatan	40,10	1,85	4,63	36,46	43,74	2,53	2 305
64 Kalimantan Timur	41,56	2,51	6,04	36,64	46,49	3,33	1 608
65 Kalimantan Utara	42,81	1,81	4,22	39,26	46,36	0,32	703
71 Sulawesi Utara	40,38	1,38	3,42	37,67	43,08	1,07	3 840
72 Sulawesi Tengah	42,54	1,63	3,83	39,34	45,73	1,27	2 372
73 Sulawesi Selatan	40,30	1,62	4,02	37,12	43,48	4,60	6 626
74 Sulawesi Tenggara	41,25	2,19	5,30	36,96	45,55	1,82	2 881
75 Gorontalo	40,08	3,00	7,50	34,18	45,98	1,78	1 059
76 Sulawesi Barat	43,79	1,57	3,58	40,71	46,87	0,46	1 156
81 Maluku	44,12	2,29	5,20	39,62	48,63	1,38	2 169
82 Maluku Utara	39,10	2,77	7,08	33,67	44,53	1,33	1 585
91 Papua Barat	40,44	3,26	8,05	34,05	46,83	1,08	1 388
94 Papua	44,32	2,31	5,21	39,78	48,85	1,68	2 068
Indonesia	**37,40**	**0,45**	**1,21**	**36,51**	**38,29**	**10,75**	**122 694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.14 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Kelompok Pengeluaran 20 Persen Teratas, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	23,38	2,73	11,68	18,02	28,74	7,69	3 940
12 Sumatera Utara	27,95	4,88	17,46	18,37	37,54	67,04	7 113
13 Sumatera Barat	21,70	3,81	17,55	14,23	29,18	19,75	4 978
14 Riau	23,85	3,34	13,99	17,31	30,40	11,74	2 065
15 Jambi	23,68	4,29	18,12	15,26	32,10	14,84	2 126
16 Sumatera Selatan	24,39	4,71	19,29	15,16	33,63	39,39	3 620
17 Bengkulu	20,32	3,05	15,03	14,33	26,31	4,67	1 826
18 Lampung	19,76	4,01	20,30	11,89	27,64	37,35	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	23,27	2,88	12,40	17,60	28,93	2,64	1 193
21 Kepulauan Riau	17,82	5,98	33,53	6,09	29,55	13,35	1 170
31 DKI Jakarta	34,86	3,83	10,98	27,34	42,37	26,54	1 794
32 Jawa Barat	19,09	2,81	14,73	13,57	24,61	109,11	9 183
33 Jawa Tengah	17,74	1,44	8,14	14,90	20,57	29,61	14 432
34 DI Yogyakarta	14,80	3,54	23,92	7,85	21,75	25,58	2 258
35 Jawa Timur	16,79	2,84	16,94	11,21	22,37	141,31	15 797
36 Banten	22,10	4,98	22,55	12,32	31,88	66,57	2 023
51 Bali	17,11	4,14	24,21	8,98	25,24	28,69	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	18,47	4,04	21,90	10,53	26,41	22,67	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	19,98	1,88	9,41	16,29	23,68	4,83	5 403
61 Kalimantan Barat	20,48	4,43	21,63	11,78	29,17	22,82	2 828
62 Kalimantan Tengah	20,86	3,32	15,91	14,34	27,37	5,82	1 898
63 Kalimantan Selatan	20,65	3,61	17,49	13,56	27,74	14,09	2 305
64 Kalimantan Timur	19,86	3,78	19,03	12,44	27,28	11,53	1 608
65 Kalimantan Utara	21,80	4,93	22,59	12,13	31,47	3,43	703
71 Sulawesi Utara	23,80	2,28	9,57	19,33	28,27	3,86	3 840
72 Sulawesi Tengah	22,08	3,25	14,73	15,70	28,47	7,18	2 372
73 Sulawesi Selatan	19,54	3,42	17,50	12,83	26,26	31,35	6 626
74 Sulawesi Tenggara	19,22	3,64	18,96	12,07	26,37	7,90	2 881
75 Gorontalo	22,21	4,71	21,22	12,96	31,46	6,09	1 059
76 Sulawesi Barat	19,84	3,33	16,81	13,29	26,38	3,24	1 156
81 Maluku	21,95	7,13	32,47	7,96	35,93	19,12	2 169
82 Maluku Utara	23,98	5,43	22,65	13,32	34,64	6,68	1 585
91 Papua Barat	23,00	2,46	10,68	18,18	27,82	0,84	1 388
94 Papua	26,40	2,36	8,95	21,76	31,03	2,23	2 068
Indonesia	**19,31**	**0,97**	**5,04**	**17,40**	**21,22**	**74,89**	**122 694**

Keterangan: Warna kuning artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.15 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	66,78	2,78	4,17	61,32	72,25	6,46	3 940
12 Sumatera Utara	73,16	3,00	4,11	67,26	79,05	26,04	7 113
13 Sumatera Barat	60,63	3,40	5,61	53,95	67,31	11,21	4 978
14 Riau	73,28	6,16	8,41	61,19	85,38	37,18	2 065
15 Jambi	64,38	3,93	6,10	56,67	72,09	9,81	2 126
16 Sumatera Selatan	62,97	4,01	6,36	55,10	70,83	22,60	3 620
17 Bengkulu	50,57	5,14	10,17	40,48	60,67	8,58	1 826
18 Lampung	63,91	3,55	5,56	56,94	70,89	20,16	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	39,07	5,53	14,17	28,21	49,93	7,28	1 193
21 Kepulauan Riau	47,16	11,92	25,27	23,77	70,55	31,20	1 170
31 DKI Jakarta	54,27	3,70	6,83	47,00	61,55	22,73	1 794
32 Jawa Barat	53,27	2,71	5,09	47,95	58,59	62,94	9 183
33 Jawa Tengah	65,24	2,02	3,09	61,28	69,20	37,24	14 432
34 DI Yogyakarta	84,79	1,89	2,23	81,07	88,51	7,16	2 258
35 Jawa Timur	67,02	1,78	2,65	63,53	70,51	34,89	15 797
36 Banten	61,29	5,32	8,69	50,84	71,74	55,16	2 023
51 Bali	86,90	2,13	2,45	82,72	91,09	9,46	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	62,36	2,94	4,71	56,59	68,12	7,68	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	43,16	3,30	7,65	36,67	49,64	9,71	5 403
61 Kalimantan Barat	64,64	5,67	8,77	53,52	75,77	26,62	2 828
62 Kalimantan Tengah	55,96	4,45	7,95	47,23	64,70	7,02	1 898
63 Kalimantan Selatan	57,24	6,12	10,69	45,23	69,25	27,08	2 305
64 Kalimantan Timur	69,85	4,82	6,91	60,38	79,32	14,19	1 608
65 Kalimantan Utara	66,20	3,43	5,18	59,46	72,93	1,27	703
71 Sulawesi Utara	72,78	2,08	2,86	68,68	76,87	2,96	3 840
72 Sulawesi Tengah	68,59	2,37	3,45	63,95	73,24	3,04	2 372
73 Sulawesi Selatan	69,16	2,52	3,64	64,22	74,10	12,50	6 626
74 Sulawesi Tenggara	72,12	2,86	3,97	66,50	77,74	3,76	2 881
75 Gorontalo	71,51	2,97	4,15	65,68	77,34	2,05	1 059
76 Sulawesi Barat	61,03	6,71	11,00	47,85	74,20	8,78	1 156
81 Maluku	64,01	4,51	7,04	55,17	72,86	5,69	2 169
82 Maluku Utara	69,33	5,13	7,40	59,26	79,40	5,11	1 585
91 Papua Barat	59,75	6,28	10,51	47,43	72,08	4,02	1 388
94 Papua	43,90	4,73	10,78	34,61	53,18	7,06	2 068
Indonesia	**63,44**	**0,86**	**1,36**	**61,75**	**65,13**	**39,56**	**122 694**

Keterangan: Warna kuning artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.16 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Bepergian, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	14,70	1,85	12,60	11,07	18,34	5,05	3 940
12 Sumatera Utara	13,94	1,04	7,45	11,90	15,98	5,09	7 113
13 Sumatera Barat	17,19	1,75	10,20	13,75	20,64	4,99	4 978
14 Riau	10,61	1,17	10,99	8,32	12,90	2,75	2 065
15 Jambi	8,69	1,03	11,87	6,66	10,72	1,96	2 126
16 Sumatera Selatan	9,73	0,93	9,58	7,90	11,56	3,25	3 620
17 Bengkulu	13,86	1,68	12,09	10,57	17,15	1,91	1 826
18 Lampung	9,91	1,02	10,34	7,90	11,92	4,32	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	13,98	2,53	18,11	9,01	18,95	3,01	1 193
21 Kepulauan Riau	6,55	1,14	17,38	4,31	8,78	1,16	1 170
31 DKI Jakarta	12,65	0,97	7,70	10,74	14,57	3,53	1 794
32 Jawa Barat	6,91	0,63	9,11	5,67	8,15	13,14	9 183
33 Jawa Tengah	5,39	0,47	8,74	4,46	6,31	9,01	14 432
34 DI Yogyakarta	6,58	1,22	18,59	4,18	8,98	6,27	2 258
35 Jawa Timur	6,11	0,56	9,10	5,02	7,21	13,18	15 797
36 Banten	5,84	0,85	14,49	4,18	7,50	6,01	2 023
51 Bali	6,00	1,16	19,31	3,73	8,28	5,65	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	8,96	1,29	14,45	6,42	11,50	4,29	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	8,67	1,21	13,95	6,29	11,04	4,04	5 403
61 Kalimantan Barat	7,50	1,25	16,66	5,05	9,95	4,26	2 828
62 Kalimantan Tengah	11,23	1,33	11,81	8,63	13,84	1,54	1 898
63 Kalimantan Selatan	13,59	1,25	9,20	11,14	16,04	2,35	2 305
64 Kalimantan Timur	7,77	0,87	11,16	6,07	9,47	1,35	1 608
65 Kalimantan Utara	7,30	1,59	21,76	4,18	10,42	0,90	703
71 Sulawesi Utara	9,23	0,96	10,46	7,33	11,12	1,50	3 840
72 Sulawesi Tengah	9,03	1,15	12,75	6,77	11,29	1,89	2 372
73 Sulawesi Selatan	8,95	0,76	8,52	7,45	10,45	3,01	6 626
74 Sulawesi Tenggara	14,68	1,75	11,92	11,24	18,11	2,26	2 881
75 Gorontalo	8,00	2,32	29,05	3,44	12,56	3,47	1 059
76 Sulawesi Barat	10,05	1,87	18,66	6,37	13,73	1,80	1 156
81 Maluku	9,07	1,77	19,48	5,60	12,54	2,44	2 169
82 Maluku Utara	8,99	2,49	27,70	4,10	13,88	3,13	1 585
91 Papua Barat	12,10	3,34	27,64	5,53	18,66	2,58	1 388
94 Papua	6,54	0,99	15,13	4,60	8,48	1,24	2 068
Indonesia	**8,00**	**0,22**	**2,78**	**7,57**	**8,44**	**8,26**	**122 694**

Keterangan: Warna kuning artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 7.17 Nilai *Sampling Error* Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	0,81	0,22	27,27	0,38	1,25	1,13	3 940
12 Sumatera Utara	1,27	0,15	11,88	0,97	1,56	1,03	7 113
13 Sumatera Barat	0,86	0,20	23,41	0,46	1,25	1,09	4 978
14 Riau	1,07	0,28	26,50	0,52	1,63	1,46	2 065
15 Jambi	1,22	0,36	29,98	0,50	1,93	1,61	2 126
16 Sumatera Selatan	1,47	0,23	15,76	1,02	1,92	1,22	3 620
17 Bengkulu	1,17	0,29	25,18	0,59	1,75	0,61	1 826
18 Lampung	0,94	0,18	18,75	0,59	1,28	1,22	3 903
19 Kep. Bangka Belitung	0,98	0,35	35,75	0,29	1,66	0,71	1 193
21 Kepulauan Riau	NA	0,94	58,48	NA	NA	3,05	1 170
31 DKI Jakarta	0,65	0,30	46,34	0,06	1,24	5,77	1 794
32 Jawa Barat	0,97	0,15	15,49	0,67	1,26	4,99	9 183
33 Jawa Tengah	0,41	0,06	15,72	0,28	0,54	2,11	14 432
34 DI Yogyakarta	0,56	0,14	25,09	0,29	0,84	0,92	2 258
35 Jawa Timur	0,49	0,09	18,21	0,32	0,67	3,99	15 797
36 Banten	0,53	0,13	25,02	0,27	0,80	1,55	2 023
51 Bali	0,15	0,07	49,24	0,00	0,29	0,84	3 320
52 Nusa Tenggara Barat	2,10	0,36	17,02	1,40	2,80	1,30	2 064
53 Nusa Tenggara Timur	1,21	0,25	20,99	0,71	1,71	1,18	5 403
61 Kalimantan Barat	1,23	0,34	27,77	0,56	1,89	1,81	2 828
62 Kalimantan Tengah	1,30	0,40	30,43	0,52	2,08	1,07	1 898
63 Kalimantan Selatan	0,86	0,16	19,15	0,53	1,18	0,56	2 305
64 Kalimantan Timur	1,41	0,46	32,55	0,51	2,31	1,94	1 608
65 Kalimantan Utara	NA	1,24	60,81	NA	NA	1,85	703
71 Sulawesi Utara	0,79	0,13	16,18	0,54	1,04	0,28	3 840
72 Sulawesi Tengah	1,35	0,43	32,00	0,50	2,20	1,64	2 372
73 Sulawesi Selatan	0,99	0,18	18,39	0,63	1,35	1,43	6 626
74 Sulawesi Tenggara	0,61	0,21	34,65	0,19	1,02	0,68	2 881
75 Gorontalo	NA	0,15	53,81	NA	NA	0,37	1 059
76 Sulawesi Barat	0,75	0,30	39,36	0,17	1,33	0,54	1 156
81 Maluku	0,97	0,27	28,05	0,44	1,50	0,50	2 169
82 Maluku Utara	1,75	0,51	29,34	0,74	2,76	0,63	1 585
91 Papua Barat	1,29	0,57	44,45	0,16	2,41	0,63	1 388
94 Papua	0,88	0,28	31,72	0,33	1,43	0,70	2 068
Indonesia	**0,79**	**0,04**	**5,34**	**0,71**	**0,88**	**2,80**	**122 694**

Keterangan: Warna kuning artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Warna merah artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat, tidak bisa digunakan
Nilai 0,00 data dapat diabaikan, NA (*Not Applicable*) berarti data tidak dapat ditampilkan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

http://www.bps.go.id

BAB 8. PERLINDUNGAN SOSIAL

BANTUAN PANGAN NON TUNAI

Pada tahun 2021, penyaluran BPNT dan PKH masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

https://www.bps.go.id

Bab 8 Perlindungan Sosial

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Dibandingkan kelompok umur lainnya, lansia memiliki kerentanan sosial dan ekonomi yang paling tinggi. Penyajian data perlindungan sosial dapat membantu evaluasi kebijakan dan program perlindungan sosial, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia.

Pada tahun 2021, penyaluran BPNT dan PKH masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
---

https://www.bps.go.id

Upaya perlindungan sosial yang disajikan pada publikasi ini meliputi program bantuan sosial dan jaminan sosial yang diterima oleh rumah tangga dan penduduk lanjut usia. Hasil Susenas Maret 2021 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk memperluas cakupan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang memenuhi prinsip keadilan, terutama bagi rumah tangga dan penduduk lanjut usia yang kurang mampu.

8.1. Bantuan Sosial

Program perlindungan sosial yang dirancang tepat dan tepat sasaran dapat membantu terpenuhinya kekurangan pendapatan dan konsumsi rumah tangga miskin (Lowder et al, 2017). Program bantuan sosial yang diterima oleh lansia antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS), dan penyaluran kredit usaha. BPNT merupakan transformasi dari program subsidi beras sejahtera/rastra. Adapun PKH merupakan sebuah program bantuan sosial

bersyarat bagi keluarga miskin, termasuk mencakup penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia, dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI (pkh.kemensos.go.id).

Melalui Program BPNT, penerima manfaat dapat secara leluasa memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan. Program BPNT juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan kios, warung, atau toko yang ada di sekitar masyarakat. Melalui sistem perbankan dan transaksi elektronik, penyaluran BPNT juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat, mendekatkan masyarakat dengan produk-produk perbankan, serta menghidupkan lembaga ekonomi yang berpotensi mendorong kegiatan ekonomi secara lebih luas.

Pada tahun 2021, sebesar 24,20 persen rumah tangga lansia pernah menerima BPNT (Tabel 8.1). Jumlah ini meningkat daripada penerima BPNT pada tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 18,99 persen (BPS, 2020). Selanjutnya, jika dilihat menurut tipe daerah, rumah tangga lansia yang pernah menerima BPNT di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan (29,54 persen berbanding 19,63 persen).

Sesuai aturan yang berlaku, sasaran BPNT ditujukan kepada masyarakat miskin. Namun berdasarkan data Susenas Maret 2021, sebesar 20,71 persen rumah tangga lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen menengah dan 7,25 persen rumah tangga lansia dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas masih menerima BPNT (Tabel 8.1). Pengelompokkan rumah tangga berdasarkan pengeluaran per kapita rumah tangga sebulan, digunakan sebagai cerminan tingkat ekonomi rumah tangga lansia yang dikelompokkan menjadi kelompok pengeluaran 20 persen teratas, 40 persen menengah, dan 40 persen terbawah.

Pada Gambar 8.1 terlihat bahwa persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat atau menerima PKH terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2017-2021. Jika disalurkan secara tepat sasaran, peningkatan penerima PKH ini tentu akan dapat menurunkan kemiskinan, khususnya bagi rumah tangga lansia seperti apa yang menjadi misi besar program PKH. Akan tetapi berdasarkan Tabel 8.1 di bawah, penyaluran PKH masih belum tepat sasaran. Baru sekitar 19,24 persen rumah tangga lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang

https://www.bps.go.id

menerima PKH. Sementara dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas, sekitar 2,52 persen rumah tangga lansia masih tercatat sebagai penerima PKH.

Gambar 8.1 Perkembangan Rumah Tangga Lansia yang Tercatat Sebagai Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 2017-2021

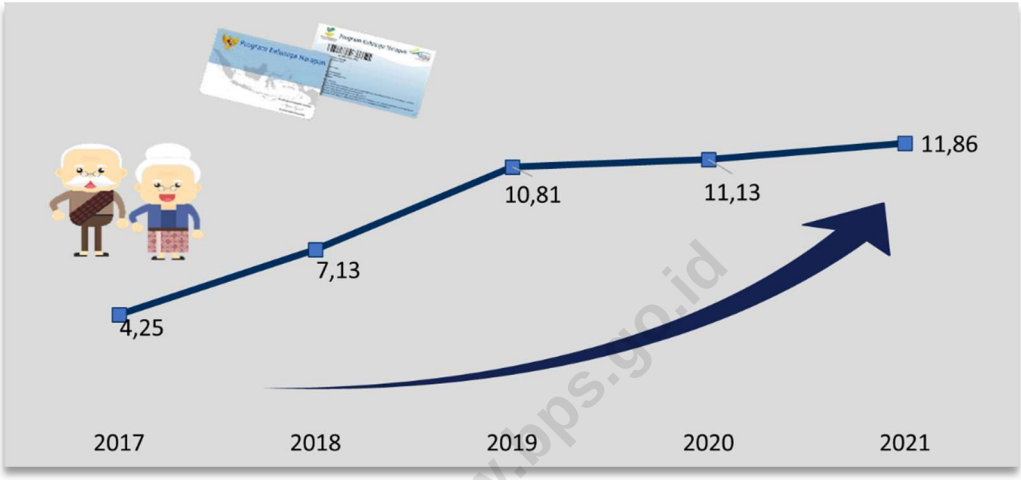

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Selain program BPNT dan PKH, pemerintah juga mengeluarkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat untuk mencairkan bantuan sosial dan subsidi bagi penerima manfaat. KKS digunakan sebagai kartu identitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kurang mampu, di antaranya adalah penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia yang belum memperoleh layanan atau bantuan sosial (intelresos.kemensos.go.id). KKS merupakan pengganti dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2014.

Pada tahun 2021, sekitar 15,01 persen rumah tangga lansia memiliki KPS/KKS (Gambar 8.2). Fenomena menarik di sini, sekitar 5,59 persen rumah tangga lansia dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas juga memiliki KPS/KKS. Sejatinya, KPS/KKS dijadikan sebagai penanda bagi PMKS yang kurang mampu saja, atau rumah tangga lansia yang berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Dilihat menurut perkembangan dari tahun ke tahun, secara umum, persentase rumah tangga lansia yang memiliki KPS/KKS mengalami penurunan selama periode 2015-2021. Namun, jika diperhatikan pada periode 2019-2021

mengalami peningkatan. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2021 dimana persentase rumah tangga lansia yang memiliki KPS/KKS meningkat menjadi 15,01 persen dari 13,59 persen pada tahun sebelumnya (Gambar 8.2).

Gambar 8.2 Perkembangan Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Kesejahteraan Sosial (KPS/KKS), 2015-2021

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Rumah tangga lansia masih memerlukan akses terhadap layanan keuangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Terutama karena banyak program perlindungan sosial yang disalurkan melalui lembaga keuangan atau perbankan, salah satunya penyaluran kredit usaha. Pada tahun 2021, sekitar 16,62 persen rumah tangga lansia pernah menerima penyaluran kredit (Tabel 8.2). Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana penyaluran kredit untuk rumah tangga lansia pada tahun 2020 mencapai 18,93 persen. Berdasarkan jenis kredit yang diterima, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang paling banyak diterima oleh rumah tangga lansia, yaitu sebesar 5,38 persen.

8.2. Jaminan Sosial

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jenis-jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengklasifikasikan jaminan sosial menjadi dua, yaitu jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Publikasi ini menyajikan statistik lansia yang memiliki jaminan kesehatan dan jaminan sosial secara umum.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. JKN dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara terpusat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh pemerintahan daerah. Peserta BPJS terdiri atas Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI. Dengan tingkat kesehatan yang semakin lemah seiring penambahan umur, lansia merupakan kelompok rentan yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta.

https://www.bps.go.id

Gambar 8.3 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 2021

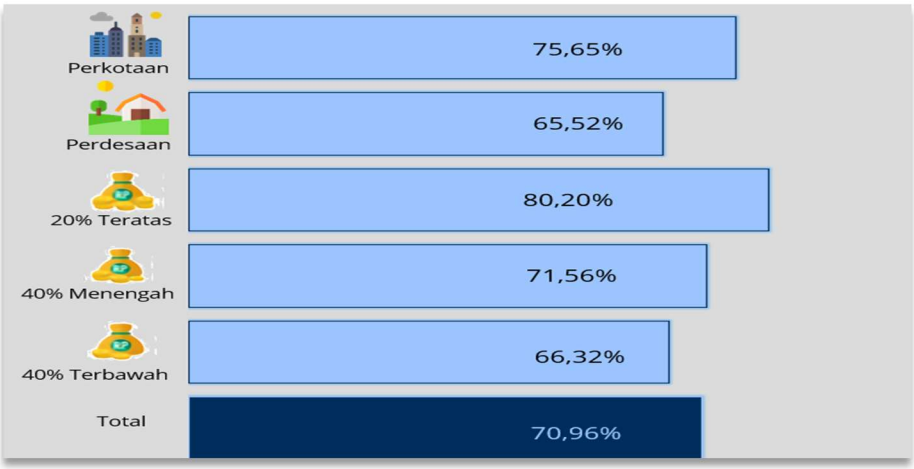

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Gambar 8.3 di atas memperlihatkan bahwa lansia penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyebar hampir secara merata pada setiap tingkatan ekonomi. Sebanyak 80,20 persen lansia dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang memiliki jaminan kesehatan, 71,56 persen lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen menengah, dan 66,32 persen lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang memiliki JKN. Secara umum, 70,96 persen lansia telah memiliki JKN dan masih ada sekitar 29,04 persen lansia yang belum memiliki JKN.

Gambar 8.4 Perkembangan Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial, 2013-2021

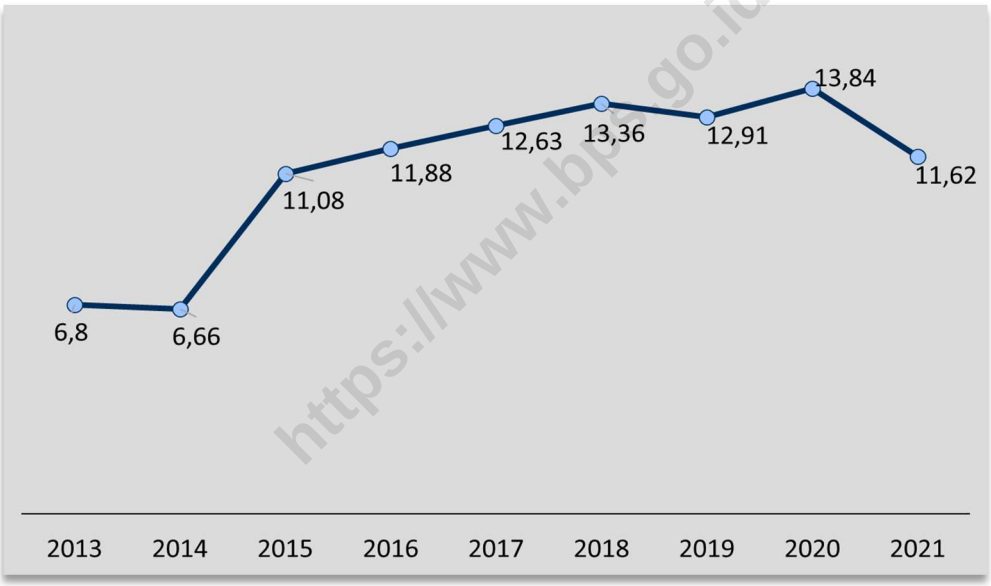

https://www.bps.go.id

Sumber: BPS, Susenas Maret, 2013-2021

Jenis jaminan kesehatan yang banyak dimiliki oleh lansia adalah BPJS PBI, yaitu sebesar 46,02 persen lansia yang memilikinya (Tabel 8.3). BPJS PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan (bpjs-kesehatan.go.id). Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021 pada Tabel 8.3 di bawah, masih ada sekitar 46,03 persen lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang belum memiliki jaminan kesehatan PBI dan sekitar 27,86 persen lansia dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang memiliki BPJS PBI. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada lansia yang lebih berhak tetapi belum

memiliki PBI dan masih ada lansia yang tidak berhak tetapi menikmati manfaat PBI.

Statistik jaminan sosial yang dicakup pada publikasi ini meliputi jaminan pensiun, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian, dan pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Secara umum, Gambar 8.4 di atas memperlihatkan selama periode tahun 2013-2021, terjadi peningkatan persentase rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial. Akan tetapi, peningkatan tersebut mengalami hambatan pada periode tahun 2014, 2019, dan 2021. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial menurun menjadi 11,62 persen dari 13,84 persen pada tahun sebelumnya.

https://www.bps.go.id

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima BPNT, Tercatat Sebagai Penerima PKH, dan Memiliki KPS/KKS, 2021

Karakteristik	Pernah Menerima BPNT	Masih Tercatat/ Menerima PKH	Memiliki KPS/KKS		
			Dapat Menunjukkan	Tidak Dapat Menunjukkan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tipe Daerah					
Perkotaan	19,63	9,40	8,50	4,21	12,71
Perdesaan	29,54	14,74	12,28	5,42	17,69
Kelompok Pengeluaran					
20 Persen Teratas	7,25	2,52	3,07	2,51	5,59
40 Persen Menengah	20,71	8,66	8,95	3,97	12,92
40 Persen Terbawah	35,49	19,24	14,85	6,57	21,41
Indonesia	**24,20**	**11,86**	**10,24**	**4,77**	**15,01**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Menurut Jenis Kredit dan Tipe Daerah, 2021

Jenis Kredit	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	4,84	6,02	5,38
Kredit dari Bank Umum selain KUR	4,01	3,19	3,63
Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	0,92	0,87	0,90
Koperasi	3,60	3,90	3,74
Perorangan dengan Bunga	1,48	1,46	1,47
Kredit Pegadaian	0,62	0,51	0,57
Perusahaan Leasing	2,63	0,97	1,87
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	0,57	0,58	0,57
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	0,29	0,41	0,35
Indonesia	**16,92**	**16,26**	**16,62**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.3 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2021

Karakteristik	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Jaminan Kesehatan Swasta		Memiliki Jaminan Kesehatan
	PBI	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Fasilitas Perusahaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	42,72	28,51	8,50	0,73	1,43	77,10
Perdesaan	49,85	9,82	8,90	0,12	0,25	65,75
Jenis Kelamin						
Laki-laki	45,43	20,82	8,66	0,51	0,97	72,27
Perempuan	46,55	18,99	8,71	0,4	0,80	71,47
Kelompok Umur						
Lansia Muda	45,58	20,99	8,63	0,48	0,95	72,52
Lansia Madya	46,91	18,99	8,79	0,42	0,84	71,88
Lansia Tua	46,37	14,38	8,82	0,30	0,50	66,88
Kelompok Pengeluaran						
20 Persen Teratas	27,86	48,82	7,93	1,79	2,66	83,04
40 Persen Menengah	46,19	19,91	9,18	0,19	0,77	72,29
40 Persen Terbawah	53,97	6,91	8,60	0,08	0,18	66,48
Status Disabilitas						
Penyandang Disabilitas	49,42	15,45	7,68	0,23	0,78	69,91
Non Disabilitas	45,54	20,49	8,83	0,48	0,90	72,13
Indonesia	**46,02**	**19,86**	**8,69**	**0,45**	**0,88**	**71,85**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial, 2021

Karakteristik	Memiliki Jaminan Sosial	Jenis Jaminan Sosial				
		Jaminan Pensiun	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Asuransi Kematian	Pesangon PHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tipe Daerah						
Perkotaan	16,58	12,70	7,98	7,47	7,87	2,69
Perdesaan	5,81	4,02	2,35	2,23	3,02	0,70
Kelompok Pengeluaran						
20 Persen Teratas	27,01	22,62	13,78	11,55	12,86	3,76
40 Persen Menengah	11,55	8,18	5,21	5,34	5,75	1,99
40 Persen Terbawah	4,33	2,52	1,54	1,69	2,08	0,63
Indonesia	**11,62**	**8,70**	**5,39**	**5,05**	**5,64**	**1,78**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima BPNT Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
11 Aceh	18,62	32,74	28,46
12 Sumatera Utara	11,94	15,69	13,67
13 Sumatera Barat	10,25	15,76	13,18
14 Riau	11,34	16,48	14,58
15 Jambi	11,57	12,07	11,91
16 Sumatera Selatan	13,04	22,73	19,23
17 Bengkulu	21,32	25,51	24,28
18 Lampung	24,54	31,77	29,65
19 Kep. Bangka Bellitung	16,30	21,55	18,44
21 Kepulauan Riau	6,80	17,22	8,28
31 DKI Jakarta	6,17	-	6,17
32 Jawa Barat	20,93	28,71	23,05
33 Jawa Tengah	28,41	38,12	33,31
34 DI Yogyakarta	31,64	49,34	37,60
35 Jawa Timur	23,67	35,12	29,21
36 Banten	11,99	23,74	16,06
51 Bali	12,45	15,93	13,70
52 Nusa Tenggara Barat	30,28	37,57	33,96
53 Nusa Tenggara Timur	10,31	33,18	28,13
61 Kalimantan Barat	12,97	19,74	17,18
62 Kalimantan Tengah	10,29	14,39	12,74
63 Kalimantan Selatan	9,30	16,50	13,15
64 Kalimantan Timur	13,62	21,97	16,36
65 Kalimantan Utara	16,19	17,46	16,72
71 Sulawesi Utara	15,19	21,01	18,05
72 Sulawesi Tengah	14,94	23,04	20,67
73 Sulawesi Selatan	15,89	28,86	23,68
74 Sulawesi Tenggara	17,51	28,95	25,30
75 Gorontalo	16,70	40,31	29,72
76 Sulawesi Barat	19,43	26,95	25,41
81 Maluku	12,02	22,64	18,19
82 Maluku Utara	7,44	14,66	12,63
91 Papua Barat	10,99	24,50	18,68
94 Papua	5,35	10,38	8,27
Indonesia	**19,63**	**29,54**	**24,20**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.6 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi dan Tipe daerah, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
11 Aceh	8,35	17,20	14,52
12 Sumatera Utara	5,97	7,52	6,69
13 Sumatera Barat	5,86	7,59	6,78
14 Riau	5,82	9,81	8,33
15 Jambi	6,83	6,69	6,73
16 Sumatera Selatan	7,49	9,86	9,00
17 Bengkulu	7,33	10,75	9,75
18 Lampung	13,89	18,98	17,49
19 Kepl. Bangka Belitung	5,29	7,84	6,33
21 Kepulauan Riau	4,29	10,79	5,21
31 DKI Jakarta	2,83	-	2,83
32 Jawa Barat	8,90	10,94	9,46
33 Jawa Tengah	13,32	18,43	15,90
34 DI Yogyakarta	21,31	27,16	23,28
35 Jawa Timur	10,33	16,29	13,21
36 Banten	5,69	8,83	6,78
51 Bali	6,11	11,01	7,87
52 Nusa Tenggara Barat	21,83	21,14	21,49
53 Nusa Tenggara Timur	7,99	28,99	24,35
61 Kalimantan Barat	8,06	12,92	11,08
62 Kalimantan Tengah	6,67	7,15	6,95
63 Kalimantan Selatan	4,48	6,11	5,35
64 Kalimantan Timur	7,73	8,95	8,13
65 Kalimantan Utara	6,61	13,01	9,30
71 Sulawesi Utara	8,60	11,43	10,00
72 Sulawesi Tengah	10,52	12,91	12,21
73 Sulawesi Selatan	6,45	13,10	10,44
74 Sulawesi Tenggara	12,97	18,58	16,79
75 Gorontalo	15,53	20,65	18,35
76 Sulawesi Barat	12,28	13,59	13,32
81 Maluku	9,58	26,25	19,26
82 Maluku Utara	4,90	12,10	10,07
91 Papua Barat	16,18	13,92	14,89
94 Papua	4,53	7,97	6,53
Indonesia	**9,40**	**14,74**	**11,86**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.7.1 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan KPS/KKS, 2021

Perkotaan

Provinsi	Kepemilikan KPS/KKS			Jumlah
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	4,94	2,90	92,16	100,00
12 Sumatera Utara	5,29	2,28	92,43	100,00
13 Sumatera Barat	5,11	3,09	91,81	100,00
14 Riau	5,86	7,05	87,09	100,00
15 Jambi	3,40	1,99	94,61	100,00
16 Sumatera Selatan	5,73	4,11	90,16	100,00
17 Bengkulu	6,37	4,28	89,36	100,00
18 Lampung	8,16	3,56	88,27	100,00
19 Kepl. Bangka Belitung	8,25	11,47	80,27	100,00
21 Kepulauan Riau	3,23	4,09	92,69	100,00
31 DKI Jakarta	3,06	4,70	92,24	100,00
32 Jawa Barat	8,68	4,38	86,94	100,00
33 Jawa Tengah	12,41	4,89	82,69	100,00
34 DI Yogyakarta	15,48	8,53	75,98	100,00
35 Jawa Timur	10,21	4,43	85,36	100,00
36 Banten	4,35	1,78	93,87	100,00
51 Bali	6,79	1,20	92,01	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	17,07	8,00	74,93	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	5,95	2,34	91,71	100,00
61 Kalimantan Barat	7,72	2,34	89,94	100,00
62 Kalimantan Tengah	2,59	3,59	93,81	100,00
63 Kalimantan Selatan	3,94	3,36	92,70	100,00
64 Kalimantan Timur	4,23	2,34	93,43	100,00
65 Kalimantan Utara	10,18	0,82	89,00	100,00
71 Sulawesi Utara	6,51	2,12	91,36	100,00
72 Sulawesi Tengah	5,85	4,62	89,53	100,00
73 Sulawesi Selatan	6,62	2,73	90,64	100,00
74 Sulawesi Tenggara	11,12	10,31	78,57	100,00
75 Gorontalo	9,28	4,13	86,59	100,00
76 Sulawesi Barat	5,21	3,20	91,59	100,00
81 Maluku	4,92	2,14	92,95	100,00
82 Maluku Utara	3,41	1,33	95,26	100,00
91 Papua Barat	6,51	4,99	88,50	100,00
94 Papua	1,83	2,85	95,31	100,00
Indonesia	**8,50**	**4,21**	**87,29**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan KPS/KKS, 2021

Perdesaan

Provinsi	Kepemilikan KPS/KKS			Jumlah
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	9,00	4,44	86,56	100,00
12 Sumatera Utara	7,08	2,90	90,02	100,00
13 Sumatera Barat	6,75	1,82	91,43	100,00
14 Riau	8,63	10,71	80,66	100,00
15 Jambi	4,05	2,06	93,90	100,00
16 Sumatera Selatan	9,78	3,28	86,94	100,00
17 Bengkulu	8,28	3,43	88,30	100,00
18 Lampung	12,32	4,63	83,05	100,00
19 Kepl. Bangka Belitung	18,61	6,66	74,73	100,00
21 Kepulauan Riau	10,81	1,61	87,58	100,00
31 DKI Jakarta	-	-	-	-
32 Jawa Barat	10,46	5,87	83,67	100,00
33 Jawa Tengah	16,23	5,87	77,90	100,00
34 DI Yogyakarta	31,36	11,32	57,32	100,00
35 Jawa Timur	13,85	6,92	79,23	100,00
36 Banten	7,56	5,15	87,29	100,00
51 Bali	12,24	2,10	85,66	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	15,05	5,76	79,19	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	16,62	6,50	76,88	100,00
61 Kalimantan Barat	8,61	3,42	87,97	100,00
62 Kalimantan Tengah	4,27	0,99	94,75	100,00
63 Kalimantan Selatan	8,38	3,21	88,41	100,00
64 Kalimantan Timur	11,49	2,38	86,13	100,00
65 Kalimantan Utara	8,41	1,66	89,93	100,00
71 Sulawesi Utara	8,64	3,76	87,60	100,00
72 Sulawesi Tengah	8,99	2,23	88,78	100,00
73 Sulawesi Selatan	10,42	4,76	84,83	100,00
74 Sulawesi Tenggara	19,30	11,11	69,59	100,00
75 Gorontalo	19,68	6,29	74,03	100,00
76 Sulawesi Barat	11,15	4,35	84,49	100,00
81 Maluku	11,08	4,07	84,85	100,00
82 Maluku Utara	4,51	1,88	93,61	100,00
91 Papua Barat	14,34	7,28	78,38	100,00
94 Papua	3,42	4,25	92,33	100,00
Indonesia	**12,28**	**5,42**	**82,31**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.7.3 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan KPS/KKS, 2021

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Kepemilikan KPS/KKS			Jumlah
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	7,77	3,97	88,26	100,00
12 Sumatera Utara	6,12	2,56	91,32	100,00
13 Sumatera Barat	5,98	2,41	91,61	100,00
14 Riau	7,60	9,35	83,05	100,00
15 Jambi	3,84	2,03	94,12	100,00
16 Sumatera Selatan	8,31	3,58	88,11	100,00
17 Bengkulu	7,72	3,68	88,61	100,00
18 Lampung	11,10	4,32	84,58	100,00
19 Kepl. Bangka Belitung	12,48	9,51	78,01	100,00
21 Kepulauan Riau	4,30	3,74	91,96	100,00
31 DKI Jakarta	3,06	4,70	92,24	100,00
32 Jawa Barat	9,16	4,79	86,05	100,00
33 Jawa Tengah	14,34	5,39	80,27	100,00
34 DI Yogyakarta	20,83	9,47	69,70	100,00
35 Jawa Timur	11,97	5,63	82,39	100,00
36 Banten	5,46	2,95	91,59	100,00
51 Bali	8,75	1,52	89,73	100,00
52 Nusa Tenggara Barat	16,05	6,87	77,08	100,00
53 Nusa Tenggara Timur	14,26	5,58	80,16	100,00
61 Kalimantan Barat	8,27	3,01	88,72	100,00
62 Kalimantan Tengah	3,59	2,04	94,37	100,00
63 Kalimantan Selatan	6,31	3,28	90,41	100,00
64 Kalimantan Timur	6,62	2,36	91,02	100,00
65 Kalimantan Utara	9,44	1,17	89,39	100,00
71 Sulawesi Utara	7,56	2,93	89,51	100,00
72 Sulawesi Tengah	8,07	2,93	89,00	100,00
73 Sulawesi Selatan	8,90	3,95	87,15	100,00
74 Sulawesi Tenggara	16,69	10,85	72,46	100,00
75 Gorontalo	15,01	5,32	79,66	100,00
76 Sulawesi Barat	9,94	4,12	85,95	100,00
81 Maluku	8,50	3,26	88,25	100,00
82 Maluku Utara	4,20	1,72	94,07	100,00
91 Papua Barat	10,97	6,29	82,74	100,00
94 Papua	2,75	3,66	93,58	100,00
Indonesia	**10,24**	**4,77**	**84,99**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.8 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	98,88	97,91	98,67	97,81	98,21
12 Sumatera Utara	75,99	60,23	69,99	67,75	68,78
13 Sumatera Barat	76,50	69,96	73,03	73,00	73,01
14 Riau	78,10	58,23	66,58	65,13	65,87
15 Jambi	68,66	50,92	56,79	56,44	56,62
16 Sumatera Selatan	79,88	58,63	66,80	65,72	66,24
17 Bengkulu	77,82	69,45	73,29	70,37	71,86
18 Lampung	87,51	64,76	71,45	71,32	71,39
19 Kep. Bangka Belitung	85,70	78,09	81,47	83,81	82,60
21 Kepulauan Riau	75,24	90,99	78,21	76,68	77,46
31 DKI Jakarta	94,99	-	96,00	94,06	94,99
32 Jawa Barat	70,71	53,93	66,52	65,67	66,08
33 Jawa Tengah	77,21	67,52	71,71	72,81	72,30
34 DI Yogyakarta	88,32	86,96	88,13	87,63	87,86
35 Jawa Timur	71,22	61,35	66,75	66,10	66,40
36 Banten	73,22	51,13	67,68	63,55	65,62
51 Bali	88,89	83,67	88,03	86,16	87,05
52 Nusa Tenggara Barat	73,35	60,01	68,48	65,01	66,58
53 Nusa Tenggara Timur	85,33	75,19	80,06	75,09	77,41
61 Kalimantan Barat	82,30	59,16	68,07	67,51	67,79
62 Kalimantan Tengah	82,28	66,10	73,63	71,33	72,56
63 Kalimantan Selatan	90,18	67,30	77,86	77,92	77,89
64 Kalimantan Timur	82,45	74,65	80,92	78,75	79,89
65 Kalimantan Utara	80,75	87,79	84,91	82,31	83,73
71 Sulawesi Utara	86,76	81,93	83,08	85,60	84,38
72 Sulawesi Tengah	82,84	73,36	77,30	74,92	76,10
73 Sulawesi Selatan	85,03	78,12	81,39	80,48	80,88
74 Sulawesi Tenggara	83,09	80,75	83,69	79,48	81,49
75 Gorontalo	85,86	79,27	83,62	81,06	82,25
76 Sulawesi Barat	90,89	88,36	87,48	90,14	88,90
81 Maluku	73,19	64,19	69,55	66,32	67,89
82 Maluku Utara	82,74	73,33	76,31	75,45	75,88
91 Papua Barat	83,23	89,11	86,82	86,26	86,56
94 Papua	82,75	89,96	88,25	85,19	86,91
Indonesia	**77,10**	**65,75**	**72,27**	**71,47**	**71,85**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.9 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2021

Provinsi	Jenis Jaminan Kesehatan				
	PBI	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Kesehatan	Fasilitas Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	85,45	11,96	8,36	0,05	0,07
12 Sumatera Utara	38,25	25,76	5,93	0,63	2,25
13 Sumatera Barat	39,95	26,39	10,50	0,14	0,70
14 Riau	33,46	22,96	17,96	0,06	1,03
15 Jambi	28,77	26,12	1,12	0,18	0,65
16 Sumatera Selatan	32,37	21,68	12,80	0,33	0,77
17 Bengkulu	46,90	24,32	0,72	0,22	0,24
18 Lampung	47,94	16,54	9,61	0,32	0,91
19 Kep. Bangka Belitung	46,29	34,94	0,38	0,71	0,37
21 Kepulauan Riau	38,63	36,04	3,72	0,92	0,83
31 DKI Jakarta	55,51	36,85	0,01	3,37	1,88
32 Jawa Barat	41,96	20,20	4,54	0,30	1,17
33 Jawa Tengah	50,55	15,87	10,19	0,14	0,44
34 DI Yogyakarta	65,68	21,23	0,06	0,26	0,81
35 Jawa Timur	41,79	15,09	13,89	0,42	0,90
36 Banten	40,12	20,31	10,68	1,06	1,33
51 Bali	49,07	28,14	13,80	1,40	0,35
52 Nusa Tenggara Barat	49,67	14,52	12,56	0,20	0,21
53 Nusa Tenggara Timur	57,13	14,61	7,59	0,01	0,08
61 Kalimantan Barat	39,09	18,67	19,43	0,51	0,95
62 Kalimantan Tengah	49,16	20,92	2,71	0,69	0,51
63 Kalimantan Selatan	47,22	29,19	1,17	0,03	0,51
64 Kalimantan Timur	36,17	40,76	0,55	1,12	2,17
65 Kalimantan Utara	53,36	29,86	0,00	0,00	0,51
71 Sulawesi Utara	50,01	30,65	2,90	0,11	1,64
72 Sulawesi Tengah	54,28	20,65	1,10	0,07	0,18
73 Sulawesi Selatan	56,73	22,72	1,41	0,22	0,43
74 Sulawesi Tenggara	59,08	17,52	4,92	0,30	0,13
75 Gorontalo	67,29	14,24	0,72	0,00	0,53
76 Sulawesi Barat	60,04	18,48	12,49	0,09	0,05
81 Maluku	43,18	19,68	5,63	0,14	0,13
82 Maluku Utara	37,69	15,09	27,67	0,05	0,47
91 Papua Barat	68,79	10,01	9,84	0,13	0,36
94 Papua	45,25	12,28	35,42	0,19	0,48
Indonesia	**46,02**	**19,86**	**8,69**	**0,45**	**0,88**

Keterangan: Nilai 0,00 data dapat diabaikan
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.10 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2021

Provinsi	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
11 Aceh	28,46	6,67	13,27
12 Sumatera Utara	15,57	5,92	11,12
13 Sumatera Barat	25,78	7,69	16,14
14 Riau	21,70	3,88	10,49
15 Jambi	18,49	4,58	9,00
16 Sumatera Selatan	23,92	3,69	11,00
17 Bengkulu	22,36	5,14	10,18
18 Lampung	16,02	3,45	7,13
19 Kepl. Bangka Belitung	12,07	4,12	8,83
21 Kepulauan Riau	18,22	6,74	16,59
31 DKI Jakarta	21,62	-	21,62
32 Jawa Barat	12,86	5,71	10,92
33 Jawa Tengah	15,62	5,34	10,43
34 DI Yogyakarta	24,29	25,55	24,72
35 Jawa Timur	12,61	4,07	8,47
36 Banten	14,61	5,32	11,39
51 Bali	16,55	7,96	13,46
52 Nusa Tenggara Barat	15,95	3,52	9,68
53 Nusa Tenggara Timur	37,56	7,96	14,51
61 Kalimantan Barat	17,34	6,32	10,49
62 Kalimantan Tengah	27,24	5,88	14,48
63 Kalimantan Selatan	24,89	8,18	15,96
64 Kalimantan Timur	21,94	6,09	16,72
65 Kalimantan Utara	23,78	13,97	19,66
71 Sulawesi Utara	19,13	10,25	14,76
72 Sulawesi Tengah	22,35	6,91	11,42
73 Sulawesi Selatan	25,77	8,97	15,68
74 Sulawesi Tenggara	25,80	9,43	14,65
75 Gorontalo	26,11	6,06	15,05
76 Sulawesi Barat	20,29	7,17	9,85
81 Maluku	31,41	8,33	18,01
82 Maluku Utara	28,26	6,38	12,56
91 Papua Barat	25,52	9,35	16,31
94 Papua	36,19	2,92	16,90
Indonesia	**16,58**	**5,81**	**11,62**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.11 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2021

Provinsi	Jenis Jaminan Sosial				
	Jaminan Pensiun	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Asuransi Kematian	Pesangon PHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	12,29	9,20	8,23	8,29	2,39
12 Sumatera Utara	9,83	5,38	4,07	4,70	1,30
13 Sumatera Barat	14,55	9,09	8,11	9,54	1,50
14 Riau	8,01	3,77	5,24	3,44	2,24
15 Jambi	7,27	4,34	3,85	3,79	1,36
16 Sumatera Selatan	9,25	5,86	6,00	6,08	2,47
17 Bengkulu	9,06	6,04	5,42	5,97	1,29
18 Lampung	6,40	2,52	2,72	2,61	0,69
19 Kepl. Bangka Belitung	6,89	4,83	5,49	4,51	1,60
21 Kepulauan Riau	9,74	11,99	11,70	10,94	1,82
31 DKI Jakarta	15,44	10,39	9,97	8,75	3,53
32 Jawa Barat	8,21	4,94	4,67	4,39	1,79
33 Jawa Tengah	7,31	4,56	4,70	4,98	1,79
34 DI Yogyakarta	14,48	9,74	9,10	16,15	2,69
35 Jawa Timur	5,39	3,14	2,77	4,31	1,17
36 Banten	6,02	6,16	5,63	5,68	2,98
51 Bali	11,27	6,45	6,29	5,62	1,96
52 Nusa Tenggara Barat	8,06	4,86	4,12	5,53	1,88
53 Nusa Tenggara Timur	12,91	7,27	5,84	7,33	1,64
61 Kalimantan Barat	8,71	5,26	5,24	5,88	1,77
62 Kalimantan Tengah	11,82	7,03	6,04	6,98	2,34
63 Kalimantan Selatan	14,01	8,42	8,06	8,95	1,49
64 Kalimantan Timur	11,31	9,06	10,06	9,27	4,53
65 Kalimantan Utara	13,14	11,98	13,58	10,44	5,36
71 Sulawesi Utara	12,84	5,99	5,58	5,61	1,05
72 Sulawesi Tengah	10,20	7,75	6,55	7,59	1,74
73 Sulawesi Selatan	12,49	7,69	6,72	8,51	2,01
74 Sulawesi Tenggara	13,63	9,81	8,74	9,51	1,75
75 Gorontalo	11,60	8,42	8,41	11,03	0,27
76 Sulawesi Barat	9,59	6,00	4,70	6,00	0,58
81 Maluku	17,07	6,40	5,45	5,74	1,18
82 Maluku Utara	10,97	8,39	8,26	8,78	3,30
91 Papua Barat	14,70	8,37	8,08	7,84	2,13
94 Papua	16,08	5,30	3,72	4,21	1,08
Indonesia	**8,70**	**5,39**	**5,05**	**5,64**	**1,78**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.12 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima BPNT Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	28,46	2,09	7,33	24,36	32,56	3,21	3.189
12 Sumatera Utara	13,67	1,61	11,81	10,50	16,84	9,69	5.569
13 Sumatera Barat	13,18	1,47	11,15	10,30	16,07	3,35	3.747
14 Riau	14,58	1,48	10,15	11,67	17,48	2,62	1.633
15 Jambi	11,91	1,78	14,92	8,43	15,40	3,38	1.653
16 Sumatera Selatan	19,23	2,53	13,14	14,27	24,19	10,32	2.781
17 Bengkulu	24,28	1,97	8,11	20,42	28,15	1,29	1.398
18 Lampung	29,65	1,59	5,38	26,52	32,78	3,41	2.961
19 Kepl. Bangka Belitung	18,44	1,93	10,45	14,66	22,23	1,07	917
21 Kepulauan Riau	8,28	1,66	20,04	5,02	11,53	1,56	916
31 DKI Jakarta	6,17	1,51	24,45	3,21	9,13	12,43	1.392
32 Jawa Barat	23,05	1,48	6,44	20,13	25,96	20,44	7.047
33 Jawa Tengah	33,31	1,58	4,74	30,21	36,41	17,64	10.899
34 DI Yogyakarta	37,60	3,93	10,46	29,88	45,32	12,39	1.623
35 Jawa Timur	29,21	1,52	5,19	26,23	32,19	20,91	12.150
36 Banten	16,06	2,29	14,24	11,57	20,54	13,84	1.591
51 Bali	13,70	2,31	16,83	9,17	18,23	7,41	2.285
52 Nusa Tenggara Barat	33,96	2,44	7,19	29,17	38,75	4,29	1.584
53 Nusa Tenggara Timur	28,13	1,87	6,64	24,46	31,79	2,88	4.054
61 Kalimantan Barat	17,18	2,02	11,76	13,21	21,14	4,27	2.222
62 Kalimantan Tengah	12,74	1,71	13,39	9,39	16,09	1,79	1.503
63 Kalimantan Selatan	13,15	1,56	11,85	10,09	16,21	3,02	1.894
64 Kalimantan Timur	16,36	2,55	15,56	11,37	21,36	4,72	1.262
65 Kalimantan Utara	16,72	2,26	13,53	12,28	21,16	0,69	545
71 Sulawesi Utara	18,05	1,90	10,55	14,31	21,79	2,45	2.835
72 Sulawesi Tengah	20,67	2,10	10,15	16,55	24,79	2,44	1.850
73 Sulawesi Selatan	23,68	2,24	9,46	19,29	28,08	9,01	5.090
74 Sulawesi Tenggara	25,30	2,39	9,43	20,62	29,98	2,21	2.274
75 Gorontalo	29,72	4,13	13,91	21,61	37,84	2,99	831
76 Sulawesi Barat	25,41	5,61	22,06	14,41	36,41	6,09	902
81 Maluku	18,19	2,53	13,90	13,23	23,15	2,11	1.641
82 Maluku Utara	12,63	1,47	11,62	9,75	15,51	0,62	1.228
91 Papua Barat	18,68	3,61	19,33	11,59	25,77	1,63	1.096
94 Papua	8,27	2,04	24,66	4,27	12,27	3,27	1.620
Indonesia	**24,20**	**0,57**	**2,37**	**23,07**	**25,33**	**17,01**	**94.182**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.13 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	14,52	1,21	8,32	12,15	16,89	1,77	3.189
12 Sumatera Utara	6,69	0,64	9,59	5,43	7,95	2,89	5.569
13 Sumatera Barat	6,78	0,90	13,31	5,01	8,56	2,29	3.747
14 Riau	8,33	1,41	16,91	5,57	11,09	3,88	1.633
15 Jambi	6,73	0,78	11,58	5,20	8,26	1,09	1.653
16 Sumatera Selatan	9,00	0,90	10,03	7,23	10,77	2,50	2.781
17 Bengkulu	9,75	1,07	10,94	7,65	11,84	0,79	1.398
18 Lampung	17,49	1,08	6,19	15,36	19,61	2,27	2.961
19 Kepl. Bangka Belitung	6,33	1,79	28,20	2,83	9,84	2,34	917
21 Kepulauan Riau	5,21	0,85	16,35	3,54	6,89	0,63	916
31 DKI Jakarta	2,83	0,59	20,79	1,67	3,98	3,98	1.392
32 Jawa Barat	9,46	0,69	7,29	8,10	10,81	9,14	7.047
33 Jawa Tengah	15,90	0,77	4,85	14,39	17,41	6,98	10.899
34 DI Yogyakarta	23,28	2,24	9,61	18,89	27,67	5,26	1.623
35 Jawa Timur	13,21	0,66	4,96	11,93	14,50	7,04	12.150
36 Banten	6,78	0,94	13,86	4,94	8,62	4,98	1.591
51 Bali	7,87	1,41	17,89	5,11	10,63	4,51	2.285
52 Nusa Tenggara Barat	21,49	2,74	12,75	16,11	26,86	7,17	1.584
53 Nusa Tenggara Timur	24,35	1,47	6,03	21,47	27,23	1,95	4.054
61 Kalimantan Barat	11,08	0,98	8,84	9,16	13,00	1,45	2.222
62 Kalimantan Tengah	6,95	1,03	14,74	4,94	8,97	1,11	1.503
63 Kalimantan Selatan	5,35	0,57	10,68	4,23	6,47	0,92	1.894
64 Kalimantan Timur	8,13	1,60	19,66	4,99	11,27	3,41	1.262
65 Kalimantan Utara	9,30	2,01	21,66	5,34	13,25	0,90	545
71 Sulawesi Utara	10,00	1,34	13,41	7,37	12,63	1,99	2.835
72 Sulawesi Tengah	12,21	1,44	11,76	9,39	15,03	1,75	1.850
73 Sulawesi Selatan	10,44	1,04	9,91	8,41	12,47	3,72	5.090
74 Sulawesi Tenggara	16,79	1,50	8,96	13,83	19,74	1,19	2.274
75 Gorontalo	18,35	2,76	15,05	12,93	23,77	1,86	831
76 Sulawesi Barat	13,32	2,24	16,84	8,92	17,72	1,60	902
81 Maluku	19,26	4,15	21,56	11,11	27,41	5,44	1.641
82 Maluku Utara	10,07	1,23	12,18	7,66	12,48	0,53	1.228
91 Papua Barat	14,89	2,71	18,21	9,57	20,22	1,10	1.096
94 Papua	6,53	1,41	21,58	3,76	9,29	1,94	1.620
Indonesia	**11,86**	**0,30**	**2,49**	**11,28**	**12,44**	**7,92**	**94.182**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.14 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki KPS/KKS Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	11,74	1,28	10,89	9,23	14,25	2,37	3.189
12 Sumatera Utara	8,68	0,95	10,97	6,81	10,55	5,02	5.569
13 Sumatera Barat	8,39	0,98	11,69	6,47	10,32	2,22	3.747
14 Riau	16,95	1,83	10,78	13,37	20,54	3,54	1.633
15 Jambi	5,88	0,79	13,48	4,32	7,43	1,27	1.653
16 Sumatera Selatan	11,89	1,34	11,28	9,26	14,53	4,31	2.781
17 Bengkulu	11,39	1,70	14,91	8,06	14,73	1,75	1.398
18 Lampung	15,42	1,04	6,76	13,37	17,47	2,34	2.961
19 Kepl. Bangka Belitung	21,99	2,11	9,59	17,85	26,13	1,13	917
21 Kepulauan Riau	8,04	1,17	14,62	5,73	10,34	0,80	916
31 DKI Jakarta	7,76	1,95	25,10	3,94	11,58	16,75	1.392
32 Jawa Barat	13,95	0,96	6,86	12,07	15,82	12,58	7.047
33 Jawa Tengah	19,73	1,18	5,98	17,41	22,04	13,78	10.899
34 DI Yogyakarta	30,30	3,92	12,93	22,61	37,99	13,66	1.623
35 Jawa Timur	17,61	0,99	5,64	15,66	19,56	12,79	12.150
36 Banten	8,41	1,62	19,24	5,23	11,58	12,12	1.591
51 Bali	10,27	1,69	16,49	6,95	13,60	5,13	2.285
52 Nusa Tenggara Barat	22,92	3,00	13,07	17,04	28,80	8,19	1.584
53 Nusa Tenggara Timur	19,84	1,61	8,14	16,67	23,01	2,73	4.054
61 Kalimantan Barat	11,28	1,21	10,76	8,90	13,67	2,20	2.222
62 Kalimantan Tengah	5,63	0,89	15,86	3,88	7,38	1,03	1.503
63 Kalimantan Selatan	9,59	1,15	11,95	7,34	11,85	2,15	1.894
64 Kalimantan Timur	8,98	1,45	16,16	6,13	11,82	2,57	1.262
65 Kalimantan Utara	10,61	2,98	28,06	4,77	16,45	1,74	545
71 Sulawesi Utara	10,49	1,02	9,72	8,49	12,49	1,10	2.835
72 Sulawesi Tengah	11,00	1,61	14,66	7,84	14,16	2,42	1.850
73 Sulawesi Selatan	12,85	0,94	7,29	11,01	14,69	2,54	5.090
74 Sulawesi Tenggara	27,54	2,78	10,10	22,09	33,00	2,84	2.274
75 Gorontalo	20,34	3,45	16,99	13,55	27,12	2,69	831
76 Sulawesi Barat	14,05	3,89	27,66	6,42	21,68	4,59	902
81 Maluku	11,75	1,28	10,88	9,24	14,26	0,77	1.641
82 Maluku Utara	5,93	0,99	16,72	3,98	7,87	0,56	1.228
91 Papua Barat	17,26	2,74	15,86	11,89	22,63	1,00	1.096
94 Papua	6,42	1,23	19,24	3,99	8,84	1,52	1.620
Indonesia	**15,01**	**0,40**	**2,68**	**14,22**	**15,80**	**12,00**	**94.182**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.15 Nilai *Sampling Error* Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	13,27	2,30	17,35	8,75	17,78	6,91	3.189
12 Sumatera Utara	11,12	1,10	9,94	8,95	13,29	5,42	5.569
13 Sumatera Barat	16,14	3,70	22,94	8,87	23,40	17,97	3.747
14 Riau	10,49	2,79	26,63	5,01	15,98	12,42	1.633
15 Jambi	9,00	2,44	27,17	4,20	13,79	8,18	1.653
16 Sumatera Selatan	11,00	3,23	29,35	4,66	17,34	26,72	2.781
17 Bengkulu	10,18	2,79	27,39	4,71	15,66	5,21	1.398
18 Lampung	7,13	1,26	17,71	4,65	9,61	6,75	2.961
19 Kepl. Bangka Belitung	8,83	2,20	24,95	4,50	13,15	2,62	917
21 Kepulauan Riau	16,59	2,45	14,75	11,79	21,39	1,86	916
31 DKI Jakarta	21,62	4,91	22,69	11,99	31,25	44,89	1.392
32 Jawa Barat	10,92	1,20	11,04	8,55	13,28	24,60	7.047
33 Jawa Tengah	10,43	0,95	9,10	8,57	12,29	15,13	10.899
34 DI Yogyakarta	24,72	2,28	9,22	20,24	29,19	5,25	1.623
35 Jawa Timur	8,47	1,02	12,02	6,48	10,47	25,13	12.150
36 Banten	11,39	2,09	18,31	7,30	15,49	15,38	1.591
51 Bali	13,46	1,62	12,04	10,28	16,64	3,72	2.285
52 Nusa Tenggara Barat	9,68	2,05	21,19	5,65	13,70	7,75	1.584
53 Nusa Tenggara Timur	14,51	1,90	13,10	10,78	18,24	4,86	4.054
61 Kalimantan Barat	10,49	1,47	14,01	7,61	13,38	3,43	2.222
62 Kalimantan Tengah	14,48	3,28	22,61	8,06	20,91	5,94	1.503
63 Kalimantan Selatan	15,96	1,80	11,28	12,42	19,49	3,43	1.894
64 Kalimantan Timur	16,72	3,42	20,45	10,01	23,44	8,37	1.262
65 Kalimantan Utara	19,66	3,35	17,05	13,08	26,24	1,33	545
71 Sulawesi Utara	14,76	1,10	7,47	12,60	16,93	0,97	2.835
72 Sulawesi Tengah	11,42	2,60	22,78	6,32	16,53	6,09	1.850
73 Sulawesi Selatan	15,68	2,06	13,14	11,64	19,73	10,42	5.090
74 Sulawesi Tenggara	14,65	3,15	21,53	8,46	20,84	5,84	2.274
75 Gorontalo	15,05	4,18	27,77	6,85	23,25	4,99	831
76 Sulawesi Barat	9,85	2,60	26,41	4,75	14,96	2,80	902
81 Maluku	18,01	5,50	30,54	7,22	28,81	10,05	1.641
82 Maluku Utara	12,56	2,82	22,48	7,02	18,10	2,32	1.228
91 Papua Barat	16,31	3,03	18,54	10,38	22,25	1,28	1.096
94 Papua	16,90	4,24	25,10	8,57	25,22	7,65	1.620
Indonesia	**11,62**	**0,45**	**3,85**	**10,74**	**12,50**	**18,45**	**94.182**

Keterangan: Warna kuning berarti perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

Tabel 8.16 Nilai *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	*Standard Error*	*Relative Standard Error*	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampel	Jumlah Unit Observasi
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Aceh	98,21	0,40	0,41	97,42	99,00	1,72	3.940
12 Sumatera Utara	68,78	3,39	4,93	62,12	75,44	30,36	7.113
13 Sumatera Barat	73,01	3,80	5,20	65,56	80,47	16,91	4.978
14 Riau	65,87	5,93	9,01	54,23	77,52	30,01	2.065
15 Jambi	56,62	5,12	9,04	46,57	66,67	15,55	2.126
16 Sumatera Selatan	66,24	5,38	8,13	55,68	76,81	42,52	3.620
17 Bengkulu	71,86	3,38	4,71	65,22	78,49	4,58	1.826
18 Lampung	71,39	3,55	4,97	64,42	78,36	22,70	3.903
19 Kep. Bangka Belitung	82,60	4,18	5,06	74,41	90,80	6,87	1.193
21 Kepulauan Riau	77,46	3,50	4,52	70,58	84,34	3,85	1.170
31 DKI Jakarta	94,99	0,88	0,93	93,26	96,71	6,68	1.794
32 Jawa Barat	66,08	2,22	3,36	61,72	70,45	47,02	9.183
33 Jawa Tengah	72,30	1,86	2,58	68,64	75,96	35,95	14.432
34 DI Yogyakarta	87,86	1,29	1,46	85,33	90,38	3,99	2.258
35 Jawa Timur	66,40	2,75	4,14	61,00	71,79	82,76	15.797
36 Banten	65,62	5,62	8,56	54,59	76,64	64,56	2.023
51 Bali	87,05	2,66	3,05	81,83	92,26	14,84	3.320
52 Nusa Tenggara Barat	66,58	4,08	6,13	58,56	74,60	15,64	2.064
53 Nusa Tenggara Timur	77,41	2,45	3,17	72,60	82,22	7,51	5.403
61 Kalimantan Barat	67,79	5,41	7,98	57,16	78,41	25,41	2.828
62 Kalimantan Tengah	72,56	2,29	3,16	68,06	77,06	2,30	1.898
63 Kalimantan Selatan	77,89	4,42	5,68	69,21	86,58	20,12	2.305
64 Kalimantan Timur	79,89	3,35	4,19	73,32	86,46	8,95	1.608
65 Kalimantan Utara	83,73	2,42	2,89	78,98	88,48	1,04	703
71 Sulawesi Utara	84,38	1,46	1,73	81,52	87,25	2,18	3.840
72 Sulawesi Tengah	76,10	2,29	3,00	71,61	80,58	3,35	2.372
73 Sulawesi Selatan	80,88	1,94	2,40	77,07	84,70	10,29	6.626
74 Sulawesi Tenggara	81,49	2,70	3,31	76,19	86,79	4,46	2.881
75 Gorontalo	82,25	1,64	2,00	79,03	85,47	0,87	1.059
76 Sulawesi Barat	88,90	3,84	4,32	81,37	96,44	6,93	1.156
81 Maluku	67,89	4,64	6,83	58,79	76,99	6,36	2.169
82 Maluku Utara	75,88	6,86	9,04	62,41	89,35	10,62	1.585
91 Papua Barat	86,56	1,99	2,30	82,66	90,46	0,83	1.388
94 Papua	86,91	2,62	3,01	81,77	92,05	4,68	2.068
Indonesia	**71,85**	**0,86**	**1,20**	**70,16**	**73,55**	**45,49**	**122.694**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

PROGRAM KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pelayanan sosial lanjut usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.

(Permensos Nomor 19 Tahun 2012)

ATENSI dan **SERASI** adalah program pelayanan dan pemberdayaan lansia melalui balai yang dapat melakukan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga.

ATENSI : Asistensi Rehabilitasi Sosial

SERASI : Sentral Layanan Sosial

https://www.bps.go.id

Bab 9 Program Kesejahteraan Lanjut Usia

Fenomena penuaan penduduk (*ageing population*) dan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dapat membawa implikasi yang luas dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Lansia sebagai kelompok penduduk yang paling rentan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Risiko sosial ekonomi yang berpotensi dihadapi lansia antara lain berupa masalah kesehatan baik fisik maupun spiritual, masalah kemandirian keuangan dan produktivitas, masalah tempat tinggal dan partisipasi sosial, hingga masalah kematian. Penanganan masalah kesejahteraan lanjut usia yang tepat akan menguntungkan bagi ekonomi negara, karena lansia potensial yang produktif dapat mendukung dan menguatkan kehidupan bangsa. Pada bagian ini, akan dibahas berbagai kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan lanjut usia yang diambil pemerintah, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan lansia menjadi lebih baik.

https://www.bps.go.id

9.1. Kebijakan Umum Kesejahteraan Lanjut Usia

Secara umum, kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan lanjut usia diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia diarahkan agar penduduk lanjut usia tetap dapat diberdayakan, sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan

masyarakat untuk memberdayakan penduduk lanjut usia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditujukan kepada penduduk lanjut usia potensial dan tidak potensial. Lansia potensial adalah penduduk lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Lansia tidak potensial adalah penduduk lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penduduk lanjut usia meliputi:

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
g. perlindungan sosial; dan
h. bantuan sosial.

https://www.bps.go.id

Prinsip dari kebijakan umum kesejahteraan lanjut usia adalah bahwa lansia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara mengupayakan pemberdayaan dan apresiasi kepada penduduk lanjut usia sesuai dengan kemampuan dan produktivitas lansia. Pada kondisi ini, negara bertindak sebagai fasilitator dalam penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Sementara bagi lansia yang sudah tidak berdaya, negara memberikan perlindungan dan bantuan sosial agar lansia mampu meningkatkan atau menjaga kesejahteraannya. Langkah yang paling penting di antaranya memberikan fasilitas yang memudahkan aksesibilitas bagi lansia, khususnya di area publik. Langkah penyediaan kemudahan akses ini didasari oleh peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan payung hukum yang jelas terhadap kegiatan pemberdayaan dan perlindungan sosial lansia.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pemerintah bertugas untuk

mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi sosial, maupun organisasi kemasyarakatan. Kebijakan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.

9.2. Program Kesejahteraan Lanjut Usia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan arah kebijakan kelanjutusiaan melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial bagi lansia, yang didalamnya mencakup pemenuhan hak dasar dan inklusivitas. Selain itu, SDGs target 1.3 menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua (*no one left behind*), yang salah satu sasarannya adalah penduduk lansia. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia menyebutkan bahwa pelayanan sosial lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Secara garis besar, program pelayanan dan pemberdayaan lanjut usia adalah sebagai berikut:

https://www.bps.go.id

1. Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Sentral Layanan Sosial (SERASI).
   Program ATENSI dan SERASI merupakan reformasi dari fungsi balai yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial, sehingga balai dapat melakukan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga. Program ATENSI dan SERASI bukanlah panti, melainkan tempat rehabilitasi. Artinya, lansia yang dititipkan akan menjalani terapi agar lebih berdaya lagi, misalnya terapi keterampilan. Setelah mengikuti program ATENSI dan SERASI, mereka akan dikembalikan kepada keluarganya sehingga tidak tinggal di balai secara terus-menerus. Dalam melaksanakan ATENSI, Kementerian Sosial bekerja sama dengan komunitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Pada dasarnya, program ATENSI dan SERASI tidak hanya ditujukan kepada lansia. Karena kedua program tersebut menerapkan pendekatan *life cycle*, yang diperuntukan

juga kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk ibu hamil maupun bayi.

2. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).
   Program ASLUT adalah bagian rehabilitasi sosial untuk membantu lansia terlantar atau lansia non potensial, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Target sasaran program ASLUT mendapatkan bantuan senilai Rp 2.400.000,- per tahun per lansia dari pemerintah pusat. Beberapa pemerintah daerah memiliki program untuk menambah besaran bantuan untuk lansia tersebut dengan jumlah yang berbeda-beda.

3. Pendampingan Sosial Lanjut Usia Tidak Potensial (*Home Care*).
   Pelaksanaan layanan *home care* dilakukan oleh petugas kesehatan, terutama bagi lansia risiko tinggi, lansia yang tinggal sendirian, serta lansia dengan ketergantungan sedang dan berat. *Home care* dilakukan melalui kunjungan rumah, namun dengan tetap mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Layanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan individu lansia, baik terkait tindakan perawatan jangka panjang, pendampingan sosial, maupun edukasi tentang upaya pencegahan penularan COVID-19 bagi lansia dan pendamping lansia. Secara khusus, tujuan yang diharapkan dari Pendampingan dan Perawatan lanjut usia di rumah (Stanhope dan Lancaster, 1996) adalah:
   a. Meningkatnya kemampuan lansia untuk menyesuaikan diri terhadap proses perubahan dirinya secara fisik, mental, dan sosial;
   b. Terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak lansia agar mampu berperan dan berfungsi di masyarakat secara wajar;
   c. Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam pendampingan dan perawatan lansia di rumah; dan
   d. Terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram bagi lansia baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya.

4. Dukungan Keluarga (*Family Support*).
   Program *family support* adalah setiap upaya yang ditujukan kepada lansia potensial guna memperkuat keberfungsian fisik, psikologis, sosial, dan spiritual maupun ekonomi dengan dukungan dan penyertaan keluarga lansia. Tujuan program ini adalah untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada

https://www.bps.go.id

lansia potensial agar mereka terlindungi dari risiko sosial, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraannya.

5. Asistensi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU).
   Program asistensi sosial lanjut usia melalui LKS-LU adalah serangkaian kegiatan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap lansia terlantar dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Asistensi sosial lanjut usia melalui LKS LU diberikan dalam bentuk uang melalui transfer langsung ke rekening LKS LU.

6. Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Progres LU).
   Progres LU adalah upaya yang bertujuan untuk membantu lansia dalam pemulihan dan pengembangan fungsi sosialnya. Progres LU terdiri dari:
   a. Bantu LU (Bantuan Bertujuan Lanjut Usia), berupa bantuan sosial non tunai sebesar Rp. 200.000 per orang per bulan;
   b. Perawatan Sosial Dalam Keluarga/Balai, berupa bantuan sosial sebesar Rp. 1.200.000 per orang / tahun melalui LKS LU;
   c. Dukungan Keluarga yang mengurusi lanjut usia, berupa bantuan sosial non tunai sebesar Rp. 3.000.000 per orang per tahun; dan
   d. Terapi, berupa bantuan sosial sebesar Rp. 1.350.000 per orang per tahun melalui LKS LU.

7. Pendamping Sosial Profesional Lanjut Usia.
   Program pendampingan sosial profesional lansia merupakan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat, yang melakukan koordinasi dan pendampingan pada semua program rehabilitasi sosial lanjut usia di daerah (provinsi, kabupaten/Kota, Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia). Program Pendamping Sosial terdiri dari:
   a. Respon Kasus, berupa penjangkauan kasus dalam rangka asesmen dan intervensi kedaruratan lanjut usia;
   b. Manajemen Kasus, berupa pelaksanaan koordinasi melalui pertemuan antar institusi/ahli terkait permasalahan lanjut usia;
   c. Honor, berupa pembayaran imbalan kepada Pendamping Sosial Lanjut Usia yang bersifat mengikat sebesar Rp. 2.500.000 per orang per bulan; dan
   d. Tali Asih, berupa pembayaran imbalan kepada Pendamping Sosial Lanjut Usia yang bersifat tidak mengikat, sesuai dengan karakteristik kegiatan.

https://www.bps.go.id

8. Dukungan Teknis Lanjut Usia.

   Kegiatan dukungan teknis lanjut usia dilaksanakan untuk mendukung kegiatan utama program rehabilitasi sosial lanjut usia, yang terdiri dari:

   a. Rapat koordinasi bimbingan terpadu;
   b. Monitoring terpadu, berupa monitoring terintegrasi antar kegiatan; dan
   c. Evaluasi terpadu, berupa evaluasi terintegrasi antar kegiatan.

9. Dukungan Aksesibilitas Lanjut Usia.

   Bantuan Sosial yang diberikan kepada lanjut usia potensial dan non potensial dalam bentuk pemenuhan hak hidup layak dan aksesibilitas, yang terdiri dari:

   a. Pemenuhan hak hidup layak, berupa bantuan sosial bagi lanjut usia yang berada dalam situasi darurat; dan
   b. Bimbingan dan dukungan aksesibilitas, berupa bantuan sosial bagi lanjut usia yang mengalami hambatan mobilitas dan aksesibilitas.

10. Dukungan Kegiatan Lainnya, antara lain:

    a. Pelayanan sosial melalui respon kasus;
    b. Pengembangan kawasan ramah lansia;
    c. *Day Care*;
    d. Penguatan dan pengembangan mitra;
    e. Peningkatan akreditasi lembaga;
    f. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN);
    g. Rekruitmen dan pengembangan pendamping sosial lanjut usia;
    h. Penghargaan kesejahteraan sosial;
    i. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); dan
    j. Monitoring dan Evaluasi program secara terpadu.

Selain dikelola oleh Kementerian Sosial, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia juga dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Program kesejahteraan lanjut usia dari Kementerian Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia, serta meningkatkan pemberdayaan potensi lansia di masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan lansia untuk mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat, atau disingkat dengan Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif). Program yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan lansia SMART di antaranya:

https://www.bps.go.id

1. Pengembangan dan Penguatan Pelayanan dasar, melalui pengembangan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun lansia. Santun lansia dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi upaya promotif, preventif kuratif, rehabilitatif, dan rujukan kepada lansia, yang dilakukan secara proaktif, baik, sopan, serta memberikan kemudahan dan dukungan bagi lansia.
2. Pengembangan Pelayanan Rujukan, melalui pengembangan rumah sakit yang mempunyai pelayanan Geriatri Terpadu.
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan di Posyandu Lansia. Kegiatan dilakukan oleh kader dengan pendampingan dari tenaga kesehatan Puskesmas/sektor terkait. Kegiatan ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif serta deteksi dini.
4. Peningkatan Pemberdayaan Lansia dalam keluarga/masyarakat. Proses pemberian informasi, kemampuan dan motivasi bagi lansia agar mereka berperilaku sehat, berperan dalam mengembangkan perilaku sehat, dan mampu memberi solusi apabila ada permasalahan kesehatan dalam keluarga dan masyarakat.
5. Peningkatan Pelayanan *Home Care* yang terintegrasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. Program ini ditujukan bagi Lansia yang tidak mampu secara fungsional untuk mandiri di rumah namun tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit, atau secara teknis sulit untuk berobat jalan.
6. Pengembangan pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP, *Long Term Care*). PJP dikembangkan dengan memperhatikan aspek budaya yang masih mempertahankan model keluarga besar.
7. Peningkatan pelayanan integrasi dengan lintas program melalui pendekatan siklus hidup. Lansia sehat, aktif dan mandiri dapat dipersiapkan sejak dini sebagai pendekatan siklus hidup. Pelayanan kepada lanjut usia dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan lintas program.
8. Peningkatan kemitraan dengan lembaga sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas), pihak swasta, dan lain-lain. Peningkatan kemitraan disesuaikan dengan bidang dan kemampuan masing-masing dengan prinsip kesetaraan

https://www.bps.go.id

dan keterbukaan. Di tingkat kecamatan dapat dibentuk kelompok kerja pembinaan lanjut usia yang terdiri dari lintas unsur dan lintas sektor, yang bertujuan untuk:

a. Melakukan koordinasi dalam upaya pembinaan lanjut usia;
b. Mendorong terbentuknya kelompok/posyandu lanjut usia di masyarakat;
c. Memantau permasalahan lanjut usia di masyarakat dan memberi masukan kepada pelaksana program sektor terkait;

Sedangkan di tingkat desa/kelurahan dibentuk tim pelaksana pembinaan lansia.

9. Bina Keluarga Lansia (BKL). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia tangguh dalam bentuk penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pencatatan, serta pelaporan. Lansia tangguh adalah upaya agar lansia tetap produktif. Misalnya dengan memperpanjang usia bekerja bagi lansia di sektor formal, baik perusahaan maupun PNS, di atas usia pensiun yang telah ditetapkan (58 tahun dan atau 60 tahun). Selanjutnya, lansia madya yang berusia 70 sampai 80 tahun diharapkan bisa mandiri atau bisa mengurus dirinya sendiri. Baru di usia 80 tahun ke atas, sebagian besar lansia membutuhkan pendampingan melalui pengembangan *home care* atau pengobatan di lingkungan rumah tempat tinggal.

10. Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Lansia. Posyandu Lansia adalah suatu wadah pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk melayani lansia. Proses pembentukan dan pelaksanaan Posyandu Lansia dilakukan oleh masyarakat bersama LSM, lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial, dan lain-lain dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif. Di samping pelayanan kesehatan, posyandu lansia juga memberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, keterampilan, olahraga, seni budaya, dan pelayanan lain yang dibutuhkan para lansia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Posyandu Lansia juga membantu lansia agar dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Santun Lansia. Puskesmas santun lansia adalah puskesmas yang menyediakan ruang khusus untuk melakukan pelayanan bagi kelompok usia lanjut, yang meliputi pelayanan kesehatan

https://www.bps.go.id

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan dilakukan secara pro-aktif, baik, berkualitas, sopan, memberikan kemudahan kepada lansia, memberikan keringanan atau penghapusan biaya pelayanan bagi lansia tidak mampu, serta memberikan berbagai dukungan dan bimbingan kepada lansia dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia pada Era Pandemi COVID-19 difokuskan untuk membentuk adaptasi terhadap tatanan kehidupan baru yang lebih sehat (*new normal*). Lansia merupakan kelompok rentan yang paling berisiko kematian akibat COVID-19, sehingga pencegahan penularan mulai dari tingkat individu, keluarga, dan masyarakat menjadi sangat penting. Pencegahan penularan COVID-19 bagi lansia yang perlu dilakukan oleh pengelola Panti Wreda, dengan cara memberikan pemahaman kepada lansia dan pendampingnya mengenai pandemi COVID-19 secara sabar dan sesuai dengan kemampuan lansia dalam menangkap informasi. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan alat bantu seperti foto, gambar, atau video mengenai pandemi COVID-19, serta memberikan informasi yang berimbang dan menanamkan semangat optimisme dan positif.

https://www.bps.go.id

https://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

https://www.bpe.go.id

https://www.bps.go.id

Daftar Pustaka

Adioetomo, Sri M., Cicih, Lilis, H.M., & Toersilaningsih, S. 2018. "Menjadi Lansia: Antara Anugerah dan Tantangan". Dalam Adioetomo, Sri M. & Pardede, Elda L. Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Alodokter.com. 2021, 22 Februari. Segudang bahaya merokok terhadap tubuh. Diakses pada 15 November 2021, dari https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh

Ashari, R.G. 2018. Memahami Hambatan dan Cara lansia Mempelajari Media Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 15 No 2, Desember 2018: 155-170.

Badan Pusat Statistik BPS. 2020. Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2020. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik BPS. 2020. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik. 2021. Buku Konsep dan Definisi Susenas Maret 2021. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik. 2021. Buku Pemanfaatan Susenas Maret 2021. Jakarta: BPS

BAPPENAS. 2019. Transisi Demografi dan Epidemiologi: Permintaan Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Jakarta: BAPPENAS.

Blackman, T., F. Evason, M. Mclaugh & R. Woods,. 1989. *Housing and Health: A Case Study of Two Areas of West Belfast*. Journal of Social Policy, Vol.1.

Borjas, George J. 2016. *Labor Economics 7th Edition*. New York: McGraw-Hill education.

bpjs-kesehatan.go.id. 2020, 12 Desember. Tantangan Jaminan Sosial di Era Ageing Population. Diakses pada 25 November 2021, dari https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/1759/Tantangan-Jaminan-Sosial-di-Era-Ageing-Population diakses 25 november 2021

BPS. 2021. https://sirusa.bps.go.id. Jakarta: BPS.

BPS. 2021. Pedoman Sakernas Agustus 2021. Jakarta: BPS.

https://www.bps.go.id

BPS. 2021. Pedoman Sensus Penduduk September 2020. Jakarta: BPS.

BPS. 2021. Pedoman Susenas Maret 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Covid19.go.id. 2021. Peta Sebaran Covid19. Diakses pada 31 Oktober 2021, dari https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19

Ehrenberg, Ronald G. & Smith, Robert S. 2012. *Modern Labor Economics 11th Edition*. Boston: Prentice Hall.

health.kompas.com. 2021, 15 Juli. Apa Itu Komorbid. Diakses pada 18 November 2021, dari https://health.kompas.com/read/2021/07/15/090100668/apa-itu-komorbid-?page=all

Henning-Smith, C., & Gonzales, G. 2020. *The Relationship Between Living Alone and Self-Rated Health Varies by Age: Evidence from the National Health Interview Survey*. Journal of Applied Gerontology, 399, 971–980. https://doi.org/10.1177/0733464819835113

Heryanah. 2015. *Ageing Population* dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia. Jurnal Populasi Vol. 23 Nomor 2 Tahun 2015, hal. 1-16.

Howell, F. & Priebe, J. 2013. Asistensi Sosial untuk Usia Lanjut di Indonesia, Kajian Empiris Program ASLUT. TNP2K dan Australia AID.

Iliffe, S. et al. 1992. *Are Elderly People Living Alone an at Risk Group*. British Medical Journal, Vol. 305, No. 6860, 1001-1004.

Infodatin Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Situasi dan Analisi Lanjut Usia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial. Kartu Keluarga Sejahtera Online Bagi PMKS. Intel Resos. Diakses pada 11 November 2021, dari https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Program+Kks

International Labour Office ILO. 2011. Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia. Geneva: ILO.

Isnutomo, M. D.. 2012. Identifikasi Permintaan Kelompok Usia Lanjut Tehadap Kegiatan Rekreasi Di Kota Bandung. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 23 No. 2, Agustus 2012.

Jamalludin. 2021. Keputusan Pekerja Lansia tetap Bekerja Pascapensiun dan Kaitannya dengan Kebahagiaan. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 121, 89-101. https://doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2450

https://www.bps.go.id

Junaidi, Erfit, & Prihanto, Purwaka H. 2017. Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Keterlibatan Penduduk Lanjut Usia dalam Pasar Kerja di Provinsi Jambi. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, 302, 197-205. https://dx.doi.org/10.20473/mkp.V30I22017.197-205.

Kaplan, H. I., Sadock, B. J., Grebb, J. A. 2010. Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Jilid Satu. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Karni, Asniti. 2018. *Subjective Well-Being* pada Lansia. Jurnal Ilmiah Syiar, IAIN Bengkulu.

Kartini, Putu Yunny L, & Kartika, I Nengah. 2020. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesejahteraan Lansia di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 9.5, 435-470. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/61072/35304

Katadata.co.id. 2020, 4 Desember. Rapuhnya Nasib Lansia Indonesia di Masa Pagebluk. Diakes pada tanggal 12 Desember 2021. Diunduh dari: https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc8e6ab2f7fe/rapuhnya-nasib-lansia-indonesia-di-masa-pagebluk

kemensos.go.id. 2021, 29 Mei. Hadapi Tantangan Era Lansia Kemensos Hadirkan Layanan Atensi Lansia. Diakses pada 15 November 2021, dari https://kemensos.go.id/hadapi-tantangan-era-lansia-kemensos-hadirkan-layanan-atensi-lansia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester I. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan RI. 2016. Keperawatan Gerontik. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2017. Analisis Lansia 2017. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik. Diakses pada tanggal 12 Desember 2021. Diunduh dari: https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2433-kajian-dampak-covid-19-terhadap-pasar-tenaga-kerja-dan-respons-kebijakan-di-kawasan-asia-dan-pasifik

https://www.bps.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Multikeaksaraan Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian PPN/Bappenas. 2019. Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berbasis Hasil Outcome. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPPA. 2020. Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berperspektif gender pada masa covid-19. Jakarta: KemenPPPA

Lowder, Sarah K., Bertini, Raffaele., Croppenstedt, André. 2017. *Poverty, Social Protection and Agriculture: Levels and Trends in Data*. Global Food Security. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.06.001

Mulyati. 2012. Dukungan Sosial dan Ekonomi Keluarga Terhadap kualitas Hidup dan Kesejahteraan Lansia di Kota Bogor. [Thesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Nuraini, S. 2017. *Living Arrangement* dan Gangguan Mental Emosional pada Lansia di Indonesia Analisis Data Riskesdas 2013. Tesis Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia.

Osman, A., Jane, L., Courtney. 2012. *The depression unxiety stress scales-21 DASS-21: further examnination of dimentions, skill reliability, and correlates.* Journal Of Clinical Psikologi , 68 12. Diakses di online library.Wiley.com

Pahlevi, W. 2008. Studi Penerapan CPETD *Crime Prevention Through Environmental Design* Pada Kampung Kota Dan Kompleks Perumahan Di Kota Semarang Dengan Pendekatan Perilaku. [Tugas Akhir]. Semarang: Universitas Diponegoro

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.02/2019 tentang Dana Operasional BPJS Kesehatan Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.02/2020 tentang Dana Operasional BPJS Kesehatan Tahun 2021

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender.

https://www.bps.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Perkumpulan PRAKARSA. 2020. Kondisi Kesejahteraan Lansia dan perlindungan Sosial Lansia di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA.

Program Keluarga Harapan. 2018. Apa Itu Program Keluarga Harapan. PKH. https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1

promkes.kemkes.go.id. 2021, 25 Juni. Tetap Sehatkan Lansia di Masa Pandemi COVID-19. Diakses pada 10 November 2021, dari https://promkes.kemkes.go.id/tetap-sehatkan-lansia-di-masa-pandemi-covid-19

Rianti, E. 2011. KEBERMAKNAAN HIDUP PADA DUDA USIA LANJUT Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang.

Salsabilla, T. & Zainuddin, M. 2021. Upaya Adaptasi Modernisasi Kegiatan lansia Melalui Media Sosial pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 41, 87-95.

Saunders, R. (2006). Risk and Opportunity: Creating Options for Vulnerable Workers. *Vulnerable Workers Series, 7(7),* 74.

Silitonga. R.. 2007. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan kualitas Hidup Penderita Penyakit parkinson di Poliklinik Saraf RS DR Kariadi. [Thesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.

simsssert.bps.go.id. 2020, 21 Oktober. Panduan Metodologi, Sampling Error, Amanda Pratama Putra. Diakses pada 29 November 2021, dari: https://simsssert.bps.go.id/arsip/667

Styawan, D.A.. 2021. Tantangan Penuaan Penduduk Jawa Tengah. Diakses dari https://jatengdaily.com/2021/tantangan-penuaan-penduduk-jawa-tengah/

Syukri, M. 2008. Pendidikan Keaksaraan Fungsional: Konsep dan Strategi Pengembangan Program. Jurnal Cakrawala Kependidikan Vol. 6. 2, 112 – 207.

Szabo, A., Allen, J., Alpass, F., & Stephens, C.. 2017. *Loneliness, Socio-economic Status and Quality of Life in Old Age: The Moderating Role of Housing Tenure*. Ageing & Society, Page 1 of 24. Cambridge University Press.

TNP2K. 2020. Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder. Jakarta. TNP2K

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia

https://www.bps.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Utami, P.. 2018. Pengalaman Berwisata Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia. Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta, 53, 420-427.

Vera, Endang, Evacuasiany, Richardo. 2011. Karakteristik Pasien Usia Lanjut di Ruang Rawat Intensif Rumah Sakit Immanuel Bandung. Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 10 No.2 Februari 2011:110-119

Warda, N., Elmira, E., Rizky, M., Nurbaiti, R., & Al Izzati, R. 2018. Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia. 2006–2016. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU

WHO. 2007. *Global age-friendly cities : a guide*. Genewa: World Health Organization

WHO. 2011. *Housing: shared interests in health and development. Social determinants of health sectoral briefing series, 1*. Genewa: World Health Organization.

https://www.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://www.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr.Sutomo no. 6-8, Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4; fax: (021) 3857046
Homepage: https://www.bps.go.id; email: bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-1036
9 772086 103005